



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2021**



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Koto Baru (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sungai Penuh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan di Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
14. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun Kota Sungai Penuh.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Sungai Penuh untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Kota Sungai Penuh.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan Kota Sungai Penuh untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan Kota Sungai Penuh untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Sungai Penuh dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Sungai Penuh.
26. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
27. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
28. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
29. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan di Kota Sungai Penuh.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
33. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
34. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
35. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
36. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
37. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
39. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
40. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
41. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
42. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
43. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
44. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
45. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Sungai Penuh.
46. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
47. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

48. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
49. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya RPJMD ini untuk:
 - a. menjadi arah penyelenggaraan pembangunan di Daerah; dan
 - b. keterpaduan penyelenggaraan pembangunan dalam lima tahun periode penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya RPJMD ini untuk terwujudnya Kota Sungai Penuh menjadi “kota pendidikan, berbasis ekonomi kerakyatan yang mandiri, masyarakat yang religius, berbudaya dan sejahtera” dengan slogan **“Maju dan Berkeadilan”**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, program Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - i. BAB IX Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah;
- b. penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;

- c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan oleh Kepala Bappeda bersama dengan Kepala Perangkat Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Kepala Bappeda bersama dengan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil RPJMD dilakukan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 8

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Walikota.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, dilaksanakan melalui RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Desember 2021

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**



LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021 NOMOR 8;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 8,89/2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan RPJMD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya pada Pasal 264 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, dan peraturan daerah tentang RPJMD dimaksud ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Sungai Penuh dalam kurun waktu 2021-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan politik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
2. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Visi Walikota Sungai Penuh dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang termuat dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan di Kota Sungai Penuh, sedangkan misi Walikota Sungai Penuh dan Wakil Walikota Sungai Penuh merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas selesainya penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021–2026. Penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh ini memiliki perbedaan dengan penyusunan periode-periode sebelumnya, dimana pada awal tahun 2020 negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami keadaan luar biasa (extraordinary circumstance) akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan sehingga mengakibatkan resesi ekonomi global.

Proses penyusunan RPJMD ini telah mengkolaborasikan pendekatan politik, yaitu memasukkan komponen visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Secara umum, dokumen RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 ini terdiri dari 9 (Sembilan) bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III membahas tentang Gambaran Keuangan Daerah, Bab IV membahas Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Bab V membahas Visi, misi, tujuan dan sasaran, Bab VI membahas Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah, Bab VII membahas Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Bab IX Penutup.

Akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga selesaiannya Dokumen RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026. Tak lupa kami mohon diberikan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

WALIKOTA SUNGA PENUH

ttd

AHMADI ZUBIR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.4.1 Maksud.....	I-13
1.4.2 Tujuan.....	I-13
1.5 Sistematika Penulisan	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Luas dan Batas Administrasi	II-1
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	II-2
2.1.3 Topografi dan Kemiringan Lereng	II-4
2.1.3.1 Fisiografis.....	II-4
2.1.3.2 Topografi.....	II-5
2.1.4 Geologi	II-6
2.1.5 Hidrologi	II-7
2.1.5.1 Air permukaan (sungai)	II-7
2.1.5.2 Mata Air.....	II-8
2.1.5.3 Air Tanah.....	II-8
2.1.6 Wilayah Rawan Bencana.....	II-9
2.1.6.1 Gerakan Tanah.....	II-9
2.1.6.2 Banjir Bandang	II-10
2.1.6.3 Gempa Bumi	II-10
2.1.6.4 Letusan Gunung Berapi.....	II-11
2.1.7 Jenis Tanah.....	II-11

2.1.8 Klimatologi.....	II-12
2.1.9 Penggunaan Lahan.....	II-12
2.1.10 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-14
2.1.10.1.1 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa.....	II-15
2.1.10.1.2 Kawasan Peruntukan Industri.....	II-15
2.1.10.1.3 Kawasan Peruntukan Perkantoran.....	II-16
2.1.10.1.4 Kawasan Peruntukan Pariwisata.....	II-16
2.1.10.1.5 Kawasan Peruntukan Sektor Informal.....	II-17
2.1.10.1.6 Kawasan Peruntukan Pendidikan.....	II-17
2.1.10.1.7 Peruntukan Lainnya	II-17
2.1.11 Kawasan Strategis	II-22
2.1.11.1 Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi	II-22
2.1.11.2 Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial dan Budaya.....	II-24
2.1.11.3 Kawasan Strategis dari Perspektif Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	II-24
2.1.12 Potensi Unggulan Daerah	II-25
2.1.13 Kondisi Demografi.....	II-27
2.1.13.1 Jumlah Penduduk	II-27
2.1.13.2 Komposisi Penduduk	II-29
2.1.13.3 Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	II-32
2.1.13.4 Kepadatan Penduduk	II-33
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-33
2.2.1 Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi	II-34
2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	II-34
2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	II-39
2.2.1.3 Inflasi.....	II-45
2.2.1.4 PDRB Perkapita.....	II-47
2.2.1.5 Indeks Gini	II-50
2.2.1.6 Tingkat Kemiskinan	II-51
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-55
2.2.2.1 Pendidikan	II-55
2.2.2.2 Kesehatan.....	II-59
2.2.2.3 Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)	II-63
2.2.3 Fokus Pemuda, Seni Budaya dan Olah Raga.....	II-65

2.2.3.1	Kebudayaan.....	II-65
2.2.3.2	Pemuda dan Olah Raga	II-66
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-67
2.3.1	Urusan Wajib Pemerintahan Pelayanan Dasar.....	II-68
2.3.1.1	Pendidikan	II-68
2.3.1.2	Kesehatan.....	II-74
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-79
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-91
2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-93
2.3.1.6	Sosial	II-94
2.3.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-95
2.3.2.1	Tenaga Kerja	II-95
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-96
2.3.2.3	Lingkungan Hidup.....	II-102
2.3.2.4	Pengendalian Penduduk dan KB	II-105
2.3.2.5	Perhubungan	II-106
2.3.2.6	Komunikasi dan Informatika	II-108
2.3.2.7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-110
2.3.2.8	Penanaman Modal.....	II-112
2.3.2.9	Kebudayaan.....	II-112
2.3.2.10	Pangan.....	II-113
2.3.2.11	Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-114
2.3.2.12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-115
2.3.2.13	Statistik.....	II-116
2.3.2.14	Persandian.....	II-117
2.3.2.15	Perpustakaan.....	II-117
2.3.2.16	Kearsipan.....	II-118
2.3.3	Urusan Pilihan.....	II-119
2.3.3.1	Pariwisata	II-119
2.3.3.2	Pertanian.....	II-122
2.3.3.3	Perdagangan	II-123
2.3.3.4	Perindustrian.....	II-127
2.3.3.5	Kehutanan.....	II-129

2.3.3.6	Energi Dan Sumberdaya Mineral	II-129
2.3.3.7	Kelautan Dan Perikanan.....	II-130
2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-130
2.3.4.1	Sekretariat Daerah.....	II-130
2.3.4.2	Sekretariat DPRD	II-133
2.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-133
2.3.5.1	Perencanaan Pembangunan.....	II-133
2.3.5.2	Keuangan.....	II-135
2.3.5.3	Penelitian dan Pengembangan	II-137
2.3.5.4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	II-140
2.3.6	Unsur Pengawasan.....	II-141
2.3.7	Unsur Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan.....	II-143
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-143
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-144
2.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita	II-144
2.4.1.2	Produktivitas Total Daerah	II-145
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-146
2.4.2.1	Aksesibilitas Daerah	II-146
2.4.2.2	Penataan Wilayah.....	II-148
2.4.2.3	Ketersediaan Air Bersih.....	II-149
2.4.2.4	Fasilitas Listrik	II-151
2.4.2.5	Fasilitas Bank Non Bank	II-151
2.4.2.6	Ketersediaan Rumah Makan/Restoran dan Penginapan/Hotel	II-152
2.4.3	Fokus Iklim Investasi.....	II-152
2.4.3.1	Stabilitas Keamanan.....	II-153
2.4.3.2	Birokrasi Perizinan.....	II-154
2.4.3.3	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	II-155
2.4.3.4	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Pendukung Iklim Usaha.....	II-156
2.4.3.5	Status Desa	II-157
2.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia	II-158
2.4.4.1	Kualitas Tenaga Kerja	II-158
2.4.4.2	Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	II-159

2.5 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 II-160

 2.5.1 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal II-160

 2.5.2 Evaluasi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 II-164

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1

 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020 III-2

 3.1.2 Kinerja Pendapatan Daerah III-5

 3.1.3 Kinerja Belanja Daerah III-20

 3.1.4 Kinerja Neraca Daerah III-31

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-36

3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026 III-38

 3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah III-39

 3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah III-43

 3.3.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan III-47

3.4 Kapasitas Riil Keuangan Daerah III-51

3.5 Kebijakan Keuangan Di Masa Mendatang III-53

 3.5.1 Pendapatan Asli Daerah III-53

 3.5.2 Kebijakan Belanja Daerah III-54

 3.5.3 Kebijakan Pembiayaan III-55

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan IV-2

 4.1.1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government* IV-6

 4.1.2 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat dan berbudaya IV-8

 4.1.3 Mewujudkan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan IV-10

 4.1.4 Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang IV-13

4.2 Penelaahan RPJPD Kota Sungai Penuh 2005-2025 IV-14

4.3 Penelaahan RTRW Kota Sungai Penuh 2021-2031 IV-15

4.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah IV-16

4.4.1	Isu Internasional	IV-16
4.4.2	Isu atau Kebijakan Nasional	IV-19
4.4.3	Isu atau Kebijakan Provinsi Jambi.....	IV-23
4.4.4	Isu atau Kebijakan Kabupaten Kerinci dan Pesisir Selatan	IV-30
4.4.5	Isu Strategis Pembangunan Kota Sungai Penuh 2021-2026	IV-31
4.4.6	Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Dengan Isu Pokok Pembangunan dari Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	IV-32
4.4.7	Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang	IV-33
4.4.8	Penjelasan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah	IV-34
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-2
6.2	Arah Kebijakan	VI-14
6.3	Arah Kebijakan Kewilayahan	VI-22
6.3.1	Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi.....	VI-23
6.3.2	Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial dan Budaya	VI-25
6.3.3	Kawasan Strategis dari Perspektif Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	VI-26
6.4	Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	VI-27
6.5	Program Pembangunan Daerah.....	VI-44
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah.....	VII-4
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Pedoman Transisi	IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1
-----------------------------	------

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh	II-2
Tabel II.2	Luas Wilayah Kota Sungai Penuh menurut Ketinggian dari Permukaan Laut	II-5
Tabel II.3	Klasifikasi Lereng di Kota Sungai Penuh.....	II-5
Tabel II.4	Susunan Batuan Kota Sungai Penuh	II-6
Tabel II.5	Profil Fisik Sungai di Kota Sungai Penuh	II-8
Tabel II.6	Jenis Tanah di Kota Sungai Penuh.....	II-11
Tabel II.7	Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh	II-12
Tabel II.8	Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh Sampai Akhir Tahun 2031.....	II-19
Tabel II.9	Hasil Analisis LQ Kota Sungai Penuh Tahun 2015 - 2019.....	II-26
Tabel II.10	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2020	II-27
Tabel II.11	Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh menurut Struktur Usia Per Semester 2 Tahun 2020.....	II-30
Tabel II.12	Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-32
Tabel II.13	Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh	II-33
Tabel II.14	Pertumbuhan IPM Nasional, Provinsi dan Kab/Kota Se- Provinsi Jambi Tahun 2020.....	II-35
Tabel II.15	PDRB Kota Sungai Penuh 2016-2020.....	II-39
Tabel II.16	PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha (ADHK 2010) Tahun 2016-2020	II-42
Tabel II.17	PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha (ADHB 2010) Tahun 2016-2020	II-42
Tabel II.18	Distribusi Persentase Sektor PDRB (ADHB) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-43
Tabel II.19	Pertumbuhan Sektor PDRB (ADHK 2010) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-44
Tabel II.20	Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2020	II-47
Tabel II.21	PDRB Per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-48
Tabel II.22	Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Sungai Penuh Tahun 2020	II-59
Tabel II.23	10 Penyakit Terbesar di Kota Sungai Penuh Tahun 2020	II-63
Tabel II.24	Indikator Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020.....	II-65
Tabel II.25	Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2020.....	II-66

Tabel II.26	Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2020	II-68
Tabel II.27	Capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP sederajat Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021.....	II-71
Tabel II.28	Capaian Angka Kelulusan SD Sederajat dan SMP sederajat Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021.....	II-72
Tabel II.29	Capaian Angka Melanjutkan SD Sederajat dan SMP sederajat Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021.....	II-72
Tabel II.30	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel II.31	Persentase Pendidik dengan kualifikasi D4/S1 Jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel II.32	Cakupan Pelayanan Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2018-2020.....	II-75
Tabel II.33	Kondisi Penyakit Menular di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-76
Tabel II.34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-76
Tabel II.35	Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-77
Tabel II.36	Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	II-77
Tabel II.37	Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Sungai Penuh Tahun 2020.....	II-78
Tabel II.38	Ketersediaan Tenaga Kesehatan di RSU M.H.A Thalib Kota Sungai Penuh Tahun 2020.....	II-79
Tabel II.39	Kondisi Jalan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-81
Tabel II.40	Kondisi Jalan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-81
Tabel II.41	Daerah Irigasi dalam Kecamatan Kota Sungai Penuh	II-82
Tabel II.42	Kondisi Jaringan Irigasi di Kota Sungai Penuh 2016-2020	II-84
Tabel II.43	Kondisi Areal (Ha) Irigasi Tahun 2016-2020.....	II-84
Tabel II.44	Luas Genangan Banjir di Kota Sungai Penuh 2016-2020.....	II-85
Tabel II.45	Jaringan Drainase di Kota Sungai Penuh Tahun 2020	II-87
Tabel II.46	Volume Timbulan Air Limbah di Kota Sungai Penuh.....	II-90
Tabel II.47	Kinerja Urusan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh 2016-2020.....	II-91
Tabel II.48	Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-92

Tabel II.49	Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Sungai Penuh	II-92
Tabel II.50	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-93
Tabel II.51	Indikator Urusan Sosial Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-94
Tabel II.52	Kondisi Ketenagakerjaan Kota Sungai Penuh 2016-2020	II-95
Tabel II.53	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Sungai Penuh Tahun 2020.....	II-96
Tabel II.54	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur di Kota Sungai Penuh	II-97
Tabel II.55	Data Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2020.....	II-97
Tabel II.56	Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Kategori Sampel dan Komposisi (kg).....	II-103
Tabel II.57	Capaian Pembangunan Perhubungan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021	II-107
Tabel II.58	Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenis dan Bahan Bakar di Kota Sungai Penuh.....	II-107
Tabel II.59	Indikator Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Sungai Penuh Tahun 2019-2020.....	II-108
Tabel II.60	Perkembangan Koperasi Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-110
Tabel II.61	Perkembangan UMKM di Kota Sungai Penuh 2016-2020....	II-111
Tabel II.62	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Sungai Penuh Tahan 2016-2020	II-111
Tabel II.63	Jumlah Investasi di Kota Sungai Penuh Tahun 2017-2020 ...	II-112
Tabel II.64	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2016-2020	II-113
Tabel II.65	Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Per Kapita Kota Sungai Penuh dan Desa/Kelurahan Mandiri Pangan Tahun 2016-2020	II-114
Tabel II.66	Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-115
Tabel II.67	Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.....	II-116
Tabel II.68	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-117

Tabel II.69	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-118
Tabel II.70	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-118
Tabel II.71	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-121
Tabel II.72	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-123
Tabel II.73	Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Sungai Penuh 2015-2019	II-124
Tabel II.74	Sarana Perdagangan/Niaga Kota Sungai Penuh Tahun 2020	II-124
Tabel II.75	Perkembangan Ekspor Kota Sungai Penuh 2016-2020.....	II-126
Tabel II.76	Perkembangan Impor Kota Sungai Penuh 2016-2020.....	II-126
Tabel II.77	Tabel Ekspor Bersih Perdagangan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-127
Tabel II.78	Perkembangan Sektor Industri Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-128
Tabel II.79	Perkembangan Sektor Industri Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-128
Tabel II.80	Luas wilayah dan luas budidaya serta letak TNKS perkecamatan di Kota Sungai Penuh	II-129
Tabel II.81	Capaian Kinerja Urusan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-130
Tabel II.82	Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh Tahun 2020	II-130
Tabel II.83	Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Sungai Penuh 2016-2020	II-131
Tabel II.84	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018.....	II-132
Tabel II.85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-132
Tabel II.86	Kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-134
Tabel II.87	Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-136
Tabel II.88	Inovasi di Kota Sungai Penuh	138

Tabel II.89	Perkembangan Jumlah PNS, menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Kepangkatan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-140
Tabel II.90	Jumlah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang Mengikuti Diklat Tahun 2016-2020	II-141
Tabel II.91	Klasifikasi Pengawas Intern Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-142
Tabel II.92	Tingkat Kematangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	II-143
Tabel II.93	Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Sungai Penuh Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019-2020	II-144
Tabel II.94	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan Tahun 2019-2020	II-145
Tabel II.95	Produktivitas Total Daerah Kota Sungai Penuh 2019-2020... II-146	
Tabel II.96	Pola Ruang Kota Sungai Penuh Sampai Akhir Tahun 2031 .. II-148	
Tabel II.97	Kapasitas Terpasang Instalasi Pengolahan Air Eksisting	II-150
Tabel II.98	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk di Kota Sungai Penuh Tahun 2018-2020.....	II-153
Tabel II.99	Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-156
Tabel II.100	Status Desa/Kelurahan Kota Sungai Penuh Tahun 2015-2019	II-158
Tabel II.101	Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Tahun 2020	II-159
Tabel II.102	Rasio Ketergantungan di Kota Sungai Penuh Tahun 2020.... II-160	
Tabel II.103	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kota Sungai Penuh 2016-2021	II-160
Tabel II.104	Kriteria Notifikasi Ketercapain Target	II-164
Tabel II.105	Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021	166
Tabel II.106	Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021	173
Tabel III.1	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	III-2
Tabel III.2	Target dan Realisasi Serta Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	III-6
Tabel III.3	Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020.....	III-7
Tabel III.4	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	III-8

Tabel III.5	Target dan Realisasi PAD Tahun 2016-2020	III-9
Tabel III.6	Kontribusi Komponen Realisasi PAD Tahun 2016-2020.....	III-10
Tabel III.7	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020.....	III-11
Tabel III.8	Kontribusi Komponen Pajak Daerah Tahun 2016-2020.....	III-12
Tabel III.9	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016-2020.	III-13
Tabel III.10	Kontribusi Komponen Retribusi Daerah Tahun 2016-2020....	III-14
Tabel III.11	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2016-2020	III-15
Tabel III.12	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2016-2020.....	III-16
Tabel III.13	Kontribusi Komponen Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2016-2020.....	III-17
Tabel III.14	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2016- 2020	III-18
Tabel III.15	Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2016- 2020	III-19
Tabel III.16	Anggaran dan Realisasi serta Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020	III-20
Tabel III.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 ...	III-21
Tabel III.18	Kontribusi Komponen Belanja Daerah Tahun 2016-2020.....	III-22
Tabel III.19	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2016-2020	III-22
Tabel III.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016-2020 ..	III-23
Tabel III.21	Kontribusi Komponen Belanja Operasi Tahun 2016-2020.....	III-23
Tabel III.22	Anggaran dan Realisasi Komponen Belanja Operasi Tahun 2016-2021.....	III-24
Tabel III.23	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2020....	III-25
Tabel III.24	Kontribusi Komponen Belanja Modal Tahun 2016-2020.....	III-25
Tabel III.25	Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2020	III-26
Tabel III.26	Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2016-2020.....	III-26
Tabel III.27	Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Transfer Tahun 2016-2020.....	III-27
Tabel III.28	Realisasi Defisit/Surplus serta Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020.....	III-27
Tabel III.29	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020.....	III-29
Tabel III.30	Perhitungan Analisa Rasio Keuangan Neraca Tahun 2016- 2020	III-31

Tabel III.31	Neraca Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	III-32
Tabel III.32	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026	III-40
Tabel III.33	Proyeksi Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026	III-41
Tabel III.34	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2026.....	III-45
Tabel III.35	Proyeksi Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Daerah Tahun 2021-2026.....	III-46
Tabel III.36	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026.....	III-48
Tabel III.37	Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026	III-49
Tabel III.38	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	III-52
Tabel IV.1	Perbandingan Capaian Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2020.....	IV-2
Tabel IV.2	Keterkaitan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005- 2025 dengan Masalah Utama Pembangunan Daerah	IV-3
Tabel IV.3	Pemetaan Masalah Utama Tata Kelola Pemerintahan dan Masalah Daerah Kota Sungai Penuh.....	IV-6
Tabel IV.4	Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan, Masalah Daerah dan Masalah SKPD	IV-7
Tabel IV.5	Pemetaan Masalah Utama Kualitas Sumber Daya Manusia dan Masalah Daerah Kota Sungai Penuh.....	IV-8
Tabel IV.6	Keterkaitan Kualitas SDM, Masalah Daerah dan Masalah SKPD	IV-9
Tabel IV.7	Pemetaan Masalah Utama Ketimpangan Pendapatan dan Masalah Daerah Kota Sungai Penuh.....	IV-10
Tabel IV.8	Keterkaitan Ketimpangan Pendapatan, Masalah Daerah dan Masalah SKPD	IV-11
Tabel IV.9	Pemetaan Masalah Utama Kualitas Pelayanan Infrastruktur dan Masalah Daerah Kota Sungai Penuh.....	IV-13
Tabel IV.10	Keterkaitan Kualitas Pelayanan Infrastruktur, Masalah Daerah, dan Masalah SKPD	IV-13
Tabel IV.11	Target Kinerja Nasional Tahun 2024 dalam RPJMN 2020- 2024	IV-22
Tabel IV.12	Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi dengan Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	IV-32
Tabel IV.13	Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Sungai Penuh	IV-33

Tabel IV.14	Keterkaitan Isu Strategis Kota Sungai Penuh, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jambi serta Isu Strategis KLHS	38
Tabel V.1	Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.....	V-3
Tabel V.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021–2026	V-13
Tabel VI.1	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi I	VI-2
Tabel VI.2	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi II	VI-3
Tabel VI.3	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi III	VI-4
Tabel VI.4	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi IV	VI-5
Tabel VI.5	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi V	VI-6
Tabel VI.6	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi VI.....	VI-6
Tabel VI.7	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi VII	VI-7
Tabel VI.8	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota sungai Penuh 2021-2026	VI-7
Tabel VI.9	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota sungai Penuh 2021-2026.....	15
Tabel VI.10	Tema Pembangunan Kota Sungai Penuh	VI-22
Tabel VI.11	Arah Kebijakan Bidang Pendidikan Kategori SPM	VI-28
Tabel VI.12	Arah Kebijakan Bidang Kesehatan Kategori SPM.....	VI-29
Tabel VI.13	Arah Kebijakan Bidang Kesehatan Kategori Non-SPM.....	VI-30
Tabel VI.14	Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Kategori SPM.....	VI-31
Tabel VI.15	Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Kategori Non-SPM	VI-32
Tabel VI.16	Arah Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat Kategori Non-SPM	VI-33
Tabel VI.17	Arah Kebijakan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kategori SPM	VI-33
Tabel VI.18	Arah Kebijakan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,	VI-34
Tabel VI.19	Arah Kebijakan Bidang Sosial Kategori SPM	VI-35

Tabel VI.20	Arah Kebijakan Bidang Sosial Kategori Non-SPM	VI-35
Tabel VI.21	Arah Kebijakan Bidang Lainnya.....	VI-36
Tabel VI.22	Program Pembangunan Daerah Melalui Janji-Janji Kampanye Walikota dan Wakil Walikota	VI-45
Tabel VI.23	Program Pembangunan Daerah	VI-47
Tabel VII.1	Proyeksi Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021- 2026	VII-2
Tabel VII.2	Kapasitas Ril Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VII-3
Tabel VII.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sungai Penuh	VII-5
Tabel VIII.1	Indikator Makro Daerah Kota Sungai Penuh 2021-2026.....	VIII-4
Tabel VIII.2	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Kota Sungai Penuh 2021- 2026	VIII-5
Tabel VIII.3	Indikator Kinerja Utama Kota Sungai Penuh 2021-2026.....	VIII-6
Tabel VIII.4	Indikator Kinerja Daerah Kota Sungai Penuh 2021-2026	VIII-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Proses Penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh	I-4
Gambar I.2	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah.....	I-9
Gambar I.3	Tahapan Pembangunan.....	I-10
Gambar I.4	Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	I-11
Gambar I.5	Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.....	I-12
Gambar II.1	Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh	II-2
Gambar II.2	Posisi Kota Sungai Penuh.....	II-4
Gambar II.3	Peta Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh	II-14
Gambar II.4	Peta Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh sampai Akhir Tahun 2031	II-20
Gambar II.5	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Sungai Penuh sampai Akhir Tahun 2031	II-21
Gambar II.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sungai Penuh	II-28
Gambar II.7	Piramida Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2020	II-31
Gambar II.8	Perkembangan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-32
Gambar II.9	Indeks Pembangunan Manusia dan Dimensi Pembentuk IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-35
Gambar II.10	Perbandingan IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2020.....	II-36
Gambar II.11	Perbandingan IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2020.....	II-36
Gambar II.12	Pertumbuhan Dimensi Pembentuk IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2020.....	II-38
Gambar II.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh, Provinsi, dan Nasional Tahun 2016 — 2020	II-40
Gambar II.14	Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh, Nasional, Provinsi Jambi dan Kab/kota se-Provinsi Jambi Tahun 2020 ..	II-40
Gambar II.15	Laju Inflasi Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-46
Gambar II.16	PDRB per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-48
Gambar II.17	Inflasi dan PDRB PerKapita Kota Sungai Penuh 2016-2020...	II-49
Gambar II.18	Gini Rasio Kota Sungai Penuh, Kota Jambi dan Provinsi Jambi 2015-2019.....	II-50
Gambar II.19	Perkembangan Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-51

Gambar II.20	Perkembangan Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh, Prov Jambi, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-52
Gambar II.21	Tingkat Kemiskinan (P0) Kab/Kota Se- Provinsi Jambi Tahun 2020.....	II-53
Gambar II.22	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, dan Sejahtera II Kota Sungai Penuh, Tahun 2016-2020.....	II-53
Gambar II.23	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-54
Gambar II.24	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-55
Gambar II.25	Persentase Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021	II-56
Gambar II.26	Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-57
Gambar II.27	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021	II-58
Gambar II.28	Angka Harapan Hidup di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021	II-60
Gambar II.29	Angka Kematian Bayi dan Ibu di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-61
Gambar II.30	Perkembangan Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-62
Gambar II.31	Perkembangan Penduduk yang menganggur di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2020.....	II-64
Gambar II.32	Perkembangan Penduduk yang menganggur di Kota Sungai Penuh, Jambi dan Nasional Tahun 2016-2020	II-64
Gambar II.33	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021	II-69
Gambar II.34	APK dan APM SD/MI Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020..	II-70
Gambar II.35	APK dan APM SMP/MTS Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021	II-71
Gambar II.36	Skor Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dalam Neraca Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2018.....	II-74
Gambar II.37	Proporsi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-80
Gambar II.38	Persentase Rumah Tangga yang Memilik Akses Terhadap Sanitasi Layak Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-90
Gambar II.39	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-100
Gambar II.40	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-101
Gambar II.41	IKLH Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-103

Gambar II.42	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani dan Terkurangi melalui 3R Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021	II-104
Gambar II.43	Rasio Akseptor KB di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020	II-106
Gambar II.44	Kunjungan Wisata di Kota Sungai Penuh Tahun 2015-2019.	II-122
Gambar II.45	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Sungai Penuh.....	II-147
Gambar II.46	Jumlah Pelanggan dan Kapasitas Terpasang Kota Sungai Penuh 2016-2020	II-150
Gambar II.47	Rasio Elektrifikasi Pelayanan Jaringan Listrik di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.....	II-151
Gambar III.1	Struktur APBD Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005	III-3
Gambar III.2	Struktur APBD Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019	III-4
Gambar III.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Tahun 2016-2020	III-5
Gambar III.4	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah.....	III-39
Gambar III.5	Kerangka Pemikiran Proyeksi Belanja Daerah.....	III-43
Gambar III.6	Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	III-47
Gambar IV.1	Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah	IV-3
Gambar IV.2	Misi Presiden 2020-2024.....	IV-20
Gambar VI.1	Penerapan Model Manajemen Strategis yang Komprehensif dalam Merumuskan RPJMD Kota Sungai Penuh.....	VI-2
Gambar VI.2	Kawasan Strategis Kota Sungai Penuh	VI-23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu pada setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ bahwa Periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Diktum tersebut sesuai dengan amanat Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Teknokratik, KLHS RPJMD serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi RPJMD sebelumnya, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Dengan terpilihnya Walikota Sungai Penuh dan Wakil Walikota Sungai Penuh hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dan telah dilantik pada tanggal 25 Juni 2021, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat peraturan

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan RPJPD Kota Sungai Penuh 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah: Kota Sungai Penuh Kota Pendidikan yang Berdaya Saing, Perdagangan dan Jasa yang Produktif serta Berwawasan Lingkungan, yang didalamnya memuat indikator dan target capaian kinerja. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2005-2009), Tahap II (2010-2014), Tahap III (2015-2019), dan Tahap IV (2020-2025).

RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Sungai Penuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2021 hingga tahun 2026 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

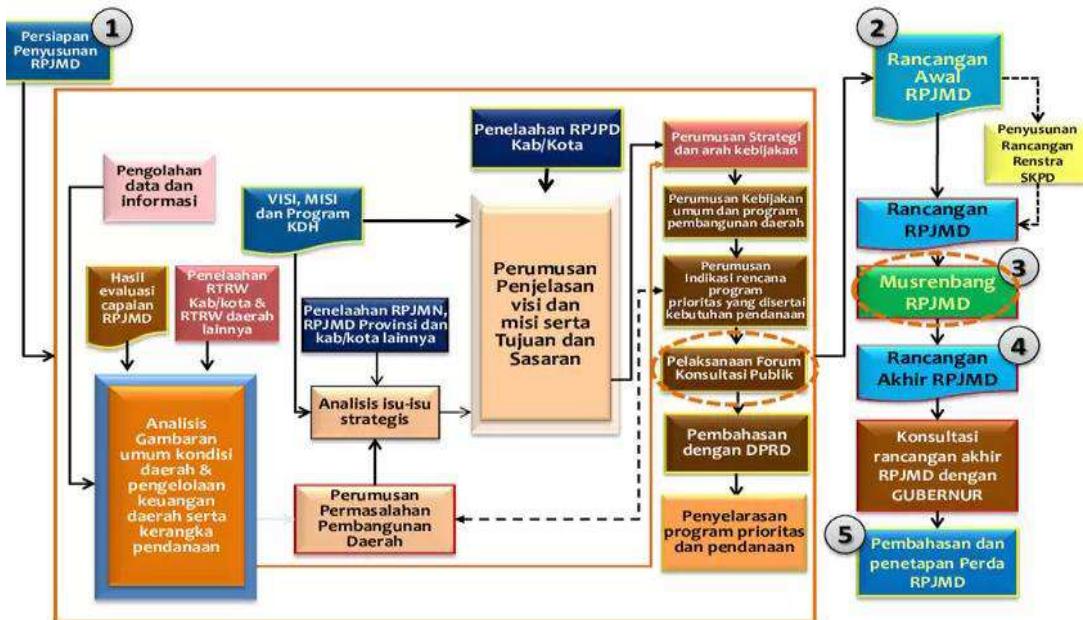
Penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, Pendekatan Politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Sungai Penuh, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh ini adalah pemahaman awal posisi Kota Sungai Penuh yang unik atau berbeda

dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis, penjaringan aspirasi masyarakat, serta forum konsultasi publik yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Proses Penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh

Berdasarkan tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada masyarakat;
2. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
5. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;

6. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;
7. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah.

Tahap awal perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 ini memiliki perbedaan dengan penyusunan periode-periode sebelumnya, yang mana pada awal tahun 2020 negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*) akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemic Covid-19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan sehingga mengakibatkan resesi ekonomi global. Perkembangan dan penyebaran Covid-19 di dunia meningkat drastis pada tahun awal tahun 2020 ketika Covid-19 mulai menyebar di Indonesia.

Dengan telah ditemukannya vaksin, kebijakan menjaga jarak aman dengan orang lain melalui *physical distancing/social distancing* atau pembatasan sosial serta pola hidup bersih dan sehat tetap harus dilakukan di seluruh negara terdampak Covid-19 untuk menurunkan kurva penyebaran Covid-19. Namun demikian kebijakan *physical distancing/social distancing* berimplikasi pada pengurangan aktifitas perekonomian secara masif. Para ahli telah melakukan analisis bahwa resesi ekonomi dampak pandemi Covid-19 lebih parah dibandingkan krisis keuangan global tahun 2008-2009.

Dengan adanya kebijakan *physical distancing/social distancing* penerimaan masyarakat mengalami penurunan, sehingga daya beli masyarakat juga mengalami penurunan mengakibatkan sisi permintaan menurun. Kebijakan *physical distancing/social distancing* juga telah menyebabkan kegiatan produksi terganggu sehingga sisi penawaran juga mengalami penurunan. Turunnya sisi penawaran dan permintaan sekaligus menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif pada wilayah terdampak pandemi Covid-19.

Situasi perlambatan ekonomi global dan nasional tentu menciptakan *bubble effect* terhadap pembangunan di daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh tahun 2019 sebesar 5,05 persen, dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan di antaranya kinerja perekonomian memburuk menjadikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh adalah negatif yaitu minus 0,14 persen. Situasi ini dipastikan akan mengoreksi secara signifikan target pertumbuhan ekonomi periode tahun 2021 hingga tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 19 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 22 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 30 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
- 31 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
- 32 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh

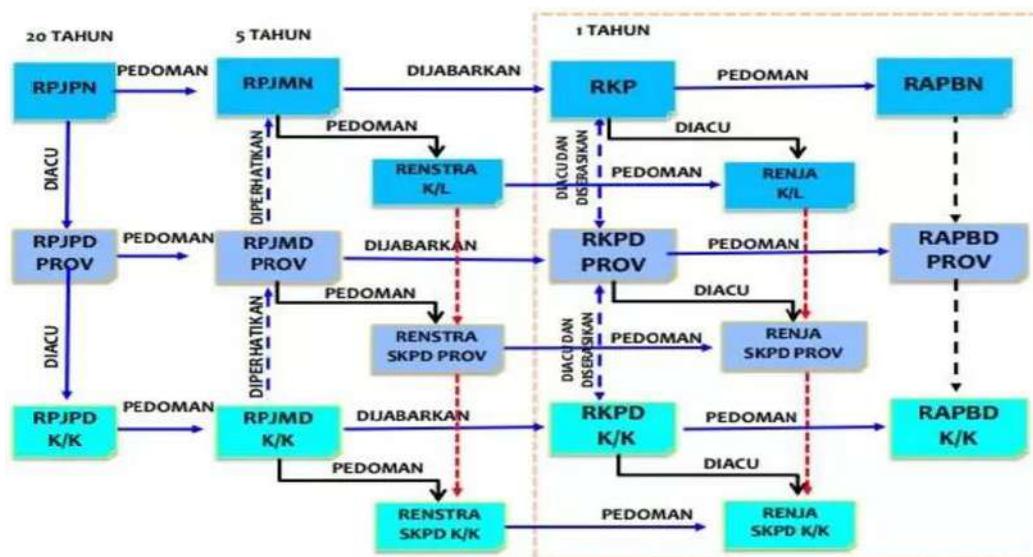
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);

- 33 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 14);
- 34 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Koto Baru (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 13);
- 35 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 15);
- 36 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi. Agar RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021- 2026 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

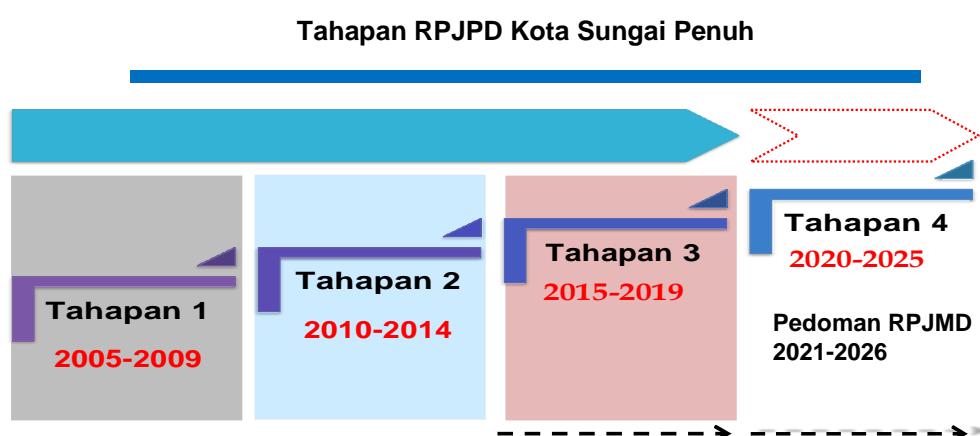


Gambar I.2
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Sungai Penuh dengan RPJPD Kota Sungai Penuh

RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh periode 2021- 2026.



**Gambar I.3
Tahapan Pembangunan**

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

2. RPJMD Kota Sungai Penuh dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

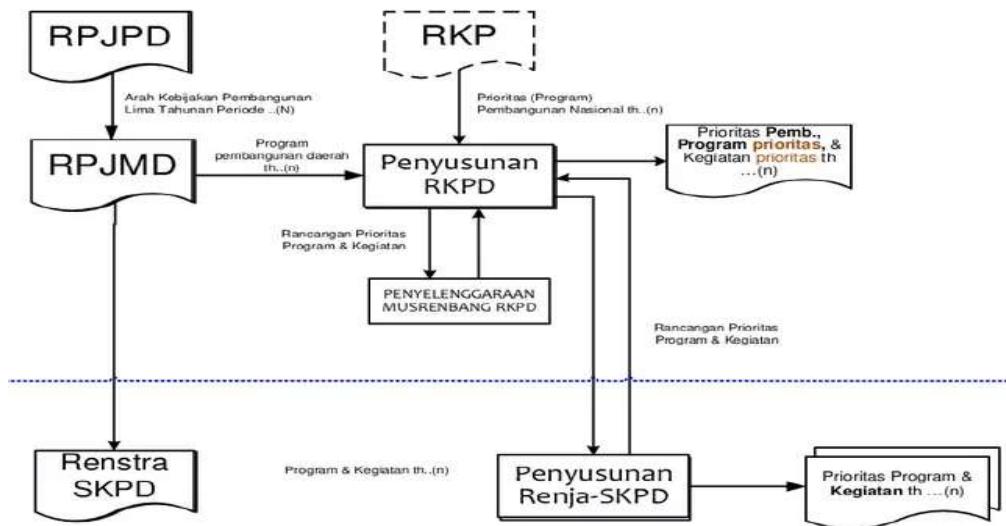


Gambar I.4
Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

3. RPJMD Kota Sungai Penuh dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Sungai Penuh, RPJMD Provinsi Jambi, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.



Gambar I.5
Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

4. RPJMD Kota Sungai Penuh dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kota Sungai Penuh. Penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh berpedoman pada RTRW Kota Sungai Penuh yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011- 2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi- asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat- pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan

ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Sungai Penuh sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

1.4.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Walikota Sungai Penuh dan Wakil Walikota Sungai Penuh kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026;
5. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Walikota Sungai Penuh dan Wakil Walikota Sungai Penuh sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Sungai Penuh periode 2021-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Sungai Penuh secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu, (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta (3) Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan dilaksanakan Pemerintah Kota Sungai Penuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Pembangunan di Kota Sungai Penuh selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian Kota Sungai Penuh juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan Kota Sungai Penuh, dengan memperhatikan seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Luas dan Batas Administrasi

Kota Sungai Penuh memiliki luas sebesar 391,5 Km², yang terdiri dari Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 231,7 Km² (59,2%) merupakan merupakan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional, dan lahan hunian budidaya seluas 159,7 Km² (40,8%). Sejak tahun 2012 Kota Sungai Penuh terdiri dari 8 Kecamatan (semula 5 Kecamatan), 65 Desa serta 4 Kelurahan. Kecamatan yang wilayahnya paling besar adalah Kecamatan Kumun Debai dengan luas 14.200Ha atau 36,27 persen dari total luas Kota Sungai Penuh. Sedangkan kecamatan yang mempunyai wilayah paling kecil adalah Kecamatan Koto Baru dengan luas 164Ha atau 0,42 persen dari luas wilayah keseluruhan. Wilayah administrasi Kota Sungai Penuh terbagi menjadi 8 kecamatan yang meliputi 4 Kelurahan dan 65 Desa.

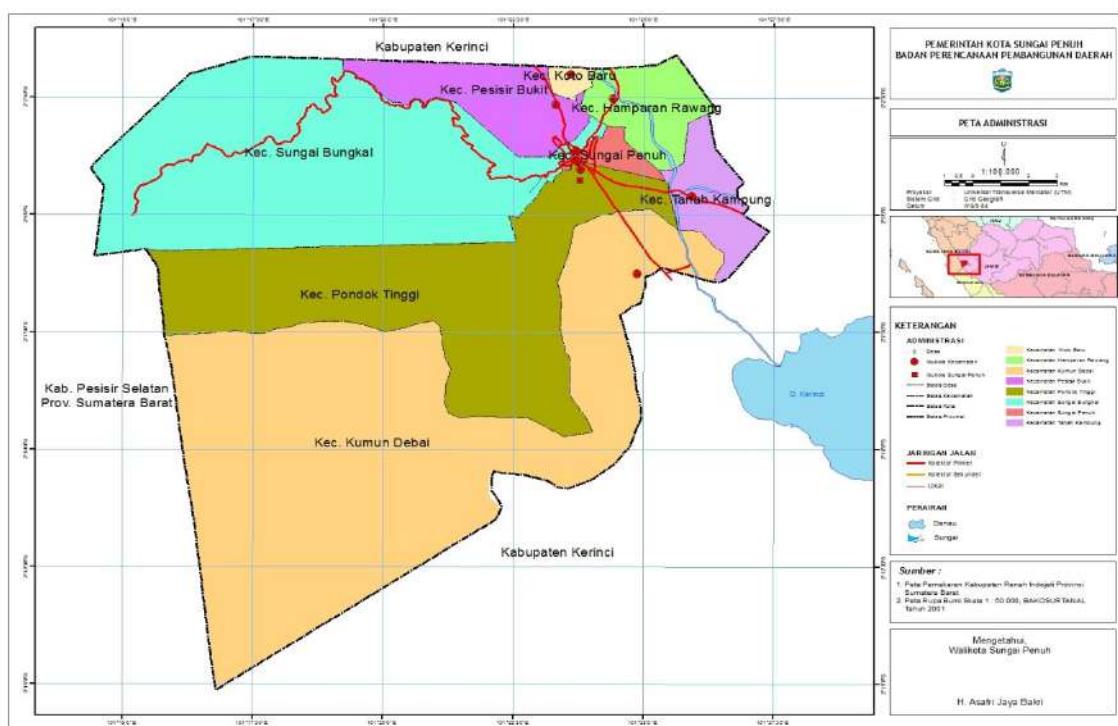
Kota Sungai Penuh merupakan wilayah hasil pemekaran Kabupaten Kerinci sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Secara administratif Kota Sungai Penuh berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Siulak, Kecamatan Depati Tujuh dan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur : Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci

Tabel II.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh

Kecamatan	Luas wilayah		Jumlah		
	(Ha)	(%)	Desa	Kelurahan	Jumlah
1. Tanah Kampung	1.100	2,81	13	-	13
2. Kumun Debai	14.200	36,27	9	-	9
3. Sungai Penuh	335	0,86	3	2	5
4. Hamparan Rawang	1.215	3,10	13	-	13
5. Pesisir Bukit	1.946	4,97	9	-	9
6. Sungai Bungkal	11.095	28,34	5	1	6
7. Pondok Tinggi	9.095	23,23	7	1	8
8. Koto Baru	164	0,42	6	-	6
Jumlah	39.150	100	65	4	69

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2021



Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh 2020

Gambar II.1
Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh

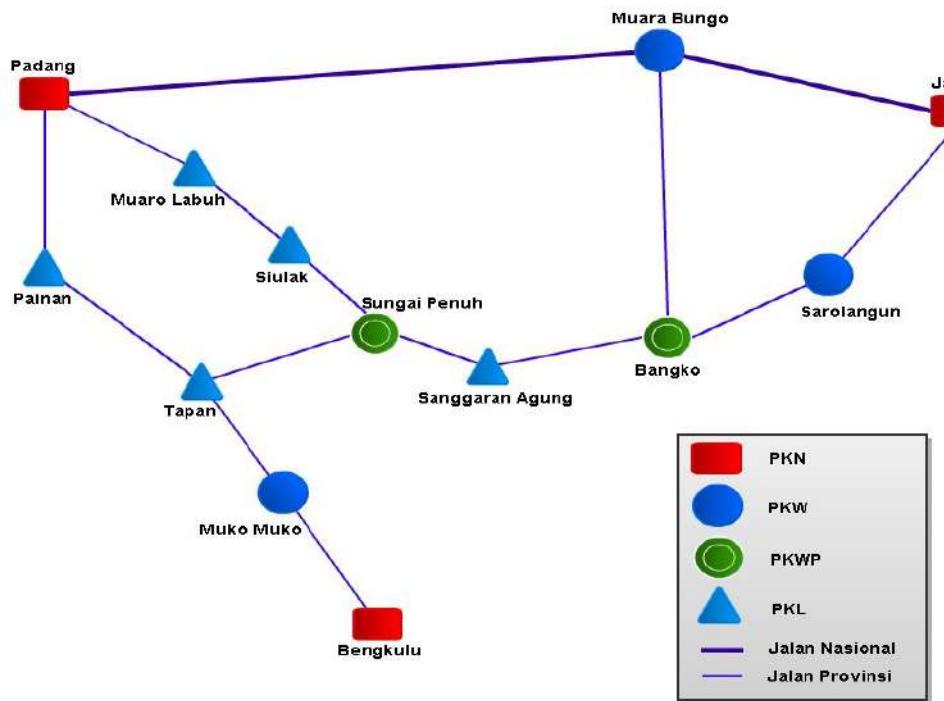
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Sungai Penuh dilihat berdasarkan posisi astronomi, berada diantara $101^{\circ} 14' 32''$ BT sampai dengan $101^{\circ} 27' 31''$ BT dan $02^{\circ} 01' 40''$ LS sampai

dengan $02^{\circ} 14' 54''$ LS. Dalam konteks pembangunan Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat memiliki fungsi dan kedudukan diantaranya :

1. Penetapan dan peningkatan Kota Sungai Penuh menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten.
2. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kota Sungai Penuh dan mempertahankan kawasan lindung.
3. Kota Sungai Penuh di dalam Sistem Perkotaan Provinsi Jambi ditetapkan memiliki peranan dan fungsi sebagai :
 - a. Pelayanan pariwisata;
 - b. Pendidikan;
 - c. Perdagangan dan jasa regional; dan
 - d. Kawasan Konservasi.
4. Dalam Sistem Transportasi Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh diarahkan untuk menjadi Jalur Penghubung (*feeder road*) berupa jalur Bangko-Sungai Penuh, serta pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Sungai Penuh-Kayu Aro-Batas Sumatera Barat dan Jaringan Jalan Kolektor Primer Sungai Penuh-Lempur.
5. Pembangunan dan Peningkatan jaringan jalan baru untuk sistem dan fungsi kolektor primer, berupa jalur Kumun Debai-Tanah Kampung-Hamparan Rawang-Pesisir Bukit-Sako (Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat).

Dilihat dari sisi arahan sistem perkotaan nasional yang diatur dalam RTRWN dan arah pengembangan wilayah Provinsi Jambi, letak geografis Kota Sungai Penuh cukup strategis. Kota Sungai Penuh terletak pada posisi sentral antara Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, dengan PKN yang terdekat dengan Kota Sungai Penuh adalah Kota Padang (PKN Sumatera Barat) yang jalur lintasnya melalui PKW Muara Labuh atau PKW Painan. Sedangkan jalur lintas menuju PKN Kota Jambi melalui PKWp Bangko dan Muaro Bungo yang merupakan PKW terdekat dengan Kota Sungai Penuh dalam wilayah Provinsi Jambi.



**Gambar II.2
Posisi Kota Sungai Penuh**

Muara Bungo juga merupakan kawasan andalan yang terdekat dengan Kota Sungai Penuh, dengan sektor unggulannya adalah : perkebunan, pertanian dan kehutanan, di sisi lain PKW Muko-muko merupakan jalur lintas menuju PKN Bengkulu. Kota Sungai Penuh juga menjadi daerah pusat kegiatan dari beberapa PKL di Kabupaten Kerinci (Sanggaran Agung, Siulak Mukai dan Batang Sangir) dan Provinsi Sumatera Barat (Tapan) serta Provinsi Bengkulu (Muko-muko). Kota Sungai Penuh dapat diorientasikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah bagi daerah sekitarnya.

2.1.3 Topografi dan Kemiringan Lereng

2.1.3.1 Fisiografis

Dalam sistem fisiografis, Kota Sungai Penuh secara umum berada pada ketinggian antara 500-1000 mdpl, yakni mencapai 15,73 persen dan ketinggian lebih dari 1000 mdpl mencapai 83,75 persen dari luas wilayah, sedangkan sisanya <1 persen berada pada ketinggian kurang dari 500 mdpl. Kota Sungai Penuh dikelilingi oleh perbukitan di sebelah utara dan barat. Kota Sungai Penuh menjadi perlintasan sistem sungai regional, yang mengalir dari hulu di utara ke arah hilir di selatan. Sistem drainase di Kota Sungai Penuh didukung oleh sistem sungai regional, dengan mengalirkan limpasan air hujan yang jatuh di Kota Sungai Penuh ke sistem sungai terkait, yang secara topografis mengalir ke arah hilir selatan Kabupaten Kerinci.

Tabel II.2
Luas Wilayah Kota Sungai Penuh menurut Ketinggian dari Permukaan Laut

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Posisi Ketinggian Dari Permukaan Laut (Ha)			Jumlah
	100 - 500 Mdpl	500 - 1000 Mdpl	> 1000 Mdpl	
1. Tanah Kampung	-	1.100	-	1.100
2. Kumun Debai	200	1050	12.950	14.200
3. Sungai Penuh	-	335	-	335
4. Hamparan Rawang	-	1.215	-	1.215
5. Pesisir Bukit	-	1.216	730	1.946
6. Sungai Bungkal	-	770	10.325	1.946
7. Pondok Tinggi	-	310	8.785	9.095
8. Koto Baru	-	164	-	164
Jumlah	200	6.160	32.790	39.150

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka, 2021

2.1.3.2 Topografi

Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wilayah Kota Sungai Penuh sangat bervariasi, dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit, dan terjal. Wilayah yang terjal berada di bagian tengah Kecamatan Sungai Penuh dan Kumun Debai (24,23%), sementara daerah perbukitan (28,23%) berada di bagian barat Kecamatan Sungai Penuh dan Kumun Debai dan dikawasan perbatasan Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (12,29%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung, serta di Kecamatan Pesisir Bukit, Sungai Penuh dan Kumun bagian timur.

Tabel II.3
Klasifikasi Lereng di Kota Sungai Penuh

No	Klasifikasi lereng	Lereng	Luas (ha)	Persentase Luas (%)
1.	Datar	0 - 2 %	4.812	12,29
2.	Bergelombang	> 2 – 15 %	4.618	11,80
3.	Berbukit	>15 - 25%	11.051	28,23
4.	Curam	>25 - 40%	9.171	23,42
5.	Sangat Curam, Terjal	> 40%	9.498	24,23
Luas Wilayah Kota			39.150	100,00

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011-2031

2.1.4 Geologi

Kota Sungai Penuh secara regional berada di lingkungan Bukit Barisan yang dibentuk oleh bentang alam perbukitan dan pegunungan dengan *relief* permukaan yang umumnya tinggi. Pembentukan bentang alam yang tampak seperti sekarang ini sangat dipengaruhi oleh susunan batuan (*litologi*), struktur geologi yang berkembang, serta proses-proses geologi yang sedang berlangsung. Pusat kegiatan kota menempati bagian kaki dari bentang alam tersebut yang disusun oleh endapan material rombakan, batuan gunung api, sedimen, dan batuan terobosan yang secara morfologi berupa kipas :

- Batuan Sedimen: terletak di bagian selatan Kota Sungai Penuh dan dikenal dengan nama Formasi Kumun membentuk bentang alam perbukitan berelief terjal memanjang barat laut tenggara, terdiri dari batu pasir, konglomerat, breksi, dantuf dengan sisipan lignit dan berlapis baik.
- Batuan Gunung Api: bersusunan andesit-basal, menempati bagian barat Kota Sungai Penuh membentuk bentang alam pegunungan dan perbukitan yang terdiridari lava andesit-basalan, tuf, dan breksi gunung api.
- Batuan Terobosan: terdiri dari Gronodiorit terletak di sekitar Kota Sungai Penuh membentuk perbukitan yang memanjang barat laut tenggara, dan batuan terobosan granit yang menempati bagian barat laut.
- Batuan Sedimen Lainnya dan Endapan Aluvium: mengalasi bentang alam dataran, yaitu formasi pengasih terdiri dari batu lempung, batu lanau, batu pasir berbatu apung dengan sisipan lignit dan konglomerat. Endapan aluvium ini menempati bentang alam dataran di sekitar wilayah Kota Sungai Penuh.

Struktur geologi berupa lipatan, patahan, dan kelurusan banyak dijumpai di wilayah Kota Sungai Penuh, dimana umumnya berarah tenggara barat laut. Struktur patahan mempengaruhi seluruh batuan penyusun yang terbentuk di jaman Pra-Holosen bahkan hingga jaman Resen. Patahan ini mempengaruhi pula terhadap endapan aluvium di bagian dataran, yang tercermin oleh adanya retakan/lipatan dan kelurusan. Wilayah dataran yang disusun oleh endapan aluvium sungai merupakan endapan yang sangat sensitif terhadap kegempaan. Berdasarkan kejadian gempa yang pernah terjadi pada tahun 1995, bangunan rumah dan infrastruktur yang ada diatasnya telah mengalami rusak berat dibandingkan dengan bangunan yang bertumpu pada batuan lainnya, seperti batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan, dan endapan kipas (kolovial).

Tabel II.4
Susunan Batuan Kota Sungai Penuh

Jenis Batuan	Simbol
Formasi Asai	Ja
Granit tatan	Jgr
Formasi Peneta	Kjp
Formasi Hulusimapang (batuan gunung berapi)	Tomh
Batuan Sedimen Tersier	Tb, Tmk, Qtp

Jenis Batuan	Simbol
Formasi bandan	Tb
Formasi Kumun	Tmk
Formasi Pengasih	QTp
Granit dan Diorit	Tdi
Granodiorit	Tgd
Granit	Tgr
Diorit	Di
Endapan Aluvial	Qa
Endapan Kipas Aluvial	Qaf
Endapan Delta	Qad
Endapan Aluvial Gunungapi	Qav

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1996

Pada skala lokal 1:100.000, sesuai dengan struktur geologi di Kota Sungai Penuh terdapat sesar berarah ke barat laut-tenggara, yaitu sesar Siulak (hasil studi Pusat Geologi yang bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Kerinci pada tahun 2003). Sesar ini terdiri atas dua sesar yang sejajar melintasi Kota Sungai Penuh. Panjang sesar kurang lebih 37km dan lebarnya 17km. Sesar ini mulai aktif sejak Miosen Tengah, yang berhubungan dengan pembentukan Formasi Kumun dan diaktifkan lagi pada Pilio-Plitosen. Sesar ini merupakan sesar geser menganan dengan kemiringan hampir tegak.

2.1.5 Hidrologi

Pada dasarnya kondisi hidrologi Kota Sungai Penuh dapat terlihat dari adanya sumber-sumber air, baik berupa air permukaan, mata air, maupun air tanah sebagai berikut.

2.1.5.1 Air permukaan (sungai)

Wilayah Kota Sungai Penuh termasuk dalam Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, yang merupakan rangkaian daerah aliran sungai dari Kabupaten Kerinci. Wilayah Kabupaten Kerinci didominasi oleh pegunungan Bukit Barisan, sebagai bagian dan rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang memanjang sepanjang pantai Barat Sumatera, titik tertinggi adalah puncak Gunung Kerinci. Terdapat banyak dataran sepanjang lembah Bukit Barisan tersebut. Pegunungan Bukit Barisan yang berada sebelah Barat dan Timur Kerinci ini menjadi titik tertinggi di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga semua sungai yang mengalir di Kota Sungai Penuh mengalir ke arah tengah dan selatan menuju dan bermuara ke Danau Kerinci dan selanjutnya mengalir ke Sungai Batanghari.

Berdasarkan hasil penyelidikan hidrogeologi regional lembar Sungai Penuh dapat dibagi kedalam tiga (tiga) wilayah produktivitas akuifer (lapisan pembawa air) yaitu:

1. Akuifer Produktif sedang dengan penyebaran luas, keterusan rendah sampai sedang, muka air tanah beragam dan debit sumur kurang dari 5l/det;
2. Akuifer dengan produktifitas rendah setempat dimana umumnya keterusan rendah, setempat sedang, air tanah dalam jumlahnya cukup dapat diperoleh terutama dilembah-lembah atau zona sesar dan pelapukan; dan
3. Daerah air tanah langka. Pemanfaatan air permukaan sebagai air baku untuk pelayanan air bersih di Kota Sungai Penuh terutama berasal dari anak Sungai Ampuh yang terletak ±3 m di bagian desa sungai jernih Kecamatan Sungai Penuh.

2.1.5.2 Mata Air

Di wilayah Kota Sungai Penuh juga dijumpai mata air, yang terbentuk dari dasar lembah atau kaki perbukitan yang disebabkan adanya lapisan batuan kedap air dibawahnya, sehingga peregangan tidak terus ke dalam melainkan ke arah kateral dan muncul di kaki tebing/lembah atau kaki perbukitan. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa danau, dan air terjun di daerah pegunungan.

2.1.5.3 Air Tanah

Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat dibawahnya serta morfologi. Potensi air tanah umumnya relatif dalam, sekitar >60 meter. Hampir seluruh Kecamatan di Kota Sungai Penuh mempunyai kedalaman efektif tanah >90 meter. Sungai-sungai utama yang terdapat di Kota Sungai Penuh adalah Sungai Batang Merau, Sungai Batang Bungkal dan Sungai Batang Sangkir.

Tabel II.5
Profil Fisik Sungai di Kota Sungai Penuh

No	Nama sungai	Panjang (m)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m ³ /dtk)	
			Permu-kaan	Dasar		Maks.	Min.
1	Sungai Ning	3480	10,00	8,00	1,50	120,00	1,50
2	Sungai Pengasah	3624	8,00	7,00	2,00	80,00	0,90
3	Sungai Air Sesat	1140	6,00	4,00	2,00	95,00	0,95
4	Sungai Air Sempit	5041	7,00	5,00	3,00	96,00	0,98
5	Sungai Terung	4943	20,00	18,00	2,00	115,00	1,30
6	Sungai Air Hitam	2793	10,00	8,00	3,00	90,00	0,80

No	Nama sungai	Panjang (m)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m ³ /dtk)	
			Permu-kaan	Dasar		Maks.	Min.
7	Sungai Batang Sangkir	2802	15,00	13,00	3,00	130,00	4,00
8	Sungai Jernih	2988	8,00	6,00	1,50	170,00	2,50
9	Sungai Ampuh	6180	6,00	4,00	1,50	70,00	1,10
10	Sungai Ulu Air	1795	6,00	4,00	1,50	85,00	1,00
11	Sungai Batang Bungkal	9062	15,00	13,00	3,00	100,00	2,00
12	Sungai Batang Merao	10247	20,00	16,00	5,00	270,00	6,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh, Tahun 2020

2.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah atau Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang memiliki faktor resiko terhadap kejadian bencana gempa bumi, banjir, dan gerakan tanah sehingga harus dilindungi dari pengembangan kawasan terbangun dan aktifitas perkotaan. Kawasan rawan bencana Kota Sungai Penuh terdiri dari kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan genangan (banjir) dan kawasan jalur sesar (gempa bumi).

2.1.6.1 Gerakan Tanah

Wilayah Kota Sungai Penuh dapat dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah potensi gerakan tanah, yaitu potensi gerakan tanah sangat rendah, potensi gerakan tanah rendah, potensi gerakan tanah sedang, potensi gerakan tanah tinggi.

- *Potensi Gerakan Tanah Sangat Rendah*, wilayah ini umumnya menempati bentang alam dataran yang disusun oleh endapan alluvium pantai dan rawa. Gerakan tanah di wilayah ini tidak pernah terjadi, sehingga cukup stabil terhadap kemungkinan terjadinya gerakan tanah.
- *Potensi gerakan Tanah Rendah*, wilayah ini cukup luas menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng terjal hingga sangat terjal. Gerakan tanah di wilayah ini pun masih sangat jarang terjadi.
- *Potensi Gerakan Tanah Menengah*, wilayah ini menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng sangat terjal. Gerakan tanah di wilayah ini, umumnya pada zona lapukan batuan yang cukup tebal dengan tutupan lahan (vegetasi) yang jarang.

- *Potensi Gerakan Tanah Tinggi*, wilayah ini menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng sangat terjal lebih dari 30 persen. Wilayah ini nampak sebagai gerakan tanah lama atau tempat berakumulasinya material tanah pelapukan, yang apabila terjadi perubahan terhadap kondisi eksisting medan dapat memicu terjadinya gerakan tanah baru. Potensi gerakan tanah tinggi ini banyak dijumpai di sekitar tepian jalan raya Sungai Penuh menuju Tapan, kondisi kemiringan lereng yang sangat terjal hingga tegak dan pengaruh dari struktur geologi berupa patahan. Jenis gerakan tanah yang terjadi adalah longsoran bahan rombakan, runtuhan batu dan aliran tanah yang mempengaruhi terhadap lahan yang ada di bagian bawahnya seperti pertanian, perumahan dan infrastruktur jalan raya.

2.1.6.2 Banjir Bandang

Banjir menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir Bandang berpotensi terjadi di Wilayah Kota Sungai Penuh, yang diakibatkan oleh curah hujan tinggi dan berlangsung lama di bagian hulu Daerah Aliran Sungai Batang Bungkal dan Sungai Ampuh yang bersatu masuk ke dalam badan air Sungai Batang Bungkal. Peresapan air hujan di bagian hulu tersebut kurang baik sehingga air langsung mengalir ke bagian daerah aliran sungai di sekitarnya yang langsung mengalir masuk ke Sungai batang Bungkal yang melintasi Kota Sungai Penuh. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap bangunan fisik, jembatan, bangunan rumah di sekitar tepian sungai batang bungkal. Dampak lainnya sangat berpengaruh terhadap wilayah Kabupaten Kerinci yang berada di bagian hilir sungai. Kawasan rawan bencana banjir di Kota Sungai Penuh meliputi lahan-lahan yang berada di sekitar DAS beserta anak sungainya. Berdasarkan hasil analisis resiko bencana banjir, diperkirakan kawasan rawan banjir terletak pada sebagian Kecamatan Sungai Penuh, sebagian Kecamatan Hamparan Rawang dan sebagian Kecamatan Tanah Kampung serta Kecamatan Kumun Debai seluas 1.049 ha.

2.1.6.3 Gempa Bumi

Daerah Sungai Penuh Berdasarkan Peta Seismotektonik Daerah Sungai Penuh dan sekitarnya yang disusun oleh M. Firdaus, A. Soehaemi, dan kawan-kawan Tahun 2002 (Pusat Survey Geologi, Badan Geologi), bahwa wilayah Kota Sungai penuh khususnya, umumnya termasuk kedalam zona gempa bumi berskala V, VI dan VII MMI. Oleh karena itu, perlu ada kesiapan dari kota dalam menghadapi resiko tersebut. Kawasan di Kota Sungai Penuh yang dilalui oleh sesar aktif mencakup seluruh kawasan yakni terutama di sebagian Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit serta sebagian kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai yang mencakup areal seluas 521 ha.

2.1.6.4 Letusan Gunung Berapi

Daerah letusan gunung berapi berdasarkan RTRW Provinsi Jambi terbagi menjadi dua daerah, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

1. *Daerah Bahaya*, Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom volkanik yang membara (mematikan). Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.
2. *Daerah Waspada*, Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil volkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 9 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

2.1.7 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kota Sungai Penuh meliputi 4 (empat) macam, yaitu: andosol, latosol, podsolik, dan aluvial. Pemanfaatan tanah jenis aluvial pada usaha pertanian dapat dilakukan di daerah endapan sungai atau daerah rawa-rawa pasang surut, sedangkan tanah aluvial yang berasal dari bahan alluvium umumnya merupakan tanah subur. Jenis tanah aluvial di Kota Sungai Penuh umumnya berupa tanah subur yang dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sawah.

Tabel II.6
Jenis Tanah di Kota Sungai Penuh

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Andosol	12.564	32,09
2	Latosol	15.577	39,79
3	Padsolik	5.594	14,29
4	Aluvial	5.415	13,83
Jumlah		39.150	100

Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, Tahun 2021

2.1.8 Klimatologi

Sungai Penuh memiliki suhu rata-rata 23,1°C selama tahun 2020. Suhu maksimum sebesar 29,4°C terjadi hampir disetiap bulan, serta suhu minimum sebesar 18,8°C terjadi hampir disetiap bulan. Pada tahun 2019 curah hujan rata-rata per bulan adalah sebesar 156,9mm dengan curah hujan terendah sebesar 37,8mm terjadi pada bulan agustus dan curah hujan tertinggi sebesar 342,5mm terjadi pada bulan Desember. Curah hujan rata-rata per bulan sepanjang tahun 2020 sebesar 181,8mm dengan curah hujan terendah sebesar 25,5mm terjadi pada bulan Juli dan curah hujan tertinggi sebesar 268mm terjadi pada bulan Januari.

Kelembaban relatif udara rata-rata per bulan pada tahun 2019 sebesar 82 persen dengan kelembaban udara terendah sebesar 76 persen (bulan September dan Oktober) dan kelembaban udara tertinggi sebesar 87 persen terjadi pada bulan Desember. Pada tahun 2020 kelembaban relatif udara rata-rata per bulan sebesar 81 persen dengan kelembaban udara terendah sebesar 74 persen di bulan Desember dan kelembaban udara tertinggi sebesar 83 persen terjadi pada bulan Januari, Maret, April dan November.

2.1.9 Penggunaan Lahan

Kota Sungai Penuh saat ini pada dasarnya terbentuk dari percampuran kegiatan-kegiatan yang bersifat perkotaan dan sebagian kecil bersifat perdesaan berupa lahan-lahan pertanian, serta kegiatan kepariwisataan. Kegiatan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan wilayah (regional) berupa fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi regional dan fasilitas perkantoran dan/atau pemerintahan. Sedangkan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Kota Sungai Penuh memiliki tingkat pelayanan nasional maupun regional antara lain berupa fasilitas akomodasi hotel dalam memberikan pelayanan jasa kepariwisataan yang mengaitkan objek-objek wisata baik yang berada di dalam kota ataupun yang terletak di luar kota dan daerah lain di Kabupaten Kerinci.

**Tabel II.7
Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh**

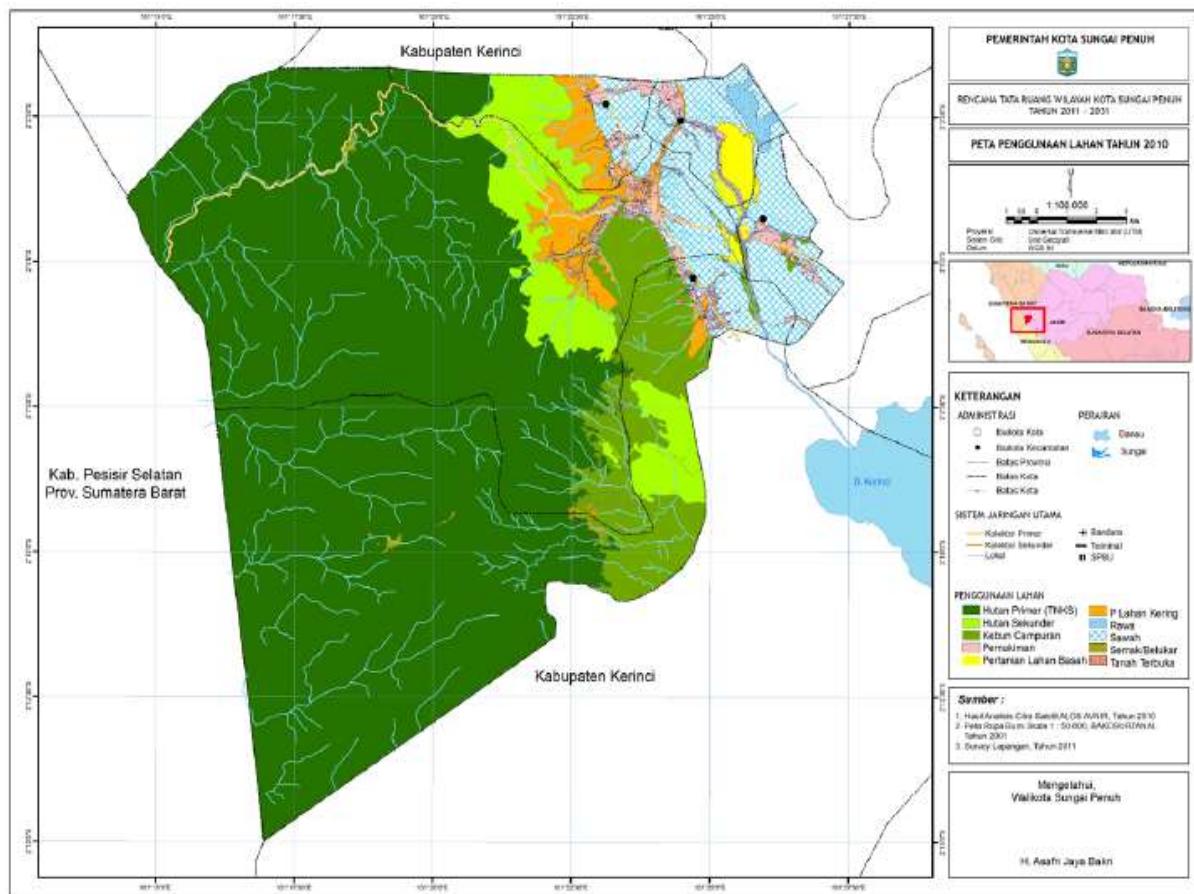
No	Penggunaan lahan	Kecamatan								Luas (Ha)
		Hamp. Rawang	Koto Baru	Kumun Debai	Pesisir Bukit	Pondok Tinggi	Sungai Bungkal	Sungai Penuh	Tanah Kampung	
1	Hutan primer (TNKS)	-	-	11.032	379	4.600	7.167	-	-	23.178
2	Hutan sekunder	-	-	666	837	3.508	2.876	-	-	7.887
3	Kebun campuran	-	-	1.218	-	324	371	10	38	1.961
4	Pemukiman	150	40	128	104	157	117	77	147	920

No	Penggunaan lahan	Kecamatan								Luas (Ha)
		Hamp. Rawang	Koto Baru	Kumun Debai	Pesisir Bukit	Pondok Tinggi	Sungai Bungkal	Sungai Penuh	Tanah Kampung	
5	Pertanian lahan basah	287	-	4	-	52	-	5	51	399
6	Pertanian lahan kering	-	-	70	394	147	427	-	3	1.041
7	Rawa	127	-	-	-	-	-	-	3	130
8	Sawah	651	124	505	226	285	100	243	858	2.992
9	Semak/ Belukar	-	-	568	5	20	37	-	-	630
10	Tanah terbuka	-	-	9	1	2	-	-	-	12
Total		1.215	164	14.200	1.946	9.095	11.095	335	1.100	39.150

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031.

Komponen ruang kota yang bersifat pedesaan berupa lahan-lahan pertanian tanaman pangan sawah dan kebun lahan kering terdapat lebih banyak di wilayah *hinterland* kota dengan hasil produksi yang dipasarkan ke Provinsi Jambi, dan wilayah Sumatera Barat. Daerah pertanian ini sebagian besar berada di bagian Timur dan Selatan wilayah kota, terutama di Kecamatan Tanah Kampung dan Hamparan Rawang. Secara umum gambaran penggunaan lahan di Kota Sungai Penuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan pusat kota yang merupakan konsentrasi kegiatan perdagangan, pemerintahan dan perkantoran, pelayanan kegiatan sosial dan pariwisata dengan lingkup pelayanan regional wilayah kota dan daerah pinggiran. Kegiatan ini berada di Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Desa Gedang, Permanti, Koto Tinggi, serta Aur Duri;
2. Kawasan pariwisata dan kegiatan pendukungnya yaitu sepanjang Bukit Sentiong, Bukit Khyangan dan kawasan Taman Bunga di Talang Lindung serta kawasan Bukit Khayangan;
3. Kawasan perumahan yang menyebar dengan intensitas yang semakin tinggi ke arah pusat kota. Bagian Barat dan Tenggara serta Utara kota merupakan daerah perkembangan perumahan yang antara lain di Kecamatan Sungai Penuh bagian Barat, dan Pesisir Bukit; dan
4. Kawasan Pertanian pada kawasan Utara dan Tenggara kota yang besaran lahanannya semakin menyusut karena beralih fungsi menjadi lahan perumahan.



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031.

Gambar II.3
Peta Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh

Perkembangan fisik ruang kota dari awal hingga mencapai besaran luas seperti sekarang berawal dari lingkungan pusat kota. Perkembangan mengikuti rencana pola jaringan jalan lingkar yaitu poros jalan Desa Gedang-Jembatan I Tanah Kampung. Struktur Kota Sungai Penuh yang bersifat konsentrik cenderung mengarah ke pola pembauran sektoral yang terintegrasi tanpa zonasi yang tidak begitu jelas batasnya. Terjadi pemusatan kegiatan-kegiatan utama seperti kegiatan perdagangan, perkantoran, perhotelan dan kepariwisataan, pendidikan, dan kesehatan dengan konsentrasi tinggi pada pusat kota.

2.1.10 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Sungai Penuh sebagai salah satu kota di Provinsi Jambi memiliki peran strategis. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Sungai Penuh Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh tahun 2011-2031.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa berdasarkan arahan sistem perkotaan nasional yang diatur dalam RTRWN dan arah pengembangan wilayah

Provinsi Jambi, letak geografis Kota Sungai Penuh cukup strategis. Kota Sungai Penuh terletak pada posisi sentral antara Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, dengan PKN yang terdekat dengan Kota Sungai Penuh adalah Kota Padang (PKN Sumatera Barat) yang jalur lintasnya melalui PKW Muara Labuh atau PKW Painan. Sedangkan jalur lintas menuju PKN Kota Jambi melalui PKWp Bangko dan Muaro Bungo yang merupakan PKW terdekat dengan Kota Sungai Penuh dalam wilayah Provinsi Jambi.

Muara Bungo juga merupakan kawasan andalan yang terdekat dengan Kota Sungai Penuh, dengan sektor unggulannya adalah : perkebunan, pertanian dan kehutanan. Di sisi lain PKW Muko-muko merupakan jalur lintas menuju PKN Bengkulu. Kota Sungai Penuh juga menjadi daerah pusat kegiatan dari beberapa PKL di Kabupaten Kerinci (Sanggaran Agung, Siulak Mukai dan Batang Sangir) dan Provinsi Sumatera Barat (Tapan) serta Provinsi Bengkulu (Muko-muko). Oleh karena itu, Kota Sungai Penuh di kemudian hari dapat diorientasikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah bagi daerah sekitarnya. Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, Kota Sungai Penuh memiliki kawasan strategis yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah dimasa mendatang, diantaranya adalah:

2.1.10.1.1 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yaitu melalui pengembangan kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan pusat perdagangan, jasa, pergudangan dan transportasi skala regional di Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Sungai Bungkal untuk mendorong percepatan pengembangan fungsi utama Kota Sungai Penuh sebagai PKWp. Hal ini mencakup pengembangan kawasan pergudangan, pasar serta Pusat Pemandu Modal (Terminal tipe A). Pengembangan pusat perbelanjaan, perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan wajib memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau kegiatan sejenis lainnya.

2.1.10.1.2 Kawasan Peruntukan Industri

Adapun untuk kawasan peruntukan industri berupa kawasan industri kecil maupun industri rumah tangga umumnya tersebar di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal dan Kecamatan Pondok Tinggi disamping Kecamatan Lainnya. Kondisi eksisting pada kecamatan ini sudah banyak terdapat industri kecil/rumah tangga. Pemerintah Kota Sungai Penuh hanya perlu menata kembali kawasan ini, arahan pengembangan kawasan ini dilakukan di setiap Kecamatan serta terintegrasi dengan kawasan pariwisata budaya. Disamping itu, kedepannya direncanakan pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga berkembang diseluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.

2.1.10.1.3 Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan perkantoran mencakup perkantoran pemerintah maupun swasta. Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan perkantoran umumnya di Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Sungai Bungkal sesuai dengan potensi disamping Kecamatan lainnya, sedangkan untuk kawasan perkantoran swasta di Kecamatan Sungai Penuh karena memiliki lokasi yang strategis dan konektivitas yang baik antar wilayah. Rencana Luas keseluruhan lahan yang digunakan untuk perkantoran pemerintahan ialah seluas 17,46 ha.

2.1.10.1.4 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Daya tarik wisata ini telah dituangkan dalam kebijakan kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sungai Penuh tahun 2020-2034, meliputi:

- a. Pengembangan Wisata Alam dan ekowisata, antara lain:
 - 1) Bukit Khayangan;
 - 2) Bukit Sintiong;
 - 3) Bukit Simancik;
 - 4) Panorama Bukit Tapan; dan
 - 5) Air Terjun Tiga Beradik.
 - 6) Renah Padang Tinggi
- b. Lokasi pengembangan wisata edukasi dan budaya, antara lain:
 - 1) Masjid Agung Pondok Tinggi di Kecamatan Pondok Tinggi;
 - 2) Masjid Raya Rawang di Kecamatan Hamparan Rawang;
 - 3) Museum Tanah Sabingkeh di Kecamatan Hamparan Rawang;
 - 4) Tanah Mendapo di Kecamatan Sungai Penuh;
 - 5) Makam Siak Lengih di Kecamatan Sungai Bungkal;
 - 6) Makam Siak Alam di Kecamatan Pesisir Bukit;
 - 7) Makam Syeh H. Muhammad Sekin di Kecamatan Tanah Kampung;
 - 8) Batu Sorban di Kecamatan Pesisir Bukit;
 - 9) Batu Gong Nenek Betung di Kecamatan Kumun Debai;
 - 10) Kenduri Sko;
 - 11) Tulisan Incung;
 - 12) Gong Bisu di Kecamatan Koto Baru;
 - 13) Sumur Pulai di Kecamatan Sungai Penuh, dan
 - 14) Kesenian Tradisional.
- c. Lokasi pengembangan wisata buatan, antara lain:
 - 1) Taman Bunga Puti Senang di Kecamatan Sungai Bungkal;
 - 2) Bukit Impian di Kecamatan Sungai Bungkal;
 - 3) Panorama Puncak di Kecamatan Sungai Bungkal;
 - 4) Jembatan Kerinduan di Kecamatan Pondok Tinggi; dan
 - 5) Lapangan Merdeka di Kecamatan Sungai Penuh.

2.1.10.1.5 Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Sektor informal merupakan sektor usaha pelayanan yang tidak terorganisasi baik waktu, jenis usaha maupun lokasi, karena kegiatan ini sangat tergantung pada waktu, jenis dan lokasi kegiatan formal terutama kegiatan perdagangan, jasa dan pelayanan publik lainnya yang bersifat formal. Pemanfaatan ruang untuk kawasan sektor informal pada dasarnya dimaksudkan untuk mengarahkan lokalisasi kegiatan sektor informal untuk sore dan malam hari (bukan pemanfaatan ruang secara penuh). Keberadaan sektor informal di Kota Sungai Penuh tersebar terutama pada kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota, yang memanfaatkan ruang pejalan dan area parkir. Rencana penyediaan ruang bagi sektor informal diarahkan dengan prinsip pengaturan waktu dan ruang untuk beraktifitas yaitu pada sore dan malam hari (antara jam 15.00-22.00 WIB). Sementara lokasi kegiatan sektor informal diarahkan untuk memanfaatkan ruang pada kawasan Pujasera Kelurahan Pasar Sungai Penuh, ruang terbuka non hijau dan pelataran parkir depan Kinca Plaza, serta pada kawasan Terminal Kota Sungai Penuh berupa pelataran terbuka, serta pada kawasan lainnya sesuai dengan potensi.

2.1.10.1.6 Kawasan Peruntukan Pendidikan

Kawasan peruntukan pendidikan di Kota Sungai Penuh berupa kawasan pendidikan dan pelatihan yang berada di Kecamatan Pesisir Bukit dan di Kecamatan Sungai Penuh dengan dukungan keberadaan jalur pergerakan regional, ketersediaan lahan pengembangan dan telah terdapat beberapa perguruan tinggi di lokasi tersebut. Kawasan pendidikan ini diarahkan untuk berkembang dan dapat mendukung fungsi penunjang pendidikan tinggi berupa fasilitas pusat penelitian, asrama serta fasilitas sarana olahraga dan taman rekreasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Hingga akhir tahun rencana, kawasan pendidikan dan pelatihan ini diarahkan untuk dapat menampung semua kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sudah ada saat ini, sehingga teraglomerasi pada satu lokasi, alokasi ruang bagi kawasan pendidikan dan pelatihan mencapai 32,08 ha. Untuk kawasan peruntukan pendidikan PAUD, dasar dan menengah meliputi seluruh Kecamatan.

2.1.10.1.7 Peruntukan Lainnya

1) Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan peruntukan lainnya terkait kepentingan strategis nasional. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kota Sungai Penuh memiliki luas area pemanfaatan mencapai 4,85 ha meliputi :

- a. Markas Komando Distrik Militer 0417 di Kecamatan Sungai Penuh;
- b. Koramil yang terdapat di kecamatan dalam Kota Sungai Penuh; dan
- c. Polres dan polsek dalam Kota Sungai Penuh.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Holtikultura dan Perkebunan

Kawasan peruntukan holtikultura dan perkebunan di Kota Sungai Penuh meliputi seluruh Kecamatan yang disesuaikan dengan potensi, terutama terdapat pada kawasan sebelah Barat kota, dengan jenis tanaman seperti kentang, cabe, tomat, casiavera, kopi, kemiri, cengkeh dan lainnya.

Arahan pengembangan lahan holtikultura dan perkebunan ini adalah secara tumpang sari agar dapat meningkatkan nilai produksi hasil perkebunan. Pemanfaatan ruang kawasan perkebunan dengan tetap mempertahankan areal perkebunan yang sudah ada. Potensi luas kawasan peruntukan holtikultura dan perkebunan mencapai 5.944,35 ha. Selain diarahkan sebagai kawasan pertanian perkebunan dan holtikultura, kawasan ini juga diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dibatasi pengelolaannya tanpa merubah fungsi utama kawasan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan holtikultura, kawasan ini juga diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dibatasi pengelolaannya tanpa merubah fungsi utama kawasan

b. Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan untuk pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan atau sawah kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki sarana-saluran irigasi yang memadai yang meliputi seluruh Kecamatan. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian dari penataan lansekap kota dalam upaya menjaga keseimbangan antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun serta untuk mendukung penjagaan iklim mikro Kota Sungai Penuh yang sudah terkenal dengan kesejukannya. Adapun luas lahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sawah ini adalah 2.731,33 ha. Terdapatnya lahan rawa di Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Tanah Kampung saat ini, sebagian telah diolah dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Dengan karakteristik lahan rawa yang ada, selain dimanfaatkan sebagai daerah tangkapan air juga dapat diarahkan pada pengembangan areal persawahan.

3) Peternakan

Budidaya peternakan tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, arahan pengembangan peternakan ini dilakukan di setiap Kecamatan. Rencana pengembangan budidaya peternakan diarahkan menyebar diseluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh melalui : (a) Penggunaan lahan secara terpadu; dan (b) Pengelolaan pemasaran hasil ternak secara lebih baik terutama untuk pemasaran lokal dan regional.

4) Kawasan Peruntukan Perikanan

Adapun untuk kawasan peruntukan perikanan tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, arahan pengembangan kawasan ini dilakukan di setiap Kecamatan untuk memanfaatan Sungai Batang Merao dan Sungai Batang Sangkir sebagai areal pengembangan budidaya perikanan darat serta pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dalam Kota Sungai Penuh untuk menunjang pengembangan budidaya perikanan.

5) Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M)

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Pondok Tinggi dengan luas lahan mencapai 941,03 ha. Penggunaan lahan pada kawasan hutan ini didominasi oleh perkebunan rakyat seperti tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura. Arahan pengembangannya adalah Pemanfaatan lahan oleh masyarakat bersifat pertanian konservasi.

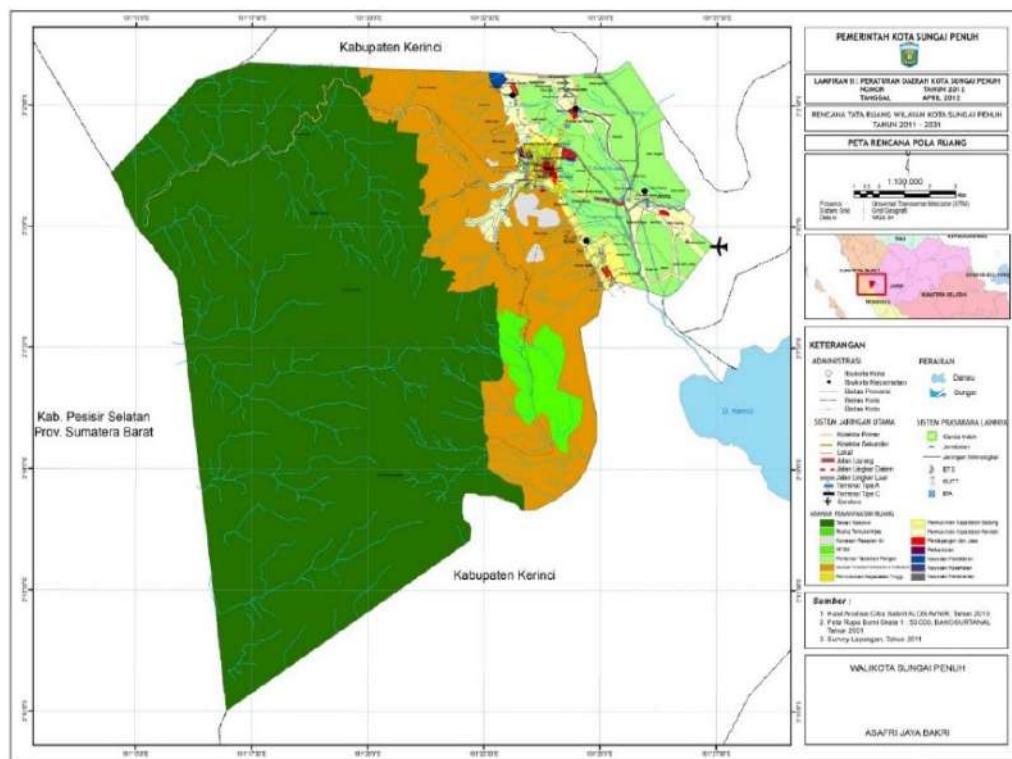
Rencana pemanfaatan lahan di Kota Sungai Penuh terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi : hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi : kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa, kawasan Hankam). Rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung seluas 24.655,00 ha sedangkan rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan budidaya seluas 10.721,00 ha.

Tabel II.8
Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh Sampai Akhir Tahun 2031

No	Fungsi kawasan	Luas (ha)	Persentase (%)
I	Kawasan Lindung		
1	Taman Nasional Kerinci Seblat	23.177,60	59,20
2	Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya	19,51	0,05
3	Ruang Terbuka Hijau Kota	492,51	1,26
4	Kawasan Cagar Budaya	3,00	0,01
5	Kawasan Rawan Bencana	962,38	2,46
Sub total		24.655,00	62,98
II	Kawasan Budidaya		
A	Kawasan Perkotaan	1.283,00	3,28
1	Permukiman	959,00	2,45

No	Fungsi kawasan	Luas (ha)	Persentase (%)
2	Perdagangan dan jasa	94,00	0,24
3	Perkantoran	50,00	0,13
4	Industri Kecil	5,00	0,01
5	Pariwisata	65,00	0,17
6	Ruang Terbuka Non Hijau	30,00	0,08
7	Ruang Evakuasi Bencana	30,00	0,08
8	Ruang Sektor Informal	5,00	0,01
9	Kawasan Pendidikan	30,00	0,08
10	Kawasan Kesehatan	15,00	0,04
B	Peruntukan Lainnya	9.438,00	24,11
1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	5,00	0,01
2	Kawasan Pertanian :		
	a. Perkebunan dan Holtikultura	5.944,00	15,18
	b. Pertanian Tanaman Pangan	2.548,00	6,51
3	Hutan Produksi	941,00	2,40
	Sub total	10.721,00	27,38
	Luas Wilayah Kota Sungai Penuh	39.150,00	100

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031



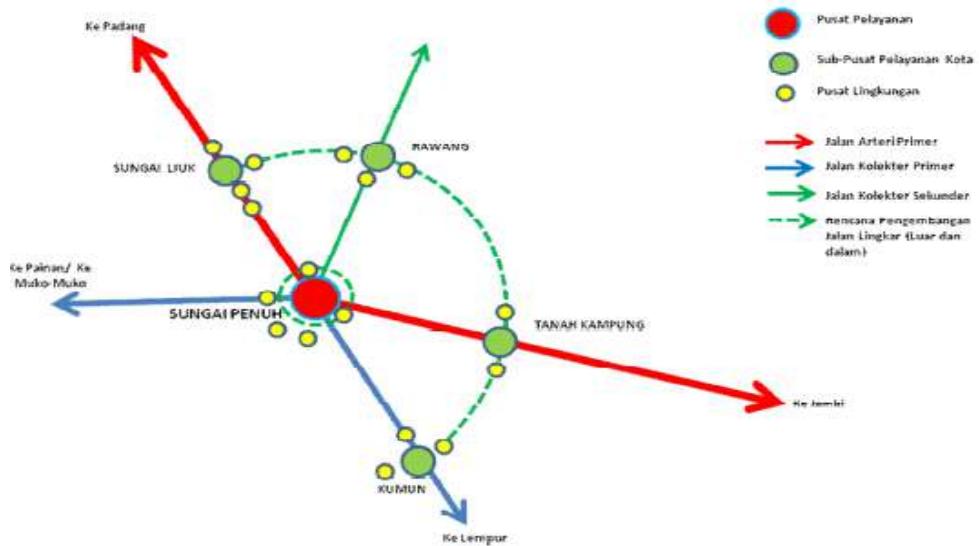
Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031

Gambar II.4
Peta Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh sampai Akhir Tahun 2031

Rencana struktur ruang Kota Sungai Penuh mengandung kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan saling berhubungan satu sama lainnya oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Pusat pelayanan di wilayah kota yang dimaksud merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional. Rencana struktur ruang Kota Sungai Penuh terdiri atas Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, serta Pusat Lingkungan.

Pusat Pelayanan Kota yaitu fungsi kota dengan pelayanan skala kota dan wilayah yang merupakan suatu pusat layanan yang memiliki wilayah pelayanan satu kota ataupun wilayah regional yang lebih luas. Pusat pelayanan kota dikembangkan berdasarkan pada aspek strategis lokasi, konektivitasnya terhadap jaringan jalan, potensi eksisting, serta mendukung peran/fungsi Kota Sungai Penuh berdasarkan kebijakan tata ruang pada skala yang lebih tinggi, yakni RTRW Provinsi Jambi dan RTRWN.

Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan yang ditentukan untuk melayani sub-wilayah kota. Dalam penentuannya juga memperhatikan aspek strategis fungsi pusat pelayanan bagi skala kota maupun regional, aksesibilitas pada jaringan prasarana, potensi eksisting, serta keterkaitan dengan Pusat Pelayanan Kota. Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan untuk melayani kegiatan dengan skala wilayah lingkungan kota. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi pusat lingkungan adalah kesesuaian dengan potensi eksisting dan mencakup pelayanan tingkat wilayah kelurahan dan sekitarnya serta memiliki posisi yang strategis.



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031

Gambar II.5
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Sungai Penuh
sampai Akhir Tahun 2031

2.1.11 Kawasan Strategis

Berdasarkan dokumen RTRW Kota Sungai Penuh 2011-2031 maka kawasan strategis Kota Sungai Penuh dapat dikelompokkan dari perspektif ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.1.11.1 Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dengan kriteria diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
- Kawasan yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- Kriteria lainnya pada aspek ekonomi yang dapat ditentukan oleh Kota sesuai dengan karakteristik dan kepentingan pembangunan kota.

Berdasarkan kriteria di atas maka ditetapkan Kawasan strategis dari perspektif ekonomi mencakup :

1. Kawasan Ekowisata

Kawasan wisata Taman Bunga Puti Senang, Bukit Kayangan, Bukit Sentiong, dan Bukit Tapan serta kawasan wisata lainnya dapat dijadikan kawasan strategis karena memiliki keunggulan sektoral yang dapat dikembangkan. Pada kawasan-kawasan ini potensi ekonomi yang dapat diarahkan adalah pariwisata berbasis lingkungan dan pendidikan. Setiap kawasan strategis ekowisata ini memiliki keunggulan masing-masing yakni:

- a. Keberadaan Kawasan Bukit Sentiong yang terletak di pusat Kota Sungai Penuh dilalui oleh jaringan jalan kolektor menjadikan kawasan ini dapat menjadi kawasan pariwisata andalan Kota Sungai Penuh dengan tetap berbasis lingkungan. Di samping itu adanya pemetaan kondisi yang cukup komprehensif merupakan pondasi dalam pengembangan masterplan kawasan ini.
- b. Kawasan Taman Bunga Puti Senang telah didukung adanya pengembangan masterplan, infrastruktur, dan potensi Bunga-bunga di dalamnya. Dari sisi aksesibilitas lokasi ini cukup mudah dijangkau dari penjuru kota dan mampu memberikan suasana yang sangat berbeda dibandingkan di pusat kota.
- c. Kawasan strategis Bukit Kayangan berlokasi cukup strategis karena memiliki akses dekat dengan kota yang merupakan tempat memandang panorama alam, dimana kita dapat memandang dari ketinggian dengan melihat Kota Sungai Penuh, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, hamparan sawah yang membentang dan desa-desa tempat tinggal penduduk tertata di sepanjang pinggiran bukit hijau. Di Taman Bukit Khayangan kita dapat pula mendengar suara -suara

siamang dan kicauan burung yang saling bersahutan pada pagi hari dan sore hari. Pengembangan kawasan memerlukan suatu revitalisasi dengan adanya suatu landasan Masterplan pengembangan.

- d. Kawasan Bukit Tapan memiliki Letak strategis kerena terdapat perbukitan dan pepohonan yang rindang, namun demikian kawasan ini memerlukan pengembangan yang lebih terencana secara komprehensif dan sebaiknya berada di dalam suatu kelembagaan pengelolaan yang sama dengan kawasan strategis lainnya.
 - e. Kawasan Renah Padang Tinggi, memiliki lokasi yang cukup strategis karena berada pada akses menuju Provinsi Sumatera Barat disertai dengan panorama alam yang indah dan didukung dengan potensi pengembangan tanaman pangan holtikultura dan juga merupakan sarana edukasi bagi masyarakat.
2. Kawasan Strategis Industri Kecil ; Dikembangkan tersebar sesuai dengan kondisi dan potensi industri kerajinan yang telah berkembang di Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh. Pengembangan kawasan Industri kecil ini diarahkan untuk dapat membentuk sentra industri yang diarahkan untuk dikembangkan di Kecamatan Hamparan Rawang, berupa peningkatan aksesibilitas terhadap bahan baku kerajinan (rotan), kemudahan pemasaran dengan mengembangkan outlet pemasaran yang dipadukan dengan jasa wisata berupa hotel dan restoran yang terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.
 3. Kawasan Pusat Perdagangan : Berada di Kecamatan Sungai Penuh yaitu Kinca Plaza dan Pasar Beringin di Kelurahan Pasar Sungai Penuh dan Pasar Tanjung Bajure di Desa Pasar Baru yang dipertahankan untuk menjadi pusat pelayanan skala kota. Kawasan perdagangan dan jasa ini didorong untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa skala wilayah dengan didukung oleh sistem pergerakan lingkar dalam kota, sehingga dapat dapat dihindari terjadinya penumpukan fungsi dan pergerakan pada satu pusat kawasan saja. Kawasan ini cukup potensial untuk berkembang mengingat posisi kawasan sekarang termasuk kawasan yang cepat tumbuh dan berada pada simpul pergerakan primer, kawasan ini juga diarahkan untuk tumbuh secara terbatas dengan kepadatan sedang sehingga dapat menghindari terjadinya lompatan pertumbuhan kawasan yang tidak terarah dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan budidaya pertanian disekitarnya. Arahan pengembangan kawasan ini diawali dengan penyusunan suatu studi rencana rinci tata ruang dengan konsep rancang kota yang dapat memadukan antara konsep tradisional dan modern, keberadaan fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dengan jaringan prasarana pejalan kaki, pengaturan gedung parkir, dan penyediaan ruang terbuka hijau.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari perspektif ekonomi meliputi :

- a. Penataan ruang kawasan ekowisata, industri kecil, perdagangan dan jasa.
- b. Mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan ekowisata, industri kecil, perdagangan dan jasa skala kota dan skala wilayah.

2.1.11.2 Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial dan Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya Kota Sungai Penuh meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan sosial budaya kota dengan kriteria sebagai berikut:

- Merupakan tempat pendidikan dan pelatihan skala regional
- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya setempat.
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri kota.
- Merupakan aset kota yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kota.
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya mencakup; tempat pendidikan dan pelatihan skala kota dan regional, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat/budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi, tempat perlindungan peninggalan budaya, tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, tempat yang memiliki potensi konflik sosial, hasil cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri. Dalam hal ini kawasan strategis yang dipromosikan dengan perspektif sosial dan budaya adalah kawasan pendidikan tinggi dan pusat pelatihan di Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Sungai Penuh serta Pelestarian Kawasan Kebudayaan Islam, berupa pelestarian kawasan Masjid Agung Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh dan Pusat pengkajian Islam di Kecamatan Hamparan Rawang.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari perspektif sosial budaya meliputi :

- a. Menata bangunan dan lingkungan.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan.
- c. Mempertahankan nilai sejarah kawasan.
- d. Mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan pendidikan, pelatihan dan kawasan wisata.

2.1.11.3 Kawasan Strategis dari Perspektif Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi tempat perlindungan keanekaragaman hayati; kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan hampir punah; kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun menimbulkan kerugian; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup; kawasan rawan bencana; dan/atau

kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Adapun kriteria Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kota Sungai Penuh meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup adalah:

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Merupakan aset kabupaten berupa kawasan lindung kabupaten yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian bagi Kota;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro wilayah kota;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup ;
- Rawan bencana alam skala kota; atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan

Berdasarkan kriteria diatas, maka kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan di Kota Sungai Penuh meliputi kawasan lindung yaitu:

1. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan luas wilayah 23.177,6 ha (59,20 % dari luas wilayah Kota Sungai Penuh). Keberadaan TNKS ini bukan menjadi suatu kendala dalam pengembangan, namun perlu dicari kesesuaian atau alternatif-alternatif baru yang dalam mengembangkan wilayah Kota Sungai Penuh dengan tetap berkomitmen terhadap pelestarian TNKS. Dalam hal ini pelestarian TNKS tersebut perlu dilihat sebagai peluang pengembangan, yaitu dengan menerapkan konsep pembangunan dan pelestarian secara terpadu, khususnya pengelolaan kawasan lindung (TNKS) dan pengembangan kawasan Daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara arif dan terpadu.
2. Kawasan resapan air dengan luas wilayah seluas 195,12 ha. Kawasan resapan air di di seagaian wilayah Kota Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu dengan mempertahankan, melindungi dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan disekitar kawasan tersebut.

2.1.12 Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari nilai sektor basis berdasarkan nilai *Location Quotient* (LQ). Dalam perekonomian dikenal adanya sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang sudah berkembang dan sudah memiliki kemampuan untuk kebutuhan lokal dan kebutuhan wilayah lain. Jika nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sektor basis, artinya tingkat

spesialisasi Kabupaten/Kota lebih tinggi dari tingkat Provinsi. Produksi komoditas sektor atau sub sektor yang bersangkutan sudah melebihi kebutuhan konsumsi di daerah dimana komoditas tersebut dihasilkan dan kelebihannya dapat dijual keluar daerah (ekspor). Jika $LQ = 1$ maka tingkat spesialisasi Kabupaten/Kota sama dengan di tingkat Provinsi. Produksi komoditas yang bersangkutan hanya cukup untuk kebutuhan daerah setempat. Produksi komoditas tersebut belum mencukupi kebutuhan konsumsi di daerah yang bersangkutan dan pemenuhannya didatangkan dari daerah lain Jika $LQ < 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sektor non basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten/Kota lebih rendah dari tingkat provinsi. Nilai LQ Kota Sungai Penuh tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.9
Hasil Analisis LQ Kota Sungai Penuh Tahun 2015 - 2019**

NO	Sektor	Hasil Analisis LQ Kota Sungai Penuh Tahun 2015 - 2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,22	0,23	0,21	0,21	0,21
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
3	Industri Pengolahan	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,51	0,48	0,48	0,46	0,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,66	2,68	2,68	2,64	2,56
6	Konstruksi	1,90	1,91	1,89	1,88	1,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,73	2,71	2,78	2,78	2,79
8	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,16	1,18	1,20	1,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	1,08	1,06	1,06	1,05
10	Informasi dan Komunikasi	4,27	4,25	4,28	4,20	4,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,23	2,19	2,31	2,43	2,35
12	Real Estate	1,95	1,97	2,00	1,99	1,92
13	Jasa Perusahaan	5,49	5,66	5,89	5,98	6,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,67	1,66	1,66	1,67	1,66
15	Jasa Pendidikan	2,86	2,92	3,01	3,00	2,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35	2,30	2,30	2,30	2,24
17	Jasa lainnya	2,37	2,35	2,40	2,39	2,39

Sumber : BPS, Hasil Analisis, Tahun 2020.

2.1.13 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar suatu pembangunan. Selain itu, penduduk juga menjadi objek dari pembangunan. Namun, seperti yang kita ketahui, masalah kependudukan yang tidak pernah ada habisnya, masih menjadi perhatian pemerintah dan bangsa ini. Salah satu masalah yang masih menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun belakangan selain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat tanpa diimbangi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri, justru hanya akan menjadi permasalahan yang merupakan awal bagi masalah-masalah berikutnya. Masalah-masalah yang mungkin akan timbul dengan tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah menambah jumlah pengangguran karena terkadang kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan tidak terpenuhi yang berdampak makin meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Dengan penduduk yang berkualitas akan memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga diharapkan dapat mencapai keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.13.1 Jumlah Penduduk

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau sentral dalam pembangunan karena peran penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat dan didukung dengan kualitas SDM yang tinggi dapat menciptakan akselerasi guna tercapainya kondisi ideal dari pembangunan.

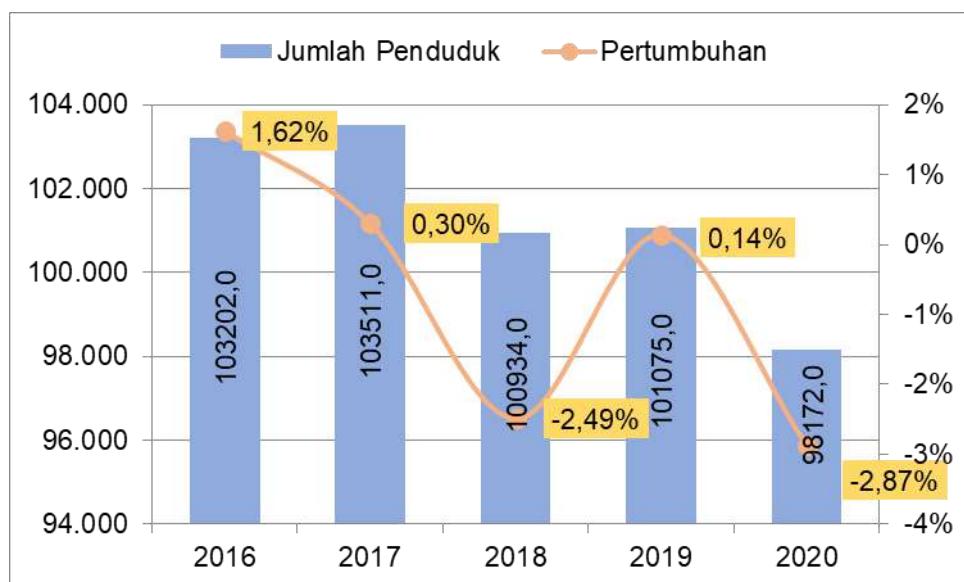
**Tabel II.10
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sungai Penuh	11.726	11.782	11.356	11.167	10.624
2	Pesisir Bukit	12.806	12.879	11.987	12.139	12.067
3	Hamp. Rawang	15.464	15.362	15.384	15.482	15.252
4	Kumun Debai	11.225	11.281	11.890	10.648	10.330
5	Tanah Kampung	11.359	11.223	10.412	11.939	11.141
6	Pondok Tinggi	19.509	19.684	19.569	19.217	18.631

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Sungai Bungkal	11.303	11.330	10.962	11.018	10.823
8	Koto Baru	9.810	9.970	9.374	9.465	9.304
Jumlah		103.202	103.511	100.934	101.975	98.172

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas sebaran atau distribusi penduduknya, kecamatan di Kota Sungai Penuh yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) adalah Kecamatan Pondok Tinggi dan kecamatan Hamparan Rawang.



Sumber : Hasil Analisis, Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2021

Gambar II.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sungai Penuh

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Sungai Penuh sejak tahun 2016 mengalami penurunan hingga tahun 2018, selanjutnya tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2,87 persen dengan rata-tata pertumbuhan sepanjang periode 2016-2020 sebesar -0,30 persen. Kecamatan yang mengalami laju penurunan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Sungai Penuh, sedangkan Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Koto Baru.

Pada Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh melaksanakan pemutakhiran data, sehingga dalam proses

pemutakhiran data tersebut tidak menutup kemungkinan menyebabkan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh menurun, hal tersebut diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Data Tidak Aktif dan Data Ganda.

Data tidak aktif disebabkan oleh penduduk yang pindah domisili tetapi tidak melapor, dan penduduk yang anggota keluarganya telah meninggal dunia namun tidak melaporkan sehingga data tersebut dinyatakan tidak aktif. Data Ganda, yaitu 2 (dua) atau lebih data kependudukan yang dimiliki oleh 1 (satu) orang yang sama sehingga setelah dilakukan pemutahiran data, maka hanya ada satu data yang diambil/digunakan. Faktor tersebut yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di Kota Sungai Penuh tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada gambar II.6.

2.1.13.2 Komposisi Penduduk

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif. Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif.

Dependency ratio juga digunakan untuk mengindikasikan bonus demografi di suatu daerah. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun). Berdasarkan komposisi penduduk tahun 2020, penduduk Kota Sungai Penuh merupakan penduduk usia produktif, yang menandakan bonus demografi. Jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja sebesar 68.515 jiwa (69,79%), sedangkan penduduk yang tidak produktif sebesar 29.657 jiwa (30,21%).

Terdapat beberapa syarat untuk mencapai keuntungan di dalam bonus demografi, yaitu bisa dimulai dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas pendidikan, melakukan pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi demi mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja.

Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.11
Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh menurut Struktur Usia
Per Semester 2 Tahun 2020

Struktur Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	3.243	2.947	6.190
5-'9	4.001	3.582	7.583
10-14	4.337	3.938	8.275
15-19	4.444	4.230	8.674
20-24	4.031	4.099	8.130
25-29	3.649	3.560	7.209
30-34	3.409	3.344	6.753
35-39	3.947	3.941	7.888
40-44	4.220	4.089	8.309
45-49	3.697	3.532	7.229
50-54	2.760	2.663	5.423
55-59	2.277	2.483	4.760
60-64	1.941	2.199	4.140
65-69	1.509	1.747	3.256
70-74	808	983	1.791
75+	960	1.602	2.562
Total	49.233	48.939	98.172

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, 2021

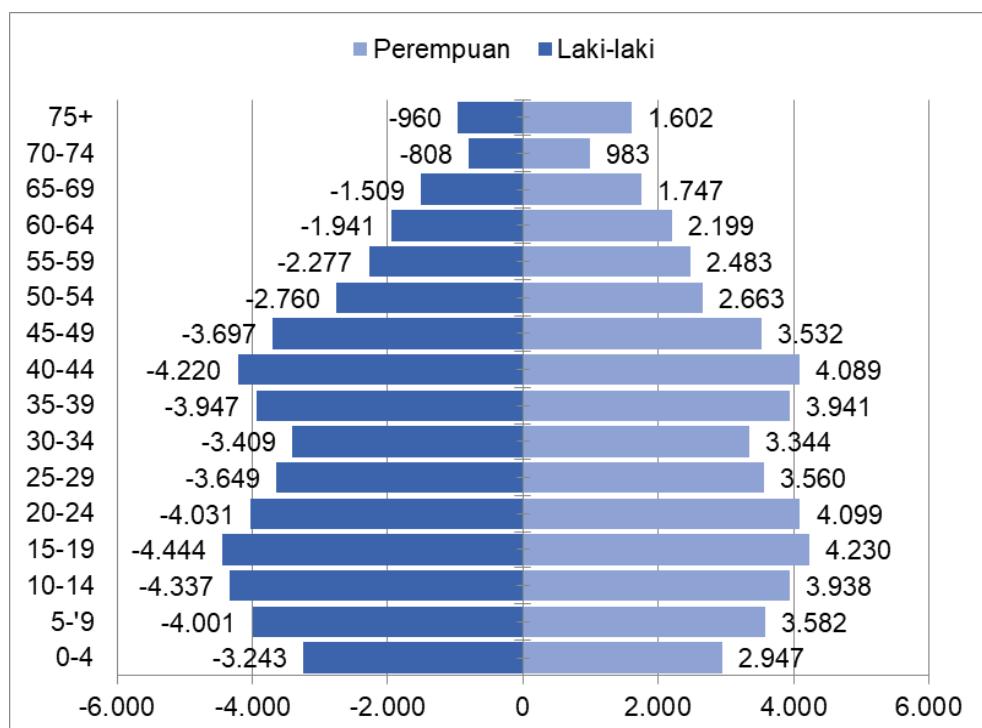
Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang masuk ke dalam usia produktif sangat banyak. Sehingga hal tersebut harus didukung dengan tingkat kualitas yang baik untuk setiap individu. Karena jika tidak, maka banyaknya jumlah penduduk malah akan memberikan dampak buruk, misalnya jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak dapat terkendali, berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Oleh karena itu, jumlah penduduk usia produktif yang meningkat juga harus didukung dengan ketersedian lapangan pekerjaan.

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2020 paling banyak berada pada rentang usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 8.670 jiwa, diikuti rentang usia 40-44 tahun sebanyak 8.309 jiwa dan rentang usia 10-14

tahun sebanyak 8.275 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 64 tahun sebanyak 7.609 jiwa.

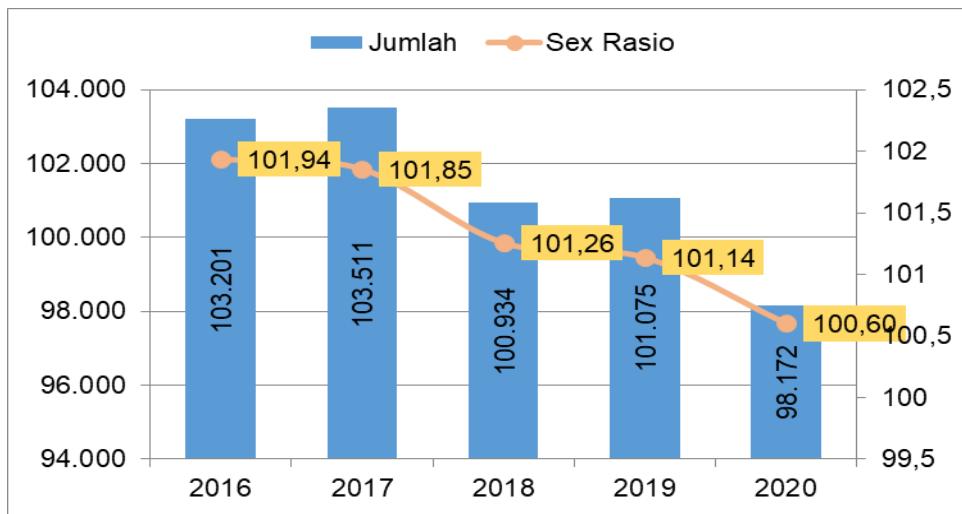
Aspek lain dari komposisi penduduk yang penting adalah *sex ratio* (rasio jenis kelamin), angka ini merupakan perbandingan jumlah pria dengan 100 wanita. Jika angka *sex ratio* (SR) > 100, berarti jumlah pria lebih banyak dibanding wanita, dan sebaliknya. Berikut pada tabel di bawah ini digambarkan *sex ratio* Kota Sungai Penuh tahun 2016-2020.

Dari grafik dibawah ini, tampak bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Sehingga diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat, karena laki-laki pada umumnya adalah pencari nafkah utama keluarga, yang berupaya melakukan aktivitas produktif guna mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat.



Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2021

Gambar II.7
Piramida Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2020



Sumber : Hasil Analisis, Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2021

Gambar II.8
Perkembangan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

2.1.13.3 Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kota Sungai Penuh Tahun 2019, jumlah penduduk yang tidak bersekolah dan lulusan SD jumlahnya masih cukup besar di Kota Sungai Penuh ini. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kota Sungai Penuh ini masih tergolong Rendah. Untuk itu upaya peningkatan kualitas penduduk melalui pendidikan harus lebih ditingkatkan pada masa mendatang. Selengkapnya, dapat di lihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.12
Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kecamatan	Tidak Sekolah	Lulusan SD	Lulusan SLTP	Lulusan SLTA	Lulusan Diploma	Lulusan S1	Lulusan S2-S3
Sungai Penuh	156	1350	1221	3047	563	1076	102
Pesisir Bukit	461	2710	1394	2785	349	819	76
Hamp. Rawang	598	3859	2110	3021	468	1167	59
T. Kampung	419	2699	1584	2724	310	668	50
Kumun Debai	356	2048	1327	2614	430	837	73
Pondok Tinggi	395	2774	2226	5307	757	1552	167
Sungai Bungkal	260	1642	1220	2980	501	927	82
Koto Baru	529	2113	1136	1918	315	463	22
Jumlah	3174	19195	12218	24396	3693	7509	631

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh Tahun, 2021

2.1.13.4 Kepadatan Penduduk

Pada Tahun 2019 kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh adalah sebesar 12.474 jiwa/km², dengan Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Koto Baru sebesar 5.711 jiwa/km² karena Kecamatan Koto Baru memiliki luas wilayah yang kecil dengan jumlah penduduk hampir sama dengan jumlah penduduk kecamatan lainnya. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Kumun Debai 95 jiwa/km² dikarenakan Kecamatan Kumun Debai memiliki luas wilayah tertinggi dengan jumlah penduduk yang juga hampir sama dengan kecamatan lainnya dan juga Kecamatan Kumun Debai memiliki daerah untuk pertanian dan perkebunan yang berada di Desa Renah Kayu Embun. Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.13
Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	TNKS	Luas Hunian/ Budi Daya	Kepadatan Penduduk
		(jw)	(km2)	(ha)	(km2)	(jw/km2)
1	Sungai Penuh	10.624	3,35	-	3,35	3.171,34
2	Pesisir Bukit	12.067	19,46	83	18,63	620,09
3	Hamp. Rawang	15.252	12,15	-	12,15	1.255,31
4	Kumun Debai	10.330	142	10.834	33,66	72,75
5	Tanah Kampung	11.141	11	-	11	1.012,82
6	Pondok Tinggi	18.631	90,95	6.130,5	39,645	204,85
7	Sungai Bungkal	10.823	110,95	6.130,5	39,645	97,55
8	Koto Baru	9.304	1,64	-	1,64	5.673,17
Kota Sungai Penuh		98.172	391,5	23.178	159,72	250,76

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh (Hasil Analisis), Tahun 2021.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

2.2.1 Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan daerah di Kota Sungai Penuh difokuskan pada pemerataan ekonomi dan kualitas masyarakat di bidang sosial. Fokus pemerataan ekonomi dilihat dari, pemerataan pendapatan, dan PDRB Perkapita.

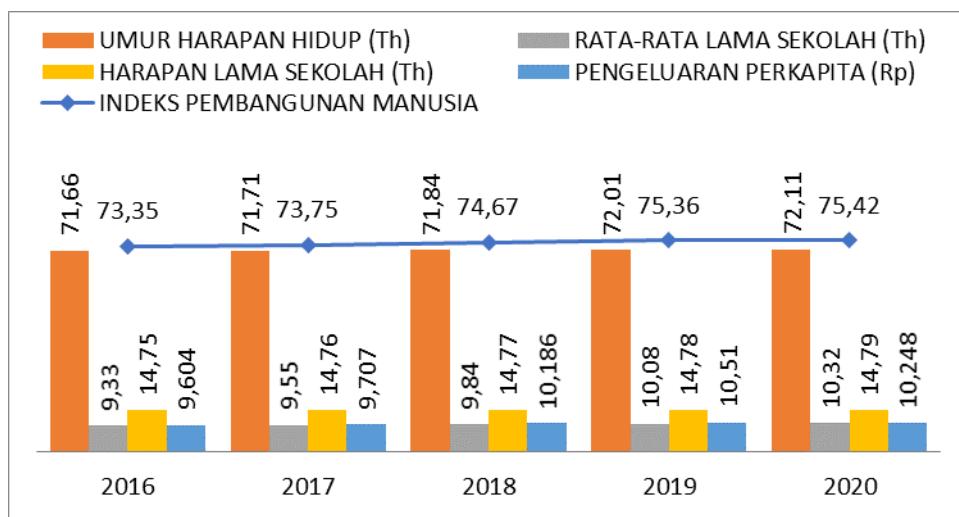
2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kualitas manusia di suatu negara atau regional pada kurun waktu tertentu. IPM dibentuk berdasarkan tiga aspek (dimensi) mendasar yaitu dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, dimensi Pengetahuan dan dimensi Standar Hidup Layak. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat diwakili oleh angka Usia Harapan Hidup (UHH). UHH adalah lama hidup (tahun) yang diharapkan akan dicapai oleh bayi yang baru lahir. Semakin tinggi capaian nilai UHH di suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu, berarti semakin tinggi derajat kesehatannya.

Dimensi Pengetahuan ditentukan berdasarkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lama sekolah formal (tahun) yang sedang atau telah diselesaikan oleh penduduk yang berumur 25 ke atas, sedangkan HLS merupakan lama sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan diselesaikan oleh seorang anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selanjutnya untuk dimensi Standar Hidup Layak ditentukan berdasarkan besaran pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun. Pengertian "yang disesuaikan" adalah dapat diperbandingkan antar waktu dan antar wilayah.

Perkembangan IPM Kota Sungai Penuh dalam periode waktu 2016-2020 terus mengalami kenaikan. IPM Kota Sungai Penuh tahun 2016 sebesar 73,35, hingga tahun 2020 meningkat menjadi 75,42. Peningkatan capaian IPM Kota Sungai Penuh diikuti dengan peningkatan komponen pembentuk IPM periode tahun 2016-2020, yaitu :

1. Rata – rata lama sekolah tahun 2020 dengan capaian sebesar 10,32 th.
2. Harapan lama sekolah tahun 2020 dengan capaian sebesar 14,79 th.
3. Umur harapan hidup tahun 2020 dengan capaian sebesar 72,11 th.
4. Pengeluaran perkapita tahun 2020 dengan capaian sebesar Rp. 10,248 juta.



Sumber : BPS.Prov Jambi (hasil analisis), 2021

Gambar II.9
Indeks Pembangunan Manusia dan Dimensi Pembentuk IPM
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

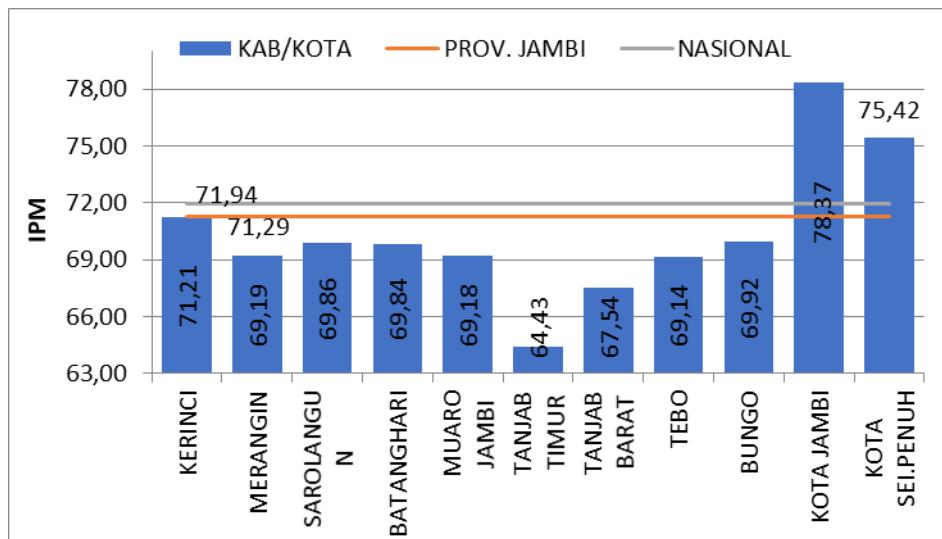
Pertumbuhan IPM Kota Sungai Penuh tahun 2020 sebesar 0,08 persen berada dibawah pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi kecuali Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2020 terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,8 persen, diikuti oleh Kabupaten Kerinci sebesar 0,37 persen.

Tabel II.14
Pertumbuhan IPM Nasional, Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Jambi
Tahun 2020

KAB/KOTA	2019	2020	PERTUMBUHAN IPM (persen)
KERINCI	70,95	71,21	0,37
MERANGIN	69,07	69,19	0,17
SAROLANGUN	69,72	69,86	0,20
BATANGHARI	69,67	69,84	0,24
MUARO JAMBI	69,01	69,18	0,25
TANJAB TIMUR	63,92	64,43	0,80
TANJAB BARAT	67,54	67,54	0,00
TEBO	69,02	69,14	0,17
BUNGO	69,86	69,92	0,09
KOTA JAMBI	78,26	78,37	0,14
KOTA SEI. PENUH	75,36	75,42	0,08
PROV. JAMBI	71,26	71,29	0,04
NASIONAL	71,92	71,94	0,03

Sumber : BPS Prov Jambi, 2021

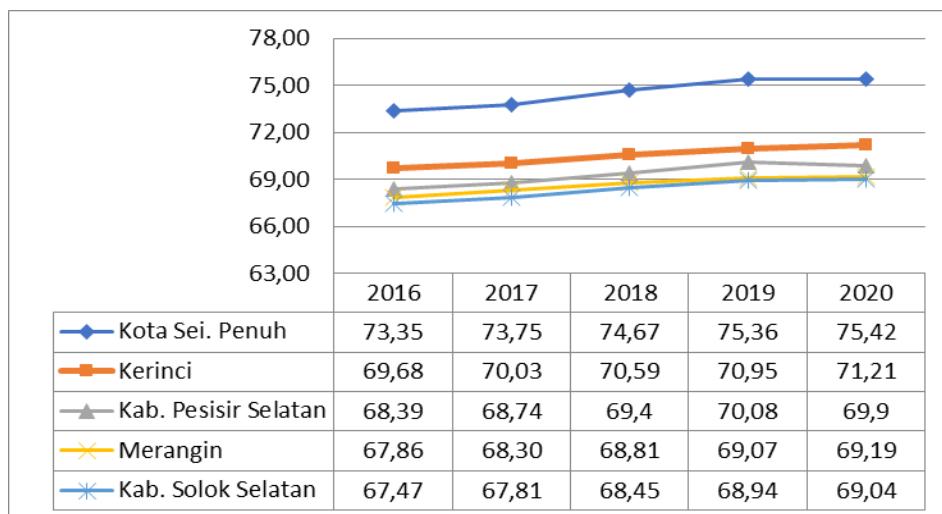
Jika dilihat dari capaian IPM kab/kota se- Provinsi Jambi, capaian IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2020 sebesar 75,42 (urutan kedua kab/kota se- Provinsi Jambi, dibawah capaian IPM Kota Jambi), dan diatas capaian IPM Prov Jambi dan Nasional.



Sumber : BPS.Prov Jambi (hasil analisis), 2021

Gambar II.10
Perbandingan IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2020

Apabila dibandingkan IPM Kota Sungai Penuh dengan kabupaten tetangga periode tahun 2016 hingga tahun 2020, *trend* capaian IPM Kota Sungai Penuh berada diatas capaian Kabupaten Kerinci, Pesisir Selatan, Merangin dan Solok Selatan.



Sumber : BPS.(hasil analisis), 2021

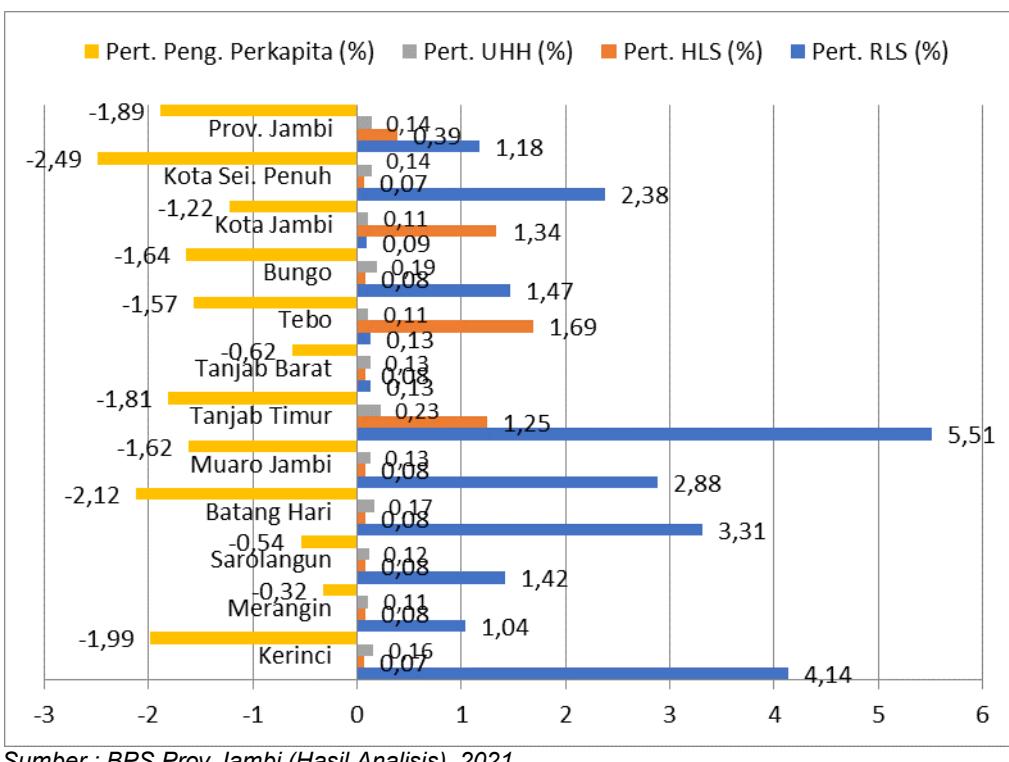
Gambar II.11
Perbandingan IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2020

Pada tahun 2020, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebagai kabupaten dengan umur harapan hidup terendah di Provinsi Jambi yaitu sebesar 66,23 tahun. Walaupun demikian Tanjung Jabung Timur juga meraih laju pertumbuhan umur harapan hidup tertinggi sebesar 0,23 persen. Pertumbuhan umur harapan hidup tertinggi berikutnya ditempati Kabupaten Bungo sebesar 0,19 persen (dari 67,61 tahun naik menjadi 67,74 tahun). Pada tempat ketiga dan keempat ada Kabupaten Batanghari dan Kerinci dengan pertumbuhan umur harapan hidup dari tahun 2019-2020 sebesar 0,17 dan 0,16 persen. Sedangkan untuk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten/Kota yang lainnya, pertumbuhan umur harapan hidupnya di bawah 0,15 persen.

Tahun 2020 pertumbuhan rata-rata lama sekolah tertinggi diraih oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 5,51 persen. Peningkatan rata-rata lama sekolah tertinggi kedua diraih oleh Kabupaten Kerinci dengan pertumbuhan sebesar 4,14 persen dari tahun 2019-2020. Pada posisi ketiga dan keempat ada Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi yang pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduknya meningkat sebesar 3,31 persen dan 2,88 persen. Kota Sungai Penuh menempati posisi kelima dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah dari tahun 2019-2020 sebesar 2,38 persen. Sementara untuk Kabupaten/Kota yang lain, pertumbuhan rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 berada di bawah 2 persen.

Selain rata-rata lama sekolah, indikator lain yang meningkat adalah harapan masa sekolah (HLS). Dari sebelas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, pada tahun 2020 Kabupaten Tebo meraih pertumbuhan harapan masa sekolah tertinggi yakni sebesar 1,69 persen. Sedangkan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang paling lambat laju pertumbuhannya (0,07%).

Laju pertumbuhan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten/Kota tahun 2020 rata-rata mengalami kontraksi sekitar 1,45 persen. Pertumbuhan terendah di Kota Sungai Penuh, terkontraksi hingga 2,49 persen. Sementara yang paling sedikit kontraksinya adalah Kabupaten Merangin (0,32%). Kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat juga terkontraksi di bawah satu persen. Sisanya (7 Kabupaten) laju pertumbuhan pengeluaran per kapitanya berkisar pada angka minus 1,2 sampai 2,5 persen.



Sumber : BPS Prov Jambi (Hasil Analisis), 2021

Gambar II.12
Pertumbuhan Dimensi Pembentuk IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2020

Pertumbuhan dimensi pembentuk IPM Kota Sungai Penuh dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah Kota Sungai Penuh 2020 sebesar 2,38 persen dibawah capaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur (5,51%), Kerinci (4,14%), Batang Hari (3,31%), dan Muaro Jambi (2,88%), meskipun diatas pertumbuhan Provinsi Jambi (1,18%)
2. Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kota Sungai Penuh 2020 sebesar 0,07 persen sama dengan capaian Kabupaten Kerinci, dibawah capaian Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi lainnya dan capaian Provinsi Jambi (0,39%)
3. Pertumbuhan Umur Harapan Hidup Kota Sungai Penuh 2020 sebesar 0,14 persen dibawah capaian Kabupaten Tanjab Timur (0,23%), Bungo (0,19%), Batang Hari (0,17%), Kerinci (0,16%), sama dengan capaian Provinsi Jambi (0,14%).
4. Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kota Sungai Penuh 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,49 persen berada pada capaian paling rendah jika dibandingkan capaian Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan capaian Provinsi Jambi.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

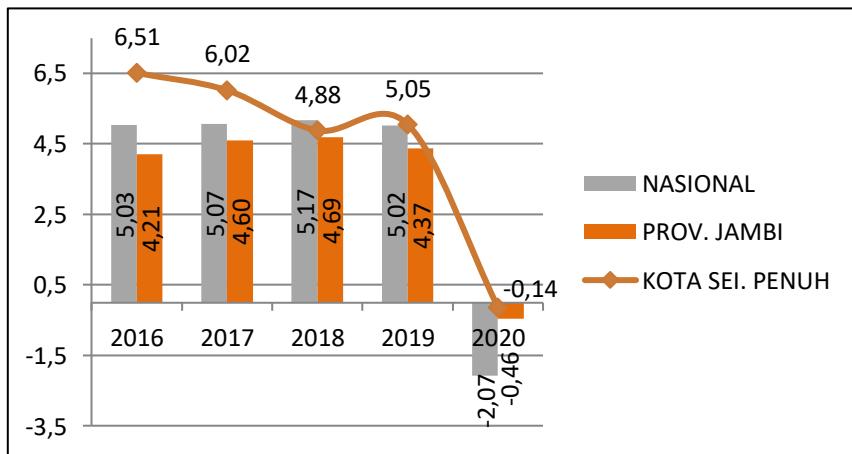
Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meminimalkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Pembangunan ekonomi berjalan efektif dan efisien manakala berpijak pada perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan indikator pembangunan ekonomi menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam perencanaan pembangunan, guna mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran. PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

**Tabel II.15
PDRB Kota Sungai Penuh 2016-2020**

	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
ADHB	5.731	6.371	6.951	7.482	7.566
ADHK (2010)	3.964	4.184	4.388	4.609	4.603
PDRB Perkapita (Juta Rp)					
ADHB	65,15	71,65	77,28	82,3	82,47
ADHK (2010)	44,85	47,05	48,79	50,71	50,17

Sumber : BPS. Tahun 2021

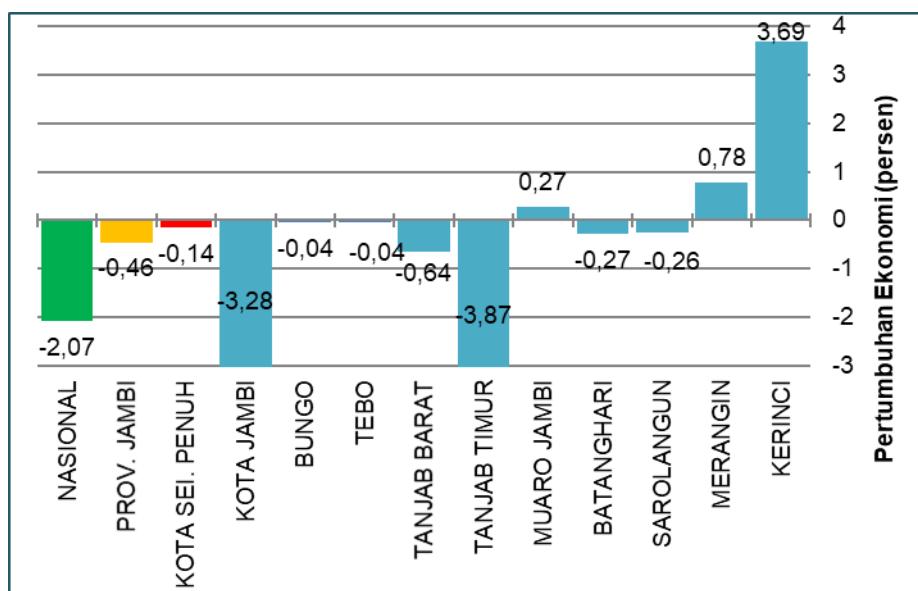
Pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung Atas Dasar Harga Berlaku, total nilai PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2016 sebesar Rp.5.731 Milyar, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp.7.566 Milyar. Apabila dihitung Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010, total nilai PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2016 sebesar Rp. 3.964 Milyar, selanjutnya terus meningkat sampai Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.4.603 Milyar.



Sumber : PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2021

Gambar II.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh, Provinsi, dan Nasional
Tahun 2016 — 2020

Namun jika dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh dalam 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang terus menurun. Hal ini memiliki kemiripan yang sama dengan *trend* perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.



Sumber : BPS, Tahun 2021

Gambar II.14
Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh, Nasional, Provinsi Jambi dan
Kab/kota se-Provinsi Jambi Tahun 2020

Namun *trend* pertumbuhan ini memperlihatkan kecenderungan yang sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari ketiga perbandingan ini, Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh masih berada di atas *trend* pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional. Pada tahun 2016 perekonomian Kota Sungai Penuh tumbuh 6,51 persen, kemudian empat tahun berikutnya terus melambat, masing-masing tumbuh 6,02 persen (2017), 4,88 persen (2018), 5,04 persen (2019) dan mengalami kontraksi sebesar minus 0,14 persen (2020).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Perlambatan ditahun 2020 lebih dikarenakan faktor pandemi *Covid-19*, faktor eksternal (ekonomi global) seperti menguatnya *dollar*, ketidakstabilan harga minyak mentah dunia dan naiknya harga pangan dunia, dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di samping itu adanya perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial berdampak pula terhadap perekonomian Nasional, Provinsi dan Kota Sungai Penuh, sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Terjadinya perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai SNA (*System National Account* 2008), maka cakupan sektor/kategori semakin luas, terbagi menjadi 17 sektor lapangan usaha, dan dampak dari perubahan ini capaian angka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah. Meskipun Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,14 persen, diatas Capaian Pertumbuhan Provinsi Jambi sebesar -0,46 dan Nasional sebesar -2,07, namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi.

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan, terjadi kenaikan dari Rp.3.946.467,11 juta pada Tahun 2016 menjadi Rp.4.602.980,14 juta pada Tahun 2020. Perkembangan PDRB dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.16
PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha (ADHK 2010)
Tahun 2016-2020

No	Sektor PDRB	PDRB (2010) ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Sungai Penuh. (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	235.062,09	228.572,17	237.211,79	238.206,28	242.928,86
2	Pertambangan dan Penggalian	33.267,81	35.722,40	36.454,19	36.690,00	36.571,58
3	Industri Pengolahan	27.806,03	29.618,04	30.110,56	31.331,91	31.390,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	966,72	979,02	992,02	1.027,06	1.138,95
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.204,57	14.585,82	14.929,58	15.090,93	16.082,81
6	Konstruksi	517.488,07	541.520,59	576.151,62	583.946,46	578.856,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.011.693,00	1.082.684,04	1.149.681,55	1.236.637,30	1.198.943,29
8	Transportasi dan Pergudangan	146.115,39	156.797,32	166.468,02	178.736,71	169.117,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.166,45	47.892,37	50.759,48	53.085,90	50.203,33
10	Informasi dan Komunikasi	582.503,30	625.230,24	659.751,52	692.079,34	732.588,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	201.388,12	219.317,86	221.545,05	226.761,23	238.747,15
12	Real Estate	110.091,50	116.474,98	122.170,91	125.713,87	123.956,77
13	Jasa Perusahaan	230.883,53	250.726,37	266.360,76	281.117,15	270.225,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	224.364,08	230.098,16	240.984,03	251.894,54	247.997,62
15	Jasa Pendidikan	369.983,87	397.041,17	417.469,85	429.449,31	431.841,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101.712,41	107.350,49	112.950,68	118.078,64	125.167,75
17	Jasa lainnya	93.770,16	99.954,18	104.185,94	109.810,55	107.221,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3.946.467,11	4.183.885,221	4.388.177,55	4.609.657,86	4.602.980,14

Sumber : BPS, PDRB Kota Sungai Penuh, 2021

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini. PDRB menurut harga berlaku juga digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.17
PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha (ADHB 2010)
Tahun 2016-2020

No	Sektor PDRB	PDRB (2010) ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Sungai Penuh (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	367.687,21	346.272,56	358.923,01	366.919,72	379.547,49
2	Pertambangan dan Penggalian	50.212,6	54.089,06	56.468,29	56.194,48	58.603,31
3	Industri Pengolahan	36.892,55	41.346,56	43.585,75	45.607,69	46.468,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.167,48	1.365,64	1.441,55	1.530,00	1.960,03

No	Sektor PDRB	PDRB (2010) ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Sungai Penuh (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.757,37	20.137,07	21.104,49	21.530,00	23.113,48
6	Konstruksi	648.659,59	708.562,62	781.638,71	807.900,00	811.638,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.628.472,15	1.857.443,92	2.054.875,78	2.230.390,00	2.228.604,80
8	Transportasi dan Pergudangan	178.306,14	195.896,84	211.310,17	237.390,00	216.795,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	67.143,65	74.315	79.936,38	86.330,00	81.400,32
10	Informasi dan Komunikasi	792.881,26	915.080,96	994.927,61	1.064.570,00	1.118.572,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	275.027,53	312.722,03	340.090,26	342.530,00	363.845,89
12	Real Estate	167.837,5	184.605,96	200.112,45	216.120,00	215.921,55
13	Jasa Perusahaan	322.100,06	371.548,04	408.732,29	431.820,00	428.658,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	388.132,32	411.204,94	455.819,92	501.400,00	501.807,83
15	Jasa Pendidikan	538.329,07	610.462,58	675.919,5	738.960,00	749.847,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129.267,57	143.232,48	158.493,63	171.000,00	183.902,26
17	Jasa lainnya	120.605,54	136.006,41	147.973,47	157.890,00	155.313,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.731.479,59	6.371.292,65	6.951.102,40	7.481.794,37	7.566.002,32

Sumber : BPS, PDRB Kota Sungai Penuh, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa PDRB Kota Sungai Penuh mulai Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp.5.731.479,59 juta pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp.7.566.002,32 juta pada Tahun 2020.

Jika dilihat dari struktur lapangan usaha di Kota Sungai Penuh sampai tahun 2020, dominasi sektor perekonomian Kota Sungai Penuh setiap tahunnya tidak bergeser dari sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (29.46 persen); informasi dan komunikasi (14.78 persen) serta konstruksi (10.73 persen) yang terlihat perannya setiap tahun terhadap pembentukan PDRB Kota Sungai Penuh selama lima tahun terakhir.

Tabel II.18
Distribusi Persentase Sektor PDRB (ADHB) Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2020

No	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,42	5,43	5,16	4,90	5,02
2	Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,85	0,81	0,75	0,77
3	Industri Pengolahan	0,64	0,65	0,63	0,61	0,61

No	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	0,32	0,30	0,29	0,31
6	Konstruksi	11,32	10,92	10,81	10,80	10,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,41	29,15	29,56	29,81	29,46
8	Transportasi dan Pergudangan	3,11	3,07	3,04	3,17	2,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,17	1,15	1,15	1,08
10	Informasi dan Komunikasi	13,83	14,36	14,31	14,23	14,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,80	4,91	4,75	4,63	4,81
12	Real Estate	2,93	2,90	2,88	2,89	2,85
13	Jasa Perusahaan	5,62	5,83	5,88	5,77	5,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,77	6,45	6,56	6,70	6,63
15	Jasa Pendidikan	9,39	9,58	9,72	9,88	9,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,26	2,25	2,28	2,29	2,43
17	Jasa lainnya	2,10	2,13	2,13	2,11	2,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, PDRB Kota Sungai Penuh, 2021

Tabel II.19
Pertumbuhan Sektor PDRB (ADHK 2010) Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2020

No	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,48	-2,76	3,78	0,42	1,98
2	Pertambangan dan Penggalian	5,34	7,38	2,05	0,65	-0,32
3	Industri Pengolahan	6,24	4,00	4,12	4,06	0,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,23	1,27	1,33	3,53	10,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,91	2,68	2,36	1,08	6,57
6	Konstruksi	4,20	4,64	2,70	5,00	-0,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,51	7,02	6,19	7,65	-3,05

No	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Transportasi dan Pergudangan	6,87	7,31	6,17	7,37	-5,38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,53	6,04	5,99	4,58	-5,43
10	Informasi dan Komunikasi	8,21	7,34	5,52	4,90	5,85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,40	8,9	1,02	2,35	5,29
12	Real Estate	5,79	5,8	4,89	2,90	-1,40
13	Jasa Perusahaan	8,43	8,59	6,24	5,54	-3,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,48	2,56	4,73	4,53	-1,55
15	Jasa Pendidikan	8,06	7,31	5,15	2,87	0,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,44	5,54	5,22	4,54	6,00
17	Jasa lainnya	5,71	6,60	4,23	5,40	-2,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,51	6,02	4,88	5,05	-0,14

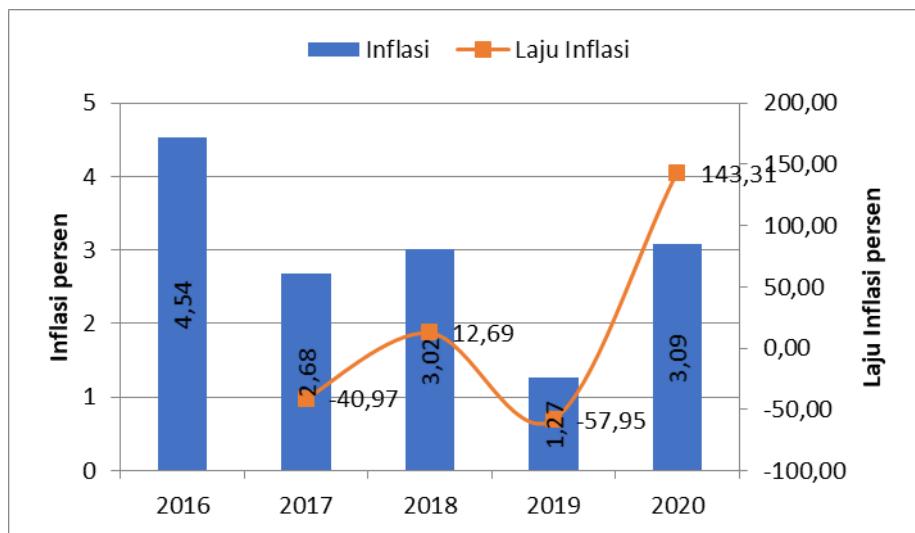
Sumber : BPS, PDRB Kota Sungai Penuh, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB Kota Sungai Penuh, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kontraksi sebesar -3,05 persen, sedangkan sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 5,85 persen, dan sektor konstruksi mengalami kontraksi sebesar -0,87 persen dalam perekonomian Kota Sungai Penuh pada tahun 2020.

2.2.1.3 Inflasi

Laju inflasi adalah faktor ekonomi lainnya yang dianalisis untuk melihat capaian kinerja fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Peranan pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi adalah untuk menjaga kestabilan harga dengan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga dipasaran. Sementara inflasi akibat banyaknya jumlah uang beredar, kebijakan suku bunga, dan kejadian spekulasi pada sektor industri keuangan, termasuk dalam kebijakan moneter yang merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk penanggulangannya.

Pada tingkat mikro, rumah tangga atau masyarakat misalnya dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Oleh karena itu, dari sisi peningkatan kesejahteraan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diikuti oleh pengendalian inflasi, agar peningkatan ekonomi menumbuhkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan dan kecenderungan inflasi di Kota Sungai Penuh ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jambi. 2021

**Gambar II.15
Laju Inflasi Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Jika inflasi semakin tinggi akan meningkat kesejahteraan masyarakat karena daya beli akan menurun, begitu juga sebaliknya. Tingkat inflasi Kota Sungai Penuh merujuk kepada inflasi Kota Jambi, inflasi di Kota Sungai Penuh cenderung berfluktuasi selama tahun 2016 hingga tahun 2020 . Inflasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 4,54 Persen dan terendah terjadi pada tahun 2019 (1,27 persen). pada tahun 2020 inflasi di Kota Sungai Penuh sebesar 3,09 persen dengan laju inflasi sebesar 143,31 persen dari tahun 2019.

Jika dilihat dari kelompok komoditas, inflasi yang terjadi di Kota Sungai Penuh bulan Desember 2020 yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,33 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,46 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa biaya komoditi ini cukup tinggi di Kota Sungai Penuh ini sehingga menyebabkan terbatasnya daya beli masyarakat untuk komponen ini.

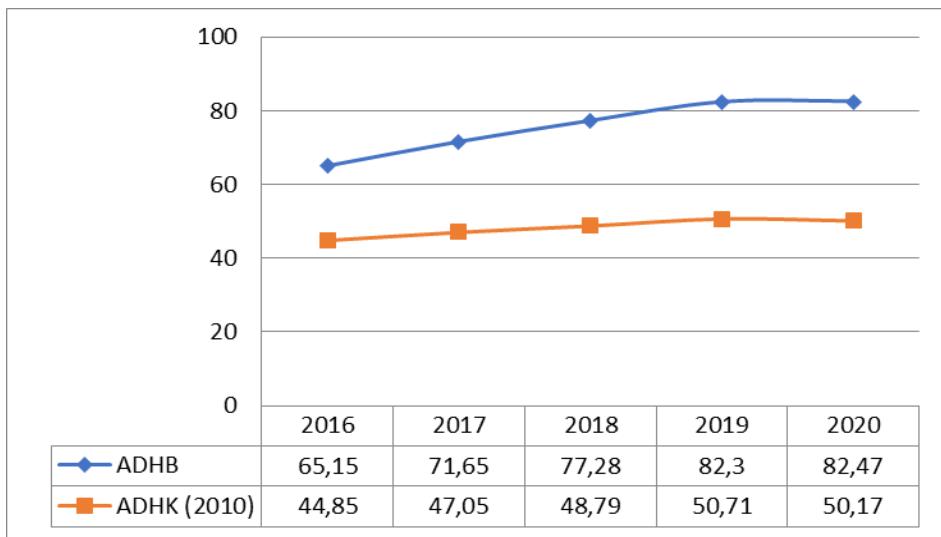
Tabel II.20
Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2020

Kelompok Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Umum	0,81	0,75	-0,65	-0,66	0,29	0,35	-0,05	0,03	0,13	0,77	0,57	0,72
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,63	0,14	-1,93	-2,03	0,51	1,60	-0,92	-1,14	0,42	2,59	2,07	2,33
Pakaian dan Alas Kaki	0,01	0,13	-0,18	-	-1,32	-0,07	-	0,02	-0,17	-	-0,01	0,02
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,03	0,19	0,10	0,28	0,07	0,01	-0,03	0,33	0,03	0,04	-0,11	-0,02
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,12	0,66	-0,18	-0,02	0,51	-0,11	0,16	0,79	0,21	0,03	0,08	0,04
Kesehatan	-	3,67	0,46	0,01	-0,06	-0,06	0,44	0,75	-	-0,01	0,14	0,01
Transportasi	0,03	2,72	-1,22	-1,26	2,19	-0,56	0,76	-0,29	0,01	-0,04	-0,12	0,46
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,24	-0,64	-0,04	0,04	-	-	0,18	3,20	-0,05	0,03	-0,09	-0,20
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,19	4,83	0,05	-0,21	-0,13	0,04	0,12	0,26	-	0,09	-0,01	-
Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-0,40	0,02	-	-	-	-
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	0,46	0,65	0,30	-	-	-	0,59	-	-	0,09	-	-
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,20	2,09	0,67	0,63	-0,98	-0,65	1,25	1,60	-	0,13	-0,08	-0,27

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

2.2.1.4 PDRB Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah, sedangkan pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sungai Penuh pada Tahun 2016 adalah Rp.65,15 juta meningkat menjadi Rp.82,47 juta,- pada tahun 2020. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sungai Penuh pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 44,85 juta meningkat menjadi Rp. 50,17 juta,- pada tahun 2020.



Sumber : BPS, PDRB Kota Sungai Penuh, 2021

**Gambar II.16
PDRB per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Meskipun nilai PDRB perkapita tidak sepenuhnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan yang merata, akan tetapi nilai ini dapat menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum di suatu wilayah. Adapun perkembangan PDRB perkapita dari penduduk kota Sungai penuh sepanjang periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II.21
PDRB Per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

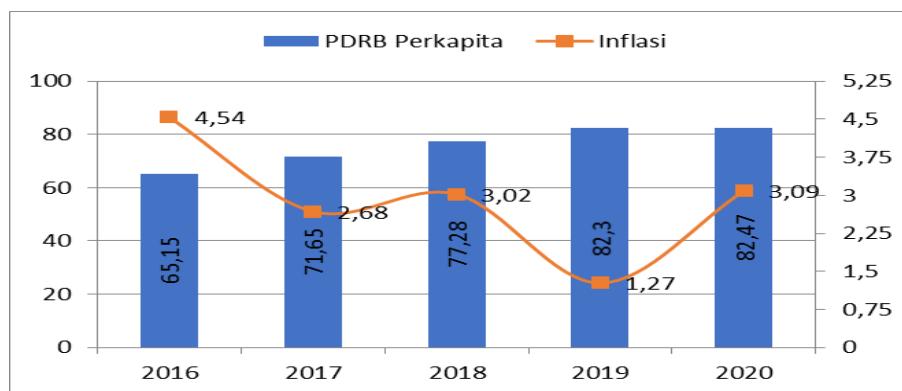
No	Sektor PDRB	PDRB (2010) ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Sungai Penuh (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,18	3,89	3,99	4,04	4,14
2	Pertambangan dan Penggalian	0,57	0,61	0,63	0,62	0,64
3	Industri Pengolahan	0,42	0,46	0,48	0,50	0,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,23	0,23	0,24	0,25
6	Konstruksi	7,37	7,82	8,36	8,89	8,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,51	20,89	22,85	24,53	24,29

No	Sektor PDRB	PDRB (2010) ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Sungai Penuh (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Transportasi dan Pergudangan	2,03	2,20	2,35	2,61	2,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,84	0,89	0,95	0,89
10	Informasi dan Komunikasi	9,01	10,29	11,06	11,71	12,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,13	3,52	3,67	3,81	3,97
12	Real Estate	1,91	2,08	2,22	2,38	2,35
13	Jasa Perusahaan	3,66	4,18	4,54	4,75	4,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,41	4,62	5,07	5,52	5,47
15	Jasa Pendidikan	6,12	6,87	7,51	8,13	8,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,47	1,61	1,76	1,88	2,00
17	Jasa lainnya	1,37	1,53	1,65	1,74	1,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		65,15	71,65	77,28	82,30	82,47

Sumber : BPS ,PDRB Kota Sungai Penuh, 2021

Perkembangan PDRB per kapita atau pendapatan per kapita dari tahun ke tahun menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Bila tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Sungai Penuh. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada Tahun 2019 PDRB per kapita Kota Sungai Penuh mencapai 82,30 juta rupiah dengan inflasi sebesar 1,27 persen, selanjutnya meningkat di Tahun 2020 menjadi sebesar 82,47 juta rupiah dengan inflasi sebesar 3,09 persen.



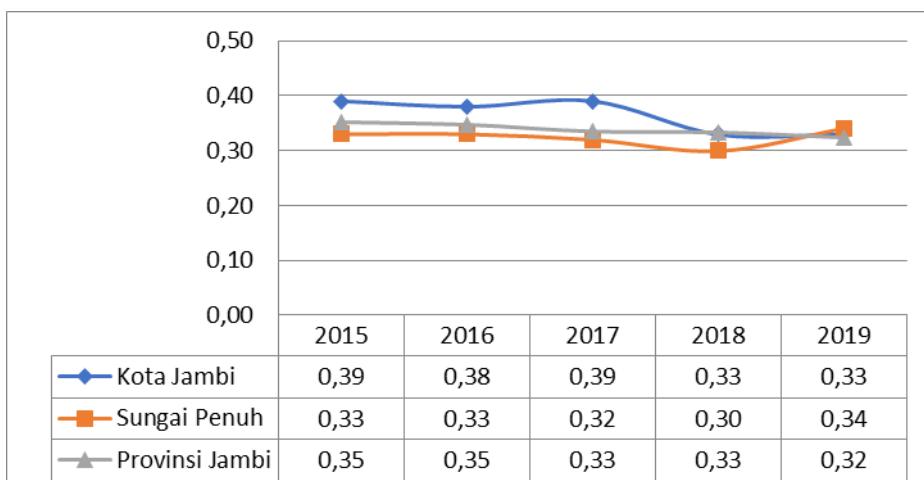
Sumber : BPS, Tahun 2016-2021

Gambar II.17
Inflasi dan PDRB PerKapita Kota Sungai Penuh 2016-2020

2.2.1.5 Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah karena berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Perkembangan Indeks Gini Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, Tahun 2017-2021

**Gambar II.18
Gini Rasio Kota Sungai Penuh, Kota Jambi dan Provinsi Jambi 2015-2019**

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum indek gini Kota Sungai Penuh berada dibawah 0,4 ($GR<0,4$), hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kota Sungai Penuh dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.

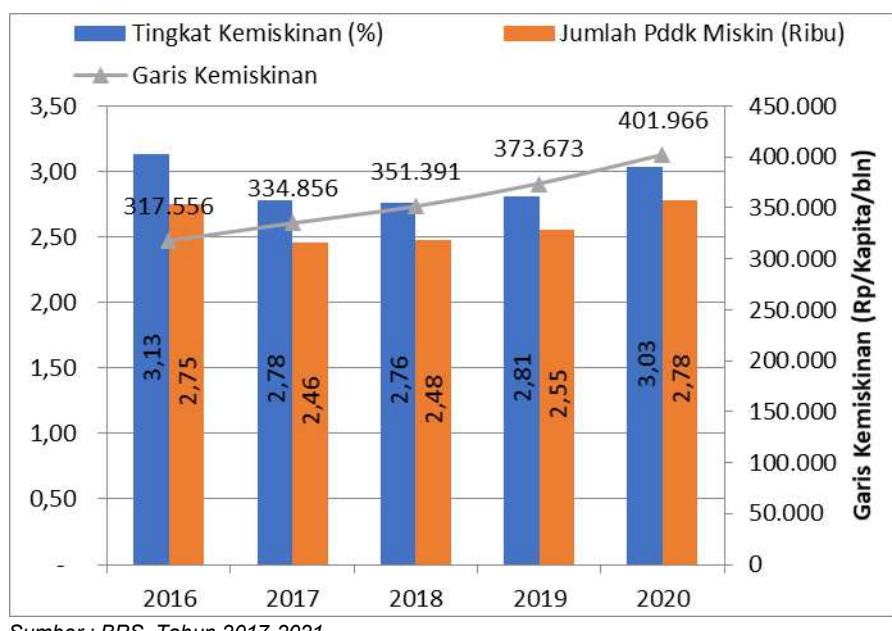
Nilai Gini rasio Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan pada tahun 2019, sehingga nilainya lebih tinggi dari nilai ketimpangan kota Jambi (0,33) dan Provinsi Jambi. Sepanjang tahun 2015-2019 secara rata-rata nilai ketimpangan Kota Sungai Penuh lebih rendah dibandingkan Kota Jambi dan Provinsi Jambi.

Peningkatan nilai ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran masyarakat.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, peningkatan ini merupakan hal yang biasa namun tetap harus diwaspada agar tidak berlanjut meningkatannya dimasa mendatang. Untuk itu tentunya perlu diperhatikan aspek pendapatan masyarakat kota agar lebih merata dengan meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta produktivitas masyarakat.

2.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.



Sumber : BPS, Tahun 2017-2021

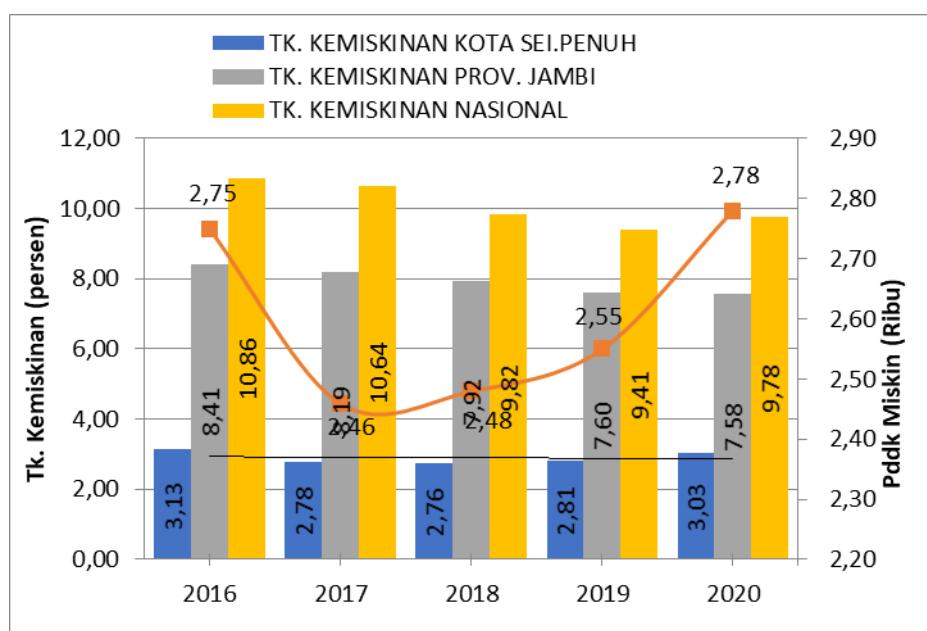
**Gambar II.19
Perkembangan Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

Perkembangan kemiskinan di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh pada tahun 2016 sebesar 3,13 persen

dengan jumlah penduduk miskin sebesar 2,75 ribu jiwa, mengalami penurunan dari tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar 2,78 persen dan 2,76 persen.

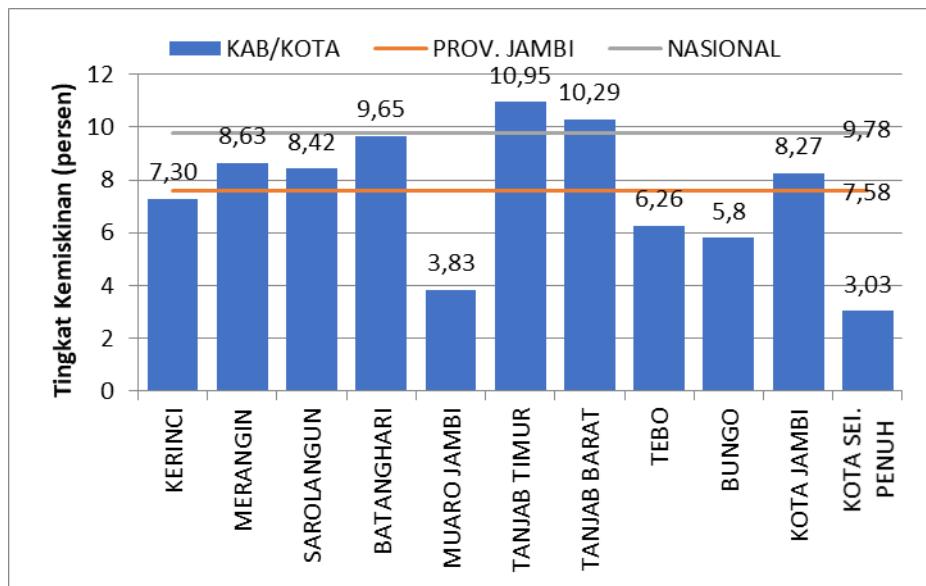
Namun pada tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi sebesar 2,81 persen (2,55 ribu jiwa) dan 3,03 persen (2,78 ribu jiwa). Selama periode 2016-2020 efektifitas tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh menunjukkan *trend* yang stagnan namun cenderung meningkat, berbeda dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional yang menunjukkan *trend* yang menurun selama periode 2016-2020.

Jika dibandingkan dengan kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi, tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, yaitu di urutan pertama terendah. hal ini seiring dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, Tahun 2017-2021

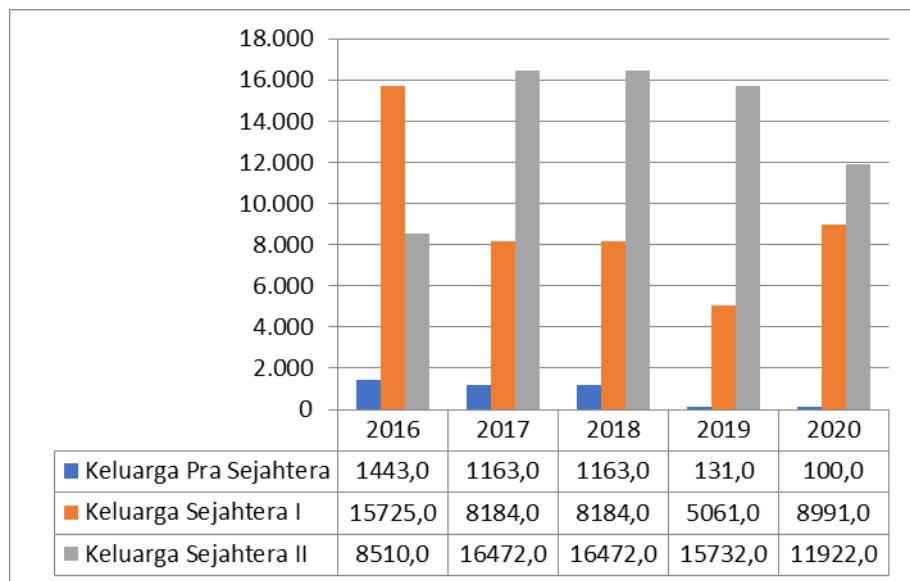
Gambar II.20
Perkembangan Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh, Prov Jambi, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Tahun 2021

Gambar II.21
Tingkat Kemiskinan (P0) Kab/Kota Se- Provinsi Jambi Tahun 2020

Perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



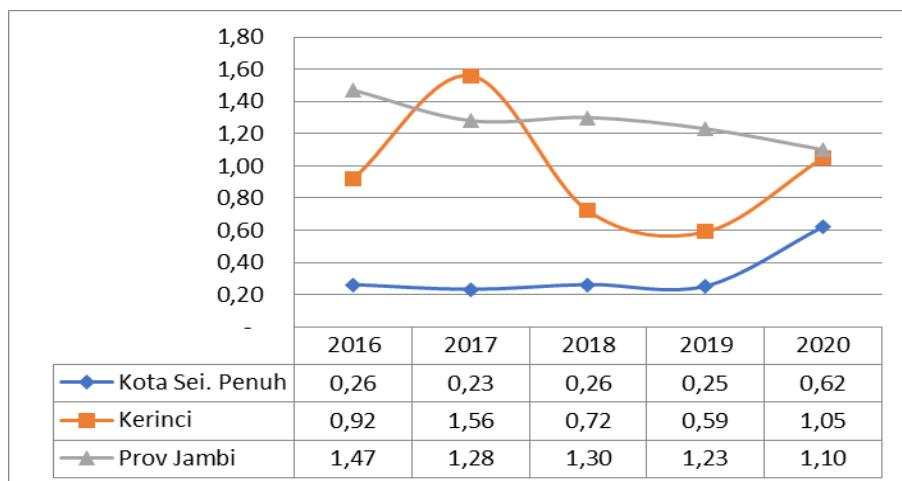
Sumber : BPS, Kota Sungai Penuh dalam Angka, 2017-2021

Gambar II.22
**Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, dan Sejahtera II
Kota Sungai Penuh, Tahun 2016-2020**

Perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, di Kota Sungai Penuh, tahun 2016-2020 cenderung mengalami fluktuasi, fluktuasi

untuk keluarga pra-sejahtera pada tahun 2016 sebesar 1.443 jiwa turun menjadi 100 jiwa pada tahun 2020, keluarga sejahtera I mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 15.725 jiwa menjadi sebesar 8.991 jiwa di tahun 2020. Sedangkan untuk keluarga sejahtera II terjadi kenaikan dari tahun 2016 sebesar 8.510 jiwa menjadi sebesar 11.992 jiwa di tahun 2020.

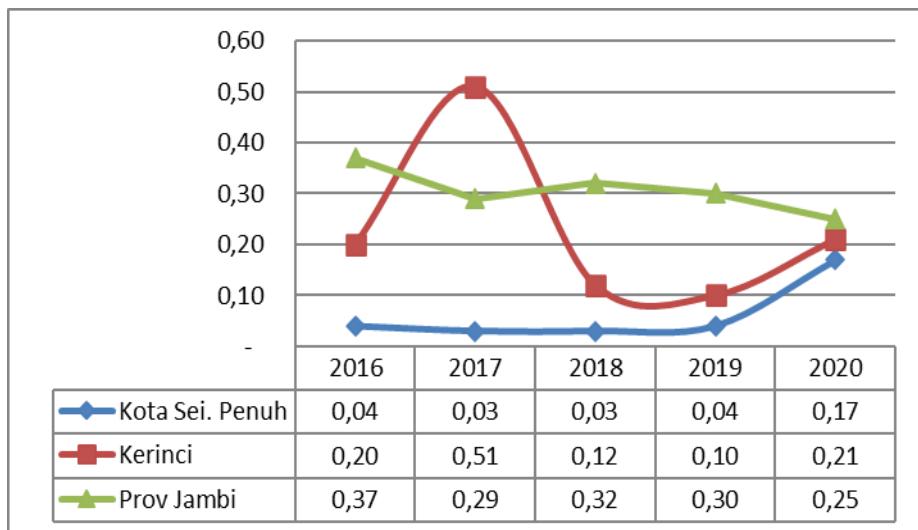
Indeks kedalaman kemiskinan, merupakan indeks yang mempresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Sungai Penuh tahun 2016 sebesar 0,26 persen. Terjadi penurunan di tahun 2017 dan 2019, namun di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,62 persen. Trend indeks kedalaman kemiskinan Kota Sungai Penuh memiliki trend yang sama dengan Kabupaten Kerinci, namun berbeda dengan Provinsi Jambi yang menunjukkan trend yang menurun. Perkembangan antar waktu indeks kedalaman kemiskinan periode 2016-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : BPS ,Kota Sungai Penuh dalam Angka, 2017-2021

Gambar II.23
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Indek Keparahan Kemiskinan, terlihat perubahan perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Sungai Penuh periode tahun 2016-2020, indeks keparahan kemiskinan Kota Sungai Penuh tahun 2016 sebesar 0,04 persen, mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar 0,03 persen. Namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi sebesar 0,17 persen. Trend indeks keparahan kemiskinan Kota Sungai Penuh memiliki trend yang sama dengan Kabupaten Kerinci, namun berbeda dengan Provinsi Jambi yang menunjukkan trend yang menurun sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, Kota Sungai Penuh dalam Angka, 2017-2021

**Gambar II.24
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan garis kemiskinan. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan serta keterpaduan antara pemerintah kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli pengentasan kemiskinan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

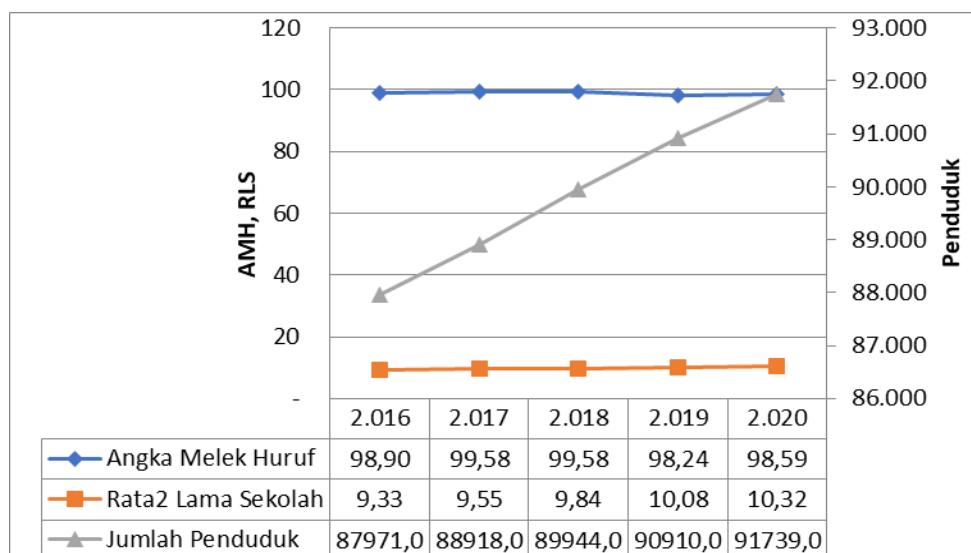
Aspek pembangunan masyarakat pada bidang sosial diukur dengan melihat indikator seperti Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Keadaan kesehatan gizi masyarakat, jumlah grup kesenian ada di daerah, sarana prasarana kesenian, jumlah klub olahraga, dan sarananya, serta masalah ketenagakerjaan.

2.2.2.1 Pendidikan

Pembangunan manusia merupakan suatu proses manusia agar mampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dsb).

Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Dalam pembangunan suatu bangsa maupun daerah, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia. Menurut Boserup (1984), pendidikan mampu membangun pola pikir seseorang menjadi lebih peka dan kritis dalam menanggapi suatu permasalahan, serta membuka pengetahuan seseorang yang memungkinkan ia untuk mengubah nasibnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu meningkatkan pembangunan pendidikan di Indonesia menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah adalah salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi sekolah secara berkelanjutan. Kebijakan pendidikan murah untuk semua dengan BOS dan Wajib Belajar 9 tahun wajib dilanjutkan dan ditingkatkan.

AMH menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca dan tulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.



Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2017-2021

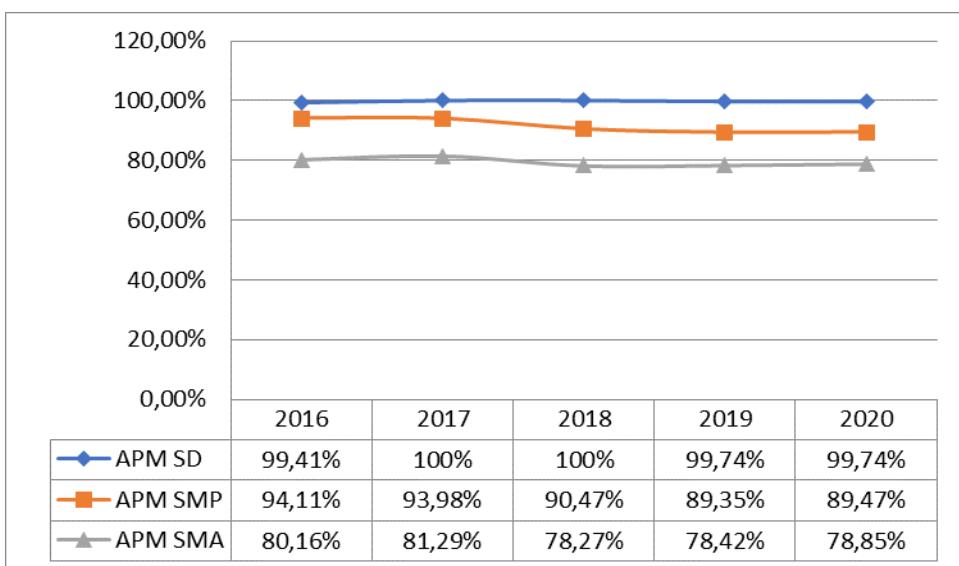
Gambar II.25
Persentase Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2021

Dari gambar di atas terlihat bahwa pada periode 2016-2020 AMH mengalami *trend* penurunan, sedangkan MYS menunjukkan trend yang meningkat, hal tersebut dikarenakan perubahan AMH atau MYS tersebut membutuhkan proses yang kompleks, tidak cukup dengan pembangunan gedung-gedung dan fasilitas sekolah saja, tetapi harus diiringi dengan penyediaan tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas, akses yang memadai, serta faktor budaya yang mengesampingkan pendidikan harus diperbaiki.

Kemudian dari sisi kewenangan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Kabupaten/Kota hanya sebatas pendidikan dasar yaitu Prasekolah, SD dan SLTP. Untuk pendidikan menengah yaitu SLTA menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dikti). Hal ini juga berimplikasi terhadap kurang signifikannya peran pemerintah kota dalam meningkatkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Tingkat Partisipasi Sekolah; Banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan partisipasi sekolah menurut kelompok umur tertentu yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni.

Angka Partisipasi Murni (APM), adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Perkembangan APM periode 2016-2020 di Kota Sungai Penuh menunjukkan angka yang fluktuatif. APM SD tahun 2016 sebesar 99,41 persen, SMP sebesar 94,11 persen dan SMA sebesar 80,16. Sampai tahun 2020, APM SD 99,74 persen meningkat jika dibandingkan tahun 2016, namun APM SMP dan SMA mengalami penurunan menjadi sebesar 89,47 persen dan 78,85 persen di tahun 2020.

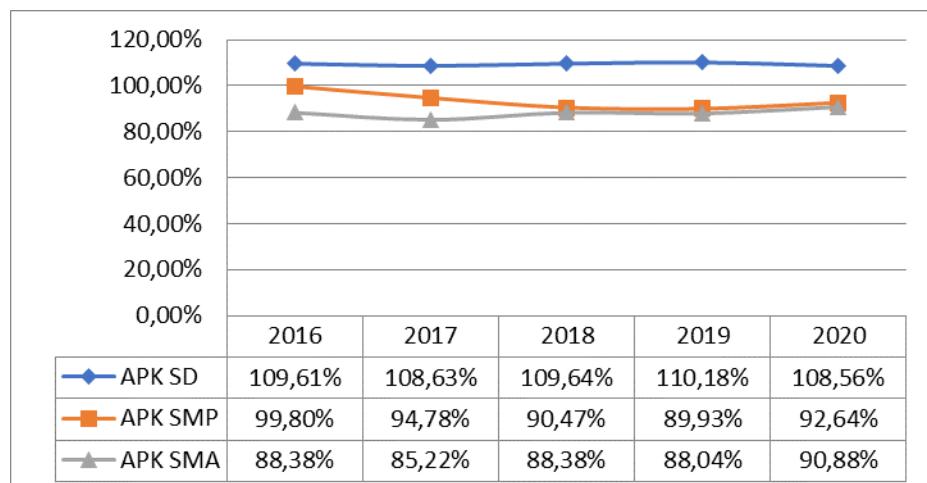


Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2017-2021

Gambar II.26
Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK juga mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK untuk kelompok umur SD tahun 2020 sebesar 108,56 persen, kelompok umur SMP sebesar 92,64 persen, dan kelompok umur SMA sebesar 90,88 persen. Secara rata-rata APK SD dari tahun 2016-2020 lebih besar dibandingkan APK SMP dan APK SMA.



Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka,2017- 2021

Gambar II.27
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2021

Kelengkapan fasilitas pendidikan di Kota Sungai Penuh ditunjukan dengan keberadaan sarana pendidikan yang ada, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah pendidikan tinggi setingkat universitas, distribusi masing-masing jenis pendidikan di setiap kecamatan pada umumnya cukup merata, sebaran fasilitas pendidikan yang dirinci menurut tingkat pendidikan dan kecamatan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.22
Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2020

No	Kecamatan	PAUD	TK	SD	SLTP	MIS/MTS/MAN/MAS	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
1	Tanah ampung	-	2	10	2	2	1	-
2	Kumun Debai	5	3	9	1	2	2	-
3	Sungai Penuh	-	5	9	4	3	2	2
4	Pondok Tinggi	1	8	10	1	2	1	1
5	Sungai Bungkal	2	5	11	2	1	1	2
6	Hamp.Rawang	7	7	11	1	3	1	-
7	Pesisir Bukit	7	3	8	2	2	2	1
8	Koto Baru	2	5	4	1	1	1	-
Jumlah		24	38	72	14	16	11	6

Sumber : BPS, Tahun 2021

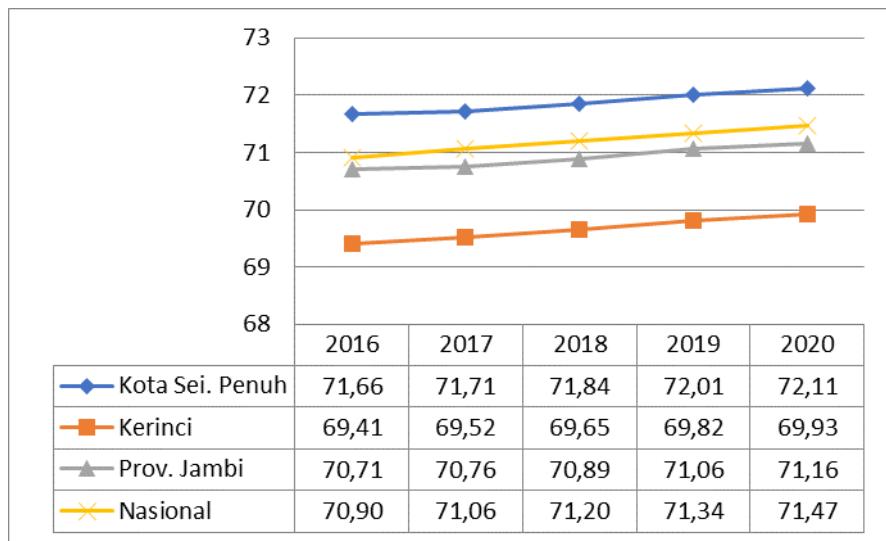
2.2.2.2 Kesehatan

Perkembangan kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Balita Gizi buruk serta angka kesakitan di Kota Sungai Penuh.

Angka Harapan Hidup (AHH), adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Perkiraan ini didasarkan pada *age specific death rate* (ASDR) pada tahun tertentu. Biasanya, AHH dibuat terpisah berdasarkan jenis kelamin, umur sekarang, dan suku/etnik. Ukuran yang umum digunakan adalah AHH saat lahir mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu.

Angka harapan hidup yang terus meningkat tersebut memperlihatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dinilai cukup berhasil. Karena angka harapan hidup merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah dari segi peningkatan kesehatan penduduk.

Perkembangan angka harapan hidup penduduk menunjukkan perkembangan berarti, dimana terlihat pada gambar di bawah ini, angka harapan hidup penduduk Kota Sungai Penuh dari Tahun 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan, yang semula pada Tahun 2016, angka harapan hidup sebesar 71,66. Pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 72,11, Dengan rata-rata per Tahun 71,87.



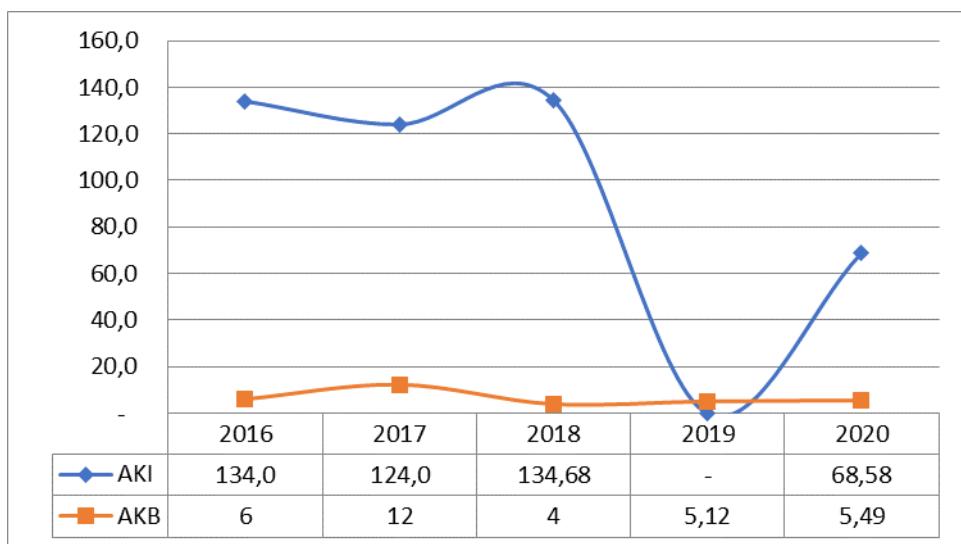
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2021

Gambar II.28
Angka Harapan Hidup di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021

Angka Kematian Bayi, Tahun 2016 di Kota Sungai Penuh angka kematian bayi adalah 6/1.000 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Pada Tahun 2017 terjadi kenaikan yang signifikan dimana angka kematian bayi pada Tahun 2017 tercatat 12/1.000 KH, dan pada Tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan yaitu tercatat 3/1.000 KH, dan di tahun 2020 meningkat menjadi 5,49/1.000 KH. AKB ini banyak dipengaruhi oleh tingkat kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dengan terus meningkatkan pengetahuan petugas dalam mengenali faktor resiko pada bayi baru lahir.

Mosley dan Chen (dalam SDKI 2007) menerangkan bahwa ada berbagai faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kematian bayi antara lain, yaitu karakteristik ibu seperti umur, paritas, ataupun selang kelahiran; pencemaran lingkungan; gizi; kecelakaan; dan penyakit.

Sedangkan untuk **Angka Kematian Ibu** atau Angka Kematian Maternal (MMR) adalah jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 100.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Kasus kematian ibu yang disebabkan karena komplikasi kehamilan dan kelahiran anak di Indonesia masih cukup tinggi. Beberapa penyebab kematian maternal dapat dicegah dengan adanya penanganan profesional dalam pemeliharaan antenatal dan kelahiran, serta peningkatan gizi ibu hamil.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2021

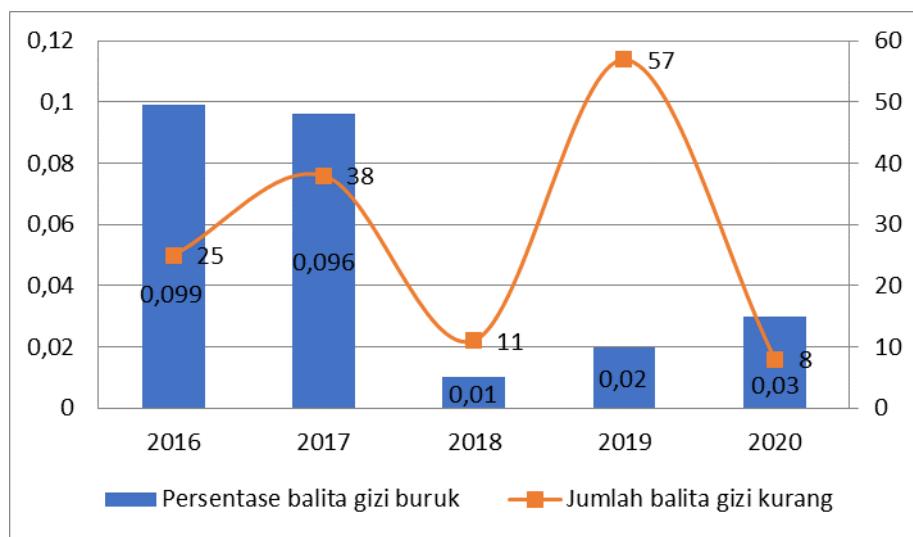
**Gambar II.29
Angka Kematian Bayi dan Ibu di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu di Kota Sungai Penuh dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 AKI sebesar 134 per 100.000 KH dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan yaitu tidak terdapat AKI, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 68,58 per 100.000 KH. Faktor yang mempengaruhi AKI diantaranya penjaringan deteksi Risti oleh petugas maupun masyarakat sudah berjalan dengan baik, meningkatkan pengetahuan petugas tentang deteksi risti, meningkatkan sosialisasi tentang faktor resiko tinggi pada ibu hamil melahirkan dan nifas dan meningkatkan kerja sama lintas sektor.

Balita gizi buruk; Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan (Permenkes 29/2019).

Tingkat kesehatan gizi sesuai dengan tingkat konsumsi yang menyebabkan tercapainya kesehatan tersebut. Tingkat kesehatan gizi terbaik ialah kesehatan gizi optimum (*eunutritional state*). Dalam kondisi ini jaringan jenuh oleh semua zat gizi tersebut. Tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya kerja dan efisiensi yang sebaik-baiknya. Tubuh juga mempunyai daya tahan yang setinggi-tingginya.

Perkembangan gizi buruk sejak tahun 2016-2020 di Kota Sungai Penuh menunjukkan penurunan. Dimana pada tahun 2016 jumlah gizi buruk sebanyak 6 jiwa/orang (0,099 persen), Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan yaitu menjadi 1 jiwa/orang (0,03 persen).



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, BPS 2021

**Gambar II.30
Perkembangan Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2020**

Balita gizi kurang; Gizi Kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, dan/atau lingkar lengan 11,5-12,5 cm pada anak usia 6-59 bulan(Permenkes 29/2019).

Perkembangan gizi kurang sejak tahun 2016-2020 di Kota Sungai Penuh menunjukkan penurunan. Dimana pada tahun 2016 jumlah gizi kurang sebanyak 25 jiwa/orang. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan yaitu menjadi 8 jiwa/orang.

Dalam upaya penanganan masalah gizi balita, diperlukan kontribusi sektor/bidang lain khususnya dalam pencegahan sebelum kasus gizi. Kasus gizi balita dapat teridentifikasi lebih dini melalui kegiatan penimbangan balita yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, namun kendala yang ditemui belum semua ibu yang mempunyai balita datang secara rutin setiap bulan. Hal ini bisa dilihat dari capaian penimbangan balita yang belum mencapai 100 persen. Oleh karena itu, revitalisasi posyandu menjadi penting untuk dilaksanakan sehingga fungsinya akan semakin meningkat. Selain itu pemenuhan dan peningkatan kemampuan kader juga perlu terus dilakukan sebagai pelaksana posyandu. Upaya lain dalam penanganan balita gizi buruk adalah pengembangan puskesmas dengan klinik gizi.

Hal ini juga terkait dengan status ekonomi masyarakat setempat yang tidak menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Penanggulangan gizi bukan saja tugas dinas kesehatan, namun sangat dibutuhkan juga peran serta masyarakat termasuk kepala keluarga untuk segera melaporkan jika bayi bermasalah dengan gizi. Peran posyandu diperlukan untuk memberikan pengetahuan mengenai sadar gizi untuk balita. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan

peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan AKB, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

Angka Kesakitan, Morbiditas (angka kesakitan) digunakan untuk menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat. Berikut adalah beberapa kejadian morbiditas yang terjadi di Kota Sungai Penuh.

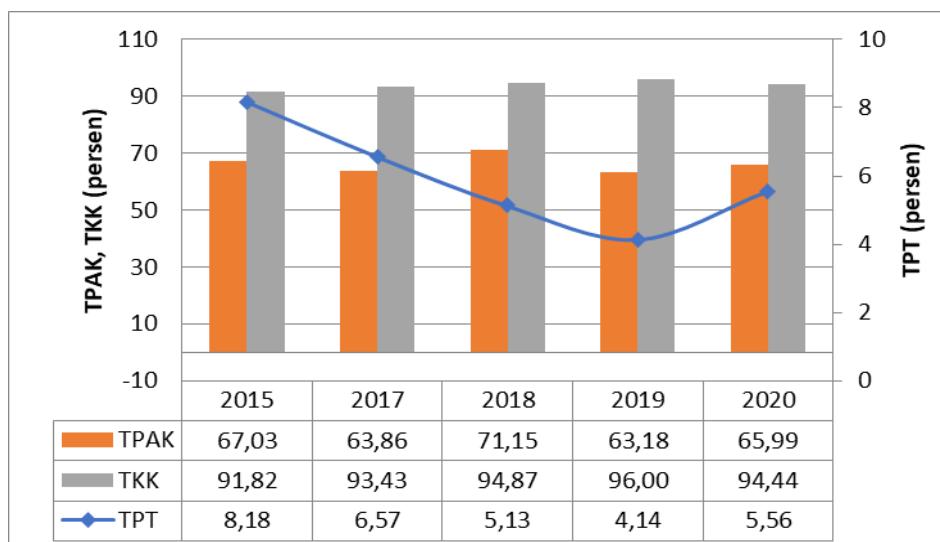
**Tabel II.23
10 Penyakit Terbesar di Kota Sungai Penuh Tahun 2020**

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus	Persentase (persen)
1	Influenza	3730	20,42
2	Gastritis	3295	18,04
3	Hipertensi	2364	12,94
4	Faringitis	1529	8,37
5	Gastroenteritis	1345	7,36
6	Dermatitis Kontakalergik (DKA)	1307	7,15
7	Arthiritis Reumatoид	1220	6,68
8	Bronkitis akut	1216	6,66
9	Polimialgia Reumatik	1154	6,32
10.	Tension Headache	1108	6,07
Jumlah		18268	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2021

2.2.2.3 Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)

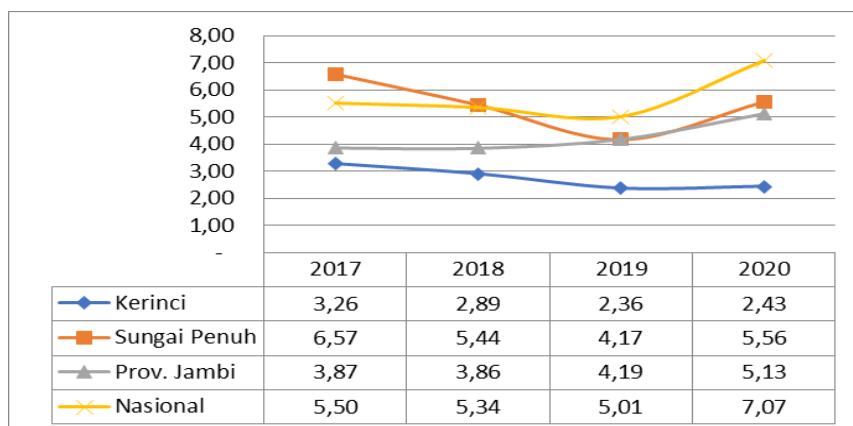
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat TPT, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPT di suatu wilayah mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Sungai Penuh indeks TPT dari Tahun 2015-2020 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Tahun 2015 sebesar 8,18 persen, pada tahun 2019 terjadi penurunan mencapai 4,17 persen, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 5,56 persen. Perkembangan penduduk berumur 15 Tahun keatas yang menganggur di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: BPS, Hasil Analisis, 2021

**Gambar II.31
Perkembangan Penduduk yang menganggur di Kota Sungai Penuh
Tahun 2010-2020**

Bila dibandingkan dengan Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi dan Nasional, TPT Kota Sungai Penuh berada di atas rata-rata tingkat pengangguran Provinsi Jambi dan Nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2016-2020, tingkat pengangguran wilayah cenderung meningkat, yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru belum mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Dalam penciptaan lapangan kerja ini masih perlu ditelaah dari sisi kualitas dan produktivitasnya. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.



Sumber: BPS, Hasil Analisis, 2021

**Gambar II.32
Perkembangan Penduduk yang menganggur di Kota Sungai Penuh, Jambi
dan Nasional Tahun 2016-2020**

2.2.3 Fokus Pemuda, Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.3.1 Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan diarahkan pada pengelolaan kekayaan budaya daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman sejarah, perlindungan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan nilai tradisional serta pelestariannya.

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada optimalisasi pelestarian budaya yang ada di daerah dengan mendorong penyelenggaraan penampilan/pergelaran seni dan budaya, penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan pelestarian peninggalan budaya serta benda-benda cagar budaya dengan perkembangan.

Perkembangan pelaksanaan urusan kebudayaan dari tahun 2015 sampai 2019 di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut ini :

Tabel II.24
Indikator Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tradisi Masyarakat Yang dilestarikan	Jumlah	2	3	8	1	1
Pakaian Adat Kota Sungai Penuh (Regulasi)	Regulasi	-	-	-	0	0
Cakupan Pembinaan LKAD	persen	-	-	100,00	100,00	100,00
Regulasi Tradisi Lokal dalam Acara Resmi Daerah	Regulasi	-	-	-	0	0
Regulasi Bentuk Gedung dan Bangunan	Regulasi	-	-	-	0	0
Jumlah Grup Kesenian	Rasio	4,45	3,57	5	5	5
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan budaya	Jumlah	-	-	1	1	1
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	1	1	1	2	0
Terbangunnya Gedung Pusat Informasi seni Dan Budaya (<i>Art Centre</i>)	persen	0	0	0	65,00	100,00
Cakupan Gelar Seni	persen	16,66	50,00	50,00	100,00	100,00
Persentase Keaktifan Kelompok seni Budaya	persen	-	70,27	69,23	100,00	100,00

Sumber : Dinas Budpar Kota Sungai Penuh, 2021

Tradisi masyarakat yang dilestarikan merupakan tradisi yang telah mendapat sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan juga yang telah mendapatkan sertifikat Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kesemuanya tidak terlepas dari pembinaan grup kesenian tradisi, penyelenggaraan *event* seni budaya, dan lomba seni budaya tradisi yang digalakkan semakin intens dalam tiga tahun terakhir.

Untuk mendukung pelestarian seni dan budaya, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh terus melaksanakan *event-event* pergelaran seni dan Budaya di Kota Sungai Penuh.

2.2.3.2 Pemuda dan Olah Raga

Sedangkan dari sisi Pemuda dan Olahraga, Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (usia 15-34 tahun) di Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 adalah sebanyak 30.766 jiwa atau 31,34 persen dari jumlah penduduk, untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti dari berbagai organisasi kepemudaan.

Tabel II.25
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Kota Sungai Penuh
Tahun 2016 – 2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda	103	103	103	105	105
2	Jumlah Klub Olah Raga per 10.000 penduduk	14,41	19,51	19,52	19,52	19,52
3	Jumlah Gedung Olah Raga per 10.000 penduduk	15,73	20,65	32,49	24,57	24,57

Sumber: Dinas Kepora Kota Sungai Penuh, 2021

Bidang keolahragaan di Kota Sungai Penuh secara organisasi ditangani oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan data dari KONI Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 terdapat 32 cabang olahraga yang dibina oleh KONI Kota Sungai Penuh. Diantara beberapa cabang olahraga yang telah dibina tersebut seperti cabang olahraga panjat tebing, dayung, karate, tarung derajat, sepak takraw, pencak silat telah mengukir prestasi.

Untuk sarana olahraga sepak bola yaitu lapangan sepak bola sudah ada di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Penuh 1 lapangan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Pesisir Bukit ada 2 lapangan sepak bola, di Kecamatan Hamparan Rawang 3 lapangan sepak bola, Kecamatan Kumun Debai 1 lapangan sepak bola, Kecamatan Tanah Kampung 4 lapangan sepak bola, Kecamatan Pondok Tinggi 1 lapangan olah raga, bola voli ada 42 lapangan yang tersebar diseluruh Kecamatan. Untuk sarana olahraga bulu tangkis sudah ada Hall Bulutangkis di semua kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh dan untuk sarana olahraga Tenis Meja, lapangan bola voli sudah ada di semua kecamatan serta lapangan bola voli juga sudah ada di sekolah-sekolah SMP, SMA/SMK dalam Kota Sungai Penuh sebanyak 22 Sekolah. Untuk sarana olahraga tenis lapangan sudah ada 1 lapangan yaitu di Koto Renah/Pesisir Bukit, olahraga takraw ada 27 lapangan. Lapangan Basket ada disekolah, Kodim, DEJ Hall yang totalnya sebanyak 15 lapangan basket. Di Kota Sungai Penuh juga berkembang olahraga beladiri pencak silat yang ada 4 perguruan pencak silat dengan menggunakan 5 fasilitas lapangan untuk latihan. Untuk renang di Kota Sungai Penuh ada 4 kolam renang. Olah raga futsal juga berkembang di Kota Sungai Penuh yang terlihat dengan bertambahnya 8 Lapangan Futsal.

Untuk menumbuhkan dan menciptakan budaya olahraga yang sehat, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai baik di lingkungan sekolah, pekerjaan maupun pemukiman sehingga memungkinkan segenap lapisan warga masyarakat melakukan olahraga dan berbagai aktivitas jasmani. Kondisi keolahragaan di Kota Sungai Penuh belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Belum terwujudnya prestasi olahraga dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi di beberapa cabang olah raga, antara lain terkendala oleh keterbatasan dukungan dana serta sarana dan prasarana pendukung.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Fungsi pemerintah sebagai dinamisator pembangunan, maka bagian aspek pelayanan umum yang dilaksanakan pemerintah Kota Sungai Penuh ditujukan untuk tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang merupakan salah satu faktor utama pembangunan. Oleh karena itu, dalam peningkatan kualitas SDM terutama difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terutama terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Berikut ini menjelaskan kondisi eksisting pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pegawai Kota Sungai Penuh pada Tahun 2020 berjumlah 2.700 orang yang terdiri dari Pegawai Struktural dan Pegawai Fungsional. Gambaran mengenai PNS Kota Sungai Penuh adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel II.26
Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2020

GOLONGAN		SKPD/KEC/ KEL/KPU	PUSKESMAS/ LABKESDA	SMP	SD	TK
IV	E	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0
	C	29	1	0	0	0
	B	139	3	76	90	17
	A	60	6	109	151	18
III	D	299	47	44	0	4
	C	332	31	53	49	5
	B	223	81	69	131	13
	A	193	65	34	89	3
II	D	79	12	2	11	1
	C	59	19	2	14	1
	B	17	0	2	11	0
	A	2	0	0	1	0
I	D	1	0	1	0	0
	C	0	0	0	0	0
	B	1	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0
JUMLAH		1434	265	392	547	62
TOTAL PEGAWAI		2700				

Sumber: BKPSDM Kota Sungai Penuh, 2021

2.3.1 Urusan Wajib Pemerintahan Pelayanan Dasar

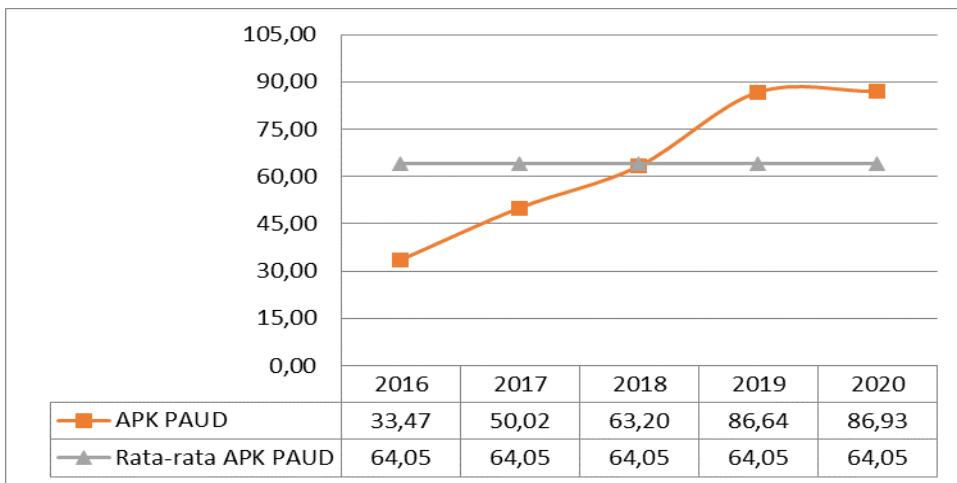
Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kota Sungai Penuh masih perlu ditingkatkan, sebagaimana kondisi eksisting sebagai berikut :

2.3.1.1 Pendidikan

1) Gambaran Pelayanan PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan anak sejak dini sejak usia sangat muda sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari.

Kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) salah satunya diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Capaian kinerja PAUD di sini termasuk pendidikan TK/RA. perkembangan APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD di Kota Sungai Penuh, seperti terlihat pada Gambar berikut :



Sumber : , Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2017-2021

**Gambar II.33
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021**

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kota Sungai Penuh periode 2016-2020 mengalami kecenderungan kenaikan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 64,05 persen. Dimana Pada Tahun 2016 capaian APK PAUD sebesar 33,47 persen dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 86,93 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan yang serius terhadap kinerja lembaga PAUD dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD.

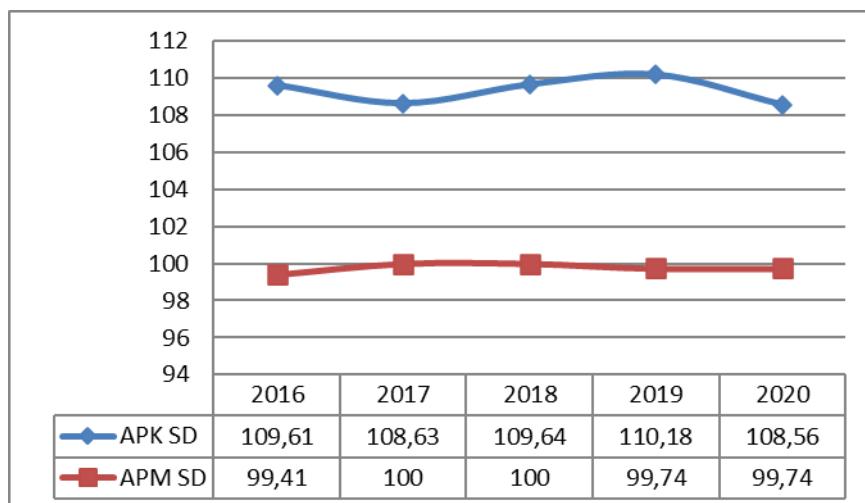
2) Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pendidikan dasar 9 tahun, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sejak tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) UU No. 20 Tahun 2003) yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Melalui pendidikan dasar 9 tahun diharapkan di masa mendatang, pendidikan minimal penduduk Indonesia adalah lulus SMP/MTs. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan 9 tahun diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan, Angka Putus Sekolah, jumlah guru, jumlah murid dan jumlah sekolah:

a) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian APK dan APM pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama kurun waktu 2016-2020 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. APK SD Sederajat pada Tahun 2016 sebesar 109,61 persen dan sampai Tahun 2020 menjadi 108,56persen. Demikian juga dengan APM SD sederajat juga mengalami peningkatan selama kurun waktu tersebut. Dari sebesar 99,41 persen di tahun 2016 menjadi sebesar 99,74 persen di tahun 2020.

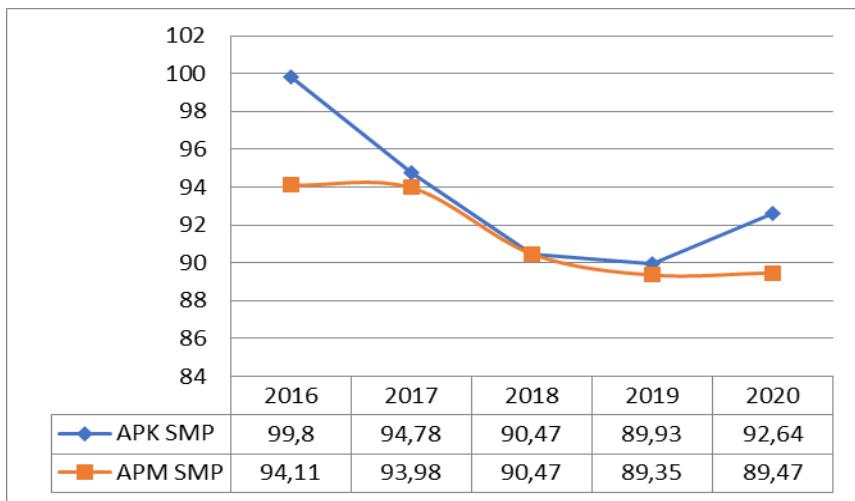
Tingginya Capaian APK di Kota Sungai Penuh melebihi 100 persen ini diasumsikan karena terjadinya perpindahan penduduk ke Kota Sungai Penuh dengan membawa keluarganya, kemudian penyebab lain adalah terdapat anak diluar usia 7-12 Tahun yang bersekolah. Sama halnya dengan capaian APM yang cenderung mengalami kenaikan dari Tahun 2016-2020, dan tercatat pada Tahun 2020 tercatat 99,74 persen.



Sumber : , Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2017-2021

Gambar II.34
APK dan APM SD/MI Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Capaian APK SMP sederajat selama kurun waktu yang sama menunjukkan kecenderungan menurun. Begitu pula dengan capaian APM SMP sederajat, pada tahun 2016 APK SMP sebesar 99,8 persen, turun di tahun 2019 menjadi 89,93 persen. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 92,64 persen. Hal ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat SMP sederajat di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya. Untuk APM SMP terjadi peningkatan dari Tahun 2016 sebesar 94,11 persen, menurun di Tahun 2019 menjadi 89,35 persen. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 89,47 persen.



Sumber :, Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2017-2021

**Gambar II.35
APK dan APM SMP/MTS Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021**

b) Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh menunjukkan kondisi yang baik dimana tidak ada angka putus sekolah, target Nasional Angka Putus Sekolah SD sederajat pada Tahun 2015 adalah 0 persen, ini menunjukkan tidak ada siswa yang putus sekolah di Kota Sungai Penuh. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, perkembangan Angka Putus Sekolah SMP Tahun 2016 sebesar 0,91 persen dan Angka putus sekolah di SMP pada Tahun 2020 sebesar 0 persen. Secara rinci perkembangan Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh terlihat pada Tabel berikut:

**Tabel II.27
Capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP sederajat
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021**

No	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat	0	0	0,98	0	0
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat	0,91	0	1,08	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2021.

c) Angka Kelulusan

Keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur melalui indikator angka kelulusan. Angka kelulusan membandingkan antara jumlah peserta yang lulus ujian dengan jumlah peserta ujian. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD sederajat selama tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, angka kelulusannya juga menunjukkan angka yang baik. Capaian Angka Kelulusan SD sederajat dan SMP sederajat termasuk dalam kategori sedang. Perkembangan Angka Kelulusan pendidikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.28
Capaian Angka Kelulusan SD Sederajat dan SMP sederajat
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan SD Sederajat (persen)	99,94	98,83	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP Sederajat (persen)	98,89	99,52	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2021

d) Angka Melanjutkan (AM)

Indikator Angka Melanjutkan merupakan indikator strategis untuk mengukur apakah semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat dan lulusan SMP sederajat melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM). Diharapkan semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat, dan semua lulusan SMP sederajat melanjutkan ke SMA. Capaian AM ke SMP sederajat dan ke SMA terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.29
Capaian Angka Melanjutkan SD Sederajat dan SMP sederajat
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat (persen)	82,84	82,92	83,12	83,21	83,40
2	Angka Melanjutkan Ke Sekolah menengah (SMA/SMK) (persen)	80,55	80,92	81,12	81,40	81,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka melanjutkan ke SMP Sederajat dan ke ke SMA/SMK sederajat menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Tahun 2020 angka melanjutkan ke SMP Sederajat

dan ke SMA/SMK sebesar 83,40 persen dan 81,50 persen, namun belum mencapai 100 persen, artinya terdapat siswa yang tidak melanjutkan ke SMP Sederajat dan ke SMA/SMK/sederajat.

e) Rasio Guru /Murid

Standar Nasional rasio jumlah guru dan murid adalah 1:20 artinya untuk setiap 20 murid terdapat satu orang guru yang akan mengajar mereka, itulah kondisi ideal yang diharapkan. Sejak Tahun 2016 rasio guru murid jenjang SD telah berada dibawah rasio 1:20. Sampai tahun 2020 Rasio guru/murid SD dan SMP sebesar 1:10 dan 1:7.

Tabel II.30
Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio guru/murid SD	1 : 8	1 : 9	1:13	1 : 10	1 : 10
2	Rasio guru/murid SMP	1 : 9	1 : 7	1:9	1 : 7	1 : 7

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2021

Kondisi pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh, Pada Tahun 2020 jumlah TK dan SD di Kota Sungai Penuh sebanyak 38 unit dan 72 unit, terdiri 32 unit TK negeri dan 6 unit TK swasta, 67 unit negeri dan 5 unit swasta sedangkan jumlah SMP 14 unit terdiri dari 13 negeri dan 1 swasta sedangkan jumlah siswa SD 8.866 siswa dan SMP 4.219 siswa.

3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru memenuhi kualifikasi D4/S1 selama kurun waktu Tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2020 Persentase guru SD yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 87,94 persen, Guru SMP yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 93,87 persen. Rincian perkembangan guru sesuai kualifikasi D4/S1 terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.31
Persentase Pendidik dengan kualifikasi D4/S1 Jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

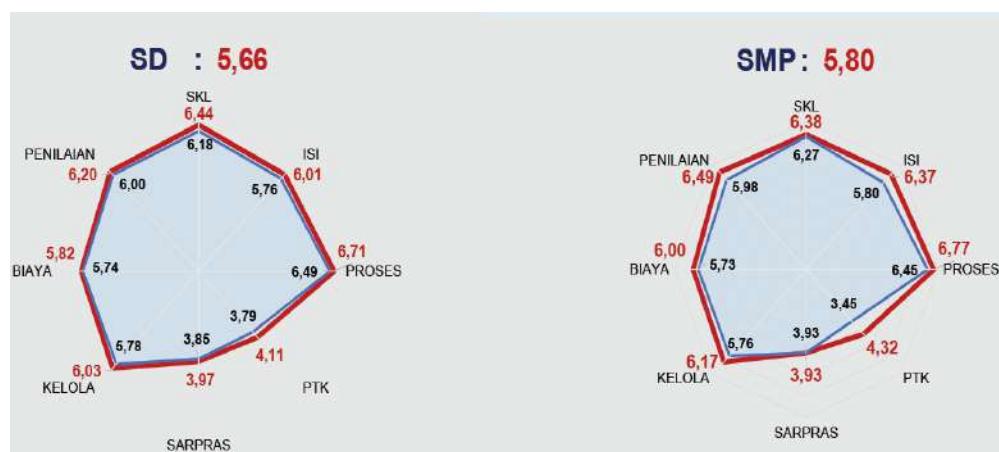
No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	81,20	82,65	83,64	87,90	87,94
2	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,10	93,70	93,80	93,55	93,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa secara keseluruhan kualifikasi guru di Kota Sungai Penuh cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan.

4) Mutu Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat beberapa item yang menjadi standar sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Beberapa standar itu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK). Kemudian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan.



Sumber: npd.kemdikbud.go.id

**Gambar II.36
Skor Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dalam Neraca Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2018**

Jika melihat capaian Skor Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di atas dapat diketahui bahwa pada jenjang SD permasalahan ada pada item yang memiliki nilai kecil yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan skor 4,11 dan item sarana dan prasarana dengan skor 3,97. Sementara itu pada jenjang SMP menunjukkan pola serupa, yakni item yang rendah meliputi standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan skor 4,32 dan item sarana dan prasarana dengan skor 3,93.

2.3.1.2 Kesehatan

Berdasarkan amanat Undang-undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.

1) Cakupan Pelayanan Kesehatan

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat. Hingga tahun 2020 cakupan pelayanan kesahatan di Kota Sungai Penuh sudah mencapai 100 persen.

Tabel II.32
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2018-2020

No	Indikator (SPM)	Cakupan (persen)		
		2018	2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Belita	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	94,5	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	88	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	92	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	88	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2021

2) Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Sungai Penuh adalah Tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular di Kota Sungai Penuh selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.33
Kondisi Penyakit Menular di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	%	36,99	34,67	21,42	38,5	68,67
Angka Kesembuhan TB Paru (CR)	%	76,00	90,00	91,49	100	100
Persentase angka kasus HIV	%	>0,01	<0,04	<0,04	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2021

3) Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan balita di Kota Sungai Penuh hingga tahun 2020 sudah mencapai 100 persen, namun persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di tahun 2020 sebesar 98,80 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai sebesar 100 persen. Pelayanan kesehatan balita dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.34
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	88,3	91,4	100,00	96,55	100
Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	96	98,16	98,16	100	98,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2021

4) Jumlah Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) per 1 September 2021 berjumlah sebesar 64.071 jiwa atau sebesar 65,26 persen dari total jumlah penduduk Kota Sungai Penuh, dengan rincian APBN sebesar 22.528 jiwa, APBD Provinsi sebesar 3.948 jiwa dan APBD Kota Sungai Penuh sebesar 37.595 jiwa.

5) Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) capaian di tahun 2020 baru mencapai 28,99 persen, angka ini menurun jika dibandingkan capaian di tahun 2019 yang mencapai 46,38 persen. Hingga tahun 2020 penduduk yang menggunakan jamban

sehat baru mencapai 86 persen, rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) mencapai sebesar 78,17 persen dan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 100 persen.

**Tabel II.35
Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	13,04	14,49	15,94	46,38	28,99
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	82,38	84,97	85,70	86,01	86,00
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	65,43	72,30	75,39	80,43	78,17
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	86,00	98,90	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2021

6) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Ketersediaan fasilitas pelayanan Kesehatan di Kota Sungai Penuh meliputi Rumah Sakit Umum M.H.A Thalib, dimana pada tahun 2020 telah dilakukan serah terima aset dari Kabupaten Kerinci. Selanjutnya RS H. Bakri milik Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Rumah Sakit Pembantu DKT 02.09.04 termasuk 11 (sebelas) puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Tabel II.36
Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kota Sungai Penuh Tahun 2020**

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu	Poskesdes
1	Sei. Penuh	1	2	-	-	6	-

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu	Poskesdes
2	Hamp. Rawang	-	2	-	-	13	-
3	Kumun Debai	-	1	1	2	11	2
4	T. Kampung	-	1	-	-	13	4
5	Koto Baru	-	1	-	-	6	-
6	Pesisir Bukit	1	2	1	-	9	-
7	Sei. Bungkal	1	1	-	-	9	1
8	Pondok Tinggi	-	1	-	-	12	-
Jumlah		3	11	2	2	79	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2021

7) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Sungai Penuh, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Tenaga kesehatan dibutuhkan sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum M.H.A Thalib Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.37
Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Kota Sungai Penuh Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Apoteker	Gizi	Ahli Lab. Medik
1	Sungai Penuh	Sugai Penuh	0	2	1	14	25	3	2	1
		Desa Gedang	0	4	1	17	18	1	1	1
2	Hamp Rawang	Rawang	0	3	1	17	34	1	2	1
		Tanjung	0	2	0	13	26	0	2	0
3	Kumun Debai	Kumun	0	2	0	21	22	0	2	0
4	T. Kampung	T.Kampung	0	3	2	24	26	2	2	1
5	Koto Baru	Koto Baru	0	4	1	18	37	2	1	2

No	Kecamatan	Puskesmas	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Apoteker	Gizi	Ahli Lab. Medik
6	Pesisir Bukit	Koto Lolo	0	3	1	13	29	0	1	1
		Sungai Liuk	0	2	0	9	21	1	1	0
7	Sei. Bungkal	Sei. Bungkal	0	2	0	12	21	0	1	0
8	Pondok Tinggi	Pondok Tinggi	0	2	0	29	23	0	2	1
Jumlah			0	29	7	187	282	10	17	8
Total							540			

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2021

Tabel II.38
Ketersediaan Tenaga Kesehatan di RSU M.H.A Thalib
Kota Sungai Penuh Tahun 2020

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Spesialis	19
2	Dokter Umum	13
3	Dokter Gigi	8
4	Bidan (D III)	9
5	Perawat/ Ners	79
6	Apoteker	16
7	Gizi	9
8	Ahli Lab. Medik	4
9	Lainnya	135
Total		292

Sumber: BPS, Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan seperti sumber daya air, jalan, air minum dan sanitasi lingkungan (air limbah, drainase dan persampahan) yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

1) Jalan Dan Jembatan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan

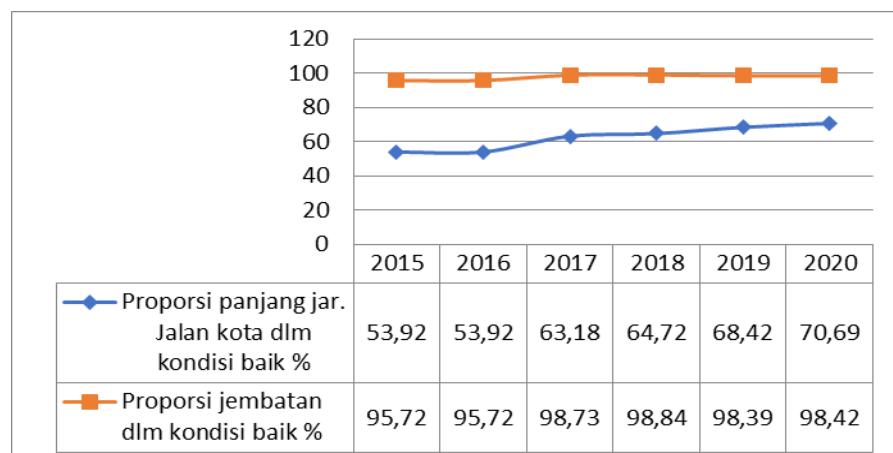
keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Ketersediaan prasarana jalan raya dan jembatan yang menghubungkan Kota Sungai Penuh dengan wilayah diluarinya, tersedia jaringan jalan Arteri Primer (jalan Provinsi) sebagai berikut:

- Ruas Sungai Penuh - arah Bangko
- Ruas Sungai Penuh - batas Provinsi Sumatera Barat (Tapan)
- Ruas Sungai penuh - arah Lempur
- Ruas Sungai Penuh - batas Provinsi arah Padang, melalui Muara Labuh

Pengembangan infrastruktur harus menyeluruh, terintegrasi karena saling terkait. Jika jembatan dalam kondisi tidak baik, maka sebaik apapun fasilitas jalan yang ada fungsinya akan menurun. Begitu sebaliknya jika jembatan dalam kondisi baik maka fungsi jalan akan bisa maksimal pengguna akan memilih jalur lain yang mana akan terjadi *overload* yang akan mengindikasikan tidak meratanya pembangunan infrastruktur, oleh sebab itu banyak jembatan yang rusak dikarenakan lambatnya penanganan dan perlu penanganan.

Jembatan merupakan sarana transportasi yang berfungsi untuk melewatkannya lalu lintas kendaraan, agar lalu lintas tersebut tidak terputus atau bisa mengurangi terjadinya kemacetan dan memiliki peranan penting dalam mensukseskan program pembangunan ekonomi. Dengan demikian jembatan harus selalu dalam keadaan baik dan terpelihara sehingga bisa berfungsi sebagai mana mestinya.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh. 2021

**Gambar II.37
Proporsi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2020**

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2020 sebesar 70,69 persen.

Sedangkan persentase jembatan permanen semuanya dalam kondisi baik dalam kondisi baik sampai dengan Tahun 2020 sebesar 98,42 persen.

Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2020 sepanjang 143,370 km dari total panjang jaringan jalan 202,81 km. Adanya pengurangan panjang jalan disebabkan oleh pengalihan kewenangannya sebagian jalan kepada Pemerintah Provinsi/Pusat. Berdasarkan kondisi panjang jalan di Kota Sungai Penuh tahun 2016-2020, terlihat bahwa kondisi jalan Kota Sungai Penuh semakin membaik yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.39
Kondisi Jalan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Tahun	Baik (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Total (Km)
2016	115,182	37,911	60,516	213,609
2017	142,506	29,934	53,107	225,547
2018	130,390	40,365	30,716	201,471
2019	139,873	35,358	29,206	204,437
2020	143,370	33,723	25,719	202,812

Sumber: Dinas PUPR Kota Sungai Penuh. 2021

Dari total panjang jalan di Kota Sungai Penuh yaitu sepanjang ± 202,812 km, pada tahun 2020 kondisi jalan dengan permukaan tanah adalah 35,93 km dan kondisi jalan dengan permukaan kerikil adalah 35,47 km, sedangkan kondisi jalan dengan permukaan aspal sebesar 124,68 km.

Tabel II.40
Kondisi Jalan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Tahun	Aspal (km)	Kerikil (km)	Tanah (km)	Tidak Dirinci (km)	Total (km)
2016	123,613	17,239	71,458	1,300	213,610
2017	121,187	19,039	81,945	3,376	225,547
2018	123,294	20,952	76,975	4,326	225,547
2019	125,446	34,913	39,419	4,659	204,437
2020	124,687	35,478	35,932	6,715	202,812

Sumber: Dinas PUPR Kota Sungai Penuh. 2021

2) Sumber Daya Air

Kota Sungai Penuh memiliki banyak mata air dengan debit yang beranekaragam. Mata air tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan Pesisir Bukit, Kumun Debai, dan Kecamatan Sungai Bungkal. Mengingat mata

air dan bangunan irigasi merupakan sarana vital dalam kegiatan pertanian, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan prioritas.

Jaringan irigasi di Kota Sungai Penuh tersebar di setiap kecamatan, luas layanan irigasi Kota Sungai Penuh mencapai 4.348 ha. Daerah irigasi di setiap kecamatan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.41
Daerah Irigasi dalam Kecamatan Kota Sungai Penuh

NO.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Kecamatan	Luas Areal (Ha)
1	Batu Lumut	Kec. Pondok Tinggi	112
2	Dusun Baru Debai	Kec. Kumun Debai	51
3	Jembatan Serong	Kec. Pondok Tinggi	245
4	Renah Kayu Embun	Kec. Kumun Debai	180
5	Sei. Bungkal	Kec. S. Bungkal - Kec. P.Bukit	230
6	Sei. Dadap		101
7	Air Baru	Kec. Tanah Kampung	30
8	Air Mati Pendung Hiang	Kec. Tanah Kampung	60
9	Air Sesat	Kec. Hamparan Rawang	18
10	Air Teluk	Kec. Kumun Debai	25
11	Air Telun Bungsu		65
12	Bandar Baru	Kec. Tanah Kampung	30
13	Bandar Gedang		40
14	Bandar Panjang P.Tinggi	Kec. Pondok Tinggi	90
15	Bandar Tuan Luak (Rawang)	Kec. Hamparan Rawang	25
16	Desa Gedang	Kec. Sungai Penuh	185
17	Dusun Baru	Kec. Sungai Bungkal	65
18	Dusun Baru Debai	Kec. Kumun Debai	20
19	Jembatan I Talang Lindung	Kec. Sungai Bungkal	119
20	Koto Baru	Kec. Koto Baru	85
21	Koto Bento	Kec. Pesisir Bukit	80
22	Koto Beringin	Kec. Hamparan Rawang	85
23	Koto Dua	Kec. Pesisir Bukit	65
24	Koto Dumo	Kec. Tanah Kampung	75
25	Koto Keras	Kec. Pesisir Bukit	35
26	Koto Lebu	Kec. Pondok Tinggi	75
27	Koto Lolo	Kec. Pesisir Bukit	50
28	Koto Padang	Kec. Tanah Kampung	51
29	Koto Panap	Kec. Tanah Kampung	60
30	Koto Pandan	Kec. Sungai Bungkal	100
31	Koto Pudung	Kec. Tanah Kampung	65
32	Koto Renah	Kec. Pesisir Bukit	15
33	Koto Teluh	Kec. Kumun Debai	85

NO.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Kecamatan	Luas Areal (Ha)
34	Koto Teluk	Kec. Kumun Debai	20
35	Koto Teluk	Kec. Kumun Debai	30
36	Koto Tengah	Kec. Pesisir Bukit	50
37	Koto Tuo	Kec. Tanah Kampung	45
38	Kumun Hilir	Kec. Kumun Debai	30
39	Lawang Agung	Kec. Pondok Tinggi	20
40	Lubuk Mendung		100
41	Muara jaya I	Kec. Kumun Debai	70
42	Muara jaya II	Kec. Kumun Debai	80
43	Muara jaya III	Kec. Kumun Debai	75
44	Paling Serumpun	Kec. Hamparan Rawang	40
45	Pematang Tampung		40
46	Rawang	Kec. Hamparan Rawang	40
47	Rio Jayo	Kec. Sungai Penuh	25
48	Sandaran Galeh	Kec. Kumun Debai	60
49	Sei. Ampuh	Kec. Pondok Tinggi	25
50	Sei. Bangko	Kec. Pondok Tinggi	80
51	Sei. Jernih	Kec. Pondok Tinggi	60
52	Sei. Liuk	Kec. Pesisir Bukit	40
53	Sei. Nua	Kec. Pondok Tinggi	50
54	Sei. Nua Depan SMAN II	Kec. Pondok Tinggi	80
55	Sei. Sirih		30
56	Sei. Talang Lindung	Kec. Sungai Bungkal	19
57	Sei. Ulu Air	Kec. Kumun Debai	51
58	Simpang Debai	Kec. Kumun Debai	51
59	Simpang III	Kec. Hamparan Rawang	60
60	Sipanjang		95
61	Sipanjang I		70
62	Sipanjang II		80
63	Sipanjang III		75
64	Sumur Anyir	Kec. S.Penuh - Kec. S.Bungkal	70
65	Taruko	Kec. Sungai Penuh	35
66	Ulu Air	Kec. Kumun Debai	35
	TOTAL		4.348

Sumber : Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, 2021

Kondisi jaringan irigasi Kota Sungai Penuh pada tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 52,21 persen meningkat menjadi 64,13 persen di tahun 2020. Kondisi jaringan irigasi Kota Sungai Penuh pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.42
Kondisi Jaringan Irigasi di Kota Sungai Penuh 2016-2020

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi (M)								
	Baik	persen	Rusak Ringan	persen	Rusak Sedang	persen	Rusak Berat	persen	Total
2016	33.213,00	52,21	2.120,00	3,33	4.430,00	6,96	23.846,00	37,49	63.609,00
2017	35.699,00	55,86	2.000,00	3,13	3.810,00	5,96	22.400,00	35,05	63.909,00
2018	39.043,00	58,32	2.500,00	3,73	3.000,00	4,48	22.400,00	33,46	66.943,00
2019	42.166,43	62,98	2.500,00	3,73	3.000,00	4,48	19.276,57	28,79	66.943,00
2020	43.141,10	64,13	2.680,00	3,98	3.150,00	4,68	18.301,90	27,21	67.273,00

Sumber : Dinas PUPR Kota Sungai Penuh 2021

Dari tabel ini dapat dilihat kondisi areal irigasi dari tahun ketahun. Kondisi baik areal irigasi tahun 2016 sebesar 2.521 ha atau sebesar 57,98 persen, pada tahun 2020 luas areal irigasi dalam kondisi baik sebesar 2.229,17 ha atau sebesar 51,27 persen.

Tabel II.43
Kondisi Areal (Ha) Irigasi Tahun 2016-2020

Tahun	Total	Baik	persen	Rusak Ringan	persen	Rusak Sedang	persen	Rusak Berat	persen
2016	4.348,00	2.521,00	57,98	624,00	14,35	300,00	6,90	903,00	20,77
2017	4.348,00	2.260,00	51,98	572,00	13,16	587,00	13,50	929,00	21,37
2018	4.348,00	3.135,00	72,10	610,00	14,03	152,00	3,50	451,00	10,37
2019	4.348,00	1.422,00	32,70	562,00	12,93	599,00	13,78	1.056,00	24,29
2020	4.348,00	2.229,17	51,27	56,54	1,30	317,26	7,30	887,41	20,41

Sumber : Dinas PUPR Kota Sungai Penuh 2021

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014, Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pada saat musim hujan, beberapa tempat di DAS dalam wilayah Kota Sungai Penuh rawan tergenang air.

Tabel II.44
Luas Genangan Banjir di Kota Sungai Penuh 2016-2020

Tahun	Luas Genangan (Ha)	Luas Perkotaan (Ha)	Persentase Luas Bebas Genangan (persen)	Persentase Luas Genangan (persen)
2016	1.756,92	15.972	89,00	11,00
2017	2.064,00	15.972	87,08	12,92
2018	2.483,65	15.972	84,45	15,55
2019	944,86	15.972	94,08	5,92
2020	2.967,60	15.972	81,42	18,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh. 2021

Pada tahun 2016 luas genangan banjir di Kota Sungai Penuh mencapai sebesar 1.756,92 ha, atau sebesar 11 persen dari luas kawasan perkotaan Kota Sungai Penuh. Luas genangan banjir meningkat di tahun 2020 mencapai sebesar 2.967,60 ha atau sebesar 18,58 persen dari luas kawasan perkotaan. Hal ini terjadi karena tempat-tempat genangan banjir tersebut merupakan daerah yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya dan kapasitas drainase yang kurang memadai, tindakan membuang sampah ke sungai juga menjadi akibat tempat-tempat tersebut tergenang air. Selain itu, berubahnya pemanfaatan lahan di sekitar aliran sungai berdampak pada semakin luasnya daerah dengan permukaan yang kedap air (*impermeable*), sehingga mengganggu proses infiltrasi air ke dalam tanah sehingga menyebabkan air hujan melimpas di permukaan tanah.

3) Drainase

Pengelolaan drainase di Kota Sungai Penuh ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum. Secara umum, saluran drainase di Kota Sungai Penuh telah menjangkau hampir seluruh wilayah kota. Saluran drainase bertujuan untuk mengalirkan limpasan air hujan baik dalam bentuk drainase buatan maupun drainase alami. Namun dalam pengelolaan pemeliharaannya belum optimal, hal ini terbukti dengan meluapnya air ke permukaan jalan ketika terjadi hujan. Untuk kedepannya perlu dilakukan inventarisasi mengenai saluran-saluran tersebut dikarenakan jaringan drainase dengan irigasi masih bercampur satu sama lain.

Saluran-saluran drainase memiliki pola yang sejajar dengan jalan. Dengan kondisi topografi yang relatif miring, serta dengan ketinggian kota diatas permukaan laut yang cukup tinggi, maka hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pengaliran air pada sistem drainase sehingga aliran permukaan mengalir langsung ke dataran yang lebih rendah yaitu Batang Air Bungkal.

Sistem drainase di Kota Sungai Penuh secara umum dibagi dalam tiga sistem:

- Sistem drainase terbuka. Sistem drainase terbuka saat ini cukup memadai untuk menampung dan mengalirkan air.
- Sistem drainase tertutup. Sistem drainase tertutup saat ini juga cukup memadai, namun terkendala dalam pembersihan/pengerukan sedimen, disebabkan oleh adanya sebagian pertokoan di atas saluran.
- Sistem drainase saluran tanah. Sistem ini sudah lama ada dan sangat bermanfaat bagi drainase kota dikala hujan turun sehingga drainase tanah yang ada dapat menampung beban curah hujan yang cukup tinggi.

Kondisi drainase dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar 31,52 persen atau sebesar 8,74 km dari total sebesar 27,73 km. Kondisi drainase di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.45
Jaringan Drainase di Kota Sungai Penuh Tahun 2020

NO	LOKASI	PANJANG JALAN (M)	PANJANG DRAINASE (M)		TOTAL PANJANG DRAINASE (M)	KONDISI DRAINASE (M)		PANJANG TROTOAR (M)		TOTAL PANJANG TROTOAR (M)	KONDISI TROTOAR (M)		PANJANG JALAN YANG MEMILIKI DRAINASE (M)
			KIRI	KANAN		BAIK	RUSAK	KIRI	KANAN		BAIK	RUSAK	
1.	JL. PANCASILA	6.060,82	1.204,60	846,46	2.051,06	732,00	1.319,06	1.204,60	846,46	2.051,06	2.051,06	-	1.204,60
2.	JL. SRI WIJAYA	167,80	167,80	167,80	335,60	335,60	-	167,80	167,80	335,60	335,60	-	167,80
3.	JL. DEPATI PARBO	4.794,74	1.601,73	2.257,49	3.859,22	3.782,22	77,00	1.601,73	2.257,49	3.859,22	3.459,22	400,00	2.257,49
4.	JL. YOS SUDARSO	1.402,72	1.368,35	1.330,67	2.699,02	2.499,02	200,00	1.368,35	1.330,67	2.699,02	2.199,02	500,00	1.368,35
5.	JL. ARIF RAHMAN HAKIM	771,16	723,26	762,54	1.485,80	400,00	1.085,80	723,26	762,54	1.485,80	600,00	885,80	762,54
6.	JL. DEPATI DUA NENEK	3.173,24	597,79	574,40	1.172,19	1.172,19	-	597,79	574,40	1.172,19	1.172,19	-	597,79
7.	JL. PROF. M. YAMIN, SH	570,75	504,78	555,97	1.060,75	177,94	882,81	504,78	555,97	1.060,75	177,94	882,81	555,97
8.	JL. LIMA LURAH	240,62	-	-	-	-	-	227,04	241,53	468,57	200,00	268,57	-
9.	JL. RE MARTADINATA	347,82	317,55	330,04	647,59	330,04	317,55	317,55	330,04	647,59	537,76	109,83	330,04
10.	JL. KH. WAHID HASYIM	312,63	295,54	283,09	578,63	100,00	478,63	-	283,09	283,09	283,09	-	295,54
11.	JL. JEND. SUDIRMAN	583,12	554,49	575,46	1.129,95	876,40	253,55	554,49	575,46	1.129,95	575,46	554,49	575,46
12.	JL. JEND. AHMAD YANI	530,94	494,86	353,34	848,20	494,86	353,34	494,86	353,34	848,20	494,86	353,34	494,86
13.	JL. SOEKARNO HATTA	892,40	453,54	798,46	1.252,00	892,40	359,60	892,40	-	892,40	453,54	438,86	798,46
14.	JL. IMAM BONJOL	240,02	207,06	195,65	402,71	207,06	195,65	207,06	143,69	350,75	258,53	92,22	207,06
15.	JL. DIPONEGORO	251,85	218,09	203,66	421,75	85,68	336,07	218,09	50,34	268,43	268,43	-	218,09
16.	JL. MAYJEND AHMAD THALIB	292,94	-	-	-	-	-	287,96	257,95	545,91	545,91	257,95	-
17.	JL. PROKLAMASI	145,33	127,21	127,69	254,90	212,31	41,87	127,21	127,69	254,90	254,90	-	127,69
18.	JL. PATIMURA	213,87	212,09	186,55	398,64	332,22	66,42	212,09	186,55	398,64	262,55	136,09	212,09
19.	JL. MURADI	3.861,36	1.699,77	1.228,91	2.928,68	1.926,02	956,91	1.699,77	1.228,91	2.928,68	1.971,77	956,91	1.699,77
20.	JL. H.BAKRI	587,03	171,84	171,89	343,73	343,73	-	506,99	547,16	1.054,15	344,73	709,42	171,89
21.	JL.H. HASMI MUCHTAR	289,27	150,00	-	150,00	-	413,09	100,00	100,00	200,00	-	200,00	-
22.	JL. M.H.THAMRIN	2.210,86	1.747,83	-	1.747,83	1.501,00	246,83	2.167,48	2.328,44	4.495,92	2.328,44	2.167,48	1.747,83
23.	JL. H. AGUS SALIM	319,18	291,73	299,42	591,15	299,42	291,73	291,73	299,42	591,15	-	591,15	299,42
24.	JL. TEUKU UMAR	347,60	139,62	145,03	284,65	145,03	139,62	237,44	251,14	488,58	488,58	45,19	145,03
25.	JL. Dr.WAHIDIN	99,07	50,00	30,00	80,00	60,00	20,00	99,09	76,16	175,25	76,16	99,09	50,00

NO	LOKASI	PANJANG JALAN (M)	PANJANG DRAINASE (M)		TOTAL PANJANG DRAINASE (M)	KONDISI DRAINASE (M)		PANJANG TROTOAR (M)		TOTAL PANJANG TROTOAR (M)	KONDISI TROTOAR (M)		PANJANG JALAN YANG MEMILIKI DRAINASE (M)
			KIRI	KANAN		BAIK	RUSAK	KIRI	KANAN		BAIK	RUSAK	
26.	JL. SISINGAMANGARAJA	120,58	-	-				62,24	66,96	129,20	66,96	129,20	-
27.	JL. HOS COKRO AMINOTO	232,30	201,24	216,08	417,32	633,40	-	216,08	102,31	318,39	110,40	207,99	216,08
28.	JL. VETERAN	194,62	-	169,39	169,39	169,39	-	-	169,39	169,39	169,39	-	-
29.	JL. SPG 3 RAWANG- TVRI BATAS KOTA	1.367,42	489,04	495,19	984,23	397,65	586,58	107,59	495,20	602,79	495,20	107,59	495,19
30.	JL. BASUKI RAHMAT	321,41	321,42	215,94	537,36	537,36	-	321,42	299,33	620,75	537,36	83,39	321,42
31.	JL. H. RUSDI SAYUTI	972,03	404,49	116,89	521,38	104,49	116,89	104,49	116,89	221,38	221,38	300,00	404,49
32.	JL. JEMBATAN DEBAI-DUSUN BARU DEBAI	1.900,00	0,00	372,00	372,00	372,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
JUMLAH		33.815,50			27.725,73	19.119,43	8.739,00			30.747,70	20.940,43	10.477,37	16.096,95

Kondisi saluran secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

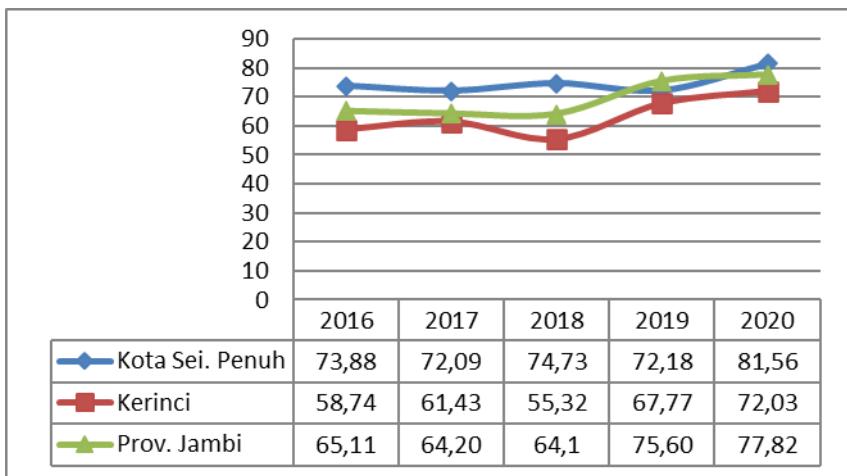
- Kondisi saluran pada lingkungan perumahan dalam Kota Sungai Penuh pada umumnya mengalir pada sisi jalan raya maupun jalan utama, dimana pada sisi jalan utama saat ini mempunyai saluran drainase yang cukup baik sehingga baik pada musim hujan maupun musim kemarau saluran drainase lingkungan perumahan maupun di jalan utama masih dapat mengatasi air masuk ke dalam saluran.
- Letak Kota Sungai Penuh yang konturnya berbukit, sehingga air mengalir memanfaatkan gravitasi ke tempat yang lebih rendah.
- Drainase kota menggunakan saluran tertutup, bagian atas tutup aluran dijadikan *site walk/trotoar, manhole* untuk mengetahui kelancaran aliran air.
- Masih adanya genangan air pada saat musim hujan di beberapa tempat yang disebabkan belum adanya pembuatan drainase, dan terjadinya sedimentasi
- Kurang seragamnya dimensi saluran yang mengakibatkan meluapnya air hujan ke jalan.

4) Air Limbah

Cakupan pengelolaan air limbah cair di Kota Sungai Penuh berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh dapat digambarkan sebagai berikut : Sistem pengelolaan air limbah di Kota Sungai Penuh masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (*on-site system*) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara komunal. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya ke saluran atau sungai. Pengelolaan limbah cair domestik yang ada di Kota Sungai Penuh lebih pada pemanfaatan sistem setempat (*on-site system*) antara lain *black water* dan *grey water* yang yang dihasilkan langsung di buang ke sungai, lahan terbuka serta ada yang dibuang ke septik tank kemudian dibuang ke drainase lingkungan. Sistem pembuangan air limbah seharusnya dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, tapi di Kota Sungai Penuh masih sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang kedalam sistem pembuangan air hujan yang dapat mengakibatkan polusi/pencemaran lingkungan. Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah pada setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Pengelolaan sanitasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu:

- a. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (*on-site system*).
- b. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (*off-site system*).

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kota Sungai Penuh Tahun 2016 sebesar 73,88 persen, meningkat menjadi sebesar 81,56 persen di tahun 2020. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS, Provinsi Jambi Dalam Angka, 2021

Gambar II.38

**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

Pada beberapa tempat, pada bangunan-bangunan tertentu diwajibkan menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) seperti: rumah sakit, industri, penginapan dll. Fasilitas pengolahan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak pencemaran lingkungan hidup. Prasarana pembuangan air limbah yang ada di Kota Sungai Penuh antara lain: Jamban Keluarga, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Perkiraan timbulan limbah di Kota Sungai Penuh diperkirakan sebagai berikut:

Tabel II.46
Volume Timbulan Air Limbah di Kota Sungai Penuh

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Pemakaian air minum (litr/org/hr)	Kebutuhan air minum (m ³ /hari)	Timbulan air limbah		
					Black Water (m ³ /hari)	Grey Water (m ³ /hari)	Total (m ³ /hari)
1	Sungai Penuh	11.167	100,00	1.116,7	223,34	134,00	357,34
2	Pesisir Bukit	12.139	100,00	1.213,9	242,78	145,67	388,45
3	Hamp. Rawang	15.482	100,00	1.548,2	309,64	185,78	495,42
4	T.Kampung	10.648	100,00	1.064,8	212,96	127,78	340,74
5	Kumun Debai	11.939	100,00	1.193,9	238,78	143,27	382,05
6	Pondok Tinggi	19.217	100,00	1.921,7	384,34	230,60	614,94
7	Sungai Bungkal	11.018	100,00	1.101,8	220,36	132,22	352,58
8	Koto Baru	9.465	100,00	946,5	189,3	113,58	302,88
Total		101.075		10.107,5	2.021,50	1.212,90	3.234,4

Sumber: Master Plan Air Limbah (Bappeda), 2020

5) Penataan Ruang

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh telah diatur dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran RTRW kedalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. Pemerintah Kota Sungai Penuh menindaklanjuti RTRW dengan penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK). Capaian kinerja Urusan Penataan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada berikut :

**Tabel II.47
Kinerja Urusan Penataan Ruang Pemerintah Daerah
Kota Sungai Penuh 2016-2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	21,00	23,08	24,98	24,53	25,50
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,024	0,028	0,034	0,038	0,04
3	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang wilayah (persen)	n.a	n.a	n.a	n.a	76,18

Sumber : Dinas Perkim & Dinas PUPR Kota Sungai Penuh 2021

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan upaya ini, dilakukan restrukturisasi kawasan-kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya penataan, salah satunya dengan perencanaan dan pembangunan serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta kegiatan yang mendukung pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Berdasarkan data capaian kinerja urusan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.48
Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah tangga pengguna listrik (persen)	96,88	96,88	99,69	99,62	100,00
2	Luas Lingkungan pemukiman kumuh (persen)	0,59	0,85	0,84	0,60	1,88
3	Rasio rumah layak huni (persen)	79,50	82,56	86,19	95,12	96,00

Sumber : Dinas Perkim&Pertanahan Kota Sungai Penuh, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat, sampai dengan tahun 2020 rumah tangga pengguna listrik sudah mencapai sebesar 100 persen, rasio rumah layak huni telah mencapai sebesar 96 persen, sedangkan untuk luas lingkungan permukiman kumuh di tahun 2020 mencapai sebesar 1,88 persen. Berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Sungai Penuh No. 051/447/2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sungai Penuh telah diputuskan sebesar 331,90 Ha yang terdiri dari 4 (empat) kawasan.

Tabel II.49
Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Sungai Penuh

No	Nama Kawasan	Desa/Kelurahan		Kecamatan	Kawasan (Ha)
1	Pusat Kota	a.	Kelurahan Sungai Penuh	Sungai Penuh	155,61
		b.	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	Sungai Penuh	
		c.	Desa Gedang	Sungai Penuh	
		d.	Desa Amar Sakti	Sungai Penuh	
		e.	Kelurahan Pondok Tinggi	Pondok Tinggi	
		f.	Desa Permanti	Pondok Tinggi	
		g.	Desa Pondok	Pondok Tinggi	
		h.	Desa Aur Duri	Pondok Tinggi	
		i.	Desa Lawang Agung	Pondok Tinggi	
		j.	Desa Dusun Baru	Sungai Bungkal	
		k.	Desa Sumur Anyir	Sungai Bungkal	
		l.	Desa Koto Tinggi	Sungai Bungkal	
2	Permukiman Pinggir Sungai Batang Merao	a.	Desa Pinggir Air	Tanah Kampung	80,90
		b.	Desa Tanjung Karang	Tanah Kampung	
		c.	Desa Tanjung Bunga	Tanah Kampung	
		d.	Desa Tanjung Karang	Hamparan Rawang	
		e.	Desa Tanjung Bunga	Hamparan Rawang	
		f.	Desa Tanjung Muda	Hamparan Rawang	
		g.	Desa Paling Serumpun	Hamparan Rawang	
		h.	Desa Koto Teluk	Hamparan Rawang	
		i.	Desa Cempaka	Hamparan Rawang	
		j.	Desa Dian	Hamparan Rawang	
		k.	Desa Maliki Air	Hamparan Rawang	

No	Nama Kawasan	Desa/Kelurahan		Kecamatan	Kawasan (Ha)
3	Permukiman Pinggir Batang Sangkir	a.	Desa Koto Tuo	Tanah Kampung	69,58
		b.	Desa Koto Panap	Tanah Kampung	
		c.	Desa Koto Tengah	Tanah Kampung	
		d.	Desa Koto Pudung	Tanah Kampung	
		e.	Desa Koto Dumo	Tanah Kampung	
4	Pusat Permukiman	a.	Desa Koto Baru	Koto Baru	25,81
		b.	Desa Dujung Sakti	Koto Baru	
		c.	Desa Limau Manis	Koto Baru	
		d.	Desa Sri Menanti	Koto Baru	

Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh, 2020

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam mewujudkan sasaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yaitu Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, dibutuhkan beberapa indikator yang harus dicapai. Indikator-indikator tersebut diantaranya, Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota, Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota, Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Tabel II.50
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	20,41	21,50	21,61	21,47	22,00
2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	83,33	91,67	77,78	85,71	80,00
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	91,67	92,3	90	98,27	t.a.d
4	Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana Penggulangan bencana		9,45	34,00	54,00	37,52
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan korban bencana yang ditangani	100,00	100,00	100,00	95,65	100,00
7	Lokasi Evakuasi	0	12	20	24	24
8	Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi)	40	40	10	42	20

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Tingkat waktu tanggap (response time rate) bencana kebakaran (menit)	<20	<18	<17	<16	<14
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP, BPBD, Dinas Damkar&Penyelamatan Kota Sungai Penuh, 2021

Pada tahun 2016 terdapat 48 jumlah pelanggaran Perda dengan jumlah penyelesaian pelanggaran Perda sebanyak 40, atau atau tingkat penyelesaian pelanggaran sebesar 83,33 persen. Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran Perda 15, dengan jumlah penyelesaian pelanggaran Perda sebanyak 12, atau tingkat penyelesaian pelanggaran sebesar 80 persen. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2016-2020 rasio Polisi Pamong Praja di Kota Sungai penuh mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 20,41 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan meningkat menjadi 22 personel untuk setiap 10.000 penduduk pada tahun 2020.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) bencana kebakaran dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 kurang dari 20 menit, meningkat menjadi kurang dari 14 menit tingkat waktu tanggap bencana kebakaran di tahun 2020. Cakupan pelayanan bencana kebakaran telah menjangkau seluruh wilayah dalam Kota Sungai Penuh.

2.3.1.6 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana dan lansia. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.51
Indikator Urusan Sosial Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana Sosial :					-
	a. Panti Jompo	-	-	-	-	-
	b. Panti Asuhan	2	2	2	2	2
	c. Panti Sosial	-	-	-	-	-
	d. Rumah Singgah	-	-	-	-	-
	e. Panti Cacat	-	-	-	-	-
2	Jumlah PMKS	t.a.d	t.a.d	5.801	5.109	10.357
3	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1,13	1,41	1,41	48,12	64,12

Sumber : Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, 2021

Berdasarkan tabel diatas Jumlah PMKS Kota Sungai Penuh Tahun 2018-2020 mengalami kenaikan, dari Tahun 2016 sebesar 5.801 menjadi 10.357 pada Tahun 2020. Pada Tahun 2016 persentase PMKS yang menerima bantuan sosial sebesar 1,13 persen, sedangkan pada tahun 2020 persentase PMKS yang menerima bantuan sosial sebesar 64,12 persen yang diberikan dengan berbagai program Pemerintah, Provinsi dan Kota.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan dan lansia rawan sosial. Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membawa hasil yang maksimal.

2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Keberhasilan dalam pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja diukur melalui beberapa indikator. Indikator yang akan dianalisis yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan jumlah Pengangguran. Dari indikator tersebut capaiannya sepanjang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja di kota Sungai Penuh dari 43.626 orang pada tahun 2019 menjadi 44.871 di tahun 2020. Di sisi lain penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja memperlihatkan penurunan yakni dari 24.805 pada tahun 2019 menjadi 23.124 tahun 2020.

**Tabel II.52
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Sungai Penuh 2016-2020**

	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	NA	43.545	47.860	43.626	44.871
Bukan Angkatan Kerja	NA	65.929	19.437	24.805	23.124
Bekerja	NA	41.743	45.255	41.806	42.377
Pengangguran	NA	1.802	2.605	1.820	2.494
Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (persen)	NA	66,05	71,12	63,75	65,99
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	NA	4,14	5,44	4,17	5,56

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sepanjang tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi sebesar 5,56 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebesar 4,17 persen, sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga terjadi

peningkatan setelah pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan dari tahun 2017.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pasar tenaga kerja di Sungai penuh masih sangat labil, hal ini diantaranya dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan dan status pekerjaan dari tenaga kerja. Pekerjaan sektor informal menyebabkan mudahnya terjadi perubahan akibat dinamika perekonomian. Adapun kondisi ketenagakerjaan kota Sungai Penuh berdasarkan status pekerjaan utama pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.53
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Sungai Penuh
Tahun 2020

Status Pekerjaan	Jumlah	persen
Berusaha sendiri	9.854	23,25
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	6.344	14,97
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2.176	5,13
Buruh/karyawan/pegawai	15.123	35,69
Pekerja bebas	4.387	10,35
Pekerja keluarga/tidak dibayar	4.493	10,60
Jumlah	42.377	100,00

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2021

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sungai Penuh dapat dilihat beberapa indikator diantaranya rasio tindak kekerasan dalam rumah tangga, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan.

A. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan jumlah tenaga kerja dibawah umur

Kepedulian Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tercermin dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikologis, penelantaran terhadap perempuan dan anak. Pelaporan kejadian dimungkinkan lebih sedikit dari yang terjadi, karena sebagian menganggap sebagai aib keluarga, dan faktor ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki.

Tabel II.54
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Jumlah Tenaga Kerja
Dibawah Umur di Kota Sungai Penuh

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio KDRT per 1.000 rumah tangga	0,26	0,13	0,09	0,21	23 kasus
2	Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PPPA Kota Sungai Penuh, 2021

Dari tabel di atas tampak bahwa Persentase tenaga kerja di bawah umur yang merupakan proporsi pekerja anak usia 5-14 Tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 Tahun ke atas belum ada datanya, hal ini bukan berarti bahwa pekerja anak tidak ada akan tetapi memperlihatkan bahwa keberadaan pekerja anak belum dapat dideteksi dan tercatat dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya pendataan yang lebih cermat agar dapat melakukan langkah kebijakan ataupun pembinaan jika kasus terjadi.

Rasio KDRT per 1000 rumah tangga di Kota Sungai Penuh menunjukkan nilai yang berfluktuasi dimana pada Tahun 2016 sebesar 0,26 turun menjadi 0,21 pada Tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pelaporan kejadian, untuk itu perlu tetap dipantau dan dilakukan edukasi kepada masyarakat agar mau melaporkan tindakan KDRT ini agar dapat dilakukan upaya pembinaan dan pencegahan agar tidak terjadi kembali. Penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.55
Data Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota
Sungai Penuh Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Jenis kasus yang ditangani	Jumlah
1	2016	Sungai Bungkal	Sumur Anyir	Kekerasan Fisik	1
		Hamp.Rawang	Koto Dian	Fisik	1
		Pesisir Bukit	Koto Renah	Fisik	1
		Pesisir Bukit	Koto Renah	Fisik	1
		Pesisir Bukit	Koto Renah	Fisik	1
		Tanah kampung	Koto padang	Fisik	1
		Pondok Tinggi	Lawang Agung	Sexual	1
		Pesisir Bukit	Sungai akar	Fisik	1
		Kumun Debai	Air Teluh	Fisik	1
		Pesisir Bukit	Sungai akar	Fisik	1
Jumlah tahun 2016					10
2	2017	Pondok Tinggi	Sungai jernih	Sexual	1

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Jenis kasus yang ditangani	Jumlah
		Hamp.Rawang	Koto Teluk	Fisik	1
		Sungai Bungkal	Sungai Ning	Fisik	1
		Hamp.Rawang	Tanjung	Fisik	1
		Pesisir Bukit	Sungai Liuk	Fisik	1
		Sungai Bungkal	Sumur Anyir	Fisik	1
		Pondok Tinggi	Sawahan	Fisik	1
		Koto Bbaru	Koto Limau Manis	Fisisik,Fisikis	1
		Pondok Tinggi	Lawang Agung	Fisik	1
		Pondok Tinggi	Sungai jernih	Fisik,Sexual	1
		Pondok Tinggi	Renah Kebelu	Lainya	1
		Kumun Debai	Air teluh	Sexual	1
		Pondok Tinggi	Lawang Agung	Sexual	1
		Pondok Tinggi	Renah kebelu	Fisik	1
		Koto Baru	Dujung Sakti	Fisik	1
		Pesisir Bukit	Koto Renah	Fisik	1
		Sungai Bungkal	Talang Lindung	Fisikis	1
		Pondok Tinggi	Lawang Agung	Fisik	1
		Pesisir Bukit	Koto Tengah	Fisik	1
		Hamparan Rawang	Koto Dian	Fisik	1
		Sungai penuh	Desa Gedang	Fisik	1
		Kumun Debai	Sanggaran Galeh	Fisiik	1
		Koto Baru	Dujung Sakti	Fisik	1
		Pondok Tinggi	Lawang Agung	Fisik	1
		Tanah Kampung	Koto Dumo	Fisik	1
		Koto Baru	Koto Limau Manis	Fisik	1
Jumlah Tahun 2017				26	
3	2018	Sungai Bungkal	Pelayang raya	Fisik	1
		Sungai Bungkal	Pelayang raya	Fisik	1
		Hamp.Rawang	Koto Dian	Iainya	1
		Sungai penuh	Pasar Sungai Penuh	Penelantaran	1
		Pesisir Bukit	Koto Renah	Fisik	1
		Koto Baru	Kampung Tengah	Fisik	1
		Koto Baru	Srimenanti	Fisik	1
		Koto Baru	Permai Indah	Fisik	1
		Pondok Tinggi	Lawang Agung	Fisiik	1
	Jumlah tahun 2018				9
4	2019	Sungai penuh	Kel .Sungai Penuh	Fisikis,Sexual	1
		Koto Baru	Koto Limau Manis	Fisik	1
		Sungai penuh	Kel.Sungai Penuh	Sexual	1
		Sungai penuh	Desa Gedang	Fisik	1
		Hamparan Rawang	Simpang tiga	Fisik	1
		Kumun Debai	Renah kayu Embun	Fisik	1
		Tanah kampung	Koto Dumo	Fisik	1

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Jenis kasus yang ditangani	Jumlah	
		Pesisir Bukit	Koto Renah	Lainya	1	
		Sungai Bungkal	Sungai Ning	Sexual	1	
		Koto Baru	Koto Baru	Fisik	1	
		Koto Baru	Kampung Tengah	Fisik	1	
		Pesisir Bukit	Sungai Liuk	Fisik	1	
		Pesisir Bukit	Sungai Lliuk	fisik	1	
		Sungai Penuh	Kel.Sungai penuh	Fisik	1	
		Sungai penuh	Kelurahan sungai Penuh	Fisik	1	
		Sungai Bungkal	Sumur Anyir	Fisikis	1	
		Hamparan Rawang	Koto Dian	Fisik	1	
		Pondok Tinggi	Karya Bakti	Fisik	1	
		Jumlah Tahun 2019			19	
5	2020	Kumun Debai	Debai	Fisik	1	
		Kumun Debai	Air Teluh	Fisik	1	
		Sungai penuh	Kel. Sungai Penuh	Penelantaran	1	
		Hamparan Rawang	Koto Dian	Fisik	1	
		Pondok Tinggi	Aur Duri	Fisik	1	
		Pondok Tinggi	Pondok Tinggi	Fisik	1	
		Sungai Penuh	Kel.Sungai penuh	Fisik	1	
		Hamparan Rawang		Fisik	1	
		Koto Baru	Dujung Sakti	Fisik	1	
Jumlah Tahun 2020					9	
Jumlah Tahun 2016-2020					73	

Sumber : Dinas PPPA Kota Sungai Penuh, 2021

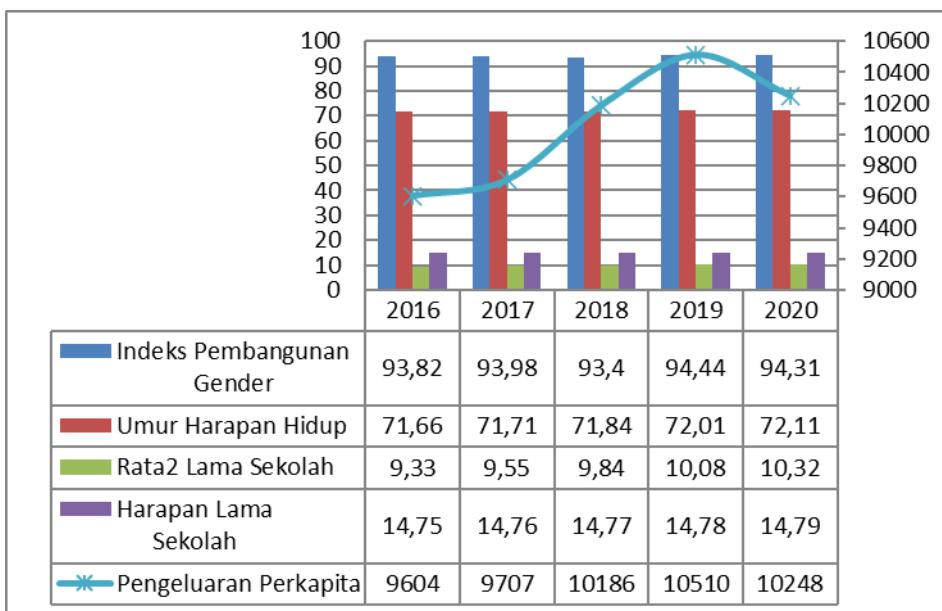
Dari data di atas tampak bahwa bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat kota Sungai penuh adalah kekerasan fisik. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan untuk mendalami penyebabnya agar dapat dicegah terjadinya kasus ini di masa mendatang

B. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG), merupakan turunan dari IPM. Melalui angka IPG, kesenjangan atau *gap* pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan Laki-laki. Semakin tinggi rasionalya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin

rendah rasio maka semakin tinggi gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

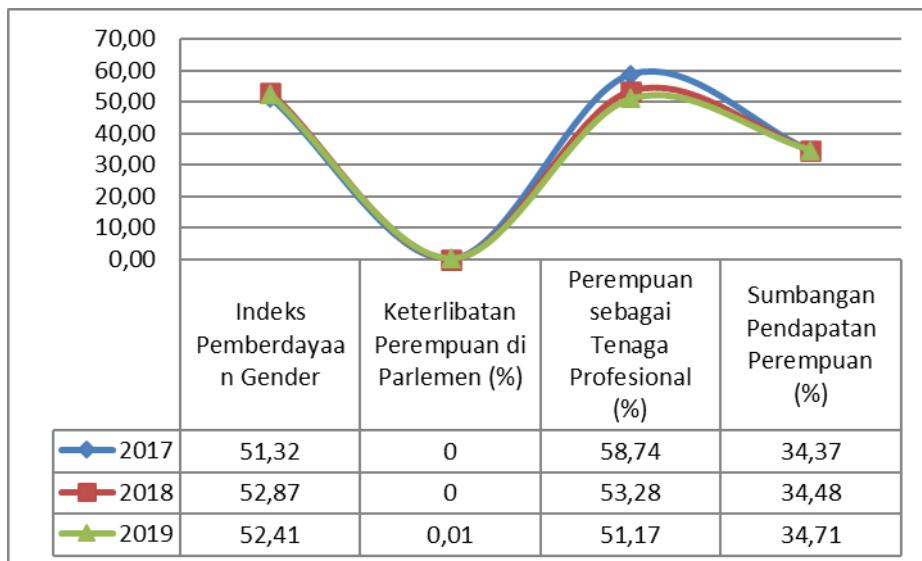


Sumber : BPS provinsi Jambi, 2021

Gambar II.39
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Pencapaian pembangunan gender di Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama 5 Tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas. IPG Kota Sungai Penuh dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 telah meningkat dari 93,82 pada Tahun 2016 menjadi 94,31 pada Tahun 2020. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki.



Sumber : BPS provinsi Jambi 2021

Data terbaru yang tersedia th 2019

**Gambar II.40
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Sungai Penuh Tahun 2017-2019**

Pencapaian pemberdayaan perempuan yang dihitung melalui IDG menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan IPG. Pada Tahun 2017, IDG Kota Sungai Penuh sebesar 51,32 sementara pada Tahun 2019 sebesar 52,41. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak adanya keterlibatan perempuan di parlemen sejak tahun 2014. Seluruh komponen IDG, perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pembangunan harus ditingkatkan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam program pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

2.3.2.3 Lingkungan Hidup

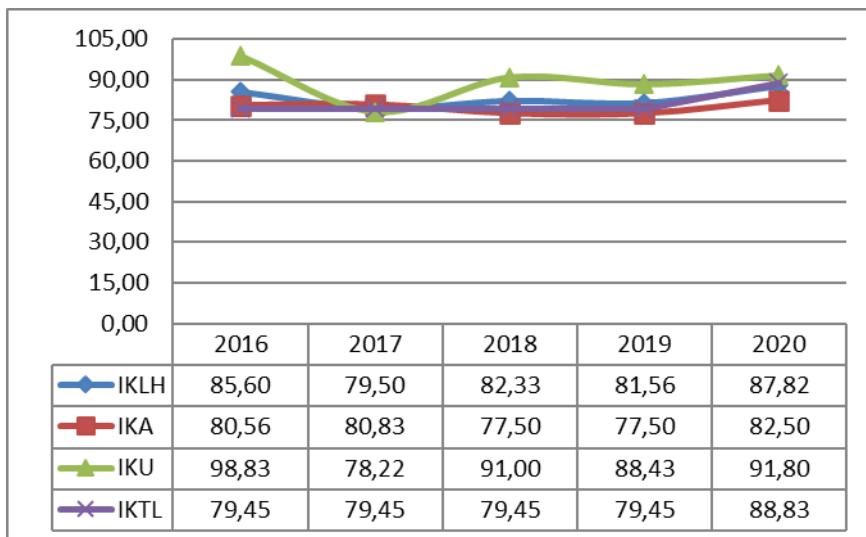
Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan dan persampahan, pencegahan terjadinya dampak lingkungan melalui pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihian lingkungan/cadangan sumber daya alam, dan pencegahan bencana, serta mengurangi dampak pemanasan global.

Kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari tiga indikator yang mencakup kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan tutupan hutan. Sebagai salah satu Kota yang mengadopsi perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup berdasarkan IKLH Kementerian Lingkungan Hidup RI, maka IKLH Kota Sungai Penuh didapat dengan perhitungan terhadap indeks pencemaran air (IPA), indeks pencemaran udara (IPU) dan indeks tutupan hutan (ITU). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dengan menggunakan bobot yang sama, di mana masing-masing komponen (IPA, IPU dan ITH) dipandang memiliki peran yang seimbang sehingga masing-masing diberi bobot 1/3 dari total IKLH. Hasil penghitungan nilai IKLH ditetapkan menjadi klasifikasi kualitas lingkungan hidup ke dalam 7 (tujuh) kategori. Penentuan klasifikasi dilakukan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|----------------|
| ▪ Unggul; | IKLH > 90 |
| ▪ Sangat baik; | 82 < IKLH = 90 |
| ▪ Baik; | 74 < IKLH = 82 |
| ▪ Cukup; | 66 = IKLH = 74 |
| ▪ Kurang; | 58 = IKLH < 66 |
| ▪ Sangat Kurang; | 50 = IKLH < 58 |
| ▪ Waspada; | IKLH < 50 |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui : **Indeks Pencemaran Air (IPA)**, Peningkatan nilai IPA di Kota Sungai Penuh merupakan indikasi bahwa berbagai upaya yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan pengendalian pencemaran air telah berdampak positif, dari mulai penyiapan perangkat peraturan, pengawasan di lapangan sampai pada pemberian sanksi bagi badan usaha yang melanggar. Begitu pula untuk **Indeks Pencemaran Udara (IPU)**, di wilayah Kota Sungai Penuh masih memenuhi baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Sedangkan **Indeks Tutupan Hutan (ITU)**, Kurun 2016-2020, nilai ITH di Kota Sungai Penuh mengalami Peningkatan hal ini disebabkan oleh Kota Sungai Penuh sebagian wilayahnya merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Perkembangan Indeks IPA, IPU,ITH serta IKLH) di Kota Sungai Penuh pada tahun 2016-2020 :



Sumber: Dinas LH Kota Sungai Penuh, 2021

**Gambar II.41
IKLH Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

Persampahan, Cakupan wilayah pelayanan pengelolaan sampah perkotaan saat ini sudah melayani semua Kecamatan. Capaian penanganan sampah sebesar 77,62 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 86 persen pada tahun 2020. Sumber sampah di Kota Sungai Penuh berasal dari sampah permukiman (berpenghasilan tinggi, sedang dan rendah), restoran, pertokoan, pasar, perkantoran, sekolah, hotel, penyapuan jalan, penyapuan taman serta sampah dari sarana umum lainnya. Pengelolaan kebersihan kota dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Pengelolaan kebersihan baik di lingkungan permukiman, pasar, jalan dan kawasan komersil dan perdagangan dilakukan secara teratur dengan pola pengumpulan pada pagi hari dan kemudian dilakukan pengangkutan, sebagian dilakukan pengolahan, dan selanjutnya pembuangan ke TPA/TPST dengan armada truk. Sampai tahun 2020 Seluruh aktivitas pengelolaan kebersihan di Kota Sungai Penuh dibiayai oleh dana APBD Kota Sungai Penuh.

Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah, Dari hasil Kajian Studi Komposisi Sampah Kota Sungai Penuh yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, didapatkan data estimasi timbulan sampah Kota Sungai Penuh Tahun 2020, sebagai berikut:

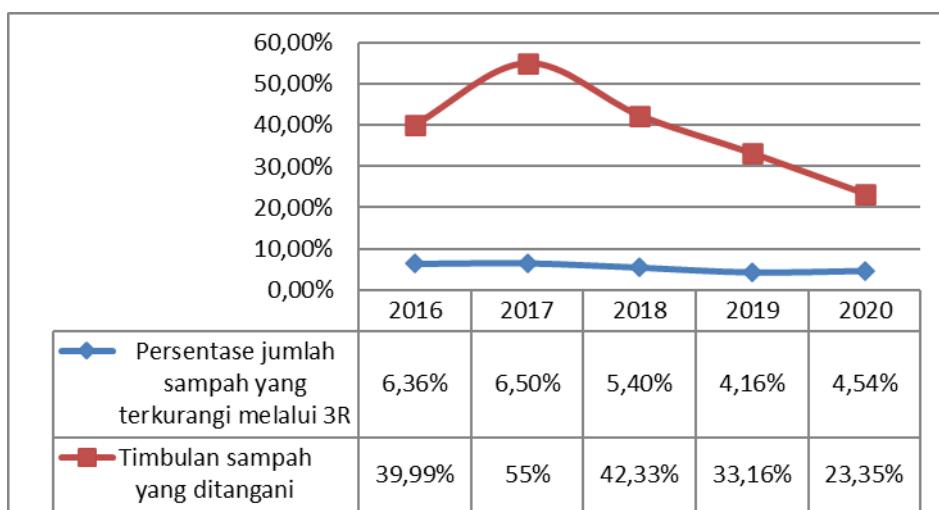
**Tabel II.56
Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Kategori Sampel dan Komposisi (kg)**

No	Kategori Sampel	Sisa Makanan	Kertas	Plastik	Kaleng	Karet	Kain	Lain-lain	Berat Total
1	Rumah Tangga	26.570,72	3.823,34	6.202,10	82,70	578,93	701,54	3.227,19	41.186,52
2	Kantor/ Sekolah	40,46	248,23	210,94	1,28	-	-	-	500,92
3	Hotel/ Restoran	50,54	39,01	16,84	0,42	-	-	12,52	119,33
4	Jalan	733,16	1.194,01	481,79	-	-	-	2.157,60	4.566,57

No	Kategori Sampel	Sisa Makanan	Kertas	Plastik	Kaleng	Karet	Kain	Lain-lain	Berat Total
5	Pasar	1.204,93	652,67	753,08	-	-	-	150,62	2.761,31
6	Toko	1.133,75	163,23	105,88	-	-	-	-	1.402,86
	Total	29.733,58	6.120,49	7.770,63	84,41	578,93	701,54	5.547,92	50.537,50

Sumber: Hasil Analisis Dinas LH Kota Sungai Penuh, 2021

Sebagian besar sampah kota yang dihasilkan tergolong sampah organik. Melihat komposisi dari sumber asalnya maka sebagian besar adalah sisa-sisa makanan yang sebesar 29,73 ton/hari, jenis sampah ini akan terdegradasi dan berpotensi sebagai sumberdaya penghasil kompos, metan dan energi. Pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan dengan manajemen 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Penimbunan di TPA/TPST). Sampah dikumpulkan dari sumbernya kemudian diangkut ke TPS dan terakhir ditimbun di TPA, tetapi bagaimana mereduksi sampah dengan mengolah sampah untuk dimanfaatkan menjadi produk yang berguna, dengan prinsip 3R dan bank sampah.



Sumber: Hasil Analisis Dinas LH Kota Sungai Penuh, 2021

Gambar II.42
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani dan Terkurangi melalui 3R
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Timbulan sampah yang ditangani hingga tahun 2020 baru mencapai sebesar 23,35 persen dari total produksi sampah yang dihasilkan per hari (50,54 ton/hari), demikian halnya pengelolaan sampah dengan prinsip atau pendekatan 3R baru mencapai sebesar 4,54 persen, meskipun penanganan sampah secara total sudah mencapai 86 persen di tahun 2020 dengan cakupan pelayanan sudah mencapai 100 persen. Pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dapat memberikan keuntungan dalam mereduksi sampah, mengurangi biaya pengangkutan,

memperpanjang umur peralatan dan TPA/TPST, mengurangi pencemaran air, tanah dan udara serta menghasilkan kompos/bahan daur ulang bernilai ekonomis.

Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah yang sesuai standar dan *establish* dalam praktek. Pengelolaan sampah yang dilakukan bukan hanya untuk memindahkan sampah dari area pusat kota ke luar kota. Untuk kondisi pengelolaan sekarang, terminologi tempat pengolahan/pemrosesan akhir belum sesuai digunakan, yang sesuai adalah tempat pembuangan akhir sampah. Kendala yang dihadapi sampai tahun 2020 adalah ketersediaan TPA/TPST yang permanen.

Jika memperhatikan kondisi di atas, maka harus dilakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir secara komprehensif, dengan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta penegakan peraturan tentang Pengelolaan Persampahan. Penanganan sampah yang baik adalah penanganan sampah pada tahap pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai Izin Lingkungan, maka Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan hidup. UKL-UPL memastikan bahwa usaha yang berjalan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sehingga izin penyelenggaraan usaha tersebut dapat dikeluarkan. Dokumen UKL UPL diwajibkan bagi usaha-usaha yang tidak memerlukan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL). Artinya UKL-UPL ditujukan bagi usaha atau proyek yang hanya berdampak kecil terhadap lingkungan hidup serta skala pengendaliannya tidak rumit dan kecil.

2.3.2.4 Pengendalian Penduduk dan KB

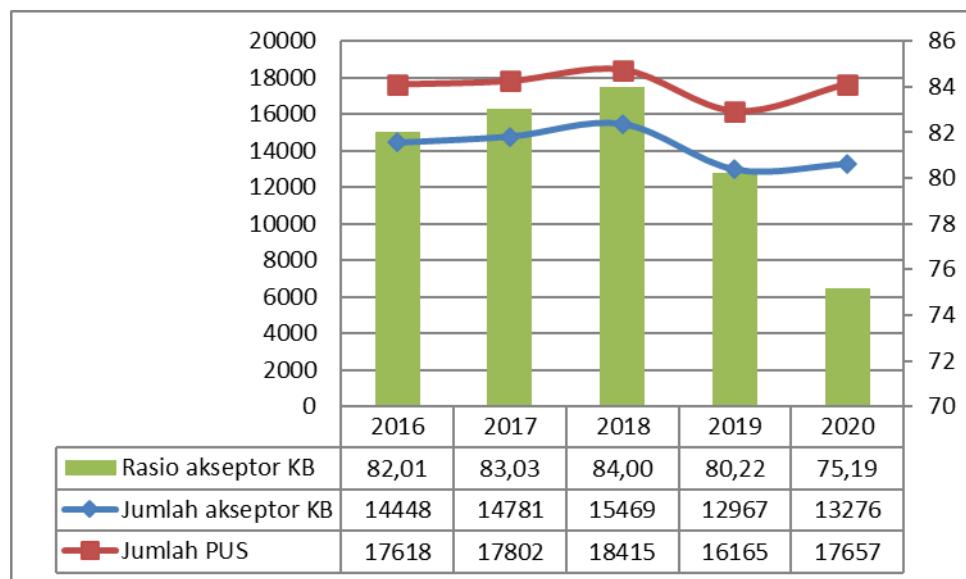
Keluarga Berencana (KB) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membatasi jumlah kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya.

Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an. atau telah dimulai sejak masa orde baru. Program ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk indonesia yang kala itu masih termasuk dalam Negara dengan angka pertumbuhan yang tinggi di dunia. Pemerintah saat itu menganggap, bahwa jika masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi itu dapat tertanggulangi, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Karena dianggap akar dari masih rendahnya kesejahteraan rakyat adalah masih tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Program keluarga berencana itu sendiri terbagi dalam beberapa program penting, antara lain, pengaturan jarak kelahiran agar tidak terlalu dekat, tidak

terlalu banyak dan pengaturan usia ibu saat melahirkan. Untuk itu BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ditunjuk untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program keluarga berencana kepada masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kesediaan masyarakat untuk menyukseksan program keluarga berencana nasional.

Perkembangan **Rasio akseptor KB**, yang dihitung dari jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) Tahun per 1000 pasangan usia subur pada Tahun yang sama. Rasio Akseptor KB Kota Sungai Penuh Tahun 2016 sebesar 82,01 persen namun pada Tahun 2020 turun menjadi 75,19 persen.



Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2017-2021

Gambar II.43
Rasio Akseptor KB di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

2.3.2.5 Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah.

Tabel II.57
Capaian Pembangunan Perhubungan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya jalur satu arah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota	Jalur	5	6	9	9	9
2	Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun	Buah	0	0	0	0	0
3	Tersedianya Dokumen Pengembangan kawasan terminal	Dok.	0	0	1	1	1
4	Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	persen	0,10	0,10	33,30	56,25	56,25
5	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	persen	90,00	90,00	75,00	92,71	92,71
6	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	persen	55,00	55,00	72,80	80,00	80,00
7	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	persen	69,00	69,00	58,50	75,07	75,07
8	Tersedianya gedung parkir publik	unit	0	0	0	0	0
9	Tempat parkir yang tertata	persen	45,00	45,00	74,50	92,00	92,00
10	Parkir on-street	Titik	21	21	21	23	23
11	Parkir off-street	Titik	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh 2021

Wilayah Kota Sungai Penuh sebagian besar merupakan daratan sehingga sistem transportasi dan perhubungan darat menjadi sarana/alat interaksi yang sangat penting. Berikut merupakan gambaran transportasi yang ada di Kota Sungai Penuh.

Sarana Transportasi, Jalan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai sarana untuk memperlancar aktivitas perekonomian, pembangunan dan stabilitas sosial. Sehingga kondisi jalan menjadi bagian yang perlu diperhatikan seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan yang begitu pesat.

Tabel II.58
Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenis dan Bahan Bakar di Kota Sungai Penuh

No	Jenis kendaraan	Jumlah Kendaraan				Jumlah	
		Premium		Solar			
1.	Angkutan Penumpang						
	1. Bus Besar	-	Unit	6	Unit	6	Unit
	2. Bus Sedang	-	Unit	183	Unit	183	Unit
	3. Bus Travel	4.158	Unit	-	Unit	4.158	Unit
	Angdes	-	Unit	-	Unit	-	Unit
	Ojek	3.950	Unit	-	Unit	3.950	Unit

No	Jenis kenderaan	Jumlah Kendaraan				Jumlah	
		-	Unit	-	Unit	21	Unit
2.	Angkutan Barang						
	1. Truck	-	Unit	400	Unit	400	Unit
	2. Pick Up	514	Unit	465	Unit	979	Unit
Jumlah		8.511	Unit	851	Unit	9.697	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh 2021

2.3.2.6 Komunikasi dan Informatika

Selama satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dalam perekonomian dunia, yaitu beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang didorong oleh kemajuan teknologi serta ditandai dengan semakin meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia.

Urusan komunikasi dan informatika menjadi urusan yang penting dalam proses pembangunan di Kota Sungai Penuh. Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan urusan ini antara lain adalah penerapan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan yang dimulai dengan *e-planning (SIPPD)*, dan *e-procurement*. Selain itu juga telah dilakukan penyediaan informasi pembangunan berbasis internet yaitu www.sungaiptukota.go.id.

Tabel II.59
Indikator Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kota Sungai Penuh Tahun 2019-2020

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jaringan komunikasi	6	19	19	19	8
2	Jumlah surat kabar lokal dan nasional	5	38	38	30	20
3	Jumlah Penyiaran	0	3	6	7	1
4	a. Radio Nasional (jaringan ke daerah)	3	3	3	3	1
	b. Radio Lokal	1	1	1	1	2
	c. TV Lokal	1	1	1	1	1
	d. TV Nasional	12	12	12	12	12
5	Website milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada
6	Jumlah pameran/expo yg dilaksanakan per th	1	2	2	2	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kominfo Sungai Penuh, 2021

Namun demikian pemanfaatan yang optimal dari TIK belum sepenuhnya dapat tercapai. Salah satu penyebabnya adalah basis data dan aplikasi dibangun menggunakan platform sistem informasi dan data yang berbeda-beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum dapat saling berhubungan untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu dan kedepan berbagai aplikasi perangkat lunak akan dibangun dan dimanfaatkan dalam suatu lingkungan jaringan komputer yang meliputi beberapa instansi di Pemerintah Kota Sungai

Penuh. Melalui jaringan internet basis data, aplikasi bahkan sistem informasi terhubung satu sama lainnya membentuk jaringan yang jauh lebih kompleks.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode tahun 2020-2024 diselesaikan paling lambat 6 (bulan) setelah RPJMN periode tahun 2020-2024, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur, dimana referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

- a) domain arsitektur Proses Bisnis;
- b) domain arsitektur data dan informasi;
- c) domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d) domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e) domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f) domain arsitektur Layanan SPBE.

Pada tahun 2021, SPBE Kota Sungai Penuh telah dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil sebagai berikut :

- Domain Kebijakan SPBE : 1
- Domain Tata Kelola : 1
- Domain Manajemen SPBE : 1
- Domain Layanan SPBE : 2,09

Adapun indeks SPBE Kota Sungai Penuh tahun 2020 yaitu 1,5 dengan predikat kurang. Kondisi ini menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE masih rendah sehingga perlu upaya peningkatan.

2.3.2.7 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah daerah pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam izin usaha simpan pinjam. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi. Ketiga, kewenangan dalam penilaian kesehatan KSP/USP koperasi. Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota.

Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi, meliputi: pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotanya dalam daerah Kabupaten/Kota, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Perkembangan pelaksanaan pembangunan pada urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada perkembangan data sebagai berikut.

**Tabel II.60
Perkembangan Koperasi Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jml. Koperasi	142	147	151	151	151
2	Jml. Koperasi Aktif	85	86	96	93	92
3	Jml. Koperasi tidak Aktif	59	61	55	58	59
4	Persentase Koperasi Aktif	59,86	58,50	63,58	61,59	60,93
5	Jumlah Anggota	9.679	10.056	10.158	10.503	10.503
6	Modal Sendiri (Milyar)	27,58	66,14	63,98	48,97	76,06
7	Hutang (Milyar)	23,14	21,77	22,79	5,10	11,44
8	Total Asset (Milyar)	210,94	96,09	102,74	58,73	113,78
9	Volume Usaha (Milyar)	87,24	89,78	106,40	67,79	118,61
10	SHU (Milyar)	33,73	4,87	6,23	7,24	7,10
11	Tingkat Kesehatan Koperasi					
	- Sehat	18	20	18	20	20
	- Cukup Sehat	35	35	35	34	34
	- Kurang	4	3	4	1	1

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kinerja bidang koperasi dari tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jika dilihat dari persentase koperasi aktif, pada tahun 2016 persentase koperasi aktif di Kota Sungai Penuh sebesar 59,86 persen, angka ini mengalami kenaikan menjadi sebesar 60,93 persen pada tahun 2020. Demikian halnya volume usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 volume usaha mencapai sebesar 118,61 milyar.

Perkembangan UMKM di Kota Sungai Penuh tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel II.61
Perkembangan UMKM di Kota Sungai Penuh 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UMKM	8.009	8.309	8.635	8.772	8.772
2	Modal Sendiri					
3	Modal Luar					
4	Total Assets	668,669	691,348	527,818	709,045	709,045
5	Omzet	612,680	686,759	539,204	706,209	706,209
6	Tenaga Kerja	12.259	12.488		12.954	12.954

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021

Pada periode tahun 2016-2020, UMKM menunjukkan perkembangan yang baik, hal ini juga ditunjukkan dengan meningkatnya omzet dari UMKM. Pada tahun 2016 Jumlah omzet UMKM sebesar Rp.668,67 miliar meningkat menjadi sebesar Rp.709,045 miliar di tahun 2020.

**Tabel II.62
Percentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

No	Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mikro	6.767	7.084	7.372	7.461	7.461
2	Kecil	1.075	1.040	1.077	1.127	1.127
3	Menengah	167	185	187	184	184
Jumlah Mikro dan Kecil		7.842	8.124	8.449	8.588	8.588
Jumlah Mikro, Kecil dan Menengah		8.009	8.309	8.636	8.772	8.772
persen Usaha Mikro dan Kecil		97,91	97,77	97,83	97,90	97,90

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Sungai Penuh, tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat usaha mikro, kecil dan menengah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 8.018 unit menjadi sebesar 8.772 unit di tahun 2020. Jenis usaha didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang mencapai sebesar 97,90 persen dari total UMKM.

2.3.2.8 Penanaman Modal

Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akseleksi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penanaman modal di Kota Sungai Penuh difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Berikut adalah hasil kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal Kota Sungai Penuh tahun 2017-2020.

Tabel II.63
Jumlah Investasi di Kota Sungai Penuh Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. miliar)	58,73	58,21	112,316	221,317
Jumlah investor (PMDN/PMA)	319	161	328	279

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Sungai Penuh 2021 (Data NSWI).

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2017 nilai investasi sebesar Rp.58,73 miliar, mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.112,32 miliar di tahun 2019 dan di tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.221,32 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 97,05 persen dari tahun 2019.

2.3.2.9 Kebudayaan

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Sungai Penuh termasuk yang bercorak heterogen namun masih dalam pengaruh dominasi kebudayaan suku Kerinci yang merupakan suku bangsa asli Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh tak pernah lepas dari pengaruh budaya Kerinci. Secara turun temurun, nilai kehidupan tradisional khas Kerinci itu telah mewarnai pola kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh.

Nilai kehidupan tradisional khas Kota Sungai Penuh ini kemudian berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan suku bangsa lain yang semakin membuat kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh semakin berwarna dan khas sekaligus menjadikan kota ini sebagai kota multikultural dan multi suku bangsa. Ini pula yang kemudian semakin memperkaya khasanah budaya Kota Sungai Penuh.

Kekayaan khasanah budaya Kota Sungai Penuh yang lain tercermin pula dari keberadaan benda cagar budaya berupa gedung bersejarah yang tersebar di seluruh wilayah, selain itu, Kota Sungai Penuh dikenal sebagai wilayah yang

memiliki banyak kesenian daerah khas seperti tari rangguk, tari rantak kudo, dll. Ini pula yang menambah warna-warni khasanah budaya Kota Sungai Penuh.

Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, Kota Sungai Penuh mengemban sasaran meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Adapun salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan urusan kebudayaan diantaranya adalah Penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selama periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.64
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	2	0

Sumber : Dinas Budpar Kota Sungai Penuh Tahun 2021

Di Kota Sungai Penuh terdiri dari multikultural dan multi suku bangsa, hal ini akan semakin memperkaya khasanah budaya Kota Sungai Penuh. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh yang berbudaya yang berbasis kearifan lokal perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

2.3.2.10 Pangan

Penyelenggaran urusan ketahanan pangan di Kota Sungai Penuh dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain produksi gabah, beras dan ketersediaan pangan. Indikator ini tidak lain bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.

Regulasi Ketahanan Pangan, Pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 dirumuskan sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Kondisi ketahanan pangan dilihat dari 3 aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan.

Ketersedian Pangan Utama, Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Indikator yang digunakan dalam ketersediaan pangan, meliputi: tingkat ketersediaan energi dan protein yang

ketercapaiannya diukur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan.

Ketersediaan energi yang harus dicapai setiap Tahun yakni minimal 2.200 kkal/kap/hari, sedangkan ketersediaan protein minimal adalah sebesar 57 gram/kap/hari.

Tabel II.65
Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Per Kapita Kota Sungai Penuh dan Desa/Kelurahan Mandiri Pangan Tahun 2016-2020

Ketersediaan pangan utama :	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan energi perkapita	(K.Kal/kap/ hari)	3.432	3.463	3.463	3.512	3.540
Ketersediaan protein perkapita	(Gr/kap/hari)	88,67	86,18	86,18	90,46	94,73
Pengembangan Desa / Kel. Mandiri Pangan	persen	7,69	18,46	24,63	30,77	30,77

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Dari data di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat kota Sungai Penuh telah mampu memenuhi kebutuhan pangan yang diukur dari ketersediaan energi dan protein perkapita. Pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Meskipun demikian pencatatan data yang lebih cermat perlu diupayakan agar data dapat memberikan informasi yang valid guna menerapkan kebijakan yang tepat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kekuatan pangan keluarga.

Untuk menjaga Ketahanan Pangan di Kota Sungai Penuh perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait ketiga aspek ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Untuk lebih terjaganya ketahanan pangan maka perlu dibangun desa dan kelurahan tahan pangan serta pengaturan (regulasi) ketahanan pangan. Disamping itu penerapan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan, serta pendapatan.

2.3.2.11 Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dalam bidang kependudukan dan catatan sipil telah dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan. Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran tersebut utamanya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran, Ketersediaan database kependudukan dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Indikator ini mengalami peningkatan yang artinya tingkat kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukannya sudah mulai membaik seiring dengan perbaikan sistem

administrasi kependudukan. Capaian indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.66
Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk berKTP per satuan penduduk	75.894	77.107	74.582	75.079	71.660
2	Kepemilikan KTP(persen)	76	85	88	95	99
3	Penerbitan akta kelahiran	841	876	898	884	717
4	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, 2021

Selain itu Pelayanan KTP Elektronik Berbasis NIK dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional dan terpadu sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pemerintah Pusat memprogramkan kegiatan pemberian identitas penduduk yang bersifat unik atau khas dan tunggal dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang berlaku secara Nasional, dari Tahun ke Tahun meningkat seperti pada tabel berikut :

2.3.2.12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau obyek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Sungai Penuh antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata

jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), jumlah LSM, PKK aktif, Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dan Indeks Desa Membangun. Rata-rata tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang membaik, secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel II.67
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah LPM	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga
3	PKK aktif	69 Desa/Kel	69 Desa/Kel	69 Desa/Kel	69 Desa/Kel	69 Desa/Kel
4	Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Indeks Desa Membangun	-	-	-	0,8037	0,8276

Sumber :BPPMPKB Kota Sungai Penuh, 2021

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (<https://idm.kemendesa.go.id/status>), status desa dikelompokkan berdasarkan indeks sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815. Pada tahun 2020, 38 dari 65 desa berstatus Mandiri (58,46%) dengan 26 desa berstatus Maju (40%) dan satu desa berstatus Berkembang. Pada tahun 2021, 47 dari 65 desa berstatus Mandiri (72,31%) dengan 18 desa berstatus Maju (27,69%). Hal ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Sungai Penuh tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020.

2.3.2.13 Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang

dilaksanakan adalah program pengembangan data/informasi/statistik daerah. Penyelenggaraan urusan statistik di Kota Sungai Penuh digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan statistik sebagai berikut:

Tabel II.68
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Buku Sungai Penuh Dalam Angka (DDA)	ada	ada	ada	ada	ada
2	Ketersediaan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	ada	ada	ada	ada	ada
3	Ketersediaan Buku Indikator Ekonomi	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh, 2021

2.3.2.14 Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, akan tetapi juga menyangkut keamanan informasi.

Arah perubahan paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, melayani Kepala Daerah, informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, penyediaan layanan e-Goverment, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta layanan keamanan informasi dengan menerapkan sertifikasi elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik.

2.3.2.15 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah.

Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa

supaya tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Jumlah pengunjung pada Tahun 2019 adalah sebanyak 4.595 orang serta buku yang tersedia sebanyak 4.758 judul.

Tabel II.69
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	1	1	3	3	3
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	4.161	4.241	4.663	4.595	4.161
4	Jumlah Koleksi Bahan Bacaan dan Literasi di Perpustakaan	t.a.d	2.801	4.010	4.758	t.a.d

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Sungai Penuh, 2021

2.3.2.16 Kearsipan

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan untuk menyelamatkan, melestarikan dan memperbaiki sistem administrasi karsipan dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan arsip daerah. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota dalam upaya melestarikan karsipan adalah penataan dan pendataan sistem karsipan daerah, Pengadaan sarana prasarana sistem penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan sistem karsipan daerah serta pembinaan sistem karsipan.

Tabel II.70
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yg telah menerapkan arsip secara baku (%)	5	20,00	30,00	50,00	55,00

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Arsiparis dan Pengelola Arsip yang memiliki kompetensi Kearsipan (org)	t.a.d	0	1	4	5
3	Kecepatan/Efektifitas Waktu dlm Retrieval Arsip (menit)	t.a.d	15	14	11	10

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Sungai Penuh, 2021

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan di Kota Sungai Penuh terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku sebesar 55 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan peningkatan SDM dalam pengelola karsipan yang dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan. Namun berdasarkan penilaian kualitas pengelolaan arsip oleh Arsip Nasional RI di 2020, kualitas pengelolaan arsip di Kota Sungai Penuh baru mencapai nilai sebesar 35,75 (sangat kurang).

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu kota tertua di Sumatera dan Kota terpadat di Provinsi Jambi setelah. Kota Jambi serta pernah menjadi ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci Provinsi Sumatera Tengah sampai tahun 1958. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Pemerintah (*Government Besluit*) Nomor 13 Tanggal 03 November 1909 Lembaran Negara Nomor 523, Sungai Penuh ditunjuk sebagai Ibukota Kabupaten Kerinci, kemudian dimekarkan menjadi kota otonom tahun 2008, dan selanjutnya Kota Sungai Penuh dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membangun Kota Sungai Penuh. Kondisi ini semakin menantang lagi bila melihat luas Kota Sungai Penuh dimana ± 59,20 persen dari total luasnya merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Destinasi pariwisata yang ditawarkan di Kota Sungai Penuh juga sangat beragam, diantaranya wisata religi, wisata alam, wisata budaya, selain itu terdapat pula beberapa tempat dan event-event kebudayaan lain yang menarik untuk dinikmati. Dengan kondisi topografi yang berbukit dapat memberi warna bagi pengembangan Kota Sungai Penuh ke depan, yaitu potensi pemandangan *landscape* kota.

Kawasan perbukitan di Kota Sungai Penuh memiliki potensi pemandangan yang indah ke arah perkotaan yang memiliki ketinggian yang lebih rendah. Keberadaan bukit-bukit tersebut dapat menjadi titik titik pengembangan yang memberikan nilai *view* yang terbaik di Kota Sungai Penuh. Lokasi-lokasi perbukitan yang memiliki potensi diantaranya:

- 1) Kawasan bukit sentiong, Kawasan ini memiliki potensi *city view* dan pandangan ke arah pegunungan di *hinterland* kota dari lokasi-lokasi perbukitan;
- 2) Koridor sepanjang Sungai Jernih dan Renah Kayu Embun pariwisata Bukit Khayangan, Kawasan ini memiliki potensi pandangan ke arah pegunungan di *hinterland* kota dari lokasi-lokasi perbukitan;
- 3) Kawasan Pemerintahan Kantor Walikota. Kawasan ini memiliki potensi pandangan ke arah persawahan, pegunungan di *hinterland* kota, serta *city view*; dan
- 4) Kawasan Taman Bunga Talang Lindung. Kawasan ini memiliki pandangan ke arah persawahan, pegunungan di *hinterland* kota, serta *city view*. Selain itu, Kota Sungai Penuh merupakan salah satu pusat kehidupan prasejarah dan merupakan pusat kebudayaan melayu tua.

Untuk itu, sektor Pariwisata di Kota Sungai Penuh merupakan potensi yang masih sangat mungkin untuk dikembangkan baik berupa wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan karena kondisi geografisnya di daerah pegunungan yang memiliki panorama indah dan udaranya yang sejuk.

Jika dilihat dari posisi Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi maka tampak bahwa dari total 125 objek wisata alam di Provinsi Jambi, 5 (lima) diantaranya terdapat di Kota Sungai Penuh. Sedangkan objek wisata buatan baru terdapat 1 (satu) objek dan wisata sejarah/buatan sebanyak 13 objek dari 83 objek wisata budaya/sejarah di Provinsi Jambi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak objek wisata budaya/sejarah yang menjadi bukti pusat sejarah/kebudayaan melayu atau peninggalan melayu kuno mengenai budaya sejarah.

Kota Sungai Penuh yang merupakan bagian dari alam Kerinci menggambarkan kesaktian atau keajaiban, potensi ini merupakan sebuah anugerah yang tiada ternilai yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Kota yang berada di "Puncak Andalas" merupakan daerah yang memiliki satu kesatuan kultur dan satu kesatuan hukum adat. Potensi dan keaneka ragaman wisata alam dan kekayaan budaya yang dimiliki Kota Sungai Penuh telah mendapat pengakuan dari organisasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Dengan di kukuhkannya Kota Sungai Penuh sebagai anggota JKPI ke 41 pada Rakernas III JKPI tanggal 20 Juni 2013 di Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur.

Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) menilai bahwa Kota Sungai Penuh memiliki keanekaragaman Pusaka alam dan atau pusaka budaya (*tangible* dan *intangible*) termasuk berbagai peninggalan kebudayaan Islam seperti makam makam / jirat tokoh ulama pengembang agama Islam, Al-Qu'ran tulisan tangan, Masjid-masjid kuno serta berbagai peninggalan artefak zaman *megalitikum* dan *neolitikum* dan peninggalan aksara zaman klasik. Artefak dan Benda Cagar Budaya yang tersebar di alam Kerinci hingga saat ini masih banyak yang belum digali, dilain pihak benda-benda budaya yang telah ada belum sepenuhnya dirawat, beberapa diantaranya bahkan ada yang telah musnah ditelan pusaran kemajuan peradaban. Untuk itu dibutuhkan upaya yang serius

untuk menjaga benda-benda peninggalan budaya ini agar kota Sungai Penuh yang telah dicanangkan sebagai Kota Pusaka dapat memanfaatkan potensi wisata budaya ini dengan lebih baik pula.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Sungai Penuh tentunya harus terus membenahi dan melakukan pembangunan pariwisata, mulai dari destinasi dan atraksi, aksesibilitas, dan sarana prasarana dari dan menuju destinasi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku wisata serta berbagai cendera mata maupun oleh-oleh daerah yang akan menjadi ciri khas wisata kota ini, untuk itu ekonomi kreatif harus dikembangkan. Dengan demikian, perkembangan pariwisata di Kota Sungai Penuh nantinya diharapkan akan dapat meningkat dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagai usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Perkembangan pelaksanaan pembangunan pada urusan pariwisata pada tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada perkembangan data sebagai berikut :

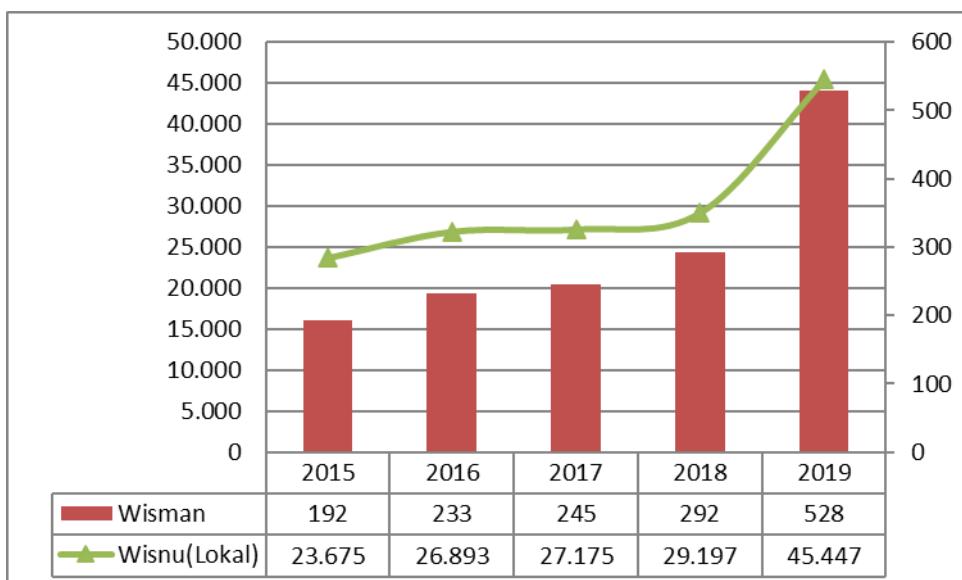
Tabel II.71
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Wisata (persen)	193,77	145,43	157,17	111,05	65,34
2	Lama Kunjungan Wisata (hari)	6,19	6,39	6,73	10,49	13,37
3	Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik	66,6%	66,6%	50%	66%	78,58%
4	Regulasi RIPARDA/RIPDA Kota Sungai Penuh	0	0	0	1	1
5	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	66,6%	66,6%	66,6%	66,7%	70%
6	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	t.a.d	15	25	40	45

Sumber: Dinas Budpar Kota Sungai Penuh, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan kinerja urusan pariwisata dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2020, jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik meningkat menjadi 78,58 persen seiring dengan penetapan regulasi RIPARDA/RIPDA Kota Sungai Penuh PAD sejak tahun 2019. Demikian halnya kinerja ekonomi kreatif, mengalami perkembangan dan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 terdapat 15 pelaku ekonomi kreatif, dan meningkat menjadi 55 pelaku ekonomi kreatif di tahun 2020.

Adanya beberapa objek wisata seperti Wisata Alam (Bukit Khayangan, Bukit sentiong, Taman Bunga Puti Senang, Kawasan Bukit Tapan, Air Terjun, Jembatan Kerinduan, Taman Bukit Benteng, Taman Puncak, Panorama Bukit Impian). Wisata Budaya (Mesjid Agung Pondok Tinggi, Mesjid Raya Rawang, Tabuh, Tanah Sebingkeh, Tanah Mendapo, Makam Nenek Siak Lengih, Batu sorban dan Makam Siak Alim, Batu Gong Nenek Betung, dan Rumah Larik). Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kota Sungai Penuh menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2015 jumlah wisatawan nusantara di Kota Sungai Penuh hanya sebanyak 23.675 orang, pada Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai sebanyak 45.447 orang. Demikian pula halnya kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan peningkatan dari sebanyak 192 orang pada Tahun 2015 menjadi 528 orang pada Tahun 2019.



Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2016-2020

**Gambar II.44
Kunjungan Wisata di Kota Sungai Penuh Tahun 2015-2019**

2.3.3.2 Pertanian

Pada urusan pertanian, terdapat 3 (tiga) sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan. Dari segi produksi, secara umum produksi sektor pertanian di Kota Sungai Penuh dari tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Capaian indikator urusan pertanian Kota Sungai Penuh pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.72
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun					
		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	persen	6,42	6,42	6,54	6,56	6,61
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	persen	2,76	3,05	3,12	3,18	3,37
3	Produksi Sektor Pertanian	Ton / th	132.769	138.809	144.920	147.187	t.a.d
4	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Keras) terhadap PDRB	persen	1,87	2,02	2,08	2,16	2,23
5	Produksi Sektor Perkebunan	Ton / th	1.060	1.100	1.130	1.150	1.180
6	Nilai Tukar Petani	persen	99,50	100,20	101,24	101,85	101,92
7	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Kw / Ha	59,35	59,80	60,15	60,32	61,20
8	Cakupan Bina Kelompok Tani	persen	47,5	62,10	70,15	86,20	89,40
9	Produksi Ternak	Ton / th	559,40	595,33	644,90	689,00	456,60
10	Produktifitas Ternak	persen	N.a	N.a	1,00	1,30	1,60

Sumber : Dinas TPHP dan Dinas Peternakan&Perikanan Kota Sungai Penuh, 2021

Pengembangan prioritas sub sektor perkebunan terutama komoditi unggulan Kota Sungai Penuh seperti komoditi kopi robusta dan arabika serta kayu manis dan komoditi unggulan lainnya perlu menjadi perhatian.

Untuk produksi ternak dari tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Produksi ternak di tahun 2016 sebesar 559,40 ton meningkat menjadi sebesar 689 ton di tahun 2019, namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 456,60 ton.

2.3.3.3 Perdagangan

Pada urusan perdagangan, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen.

Tabel II.73
**Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor Kota Sungai Penuh 2015-2019**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	a. ADHB (Milyar Rp)	1.628,47	1.857,44	2.054,88	2.230,39	2.228,60
2	b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	1.011,69	1.082,68	1.149,68	1.237,64	1.198,94
3	Kontribusi thd Tot PDRB (%-ADHB)	28,41	29,15	29,56	29,81	29,46
4	Laju Pertumbuhan (%)	6,51	7,02	6,19	7,65	-3,05

Sumber : PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas, sektor perdagangan di Kota Sungai Penuh masih merupakan sektor strategis penyumbang PDRB Kota Sungai Penuh. Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 20 persen. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini mencapai 2.228,60 miliar rupiah atau sekitar 29,46 persen. Hal ini sangat mendukung terhadap visi Kota Sungai Penuh sebagai Kota Perdagangan dan Jasa.

Tabel II.74
Sarana Perdagangan/Niaga Kota Sungai Penuh Tahun 2020

No	Lokasi	Penempatan (unit)				
		Toko	Kios	Los	Pelataran	Jumlah
1	Pasar Beringin Jaya I		50			50
2	Pasar Kinca Plaza		203		67	270
3	Pasar Tanjung Bajure					
4	Pasar MKS		56			56
5	Pasar Penyangga Rawang				134	134
6	Pasar penyangga Talang lindung					
7	Pasar penyangga Kumun				27	27
8	Swasta				30	30
	Jumlah		309		258	567

Sumber : Dinas Perdagri Kota Sungai Penuh, 2020

Kota Sungai Penuh memiliki 8 buah pasar yang menunjang aktivitas perdagangan di masyarakat yaitu Pasar Beringin Jaya I, Pasar Kinca Plaza, Pasar Tanjung Bajure, Pasar MKS, Pasar penyangga Rawang, Pasar penyangga Talang lindung, Pasar penyangga Kumun dan Swasta. Ketersediaan sarana dan Prasarana perdagangan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 secara rinci dapat kita lihat pada tabel di atas.

Walaupun demikian, sarana perdagangan yang ada saat ini belum bisa mengakomodir semua pedagang yang ada di Kota Sungai Penuh Hal ini disebabkan oleh belum dimanfaatkannya sebagian besar sarana perdagangan yang ada secara maksimal.

Kemajuan sektor perdagangan sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian di Kota Sungai Penuh, didukung oleh 40 unit kelompok pertokoan yang terdiri 3.206 warung/toko, 4 unit pasar umum, 1 unit pasar hewan, dan 25 unit Swalayan, 4 unit pasar umum (3 pasar tradisional dan 1 pasar modern) serta 25 unit swalayan. Sehingga pantaslah sektor ini mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Pasar umum di Kota Sungai Penuh saat ini terdiri dari:

1. Pasar Beringin Jaya I terdiri atas 28 kios, 37 los pemetaan, pada umum merupakan pusat perdagangan grosiran disamping perdagangan lainnya.
2. Pasar Tanjung Bajure; terdiri atas 7 kios, pasar ini merupakan tempat penjualan berbagai komoditi sembako dan barang lainnya.
3. Kincai Plaza; merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan jasa, kawasan ini yang didukung oleh 422 kios.
4. Pasar Pond; merupakan pusat perdagangan bahan bahan kebutuhan harian yang didukung oleh lebih kurang 700 pedagang.
5. Plaza Artoz merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan jasa.
6. Plaza Arafah; merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan jasa.

Potensi perdagangan di Kota Sungai Penuh di prioritaskan pada pengembangan pasar tradisional menjadi pasar modern. Potensi pasar di Kota Sungai Penuh yang dapat dikembangkan yaitu: pasar pons, kios pasar tanjung bajure, pasar beringin jaya II, pasar mambo/ramadhan, kios kincai plaza, pelataran lantai dasar kincai plaza dan pasar malam/MKS. Namun kurangnya promosi potensi yang dimiliki dan tidak adanya peraturan tegas yang dilaksanakan terhadap PKL nakal dan pedagang musiman yang membuat kesemberautan pengelolaan pedagang yang ada, sehingga perkembangan pasar yang ada di Kota Sungai Penuh berjalan di tempat.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Sungai Penuh, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Perkembangan Ekspor Kota Sungai Penuh 2016-2020 dapat dilihat pada perkembangan data sebagai berikut.

Tabel II.75
Perkembangan Ekspor Kota Sungai Penuh 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Total Nilai Ekspor					
	ADHB (Juta Rp)	4.918.692,07	5.365.796,27	5.398.575,02	5.664.087,10	5.725.877,51
	ADHK 2010 (Juta Rp)	3.746.474,31	3.886.322,89	4.083.364,80	4.246.983,04	4.135.905,32
2	Proporsi terhadap PDRB (persen -ADHB)	85,82	84,22	77,65	77,67	75,68
3	Pertumbuhan	3,20	3,73	5,07	4,01	(2,62)

Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha 2016-2021

*Angka sementara; **Angka sangat sementara;

Secara total, dalam kurun waktu 2016-2020 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016 nilai ekspor barang dan jasa (ADHB) sebesar 4.918.692,07 juta rupiah meningkat menjadi sebesar 5.725.877,51 juta rupiah pada tahun 2020. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kota Sungai Penuh.

Tabel II.76
Perkembangan Impor Kota Sungai Penuh 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Total Nilai Ekspor					
	a. ADHB (Juta Rp)	4.117.474,09	4.287.401,19	4.076.221,98	4.117.874,20	4.087.874,20
	b. ADHK 2010 (Juta Rp)	3.420.101,61	3.458.409,12	3.584.606,81	3.650.174,99	3.442.617,66
2	Proporsi thd PDRB (% ADHB)	71,84	67,29	58,64	55,04	54,03
3	Pertumbuhan	0,59	1,12	3,55	1,83	(5,69)

Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha 2016-2021

*Angka sementara; **Angka sangat sementara;

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Sungai Penuh. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E)

dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Sungai Penuh di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Sungai Penuh terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri. Berikut tabel perkembangan ekspor bersih perdagangan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020 yang dihasilkan dari perhitungan jumlah Nilai Ekspor dikurangi dengan jumlah Nilai Impor.

**Tabel II.77
Tabel Ekspor Bersih Perdagangan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai ekspor (Rp)	4.918.692,07	5.365.796,27	5.398.575,02	5.664.087,10	5.725.877,51
2	Nilai Impor (Rp)	4.117.474,09	4.287.401,19	4.076.221,98	4.117.874,20	4.087.874,20
Ekspor Bersih		801.217,98	1.078.395,08	1.322.353,04	1.546.212,90	1.638.003,31

Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha 2016-2021

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan berjumlah Rp.801,22 ribu yang kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi Rp.1,64 juta.

2.3.3.4 Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri di Kota Sungai Penuh mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun kontribusinya dari sisi penyerapan tenaga kerja masih belum memuaskan. Berdasarkan tabel di bawah ini, industri di Kota Sungai Penuh didominasi oleh industri pangan. Sampai tahun 2020 berjumlah 534 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2005 orang. Kelompok industri lain yang mendominasi jenis industri di Kota Sungai penuh adalah kelompok industri Kerajinan dengan jumlah unit usaha sebanyak 413 unit dan jumlah tenaga kerja 1.581 orang. Perkembangan pelaksanaan pembangunan pada urusan industri pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.78
Perkembangan Sektor Industri Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Kelompok Industri	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Pangan						
	a. Unit Usaha	Unit	396	452	464	516	534
	b. Tenaga Kerja	Orang	2085	2162	2208	2254	2005
2	Sandang						
	a. Unit Usaha	Unit	157				
	b. Tenaga Kerja	Orang	676				
3	Kimia dan Bahan Bangunan						
	a. Unit Usaha	Unit	82	69	69	69	69
	b. Tenaga Kerja	Orang	694	587	587	587	471
4	Logam dan Elektronika						
	a. Unit Usaha	Unit	112	95	95	96	96
	b. Tenaga Kerja	Orang	520	476	427	431	431
5	Kerajinan						
	a. Unit Usaha	Unit	111	349	357	410	413
	b. Tenaga Kerja	Orang	847	1170	1798	1837	1581
Jumlah Unit Usaha			858	965	985	1091	1112
Jumlah Tenaga Kerja			4822	4395	5020	5109	4488

Sumber : Dinas Perdagri Kota Sungai Penuh, 2021

Sektor perindustrian (Industri Pengolahan) dalam komposisi perekonomian di Kota Sungai Penuh adalah merupakan sektor penyumbang ketiga terkecil. Pada tahun 2020 sektor perindustrian memberikan kontribusi sebesar 0,61 persen dari total PDRB. Sedangkan jika dilihat dari total PDRB sektor industri pengolahan, sebagian besar masih didominasi kontribusi dari industri makanan, minuman.

Tabel II.79
Perkembangan Sektor Industri Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	ADHB/ <i>at current price</i> (Milliar Rupiah)	36,89	41,35	43,59	45,61	46,47
2	ADHK/ <i>at 2010 constant price</i> (Milliar Rupiah)	27,81	28,92	30,11	31,33	31,39
3	Kontribusi terhadap Total PDRB (persen)	0,64	0,65	0,63	0,61	0,61
4	Laju Pertumbuhan (persen)	6,24	4,00	4,12	4,06	0,19

*Angka sementara; **Angka sangat sementara;

Sumber . BPS, Tahun 2021

2.3.3.5 Kehutanan

Kota Sungai Penuh memiliki luas 39.150 ha yang terdiri dari lahan non sawah, persawahan dan hutan. Penggunaan lahan terbesar yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan hutan lindung seluas 23.177,60 ha (59,20%) dan lahan budidaya seluas 15.967 ha (40,80%). Pada tahun 2012 Kota Sungai Penuh membentuk 3 kecamatan baru yaitu Kecamatan Pondok Tinggi hasil pemekaran Kecamatan Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Koto Baru hasil pemekaran dari Kecamatan Pesisir Bukit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Bungkal hasil pemekaran Kecamatan Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal.

Tabel II.80
Luas wilayah dan luas budidaya serta letak TNKS perkecamatan di Kota Sungai Penuh

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Luas TNKS		Luas Budidaya	
		Ha	Persen	Ha	persen	Ha	persen
1.	Tanah Kampung	1.100	2,81	-	-	1.100	6,89
2.	Sungai Penuh	335	0,86	-	-	335	2,10
3.	Hamparan Rawang	1.215	3,10	-	-	1.215	7,61
4.	Pesisir Bukit	1.946	4,97	379	1,64	1.567	9,81
5.	Kumun Debai	14.200	36,27	11.032	47,60	3.168	19,83
6.	Pondok Tinggi	9.095	23,23	4.600	19,85	4.495	28,14
7.	Sungai Bungkal	11.095	0,42	7.167	30,92	3.928	24,59
8.	Koto Baru	164	28,34	-	-	164	1,03

Sumber : BPS Kota Sungai Penuh. 2020

2.3.3.6 Energi Dan Sumberdaya Mineral

Kota Sungai Penuh memiliki sektor pertambangan yang sangat potensial untuk dikembangkan meliputi Material, Emas, Kaoli, Granit, Basalt, Batu Bata dan Sirtu. Potensi pertambangan yang terkandung di Kota Sungai Penuh hanya sebagian yang diketahui secara pasti potensinya, sehingga kandungan kekayaan alam tersebut masih diteliti oleh Pemerintah Daerah. Jenis potensi sumber daya alam tersebut berupa potensi bahan Emas, Kaoli, dan Granit.

Dalam hal kelistrikan, seluruh kecamatan telah dialiri listrik, baik itu melalui layanan PLN maupun dan PLTMH yang dibangun oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik di daerah terpencil.

2.3.3.7 Kelautan Dan Perikanan

Pembangunan Kota Sungai Penuh dalam jangka panjang khususnya pada bidang perikanan memang sedang diarahkan pemanfaatan sumber daya nya pada perikanan secara optimal dan rasional bagi kesejahteraan manusia tanpa merusak sumberdaya lingkungan yang ada.

Dalam rangka memenuhi pengembangan budidaya perikanan yang ada di Kota Sungai Penuh perlu ada upaya yang mampu meningkatkan hasil produksi perikanan tersebut, salah satu nya dengan melakukan pengadaan sarana budidaya perikanan dan melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok tani pembudidayaan perikanan, selain itu diupayakan pengembangan daya saing/pengolahan perikanan di Kota Sungai Penuh. Capaian kinerja urusan perikanan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II.81
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

No		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	persen	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
2	Produksi ikan	Ton	317,90	311,66	179,16	406,60	459,01
3	Produktifitas ikan	persen	84,00	80,74	42,75	80,90	89,74
4	Konsumsi ikan	Per센 Kap/th	28,00	29,00	29,99	33,93	33,84

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, 2021

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Sungai Penuh, hasil penilaian RB dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.82
Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh
Tahun 2020**

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	4,17
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,90
	III. Reform	30,00	2,00
	Total Komponen Pengungkit	60,00	11,07
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,58
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,73

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
3	Pemerintahan yg bersih dan bebas KKN	10,00	8,73
4	Kinerja Organisasi	10,00	4,43
	Total Komponen Hasil	40,00	29,47
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	40,54

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, 2021

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Sungai Penuh tahun 2020 mendapat predikat C dengan nilai sebesar 40,54, artinya adalah agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mempercepat tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah melakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi kinerja Kota Sungai Penuh tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.83
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kota Sungai Penuh 2016-2020

No	Tahun	Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi
1	2016	CC	50,29
2	2017	CC	51,67
3	2018	B	62,17
4	2019	B	63,06
5	2020	B	65,37

Sumber : Setda Kota Sungai Penuh, 2021

Evaluasi kinerja pemerintah daerah ini meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh dinilai meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016, Kota Sungai Penuh mendapatkan predikat CC. Selama 3 tahun terakhir Kota Sungai Penuh meraih predikat B. Pada tahun 2020 Kota Sungai Penuh kembali meraih

predikat B dengan nilai evaluasi sebesar 65,37. Kedepan diharapkan Kota Sungai Penuh dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga nilai hasil evaluasi juga dapat ditingkatkan. Kategori Baik artinya adalah Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kota Sungai Penuh dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mendapatkan kategori tinggi. Hasil evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Sungai Penuh dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.84
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018*
1	Nilai Angka	n.a	n.a	2,9275
2	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber . Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, 2021 * Data terbaru

Selain itu, sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kota Sungai Penuh melayani masyarakatnya digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Perangkat Daerah pelaksana pelayanan publik. IKM tahun 2016 dan 2017 diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sedangkan IKM tahun 2018 sampai tahun 2020 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai rata-rata IKM perangkat daerah di Kota Sungai Penuh dari tahun 2016 sampai tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel II.85
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pemerintah
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai Rata-rata IKM Perangkat Daerah	Kategori
2016	70,40	Baik
2017	77,08	Baik

Tahun	Nilai Rata-rata IKM Perangkat Daerah	Kategori
2018	80,96	Baik
2019	83,19	Baik
2020	92,60	Sangat Baik

Sumber. Setda Kota Sungai Penuh, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata IKM perangkat daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2016, nilai rata-rata IKM perangkat daerah adalah 70,40. Tahun 2018, Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan nilai rata-rata IKM perangkat daerah menjadi 80,96. Hingga tahun 2020 meningkat menjadi 92,60 dengan kategori Sangat Baik. Namun berdasarkan hasil penilaian terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan di Kota Sungai Penuh oleh Ombudsman RI, baru mencapai nilai sebesar 69,91 (zona kuning).

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda.

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan; serta Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.5.1 Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 258 ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Ruang lingkup urusan perencanaan meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 1)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan 3)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan selalu dalam koridor mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Mekanisme *top-down* dilakukan dengan proses teknokratik, yaitu penyusunan rancangan awal, evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan proses *bottom-up* dilaksanakan melalui penjaringan aspirasi masyarakat pada musrenbang RW (pra-musrenbang kelurahan), musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perkembangan kinerja penyelenggaraan perencanaan di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.86
Kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, KUA-PPAS, KUAP)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian Evaluasi Perencanaan, Pembangunan (RTRW, dll)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD Tahunan	90,00	90,00	90,00	90,00	95,00
4.	Kesesuaian Program di RKPD Tahunan dengan Program di APBD Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dipublikasikan di Website Pemerintah	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6.	Tingkat Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan dan Desa/Kelurahan	n.a	85,00	85,95	86,90	87,85

Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh, Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat perkembangan kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Sungai Penuh kurun waktu 2016 sampai dengan 2020. Persentase Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, KUA-PPAS, KUAP pada tahun 2016-2020 sebesar 100 persen. Indikator Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian Evaluasi Perencanaan, Pembangunan (RTRW, dll) pada tahun 2016-2020 sebesar 100 persen. Persentase Tingkat Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang pada tahun 2020 sebesar 87,85 persen, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 86,90 persen.

2.3.5.2 Keuangan

Pelaksanaan urusan keuangan sebagai salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didukung oleh Badan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab mengelola pendapatan, keuangan dan asset pemerintah. Optimalisasi PAD, pengelolaan anggaran sesuai regulasi dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan serta pengelolaan aset terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Indikator keuangan daerah dapat dilihat dari indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan persentase peningkatan PAD. Selama 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2019, Kota Sungai Penuh mampu meraih opini WTP. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*unqualified opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*qualified opinion*, Tidak Wajar/*adversed opinion* dan Tidak Menyatakan Pendapat/ *disclaimer of opinion*.

Penyelenggaraan urusan keuangan dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berikut perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah selama 5 tahun terakhir:

Tabel II.87
Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase belanja pendidikan (20persen)	25,84	21,13	21,77	20,37	20,00
3	Persentase belanja kesehatan (10persen)	5,28	7,45	7,65	8,87	11,95
4	Bagi hasil Kabupaten/Kota dan desa	6,50	10,95	11,56	11,65	13,26
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu				
6	Rasio kemandirian keuangan daerah	5,18	4,58	4,70	4,24	3,87
7	Persentase asset yang diserahkan oleh Kab Kerinci	48,99	52,98	56,97	60,98	64,96

Sumber : Bukeuda Kota Sungai Penuh, Tahun 2021

Persentase belanja pendidikan dari tahun 2016-2020 mencapai angka 20 persen. Untuk belanja kesehatan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 5,28 persen meningkat menjadi 11,95 persen di tahun 2020. Demikian halnya bagi hasil Kabupaten/Kota dan desa meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020, dari sebesar 6,50 persen menjadi sebesar 13,26 persen.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah tahun 2016-2020 masih sangat rendah dan memiliki kecenderungan yang menurun. Sampai tahun 2020 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 3,74 persen. Ini menunjukkan bahwa Tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah karena disebabkan relatif rendahnya proporsi PAD dalam struktur keuangan Daerah yang menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah terutama

Pendapatan Asli Daerah sehingga secara bertahap ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah, pertumbuhan realisasi PAD selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar minus 5,02 persen, meskipun tingkat capaian di tahun 2020 mencapai 104,29 persen, dari target PAD di tahun 2020 sebesar 27,86 miliar dan terealisasi sebesar Rp.29,05 miliar.

Percentase asset yang diserahkan oleh Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh tahun 2016 sebesar 48,99 persen meningkat menjadi 52,98 persen di tahun 2017. Hingga tahun 2020 mencapai sebesar 64,96 persen, dan berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sampai tahun 2021 mencapai sebesar 83,00 persen.

2.3.5.3 Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring/*network* dengan *stakeholder* lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, menciptakan inovasi dan kajian yang berbasis penelitian sehingga yang nantinya dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan.

Dalam melakukan penelitian dan pengembangan mencakup 7 urusan utama yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan pengoperasian, dan evaluasi kebijakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016. Selain itu Balitbang juga menjadi motor dalam menggerakkan inovasi daerah terutama dibidang pelayanan publik serta mendukung lahirnya inovasi dan inovator dari kalangan masyarakat. Hingga tahun 2020 telah terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi yang dihasilkan, yaitu :

1. Pencegahan Covid-19 pada Sektor Hotel;
2. Inovasi Pengembangan Kopi; dan
3. Inovasi Pengembangan Produk Olahan Sirsak.

Inovasi Pelayanan Publik, seiring berjalan pengembangan Sirsak dan Kopi di Kota Sungai Penuh, Balitbang melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dengan menfasilitasi di bidang promosi melalui even-even tertentu melalui lomba-lomba dengan mengutus para penggiat sirsak dan kopi.

Tabel II.88
Inovasi di Kota Sungai Penuh

No	Nama Inovasi	Tahap Inovasi	Inisiator Inovasi Daerah	Jenis Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Inovasi Daerah	Rancang Bangun Pokok Perubahan yang dilakukan	Tujuan Inovasi Dareah	Manfaat yang diperoleh	Hasil Inovasi
1	Inovasi Pencegahan Covid-19 pada Sektor Hotel	Implementasi	Masyarakat	Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Pariwisata	Dengan pemakaian masker, jaga jarak, cek suhu tubuh maupun pemakaian hand sanitizer adalah merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam kehidupan masa pandemi Covid-19 agar terhindar dari penularan virus.	Agar melaksanakan <i>New Normal</i> , Stakeholder dan masyarakat dapat lebih mengutamakan protokol kesehatan	Dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian di daerah disegala sektor dan kehidupan berjalan normal seperti sebelum masa pandemi Covid-19 ini terjadi dan dapat terhindar dari penularan.	Kolabiasi kearifan lokal dan protokol kesehatan
2	Inovasi Pengembangan Kopi	Penguatan	Masyarakat	Pengolahan Kopi	Inovasi Peningkatan Hasil Bumi	Pertanian /Perkebunan	Kopi Sungai Penuh adalah komoditi spesial yang pernah mendapatkan beberapa penghargaan di ajang perlombaan nasional maupun internasional, upaya mempertahankan citra asli Kopi Sungai Penuh adalah dengan penguatan : Sumber Daya Manusia Kelompok tani; Menciptakan Masyarakat Peduli Indikasi Geografis; Mewujudkan Indikasi Geografis Kopi Kota Sungai Penuh dengan daya saing yang tinggi	Meningkatkan Daya Saing Kopi Kota Sungai Penuh	Pertumbuhan ekonomi masyarakat.	Pertumbuhan Pengembangan daya jual Kopi Sungai Penuh

No	Nama Inovasi	Tahap Inovasi	Inisiatör Inovasi Daerah	Jenis Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Inovasi Daerah	Rancang Bangun Pokok Perubahan yang dilakukan	Tujuan Inovasi Dareah	Manfaat yang diperoleh	Hasil Inovasi
3	Inovasi Pengembangan Produk Olahan Sirsak	Penguatan	Masyarakat	Pengolahan Produk Sirsak	Inovasi Peningkatan Hasil Bumi	Pertanian /Perkebunan	Sirsak adalah komoditi spesial yang tumbuh di Kota Sungai Penuh, rendahnya harga buah namun dengan manfaat yang kaya pada sirsak menumbuh ide ditengah masyarakat untuk mengolah sirsak menjadi berbagai olahan makan. Sirsak diolah dalam bentuk beberapa inovasi seperti Dodol Sirsak, Sirup Sirsak, Selai Sirsak, dll. Upaya tersebut dilaksanakan dalam bentuk penguatan: Sumber Daya Manusia Kelompok tani; Pemasaran produk olahan sirsak dalam bentuk promosi daerah; Membantu masyarakat untuk membuat hak paten terhadap produk olahan tersebut.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Kota Sungai Penuh	Pertumbuhan ekonomi masyarakat.	Pertumbuhan Pengembangan daya jual Produk Olahan Sirsak Kota Sungai Penuh

Sumber : Balitbang Kota Sungai Penuh, 2021

2.3.5.4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan kepegawaian diarahkan dengan meningkatkan pengembangan kapasitas aparatur dengan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, peningkatan kedisiplinan dan penempatan sesuai dengan kompetensi. Pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan menjadi daya ungkit (*leverage*) yang kuat dalam mewujudkan kinerja PNS yang kompeten dan professional.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Sungai Penuh dilayani oleh Aparatur Sipil Negara sebanyak 2.700 orang pada Tahun 2020, terdiri dari ASN yang tingkat pendidikan SD sebanyak 1, berpendidikan SMP sebanyak 4, berpendidikan SMA sebanyak 243, berpendidikan D.I dan D.II sebanyak 126, berpendidikan D.III sebanyak 353 berpendidikan DIV/S1/S2/S3 sebanyak 1.973. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas PNS dilihat dari tingkat pendidikannya cukup baik. Dengan tingkat pendidikan yang cukup diharapkan PNS akan dapat melayani masyarakat dengan baik. Hingga tahun 2020 Proporsi PNS didominasi golongan III sebesar 65,37 persen, sedangkan golongan II hanya sebesar 863 persen. Perkembangan jumlah PNS dari Tahun 2016-2020 berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan secara rinci terlihat pada tabel berikut:

**Tabel II.89
Perkembangan Jumlah PNS, menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan
Kepangkatan Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

No	Jumlah PNS	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PNS Daerah menurut tingkat pendidikan	2.886	2.797	2.775	2.685	2700
	• SD	3	3	1	1	1
	• SMP	4	4	4	2	4
	• SMA	359	479	381	274	243
	• D.I dan D.II	211	308	227	164	126
	• D III	337	392	360	346	353
	• Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d	1972	1611	1802	1898	1973
2.	Jumlah PNS Daerah menurut golongan	2.861	2.797	2.775	2.685	2700
	• Golongan I	4	2	2	2	3
	• Golongan II	396	345	280	230	233
	• Golongan III	1628	1629	1690	1683	1765
	• Golongan IV	833	815	803	770	699

Sumber : BKPSDM Kota Sungai Penuh, 2021

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih ditemukan beberapa kendala diantaranya kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, belum optimalnya penerapan SOP pelayanan, belum meratanya persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah dari segi jumlah maupun kualitas, belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional, disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan, masih belum mencukupinya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai, tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aparatur masih perlu ditingkatkan. Untuk jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan diklat yang telah diikuti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.90
Jumlah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang Mengikuti Diklat Tahun 2016-2020

No	Jenis Diklat	2016	2017	2018	2019	2020
1	Teknis	4	1	7	128	133
2	Fungsional	-	9	3	190	161
3	Kepemimpinan	-	1	-	-	-
4	Prajabatan	107		11		99

Sumber: BKPSDM Kota Sungai Penuh Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan pegawai yang mengikuti diklat, walaupun anggaran APBD terbatas disiasati dengan pelaksanaan pola kontribusi dengan menggunakan APBD provinsi. Untuk tahun-tahun kedepan diklat akan dilanjutkan dengan pola kontribusi dan anggaran lain diluar APBD.

Reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat dilihat dengan meningkatnya kapasitas manajemen aparatur yang profesional dengan tolak ukurnya adalah Indeks Profesional Aparatur. Berdasarkan peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN.

Pengukuran Indeks Profesional ASN ini diukur dari 4 dimensi yaitu, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai, secara bobot dari seluruh dimensi ini adalah 100 persen. Pada tahun 2019 Kota Sungai Penuh sudah mencoba melakukan pengukuran Indeks Profesional ASN terhadap 2.007 orang PNS dengan capaian rata-rata sebesar 9,36 persen. Bila dilihat dari kualifikasi dalam peraturan BKN capaian nilai 59, berada pada posisi rentang nilai Sangat Rendah.

2.3.6 Unsur Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Disamping itu, pelaksanaan fungsi pengawasan juga melekat pada lembaga perwakilan rakyat daerah melalui peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga legislatif. Hal ini terlihat dengan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur yang melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah dan peraturan perundang- undangan. Dalam pelaksanaan tugas, Inspektorat Daerah Kota Sungai Penuh didukung oleh fungsional pengawas sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.91
Klasifikasi Pengawas Intern Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

NO	Klasifikasi	Jumlah (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Auditor Madya	0	1	2	2	2
2	Auditor Muda	7	8	11	15	13
3	Auditor Pertama	9	4	7	4	8
4	Auditor Pelaksana	0	0	0	0	0
5	Auditor Penyelia	0	0	0	0	0
6	P2UPD Madya	1	3	3	3	3
7	P2UPD Muda	8	3	3	5	5
8	P2UPD Pertama	1	0	0	0	0
Jumlah		26	19	26	29	31

Sumber : Inspektorat Kota Sungai Penuh, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pengawas Intern pada tahun 2020 meningkat menjadi 31 orang .penambahan yang signifikan terjadi pada auditor pertama dengan jumlah total 8 orang dari sebelumnya 4 orang. Namun program peningkatan profesionalisme pemeriksa dan aparatur masih perlu ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pengawasan internal dapat terlaksana sesuai dengan sistem dan prosedur.

Pada tahun 2020 pelaksanaan SPIP oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh berada pada Level 3, artinya adalah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kapabilitas APIP hingga tahun 2020 berada pada level 2 yang artinya adalah APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Tabel II.92

Tingkat Kematangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Level Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3
2	Level Kapabilitas APIP	1	2	2	2	2

Sumber. Inspektorat Kota Sungai Penuh, 2021

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan

Kondusivitas daerah di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 2016-2020 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain pencurian, dan narkotika. Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial.

Kondisi politik Kota Sungai Penuh dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai penggerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum. Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh, selama tahun 2016 hingga tahun 2020 telah dilakukan pembinaan politik sebanyak 10 kali pembinaan.

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pamilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2020 telah diadakan pemilihan Wiliyota dan Wakil WaliKota Sungai Penuh dengan tingkat partisipasi di Kota Sungai Penuh sebesar 82,62 persen.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur berikut ini:

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Tabel II.93
Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Sungai Penuh Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019-2020

Kelompok Komoditas	Pengeluaran per Kapita Sebulan			
	Percentase		Rata-rata (rupiah)	
	2019	2020	2019	2020
Jumlah makanan	50,99	51,31	682.411,00	697.670,30
Jumlah bukan makanan	49,01	48,69	656.022,00	662.176,44
Jumlah pengeluaran	100,00	100,00	1.338.432,00	1.359.847,00

Sumber: Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2021

Dari tahun 2019 sampai tahun 2020 nilai pengeluaran Makanan yang dihasilkan lebih tinggi dari pada nilai pengeluaran Non Makanan. Ini berarti bahwa konsumsi masyarakat Kota Sungai Penuh lebih banyak ke pengeluaran untuk Makanan dari pada Non makanan. Rendahnya konsumsi non pangan di Kota Sungai Penuh disebabkan oleh tidak mencukupinya pendapatan masyarakat untuk membiayai pengeluaran primer dan tersier. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enam kebutuhan utama, baik berupa kebutuhan primer (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

Tabel II.94
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan
Tahun 2019-2020

No.	Gelongan pengeluaran	Percentase penduduk	
		2019	2020
1	< 150.000	0.00	0.00
2	150.000-199.999	0.00	0.00
3	200.000-299.999	0.00	0.24
4	300.000-499.999	4.20	2,57
5	500.000-749.999	20.45	20,39
6	750.000-999.999	21.22	19,78
7	1.000.000-1.499.999	27.59	26,61
8	>1.500.000	26.53	30,41

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2021

Dilihat dari persentase penduduk menurut golongan pengeluaran tampak bahwa, penduduk kota Sungai Penuh telah mengalami peningkatan pendapatan selama periode tahun 2019-2020, hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk menurut golongan pengeluaran. Pada tahun 2019, persentase tertinggi berada pada golongan pengeluaran Rp.1.000.000/bulan sedangkan pada tahun 2020 persentase tertinggi berada pada golongan pengeluaran yang lebih tinggi yakni >Rp 1.500.000 /bulan.

2.4.1.2 Produktivitas Total Daerah

Penghitungan produktivitas total daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerja. Produktivitas total daerah ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam 3 sektor besar yaitu *agriculture*, *manufacture*, dan *services*. **Sektor agriculture terdiri dari** sektor pertanian; kehutanan; dan perikanan. **Sektor manufacture terdiri dari** sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang; serta konstruksi. **Sektor services terdiri dari** sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan tabel di bawah ini, lapangan usaha yang paling produktif di Kota Sungai Penuh adalah sektor *service* sebesar 116,98 juta rupiah/jiwa, dan jumlah tenaga kerja paling banyak terserap ada di sektor *services* ini. Hal ini menunjukkan bahwa sektor *services* merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Sungai Penuh, diikuti sektor *manufacture* dan

agriculture. Meskipun demikian, produktivitas sektor *service* ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,02 persen per tahun, lebih rendah dari pertumbuhan sektor *manufacture* yang mencapai sebesar 0,13 persen per tahun. Sedangkan sektor *agriculture* mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 0,23 per tahun.

Tabel II.95
Produktivitas Total Daerah Kota Sungai Penuh 2019-2020

Nilai PDRB ADHK			
Lapangan Usaha	Satuan	2019	2020
<i>agriculture</i>	Juta Rp	274.896,28	279.500,44
<i>Manufacture</i>	Juta Rp	631.396,36	627.468,44
<i>Service</i>	Juta Rp	3.703.364,54	3.696.011,24
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja			
Lapangan Usaha	Satuan	2019	2020
<i>agriculture</i>	Jiwa	7.534	9.428
<i>Manufacture</i>	Jiwa	6.196	5.364
<i>Service</i>	Jiwa	28.076	27.585
Total Produktivitas			
Lapangan Usaha	Satuan	2019	2020
<i>agriculture</i>	Juta Rp/Jiwa	36,49	29,65
<i>Manufacture</i>	Juta Rp/Jiwa	101,90	116,98
<i>Service</i>	Juta Rp/Jiwa	131,90	133,99

Sumber::BPS, Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2020-2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang sangat dominan di Kota Sungai Penuh adalah sarana dan prasarana transportasi darat. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari Kota Sungai Penuh yang tidak memiliki pantai serta sungai yang besar, serta kontur tanah yang berbukit-bukit.

Untuk pergerakan internal di wilayah Kota Sungai Penuh dilayani oleh transportasi jalan dan jembatan. Transportasi jalan dan jembatan ini memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang mobilitas orang dan barang, terutama dilihat dari kapasitas angkutnya dibandingkan dengan transportasi lainnya.

Untuk ketersediaan prasarana jalan raya dan jembatan yang menghubungkan Kota Sungai Penuh dengan wilayah di luarnya, tersedia jaringan jalan sebagai berikut :

- Ruas Sungai Penuh – Bangko (Jalan Nasional)
- Ruas Sungai Penuh – Muara Labuh (Jalan Nasional)
- Ruas Sungai Penuh – Tapan (Jalan Nasional)
- Ruas Sungai penuh – Jujun – Lempur (Jalan Provinsi)



Sumber: Prov Jambi Dalam Angka, Dishub Kota Sungai Penuh, 2021

Gambar II.45
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Sungai Penuh

Dari grafik diatas dapat dijelaskan, rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah dengan perbandingan antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan. rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan, di tahun 2018 dengan rasio 26,67, artinya adalah setiap 1 km jalan melayani 27 kendaraan, selanjutnya di tahun 2020 meningkat menjadi 45,81. Demikian halnya dengan jumlah arus penumpang yang terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 30.434 menjadi sebesar 32.346 di tahun 2020. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas juga mengalami peningkatan selama periode tahun 2018-2020.

Dengan demikian pergerakan manusia menjadi aspek yang dominan, selain pergerakan barang, dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi darat. Ketersediaan sarana dan prasarana jalan di Kota Sungai Penuh dari sisi jumlah panjang jalan, akan tetapi jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah kendaraan maka tampak bahwa tingkat kepadatan jalan

semakin tinggi. Untuk itu dibutuhkan tidak hanya penambahan jumlah panjang jalan akan tetapi juga kualitas dan pengelolaannya, sehingga dapat mendorong peningkatan mobilitas orang dan barang yang pada akhirnya akan mendorong daya saing produk dan daerah.

2.4.2.2 Penataan Wilayah

Penataan wilayah di Kota Sungai Penuh dapat dilihat terhadap beberapa Indikasi diantaranya, Ketaatan terhadap RTRW yang merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW, Luas wilayah produktif yang merupakan persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, dan Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.

Berdasarkan penetapan RTRW Kota Sungai Penuh tahun 2011-2031, kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang lebih luas, yakni sebesar 59,2 persen. Namun demikian bukan berarti kawasan ini tidak memberikan nilai bagi daerah. Keberadaan kawasan ini memberikan ciri keunikan bagi Kota Sungai Penuh sebagai kawasan perkotaan yang asri dan memiliki kekayaan sumberdaya alam dalam hutang lindung maupun hutan produksinya. Hal ini memberikan nilai khusus bagi daya saing daerah.

Tabel II.96
Pola Ruang Kota Sungai Penuh Sampai Akhir Tahun 2031

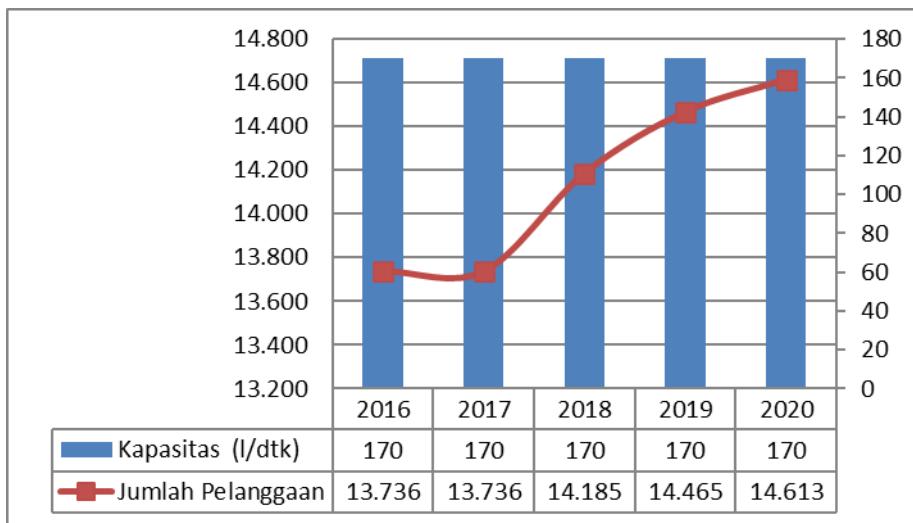
No	Fungsi kawasan	Luas (ha)	Persentase (persen)
I	Kawasan Lindung		
1	Taman Nasional Kerinci Seblat	23.177,60	59,20
2	Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya	19,51	0,05
3	Ruang Terbuka Hijau Kota	492,51	1,26
4	Kawasan Cagar Budaya	3,00	0,01
5	Kawasan Rawan Bencana	962,38	2,46
Total Kawasan Lindung		24.655,00	62,98
II	Kawasan Budidaya		
A	Kawasan Perkotaan	1.283,00	3,28
1	Permukiman	959,00	2,45
2	Perdagangan dan jasa	94,00	0,24

No	Fungsi kawasan	Luas (ha)	Persentase (persen)
3	Perkantoran	50,00	0,13
4	Industri Kecil	5,00	0,01
5	Pariwisata	65,00	0,17
6	Ruang Terbuka Non Hijau	30,00	0,08
7	Ruang Evakuasi Bencana	30,00	0,08
8	Ruang Sektor Informal	5,00	0,01
9	Kawasan Pendidikan	30,00	0,08
10	Kawasan Kesehatan	15,00	0,04
B	Peruntukan Lainnya	9.438,00	24,11
1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	5,00	0,01
2	Kawasan Pertanian :		
	a. Perkebunan dan Holtikultura	5.944,00	15,18
	b. Pertanian Tanaman Pangan	2.548,00	6,51
3	Hutan Produksi	941,00	2,40
Total Kawasan Budi Daya		10.721,00	27,38
Luas Wilayah Kota Sungai Penuh		39.150,00	100

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031

2.4.2.3 Ketersediaan Air Bersih

Fasilitas Air Minum, merupakan salah satu fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali, sedangkan Air Bersih (*Clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (*Drinking Water*) juga merupakan Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).



Sumber: BPS, Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2017-2021 Dinas PUPR 2021

**Gambar II.46
Jumlah Pelanggan dan Kapasitas Terpasang Kota Sungai Penuh 2016-2020**

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 memperlihatkan adanya peningkatan dalam jumlah pelanggan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang memanfaatkan pelayanan air dari PDAM. Namun peningkatan jumlah pelanggan tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas, dimana selama periode tahun 2016-2020 sebesar 170 l/dtk.

**Tabel II.97
Kapasitas Terpasang Instalasi Pengolahan Air Eksisting**

No	Unit Produksi	Kapasitas (l/dtk)	Sumber Air		Sistem	Tahun
1	IPA Rawang	20	Sei. Batang Merao		Perpompaan	1982
2	IPA Rawang	50	Sei. Batang Merao		Perpompaan	2015
3	IPA Pelayang Raya	35	Sungai Ampuh		Gravitasi	1992
4	IPA Pelayang Raya	20	Sungai Jernih		Gravitasi	1993
5	IPA Sungai Jernih	5	Sungai Jernih		Gravitasi	1995
6	IPA Tanah Kampung	10	Sei. Batang Sangkir		Perpompaan	2011
7	IPA Kumun Debai	30	Sei. Batang Merao		Perpompaan	2011
	Jumlah	170				

Sumber : Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, 2021

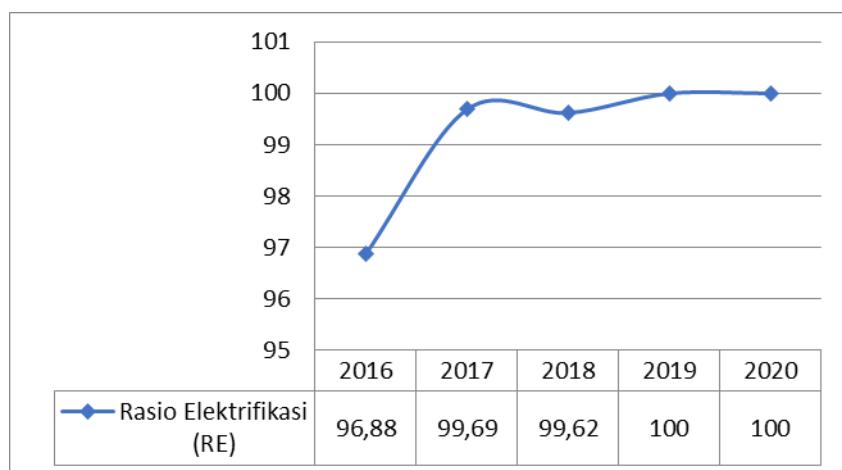
Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang mestinya terus menerus diupayakan pemerintah. Hal

yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat kehilangan air dan alternatif sumber air baku untuk mengantisipasi kekurangan debit sumber air baku terutama pada musim kemarau.

2.4.2.4 Fasilitas Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil.

Jaringan ketenagalistrikan Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Seluruh wilayah Kota Sungai Penuh telah terlayani jaringan listrik dengan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen di tahun 2020.



**Gambar II.47
Rasio Elektrifikasi Pelayanan Jaringan Listrik di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020**

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan listrik sebagai sumber energi dalam aktivitas sosial ekonomi di Kota Sungai Penuh, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas listrik di masa yang akan datang dengan membangun jaringan listrik (SUTT) dengan pola interkoneksi Sumbagsel-Sungai Penuh. Jaringan ketenagalistrikan Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR).

2.4.2.5 Fasilitas Bank Non Bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan

lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya.

Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank) Di Kota Sungai Penuh sebanyak 7 Bank baik itu Bank Pemerintah maupun Bank Swasta yaitu Bank BNI 46, Bank Jambi, Bank Pembangunan Kerinci, BRI, Bank BTPN, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mandiri, dan diperkuat pula oleh 151 unit Koperasi, 2 unit Asuransi, serta 106 lembaga non Bank lainnya.

2.4.2.6 Ketersediaan Rumah Makan/Restoran dan Penginapan/Hotel

Ketersediaan restoran, rumah makan dan penginapan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan rumah makan salah satunya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah makan. Selama kurun waktu 2016-2020 jumlah restoran, rumah makan dan penginapan yang berhasil di data oleh BPS Kota Sungai Penuh menunjukkan tren yang terus bertambah, yaitu 76 buah yang terdiri dari restoran/rumah makan, dan cafe.

Untuk Ketersediaan hotel/penginapan, Jumlah hotel di Kota Sungai Penuh kondisi Tahun 2020 sebanyak 12 hotel, Jumlah kamar yang tersedia sebanyak 199 kamar dan 346 tempat tidur. Jumlah ini mengalami peningkatan yang dikarenakan adanya pembangunan hotel baru di Kota Sungai Penuh sedangkan untuk transportasi angkutan yang ada di Kota Sungai Penuh sebanyak 28 agen travel.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Pertumbuhan suatu daerah sangat sangat tergantung dari kemampuan investasi. Upaya memotivasi investasi daerah sangat diperlukan. Pemerintah hendaknya memiliki cara strategis untuk menumbuhkan investasi di daerah. Kota Sungai Penuh yang mempunyai lahan terbatas tentunya tidak memungkinkan lagi untuk memiliki beberapa kawasan industri. Namun demikian Kota Sungai Penuh perlu meningkatkan investasi daerah dengan melalui pelayanan perdagangan dan jasa sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan melalui RPJPD 2005-2025 tentunya sudah memberikan arahan untuk memperbesar investasi dibidang perdagangan dan pelayanan jasa.

Dukungan *goodwill* dan *political will* untuk meningkatkan investasi di bidang perdagangan dan pelayanan jasa tidak terlepas dari *image* masyarakat dan pelayanan perangkat daerah. Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diusahakan oleh daerah. Terkait dengan upaya meningkatkan iklim investasi lebih dekat dengan urusan yang bersifat konkuren atau pilihan. Keunggulan daerah khususnya dalam komoditas yang dapat mendongkrak investasi perlu dimunculkan. Perdagangan merupakan bagian komoditas unggulan yang dapat

dingkatkan, hal ini didukung dengan letak geografis Kota Sungai Penuh yang sangat strategis yaitu daerah persimpangan untuk menuju ke beberapa daerah. Jasa juga merupakan bagian komoditas unggulan yang dapat ditingkatkan di Kota Sungai Penuh. Jasa pariwisata, jasa pendidikan dan jasa lainnya yang merupakan pintu masuk investasi yang dapat ditingkatkan. Untuk mendukung iklim investasi ini setidaknya kondisi tata kehidupan yang tertib, aman dan damai sebagai pra-kondisi dalam peningkatan investasi adalah merupakan modal dasar yang sangat penting.

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kota Sungai Penuh.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja: angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status desa (persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa).

2.4.3.1 Stabilitas Keamanan

Fokus iklim berinvestasi juga sangat dipengaruhi oleh rasa aman yang diciptakan, agar para investor tertarik untuk berinvestasi. Salah satu hal yang menjadi halangan terbesar dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban yaitu kriminalitas. Masalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untuk peningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi kota yang terkendali dari kekacauan kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi perlu ditumbuhkembangkan. Angka kriminalitas di Kota Sungai Penuh untuk kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2018-2020) sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.98
Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk di Kota Sungai Penuh
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah Tindak Kriminal (<i>Jumlah perkara/Criminal Case</i>)	Kasus	53	83	126
Jumlah Penduduk	Jiwa	100,934	101,075	98,172
Angka Kriminal per 10.000 penduduk	Kasus	5,25	8,21	12,83

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2021, Dinas Dukcapil 2021.

Dilihat dari tabel di atas, terjadi peningkatan tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 5,25 kasus per 10.000 penduduk, meningkat pada tahun 2020 sebanyak 12,83 kasus per 10.000 penduduk. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Iklim berinvestasi dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menggambarkan bahwa disiplin dan hukum berjalan dengan baik. Ketentraman dan ketertiban umum sangat berdampak positif dalam meningkatkan kenyamanan berinvestasi. Investasi menjadi faktor yang sangat penting karena berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi akan memberikan manfaat terhadap banyak pihak, baik investor, masyarakat dan pemerintah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan kondisivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan jumlah tindak kriminal yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kerinci yang meliputi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci selama satu tahun terhadap 10.000 penduduk.

2.4.3.2 Birokrasi Perizinan

Perizinan merupakan instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses dan persyaratan pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor pendorong atau penghambat investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Jenis perizinan yang dianalisa dalam indikator ini diantaranya: SITU, SIUP, TDP, TDG, TDI, HO, IMB, IUJK, Reklame, Izin Perusahaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), lama proses pengurusan perizinan dalam rentang waktu 2016-2020 sudah mencapai kondisi optimum. Rata-rata waktu pelayanan yang dibutuhkan selama 3 hari.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menuntut penerapan penggunaan sistem OSS. OSS adalah penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Kemudahan perizinan akan mempengaruhi nilai investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah, baik invesasi dalam negeri maupun invesasi asing. Disamping itu juga bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki

oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menerbitkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.

2.4.3.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Sungai Penuh.

Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak daerah yang berlaku di Kota Sungai Penuh sampai tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) jenis pajak. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat saat ini pengelolaannya sudah menjadi kewenangan daerah. Pada tahun 2020, pajak daerah yang ada di Kota Sungai Penuh terdiri dari;(1) pajak hotel;(2) pajak restoran;(3) pajak reklame;(4) pajak hiburan;(5) pajak penerangan jalan umum;(6) pajak air bawah tanah; (7) pajak mineral bukan logam dan lainnya;(8) PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan (9) BPHTB.

Sementara itu, jenis retribusi daerah yang diberlakukan di Kota Sungai sampai tahun 2020 terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi daerah. Pada tahun 2021 jenis retribusi daerah menjadi 14 (empat belas) jenis retribusi, terdapat penambahan jenis retribusi yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Ditinjau dari besaran nilai realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 2015-2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.99
Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan rata2/th
1	Pajak Daerah	6.291.629.478	7.177.502.825	8.740.881.511	7.652.571.156	7.265.748.342	
	Pertumbuhan		14,08	21,78	-12,45	-5,05	4,58
2	Retribusi Daerah	2.950.566.253	3.260.708.745	2.904.596.243	2.828.056.407	1.446.870.223	
Pertumbuhan			10,51	-10,92	-2,64	-48,84	-12,97
Jumlah		9.242.195.731	10.438.211.570	11.645.477.754	10.480.627.563	8.712.618.565	
Pertumbuhan			12,94	11,57	-10	-16,87	-0,59

Sumber; Bakeuda Kota Sungai Penuh (hasil analisis), 2021.

Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sepanjang tahun 2016-2020 berfluktuasi dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar -0,59 persen per tahun. Pada tahun 2016, nilai pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebesar 9.242 miliar rupiah dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 11.645 miliar rupiah. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 8.712 miliar.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

2.4.3.4 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Pendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan kedalam peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui peraturan daerah inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi meliputi Peraturan Daerah terkait dengan perizinan, Peraturan Daerah terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Peraturan Daerah

terkait dengan ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 jumlah Peraturan daerah dan Peraturan Walikota yang mendukung iklim investasi berjumlah 8 Peraturan Daerah dan 4 Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha meliputi : Peraturan Daerah terkait dengan perizinan terdiri dari Izin mendirikan bangunan, gangguan, perizinan bidang perdagangan dan perizinan bidang kesehatan sedangkan perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan belum ada.

2.4.3.5 Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya; desa swakarya; dan desa swasembada. Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Swadaya

Desa Swadaya adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama

sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Penilaian status desa/kelurahan diambil berdasarkan data dari profil desa/kelurahan yang berisi data potensi dan perkembangan. Sehingga pengisian data-data dalam profil desa/kelurahan menjadi sangat penting karena menentukan status desa. Status desa/kelurahan di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada :

**Tabel II.100
Status Desa/Kelurahan Kota Sungai Penuh Tahun 2015-2019**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	0	0	0	0	0
2 Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	n.a	n.a	n.a	1	1
3 Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	n.a	n.a	n.a	64	64
4 Jumlah Desa/Kelurahan	69	69	69	69	69

Sumber : IDM Dinas PMD Kota Sungai Penuh 2021

Dari tabel diatas tampak bahwa terdapat 64 desa di wilayah kota Sungai Penuh berstatus maju, dan terdapat 1 desa yang sedang berkembang yaitu Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai.

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Sumber daya manusia yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja di Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 paling banyak adalah lulusan SMA sebesar 32,94 persen, selanjutnya adalah lulusan Perguruan tinggi sebesar 25,25 persen, lulusan sekolah dasar sebesar 24,44 persen dan lulusan SMP sederajat sebesar 17,36 persen.

Tabel II.101
Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
≤ Sekolah Dasar	10.359	24,44
SMP Sederajat	7.358	17,36
SMA Sederajat	13.961	32,94
Perguruan Tinggi	10.699	25,25
Jumlah	42.377	100,00

Sumber: BPS, Sungai Penuh Dalam Angka, 2021

2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 adalah 43,29 persen.

Tabel II.102
Rasio Ketergantungan di Kota Sungai Penuh Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	2020
1	Penduduk usia <15th + usia >64th	jiwa	29.657
2	Penduduk usia 15-64 tahun	jiwa	68.515
3	Rasio Ketergantungan	persen	43,29

Sumber: Dinas Dukcapil Sungai Penuh, 2021

Besaran angka rasio ketergantungan di Kota Sungai Penuh memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

2.5 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021

2.5.1 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM yaitu SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Sampai Tahun 2020 rata-rata capaian SPM bidang pendidikan sebesar 93,47 persen, bidang kesehatan sebesar 94,68 persen, bidang pekerjaan umum hanya mencapai sebesar 56,55 persen, bidang perumahan rakyat sebesar 100 persen, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 95,49 persen dan bidang sosial hanya mencapai sebesar 51,30 persen.

Secara keseluruhan capaian indikator SPM Kota Sungai Penuh hingga tahun 2020 mencapai 81,91 persen. Pelaksanaan SPM merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, sehingga diperlukan integrasi SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya.

Tabel II.103
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kota Sungai Penuh 2016-2021

No	Indikator Pencapaian SPM	Target SPM Tahun ke -					Capaian SPM Tahun ke -				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Bidang Pendidikan										
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Pencapaian SPM	Target SPM Tahun ke -					Capaian SPM Tahun ke -				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesatuan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	86,11	86,21	86,40	86,64	86,93
II Bidang Kesehatan											
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	91,83	96,00	100,00	98,37
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	87,28	94,00	100,00	96,97
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	88,16	95,53	100,00	100,69
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	83,37	92,00	100,00	62,23
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	61,11	88,00	100,00	77,88

No	Indikator Pencapaian SPM	Target SPM Tahun ke -					Capaian SPM Tahun ke -				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
III Pekerjaan Umum											
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	0,66	0,66	0,67	0,73	0,73
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	n.a	0,40
IV Perumahan Rakyat											
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
V Trantibumlinmas											
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	83,33	97,04	100,00	100,00	80,00

No	Indikator Pencapaian SPM	Target SPM Tahun ke -					Capaian SPM Tahun ke -				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	n.a	99,10
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	n.a	98,43
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	n.a	99,94
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VI	Bidang Sosial										
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	n.a	2,60
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	19,50	n.a
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	16,60	n.a
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	3,00	n.a
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : SKPD Pelaksana SPM, 2021

2.5.2 Evaluasi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026

Pada prinsipnya evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman evaluasi pembangunan nasional kriteria notifikasi ketercapaian target adalah sebagai berikut :

Tabel II.104
Kriteria Notifikasi Ketercapain Target

No	Kriteria Notifikasi	Kategori
1	Apabila target tercapai $\geq 95\%$	Sudah tercapai atau <i>on track / on trend</i>
2	Apabila mencapai target $< 95\%$ dan $\geq 75\%$	Perlu Kerja keras
3	Apabila target mencapai $< 75\%$	Sulit tercapai

Sumber : Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1/2017

Hasil evaluasi RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian indikator di tahun 2020 dengan target di tahun akhir periode RPJMD yaitu tahun 2021 (rasio capaian akhir RPJMD 2021) sampai dengan tahun 2020. Berikut hasil evaluasi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 pada masing-masing misi :

1. Secara umum capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Sungai Penuh pada misi kesatu yaitu : memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government* telah menggambarkan capaian dari target yang telah ditetapkan (*on track*). Indikator yang perlu kerja keras adalah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas Penerapan SAKIP), dan indikator yang sulit tercapai adalah : (1) Efisiensi pengelolaan PAD; dan (2) Tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sungai Penuh misi kedua yaitu : Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat dan Berbudaya telah menggambarkan capaian dari target yang telah ditetapkan (*on track*). Indikator yang perlu kerja keras adalah : (1). Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (2) Proporsi puskesmas terakreditasi; (3) Rata-rata jumlah anak per keluarga;

- (4) Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda; dan
(5) Tingkat partisipasi angkatan kerja.
3. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sungai Penuh misi kedua yaitu : Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat dan Berbudaya telah menggambarkan capaian dari target yang telah ditetapkan (*on track*). Indikator yang perlu kerja keras adalah : Persentase koperasi aktif. Sedangkan indikator yang sulit tercapai adalah v: (1) Kontribusi kategori perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB; (2). Laju Pertumbuhan Ekonomi; (3). Kontribusi kategori sektor Industri pengolahan terhadap PDRB; (4) Persentase Peningkatan Produk yang Memenuhi Standar; (5). Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB dan (6). Persentase pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil.
 4. Secara umum capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Sungai Penuh pada misi ketiga yaitu : Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam telah menggambarkan capaian dari target yang telah ditetapkan *on track*). Indikator yang perlu kerja keras adalah : (1) Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik; (2). Persentase wilayah bebas banjir perkotaan; (3). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan (4). Tingkat waktu tanggap (response time rate). Sedangkan indikator yang sulit tercapai adalah : (1). Rumah tangga pengguna air bersih; (2). Persentase lingkungan permukiman kumuh; (3). Persentase ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Secara akumulasi Capaian Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 berdasarkan indikator kinerja utama pada masing-masing misi posisi sampai dengan capaian tahun 2020 jika dibandingkan target kinerja di akhir periode (tahun 2021) adalah : (1) Sudah tercapai atau *on track / on trend* mencapai 61,11 persen; (2) perlu kerja keras mencapai sebesar 18,52 persen dan sulit tercapai sebesar 20,37 persen, selengkapnya diuraikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel II.105
Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021

TAGLINE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2015	TAHUN			KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020			
				CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020					
Misi I : Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance And Clean Government											
KOTA SUNGAI PUENUH MELAYANI	1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik	1.1 Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel	1	Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	N.a	99,09	91,50	98,57	97,00	101,62
			2	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS	Kasus	N.a	2,23	4	1,11	3	270,27
			1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas Penerapan SAKIP)	Kategori / nilai		CC	B	BB	B	BB
			4	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nilai LPPD)	Kategori / nilai	B	B	SB	n.a	SB	n.a
			5	Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	Opini/ Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
	1.2 Optimalisasi kinerja pelayanan publik	1	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) / Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat baik	Baik	>100	
	2 Pemeliharaan Kota Sungai Penuh yang tenram, tertib dan nyaman	2.1 Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat	1	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas	7,80	1,61	6,68	0,00	6,45	645,00

TAGLINE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2015	TAHUN			KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
				CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020		
3 Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	3.1 Meningkatnya kemandirian daerah	1 Efisiensi pengelolaan PAD	%	5,79	6,49	3,04	47,34	3,02
		2 Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	6,14	4,24	9,59	3,75	10,24
								36,61
Misi II Memperkuat Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berwawasan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Religius, Sehat Dan Berbudaya								
KOTA SUNGAI PENUH	CERDAS	1 Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter						
		1.1 Meningkatnya kualitas layanan dan mutu Pendidikan	1 SD Terakreditasi A dan B	%	82,00	98,00	90,20	89,15
			2 SMP Terakreditasi A dan B	%	54,00	92,00	64,20	72,22
		1.2 Pemenuhan hak warga mendapatkan layanan pendidikan berkualitas	1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,17	10,08	9,58	10,32
			2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98,51	98,82	99,73	98,85
	RELEGIUS	2 Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Religius						
		2.1 Meningkatnya pengamalan kehidupan yang religius pada seluruh masyarakat dan ASN	1 Persetase Desa/Kelurahan melaksanakan Gerakan Magrib Mengaji / didikan subuh	%	N.a	75,00	100,00	100,00
			2 Persetase tempat peribadatan yang dibina/dibantu dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya	%	N.a	75,00	52,50	n.a
			3 Persetase SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD	%	N.a	100,00	100,00	100,00
SE HA	3	Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan						

TAGLINE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2015	TAHUN			KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020		
				CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020				
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan terutama promotif dan preventif, berorientasi pada proses dan kemandirian masyarakat	1	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	75,69	80,43	82,85	78,17	84,52	92,48
		2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,61	72,01	71,84	72,11	71,90	100,29
		3	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	86,11	0,00	130,00	68,58	130,00	189,56
		4	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Rasio	7	3	7	5,49	7	127,50
	3.2. Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan Rujukan yang berkualitas	1	Proporsi puskesmas terakreditasi	%	N.a	90,91	90,09	90,91	100,00	90,91
	4 Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya dan beretos kerja tinggi									
	4.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	%	3,43	2,81	3,15	3,03	3,10	102,31
		2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala	94,32	91,67	97,58	94,31	98,24	95,99
	4.2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bermasyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skala	51,81	52,27	56,09	n.a	56,95	n.a
		2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rasio	1,68	1,62	1,60	1,70	1,58	92,78

TAGLINE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2015	TAHUN			KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020	
				CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020			
BERBUDAYA	4.4. Berkembang dan meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	1 Persentase keaktifan kelompok seni budaya	%	N.a	100,00	73,26	100,00	82,56	121,12
	4.5. Meningkatnya potensi wisata daerah/destinasi wisata	1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	3,00	4,28	3,68	4,23	4,34	97,46
	4.6. Berkembangnya potensi pemuda kreatif.	1 Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	%	N.a	3,58	4,07	3,58	4,59	78,00
	4.7. Meningkatnya kompetensi, dan kemandirian tenaga kerja	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	67,03 8,18	63,75 4,17	73,18 6,68	65,99 5,56	74,84 6,38	88,17 114,79

Misi III: Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam

KOTA SUNGAI PENUH	ENTERPRENEUR	1	Meningkatkan pondasi perekonomian yang berbasis IPTEKKIN								
		1.1	Terwujudnya Layanan perekonomian daerah yang semakin kuat	1 Kontribusi kategori perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	26,89	29,79	28,04	-3,05	28,29	-10,78
				2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7,06	5,12	7,40	-0,14	7,56	-1,85
				3 PDRB Perkapita (ADHB)	Rp.(juta)	55,07	82,37	65,38	82,47	67,14	122,83
				4 Nilai Investasi (000.000)	Rp.(juta)	36.599	112.316	46.711	221.317	49.046	451,24
		1.2	Berkembangnya ekonomi kreatif	1 Kontribusi kategori sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,65	0,62	0,83	0,19	0,83	22,80
				2 Persentase Peningkatan Produk yang Memenuhi Standar	%	N.a	10,07	23,15	10,07	25,70	39,18

TAGLINE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2015	TAHUN			KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
						CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020		
	1.3 Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau	1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	(kw/ha)	59,09	60,32	59,54	60,32	59,63	101,16
		2	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	6,60	6,56	6,46	1,98	6,34	31,23
	2 Meningkatkan peranan UMKM dan Koperasi dalam peningkatan daya saing perekonomian daerah									
	2.1. Berkembangnya Koperasi, UKM dan pelaku usaha yang profesional	1	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	%	1,01	5,10	4,62	3,15	5,24	60,09
		2	Persentase koperasi aktif	%	71,00	77,48	76,21	60,93	77,18	78,95

Misi IV : Melanjutkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkualitas Sesuai Daya Dukung Dan Fungsi Ruang

KOTA SUNGAI PENUH	BERDAYA SAING	1	Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas									
		1.1.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan	1	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	%	63,24	68,42	80,24	70,69	83,64	84,52
		2	Rumah tangga pengguna air bersih	2	Rumah tangga pengguna air bersih	%	58,65	72,68	74,08	56,13	77,31	72,61
		3	Persentase rumah tinggal ber sanitasi	3	Persentase rumah tinggal ber sanitasi	%	64,67	78,00	80,82	81,56	84,05	97,04
		1.2.	Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa	1	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	N.a	75,07	77,50	98,05	87,00	112,70

TAGLINE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2015	TAHUN			KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020			
				CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020					
GREEN & CLEAN	2 Meningkatnya pengembangan kawasan serta peningkatan pemerataan pembangunan	2.1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	1	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,59	0,70	0,29	1,88	0,23	12,23
			2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,39	93,00	95,14	90,92	95,49	95,56
		2.2. Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Sungai Penuh	1	Prosentase wilayah bebas banjir perkotaan	%	90,20	94,08	90,81	81,42	90,93	89,54
		2.3. Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	1	Persentase kesesuaian dengan RTRW	%	N.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan	3.1. Terwujudnya kota bersih dan sehat	1	Persentase penanganan sampah	%	77,62	32,96	80,12	86,00	80,62	106,67
			1	Luas RTH Perkotaan Publik (%)	%	21,00	24,53	25,50	25,50	26,60	95,87
		3.2. Meningkatnya ruang terbuka hijau publik dan privat	2	Taman terpeilihara	%	45,45	100,00	90,91	100,00	100,00	100,00
			1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	96,88	100,00	98,98	100,00	99,40	100,60
		3.3. Terwujudnya Kota Sungai Penuh dengan pencahayaan yang baik dan indah di malam hari	2	Persentase Wilayah Kota Sungai Penuh terang pada malam hari	%	80,00	92,00	90,00	92,00	92,00	100,00
			1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,81	81,56	92,31	87,82	94,81	92,63

TAGLINE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2015	TAHUN			KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
				CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020		
pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini		2 Persentase ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	N/A	54,00	58,33	37,52	66,67
		3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4 Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	<22"	<16"	<17"	<14"	<15" 107,14

Sumber : RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021, BPS, Hasil Evaluasi 2021

Tabel II.106
Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan	Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	91,5	97	98,57	101,62
	Percentase tingkat pendidikan aparatur yang berpendidikan S1-S2-S3	%	67,70	67,85	74	109,06
	Percentase Aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensi (terpenuhi)	%	79,44	80	85,26	106,58
	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS	Kasus	4 /1000 ASN	3 /1000 ASN	1,11 /1000 ASN	270,27
	Percentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional	%	81,44	82	86,74	105,78
	Meningkatnya level kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kota Sungai Penuh	Level	3	3	2	66,67
	Percentase PNS mengikuti Diklat Teknis Setiap Tahun	%	15	75	15	101,27
	Terbangunnya Bandiklatda/CAT	%	75,5	90	0	0,00
	Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin)	%	100	100	100	100,00
	Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (RTRW dll)	%	100	100	100	100,00
	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	95	95	95	100,00
	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100	100	100	100,00
	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dipublikasikan di website pemerintah	%	90	90	90	100,00
	Tingkat keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan dan Desa/ kelurahan	%	88,8	89,75	90	100,28
	Percentase kajian dan studi kelayakan yang dilaksanakan/ diaplikasikan	%	57,5	60	n.a	n.a
	Proporsi hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	%	62,5	65	n.a	n.a

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
	Tingkat kelengkapan dokumen Utama statistik sektoral (Survei bidang sosial; Survei bidang ekonomi dan Survei bidang politik, hukum dan HAM)	%	71,5	87	88,54	101,77
	Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)	%	54,5	60	55	91,67
	arsiparis yang memiliki kompetensi	orang	5	6	4	66,67
	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	84,5	90	n.a	n.a
	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nilai LPPD)	kategori/nilai	SB	SB	B	<100
	Nilai SAKIP	Angka	BB	BB	B	<100
	Penilaian kinerja SKPD (Rapor)	Rapor	biru	biru	n.a	n.a
	Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun (WTP)	Opini	WTP	WTP	WTP	100,00
	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (hasil pemeriksaan BPK), Inspektorat Provinsi, Inspektorat kota)	%	78,724	79,24	72,88	91,97
	PERDA yang ditetapkan	%	80,724	90	60	66,67
	RAPERDA yang disetujui DPRD	%	84,84	90	100	111,11
	Persentase meningkatnya perkembangan asset daerah	%	16,02	16,83	16,20	96,25
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	57,5	60	n.a	n.a
	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	%	98,75	99,5	87,5	87,94
	Persentase aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci.	%	64,95	83	48	57,83
Optimalisasi kinerja pelayanan publik	Jumlah aplikasi e-government di lingkup Pemerintah Daerah	Aplikasi	20	25	22	88,00
	Persentase SKPD telah memiliki website (%)	%	90	95,5	93,75	98,17
	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM) (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan PTSP, Kecamatan, dan Puskesmas)	indeks	A	A	A	100,00
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	indeks	A	A	A	< 100
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	%	100	100	100	100,00
	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	94,95	96,29	100	103,85
	Meningkatnya ketentraman dan	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	12,79	13,24	22,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
kenyamanan masyarakat	Angka kriminalitas	%	6,68	6,45	n.a	n.a
	Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	67,5	75	62	82,67
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	97,11	97,132	31,58	32,51
	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	75,5	76,6	100	130,55
Meningkatnya kemandirian daerah	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	%	9,59	10,24	3,87	37,78
	Efisiensi pengelolaan PAD	%	3,04	3,02	45,4	6,65
	Peningkatan PAD	%	10,68	10,78	-16,76	-155,47
Meningkatnya kualitas layanan dan mutu Pendidikan	Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A.	%	90,2	91,84	89,15	97,07
	Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A.	%	64,2	66,24	72,22	109,03
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100,00
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100,00
	Rata - rata Niai UN SD	Angka	79,77	79,9	67,47	84,44
	Rata - rata Niai UN SMP	Angka	53,61	54,47	46,85	86,01
	Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	91,51	93,33	82,34	88,23
	Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	96,39	98,28	87,28	88,81
	Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	50,72	75,36	71,2	94,48
	Persentase SMP/MTs yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	58,33	83,33	71,28	85,54
	Porsentase pengelolaan sekolah yang memenuhi Manajemen MBS	%	60,90	67,60	100	147,93
	Sekolah Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (SUPEL)	%	70,00	87,50	0	0,00
	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,45	81,80	87,94	107,51
	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,05	81,40	93	114,25
	Rata-rata Nilai UKG	Angka	55,32	55,97	80	142,93
Pemenuhan hak warga mendapatkan layanan pendidikan berkualitas	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	73,11	73,50	98,02	133,36
	Rasio lembaga PAUD yang memiliki izin terhadap Total PAUD	Rasio	1	1	1	100,00
	Persentase lembaga PAUD terakreditasi	%	24,10	24,10	24,1	100,02
	Persentase PTK PAUD dan Dikmas berkualifikasi S1/D4	%	37,28	38,13	38,39	100,68

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
Meningkatnya pengamalan kehidupan yang religius pada seluruh	Terbangunnya TK Negeri di seluruh Kecamatan	Unit	2	10	2	20,00
	Penduduk usia >15 tahun melek huruf (Angka Melek Huruf)	%	99,75	99,98	98,85	98,87
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,94	0,92	0	0,00
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,04	1,02	0	0,00
	Angka Melanjutkan (AM) ke PT Akreditasi A dan B	%	36,50	42,00	n.a	n.a
	Jumlah perpustakaan :					
	- Daerah	Unit	1	1	1	100,00
	- Keliling	Unit	2	3	1	33,33
	Angka kunjungan perpustakaan per tahun	orang	2096	2348	4595	195,71
	Tersedianya digital library	Ada/ tidak	ada	ada	ada	100,00
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan terutama promotif dan preventif, berorientasi pada proses dan kemandirian masyarakat	Persentase Sekolah/Lembaga yang mengajari awal belajar	%	70,68	88,35	90	101,87
	Persetase Desa/Kelurahan melaksanakan Gerakan Magrib Mengaji dan Didikan Subuh	%	100,00	100,00	90	90,00
	Imam masjid / musholla dan penghafal al Quran yang diberikan insentif	%	100,00	100,00	90	90,00
	Pemuka agama yang disosialisasi pembangunan daerah (Orang)	Orang	828	966	95	9,83
	Rasio tempat peribadatan yang dibina/ dibantu dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya	%	52,50	87,50	100	114,29
	Cakupan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang dibina	%	82,74	91,61	100	109,16
	Regulasi yang mendukung keagamaan	Regulasi	2	2	2	100,00
	Islamic Center Terbangun (%)	%	77,5	90	30	33,33
	Persentase SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD	%	100	100	70	70,00
	Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	79,6	79,8	100,00	125,31
	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	14,49	72,46	28,99	40,01
	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	100	100	86	86,00
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	82,85	84,52	78,17	92,48
	Persentase Prevalensi balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,02	74,07
	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (standar WHO, 2005)	%	4	3	1	33,33

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Kurus dan sangat kurus (wasting pada anak balita)	TFC	10	10	0	0,00
	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	130	130	68	52,31
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100,00
	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,84	71,90	72,11	100,30
	Persentase Posbindu Lansia Aktif	%	34,05	39,55	67,16	169,81
	Kelompok usia lanjut aktif	%	45,05	50,55	67,16	132,86
	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Rasio	7	7	5	71,43
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	91,66	93,04	100	107,48
	Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	93	93	98,8	106,24
	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	%	23,75	22,50	68,67	305,20
	Angka Kesembuhan TB Paru (CR)	%	86,41	87,18	100	114,70
	Persentase angka kasus HIV yang diobati	%	<0,5	<0,5	0	>100
	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan Daerah	%	100	100	100	100,00
	Persentase keamanan pangan	%	86,00	87,50	100	114,29
Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan Rujukan yang berkualitas	Proporsi puskesmas terakreditasi	%	90,00	100	90,91	90,91
	Proporsi puskesmas PONED terstandar	%	100,00	100,00	100	100,00
	Terbangun nya rumah sakit daerah	%	92,00	90,00	90	100,00
	Terbangunnya Labkesda	%	100,00	100,00	100	100,00
	Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014	%	10,00	50,00	100	200,00
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan	Cakupan PMKS yang ditangani	%	5,46	6,31	64,12	1015,58
	Angka Kemiskinan	%	3,15	3,1	3,03	97,74
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	16,75	15,95	24,5	153,56
	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	95	95	100,00	105,26
	Persentase anak terlantar yang ditangani	%	85	85	100	117,65
	Persentase panti sosial yang mendapat bantuan	%	100	100	100,00	100,00
	Cakupan pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%	85	85	100,00	117,65

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
	Persentase Desa Mandiri	%	8,70	11,59	57	491,63
	Terbentuknya BUMDes	%	23,19	28,99	100	345,00
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bermasyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala	97,58	98,24	94,31	95,99
	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	98,44	98,44	96	97,52
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skala	56,09	56,95	52,41	92,03
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		35,47	35,56	29,61	83,27
	Rasio KDRT	Rasio	0,011	0,008	0,262	3169
	Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	%	100	100	100,00	100
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Rasio akseptor KB	Rasio	99,66	99,71	76,25	76,47
	Cakupan peserta KB aktif	%	99,87	99,90	78,36	78,44
	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100,00
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1,60	1,58	1,7	107,78
	Persentase terlaksananya pembentukan pelayanan KB di klinik KB	%	100	100	100	100,00
	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	95	95	100	105,26
	Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	100	100	87,5	87,50
	Pelayanan keluarga berencana yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya	%	100	100	100	100,00
Berkembang dan meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio	6,07	6,52	6	92,05
	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	1	1	0	0,00
	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	2	0	0,00
	Terbangunnya Gedung Pusat Informasi Seni dan Budaya (Art Centre)	%	75	90	90	100,00
	Cakupan Gelar Seni	%	60	75	0	0,00
	Persentase keaktifan kelompok seni budaya	%	73,26	82,56	0	0,00
	Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	Jml	1	1	1	100,00
	Pakaian Adat Kota Sungai Penuh (Regulasi)	Regulasi	1	1	0	0,00
	Regulasi tradisi lokal dalam acara resmi daerah	Regulasi	1	1	1	100,00
	Cakupan pembinaan LKAD	%	100	100	100	100,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
	Regulasi Bentuk gedung dan bangunan	Regulasi	1	1	1	100,00
Meningkatnya potensi wisata daerah/destinasi wisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik	%	77,6	85,75	78,58	91,64
	Regulasi RIPARDA/RIPDA Kota Sungai Penuh	Regulasi	1	1	1	100,00
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	4,03	4,34	4,03	92,85
	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	66,6	67,75	70	103,32
	Jumlah kemitraan <i>quadro helix</i> pariwisata (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi)	Jumlah	6	8	0	0,00
Berkembangnya potensi pemuda kreatif.	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	%	4,07	4,59	3,58	78,00
	tersedianya sarana prasarana untuk ruang kreativitas pemuda	Jumlah	2	2	33	1650,00
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Keg.	5	5	6	120,00
	Rasio gedung olahraga per 10.000 penduduk.	Rasio	15,54	15,89	24,47	154,01
	Rasio Lapangan olahraga	Rasio	2,33	2,51	1,21	48,21
	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	89	91	169	185,71
	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah	27	28	5	17,78
	Rasio klub olahraga per 10.000 penduduk	Rasio	16,02	16,17	19,52	120,73
	Jumlah organisasi/Perkumpulan olahraga	Jumlah	33	34	28	82,35
	Persentase cabor memiliki manajemen baik	%	65,22	80,33	96,42	120,03
Meningkatnya kompetensi, dan kemandirian tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Org	3136	3945	3945	100,00
	Terbangunnya balai latihan kerja	Unit	1	1	0	0,00
	Data Base dan Profil Tenaga Kerja	Ada/ tidak	Ada	Ada	ada	100,00
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,18	74,84	65,99	88,17
	Persentase Pencari kerja yang di tempatkan (= Jml pencaker ditempat-kan/ Jml pencaker mendaftar x 100 %)	%	28,82	29,72	8,5	28,60
	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,68	6,38	5,55	115,00
	Terbangunnya Pusat Informasi tenaga kerja , dan Perjalanan Ketenagakerjaan	%	100	100	100	100,00
Terwujudnya Layanan perekonomian daerah yang semakin kuat	Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi	%	100,00	100,00	25,00	25,00
	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	65,00	75,00	56,00	74,67
	Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	75,00	100,00	48,00	48,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
Pembangunan dan Pengembangan Pasar dan Pemasaran	Presentase jumlah pasar yang memiliki sarana prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta pemeliharaannya	%	75,00	100,00	25,00	25,00
	Terbangunya kawasan Khusus Taman Jajan dan Gedung Promosi	Unit	3,00	3,00	1,00	33,33
	Persentase pasar yang memiliki sarana dan prasarana kebersihan	%	75,00	100,00	60,00	60,00
	Persentase pasar yang memiliki tenaga keamanan pasar-pasar	%	75,00	100,00	50,00	50,00
	persentase lokasi PKL yang tertata	%	70,00	85,00	50,00	58,82
	Data base dan statistik perdagangan	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	100,00
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	%	79,50	86,00	73,00	84,88
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	46.710,67	49.046,20	221.317,00	451,24
	Persentase PMA/PMDN di Kota Sungai Penuh yang taat aturan	%	92,00	97,50	50,00	51,28
	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Jumlah	999,00	1019,41	279,00	27,37
Berkembangnya ekonomi kreatif	Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	%	31,80	40,00	31,80	79,50
	Persentase peningkatan Produk yang memenuhi Standar	%	23,15	25,70	10,07	39,18
	Persentase industri Kecil yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	31,62	37,16	24,27	65,31
	Cakupan IKM yang dibina	%	84,50	100,00	56,82	56,82
	Tersedianya Data Base potensi produksi, jasa distribusi dan akses pasar hasil produksi industri Kecil Dan menengah	Ada / Tidak	ada	ada	Ada	100,00
	Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Produk	27,00	34,00	9,00	26,47
	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	0,83	0,83	0,62	74,39
	Persentase kawasan industri kecil dan menengah Kecil yang dibina	%	80,00	100,00	50,00	50,00
	Persentase pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra.	%	66,67	66,67	41,00	61,50
	Dokumen pengembangan dan Pembinaan kawasan industri kecil dan menengah	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	100,00
	Jumlah regulasi	Regulasi	2,00	2,00	1,00	50,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	(kw/ha)	59,54	59,63	61,20	102,63
	Kontribusi Sub sektor pertanian, Peternakan, perburuan dan jasa Pertanian terhadap PDRB	%	6,30	6,15	6,34	103,03
	Persentase penyuluh pertanian yang telah mengikuti diklat teknis dan inovasi pertanian	%	84,90	95,50	78,00	81,68
	Cakupan bina kelompok petani	%	89,40	100,00	89,40	89,40
	Prosentase tersedianya sarana prasarana kawasan RKE	%	77,78	88,89	77,00	86,63
	Prosentase tersedianya sarana prasarana prasaranan kawasan RPT	%	58,33	66,67	59,65	89,48
	Pengembangan kawasan Peternakan (Kampung Ternak) dan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC)	%	50,45	62,95	58,20	92,45
	Tersedianya Dokumen pengembangan kawasan RKE	Dok	1,00	1,00	1,00	100,00
	Tersedianya Dokumen pengembangan kawasan RPT	Dok	1,00	1,00	1,00	100,00
	Tersedianya Dokumen pengembangan Peternakan (Kampung Ternak) dan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC)	Dok	1,00	1,00	1,00	100,00
	Cakupan optimasi lahan pertanian	%	42,40	46,40	40,00	86,21
	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan modern	%	25,04	31,72	26,72	84,24
	Jumlah produk hasil olahan pertanian yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Produk	16,00	20,00	12,00	60,00
	Ketersediaan pangan utama :					
	- Ketersediaan energi perkapita	(K.KAL/Hari)	3436,00	3438,60	3540,00	102,95
	- Ketersediaan protein perkapita	(GR/ Hari)	93,12	94,02	94,73	100,76
	- Pengembangan Desa / Kel. Mandiri Pangan	%	30,77	36,92	30,77	83,34
	Populasi komoditas peternakan utama:					
	- sapi potong	Ekor	4123	4258	4559	107,07
	- Kerbau	Ekor	459	482	417	86,44
	- Kambing	Ekor	31893	35142	9381	26,69
	- Domba	Ekor	12889	14223	2922	20,54

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
Berkembangnya Koperasi, UKM dan pelaku usaha yang profesional	Produksi Daging (kg)					
	* Sapi	Kg	497	516	376	72,77
	* Kerbau	Kg	125	131	72	55,21
	* Kambing	Kg	49	56	49	88,39
	*Domba	Kg	13	14	9	67,49
	Kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	%	41,00	45,50	48,70	107,03
	Produksi perikanan budidaya (Target/Realisasi)	Kg	87,11	92,10	224,36	243,61
	Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	94,44	100,00	95,00	95,00
	Cakupan bina kelompok UMKM	%	75,15	90,15	77,98	86,50
	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	%	4,62	5,24	3,15	60,09
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan	Cakupan Pengembangan UKM/IKM di wilayah pariwisata	%	82,00	97,50	48,57	49,82
	Jumlah jaringan dan kemitraan yang terjalin	Jumlah	2,00	8,00	2,00	25,00
	Tersedianya Data Base potensi produksi, jasa distribusi dan akses pasar hasil produksi Usaha Kecil dan Menengah	Ada / Tidak	ada	ada	Tidak Ada	0,00
	Regulasi tentang UMKM Kota Sungai Penuh	Ada / Tidak	ada	ada	Ada	100,00
	Persentase Koperasi aktif	%	78,38	78,85	60,93	77,27
	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	%	80,24	83,64	70,69	84,52
	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	%	98,90	98,92	98,42	99,50
Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	%	25,75	26,97	47,60	176,48
	Rumah tangga pengguna air bersih	%	0,00	0,00	56,13	#DIV/0!
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	80,82	84,05	81,56	97,04
	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	88,59	89,42	92,92	103,91
Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah kota yang baik		45,83	48,33	56,92	117,77
	Tersedianya jalur satu arah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota	Jalur	6	6	9	150,00
	Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun	Buah	2	2	0	0,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa	Tersedianya Dok. Pengembangan kawasan terminal	Dok.	1	1	1	100,00
	Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	60,00	75,00	56,25	75,00
	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	86,00	95,50	92,71	97,08
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	%	79,00	88,50	92,98	105,06
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	77,50	87,00	98,05	112,70
	Tersedianya gedung parkir publik	unit	1	1	0	0,00
	Tempat parkir yang tertata	%	100,00	100,00	96,00	96,00
	Parkir on-street	Titik	9	9	23	255,56
	Parkir off-street	Titik	3	3	5	166,67
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%			n.a	n.a
	Persentase permukiman di pinggiran sungai yang ditata	%	42,05	50,55		0,00
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	95,14	95,49	90,92	95,21
Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Sungai Penuh	Drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	76,45	82,00	68,10	83,05
	Cakupan pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	76,50	85,00	75,20	88,47
	Luas irigasi Kota dalam kondisi baik	%	55,83	58,10	51,27	88,25
	Persentase wilayah bebas banjir perkotaan	%	90,81	90,93	81,42	89,54
	Sungai yang dinormalisasi	%	66,67	83,33	93,39	112,07
	Tembok Penahan Tanah/Tebing (TPT)	%	45,00	80,00	75,20	94,00
	Tertatanya kawasan sempadan sungai	%	70,00	75,00	0,00	0,00
	Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir	Dok.	1	1	1	100,00
	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan Bencana Banjir	%	42,15	47,70	51,00	106,92
	Jumlah Desa/Kampung siaga bencana	Desa / Kel.	4	4	4	100,00
	Tertatanya kawasan jalan kerinduan	%	72,50	85,00	10,00	11,76

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	74,89	80,65	100,00	123,99
	Aplikasi penataan ruang daerah;	ada / Tidak	ada	ada	ada	100,00
	Jumlah aturan mengenai RTBL	Dok.	3	3	2	66,67
	Perubahan alih fungsi lahan	Ha	0,00	0,00	0,00	100,00
	Jumlah bangunan ber-IMB	Rasio	10,68	10,78	3,96	36,69
	Perda RDTR	Perda	1	1	1	100,00
Terwujudnya kota bersih dan sehat	Persentase pengangkutan sampah	%	73,63	81,76	64,31	78,66
	Persentase penanganan sampah	%	80,12	80,62	86,00	106,67
	Persentase pengurangan sampah diperkotaan melalui 3R	%	28,46	33,71	0,29	0,86
	Sentra 3R / Pusat Daur Ulang	Jumlah	2	2	7	350,00
	Jumlah TPS	Unit	95	108	28	26,00
	Jumlah TPST	unit	1	1	0	0,00
	Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki lembaga pengelolaan sampah profesional	Desa / Kel.	34,78	46,38	10,15	21,89
Meningkatnya ruang terbuka hijau publik dan privat	Tersedianya kebijakan/regulasi terkait kawasan bebas sampah dan penanganan persampahan	Regulasi	2	2	2	100,00
	Luas RTH Perkotaan Publik (%)	%	25,50	26,60	25,5	95,85
	Taman terbangun	Jumlah	2	7	0	0,00
	Taman terpeilihara	%	90,91	100,00	100,00	100,00
Terwujudnya Kota Sungai Penuh dengan pencayaan yang baik dan indah di malam hari	Dokumen perencanaan standar pertamanan dan pemakaman, pembangunan taman kota	Dok.	2	2	2	100,00
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	0,00	0,00	99,00	99,60
	Tersedianya standar pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Ada/ tidak	ada	ada	ada	100,00
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini	Persentase Jalan Kota yang dilengkapi PJU	%	0,00	0,00	92,00	100,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	0,00	0,00	87,82	92,63
	Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana Penggulangan bencana	%	58,33	66,67	37,52	56,29
	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	<17	<15	<14	107,14
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100,00
	Tertanganinya kerusakan infrastruktur akibat bencana	%	100	100	100	100,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	RASIO CAPAIAN AKHIR (2021) S.D 2020
	Cakupan korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	100,00
	Lokasi Evakuasi	Lokasi	8	10	24	240,00
	Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi)	Orang	20	20	20	100,00

Sumber : RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021, BPS, Hasil Evaluasi 2021

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Pemerintah Kota Sungai Penuh sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terkait dengan hal tersebut serta dalam rangka perwujudan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pada bab ini terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBD dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya (Tahun 2016-2020).

Pada Bab ini juga disajikan gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir (realisasi APBD Tahun 2016-2020) dan kerangka pendanaan proyeksi APBD mendatang selama periode RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Pada periode keuangan Tahun 2016-2020, pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 yang juga berdampak pada struktur APBD. Terhitung Tahun 2021, pengelolaan keuangan daerah dan struktur APBD mengacu kepada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut dalam rangka menghitung kemampuan fiskal dan proyeksi keuangan untuk RPJMD Tahun 2021-2026, maka analisis kinerja keuangan periode 2016-2020 dilakukan dengan *mapping* format APBD sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan juga PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa lalu memberikan gambaran kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Kondisi kinerja keuangan daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintah daerah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui perubahan struktur organisasi pemerintah daerah Kota Sungai Penuh berdasarkan pada Peraturan Daerah.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi

realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Sungai Penuh periode Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.1
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD
2016	36.632.476.994	707.134.635.517	5,18%
2017	31.420.979.313	686.197.366.176	4,58%
2018	34.202.639.851	727.140.900.415	4,70%
2019	34.956.932.128	823.213.513.636	4,25%
2020	27.855.371.496	743.896.873.306	3,74%
Rata-rata			4,49%

Sumber: LRA Kota Sungai Penuh, 2016-2020.

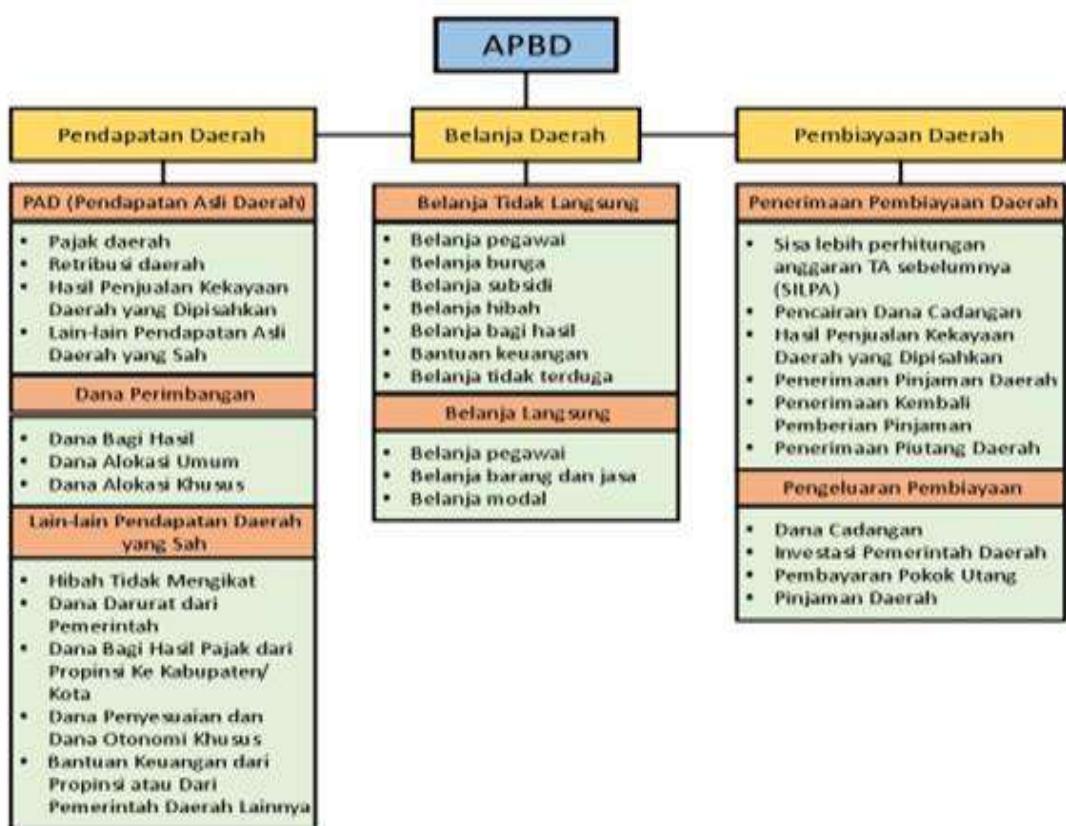
Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Sungai Penuh selama periode Tahun 2016-2020 rata-rata 4,49 persen. Secara keseluruhan, DOFD Kota Sungai Penuh pada periode Tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang cenderung menurun kecuali untuk Tahun 2018 yang naik dari Tahun 2017. DOFD Kota Sungai Penuh pada Tahun 2016 sebesar 5,18% dan mengalami penurunan pada Tahun 2017 menjadi 4,58%. Pada Tahun 2018 kembali mengalami kenaikan dengan DOFD pada Tahun 2018 sebesar 4,70% dan semakin menurun pada Tahun 2019 dan 2020 yakni masing-masing sebesar 4,25% dan 3,74%.

Semakin meningkatnya ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi membutuhkan upaya yang lebih maksimal oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kemandirian keuangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian, sebagai salah satu kota yang baru di Indonesia yakni pada Tahun 2020 ini baru berusia 12 tahun tentunya masih sangat membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah dengan sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi serta dari daerah lainnya dengan senantiasa berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020

Pada pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020, struktur APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh menggunakan struktur berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan komponen Belanja Daerah terdiri atas

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Untuk Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berikut digambarkan struktur APBD berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005.



Gambar III.1
Struktur APBD Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005

Seiring dengan terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku efektif mulai APBD Tahun 2021, maka struktur APBD selama Tahun 2016-2020 dilakukan mapping struktur APBD sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019. Hal ini agar proyeksi dan analisis kemampuan keuangan daerah pada masa periode RPJMD Tahun 2021-2026 tetap sinkron dengan realisasi APBD Tahun 2016-2020.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menggantikan PP nomor 58 Tahun 2005, struktur APBD terdiri dari 3 kelompok yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan komponen belanja terdiri dari belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Untuk Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Adapun struktur

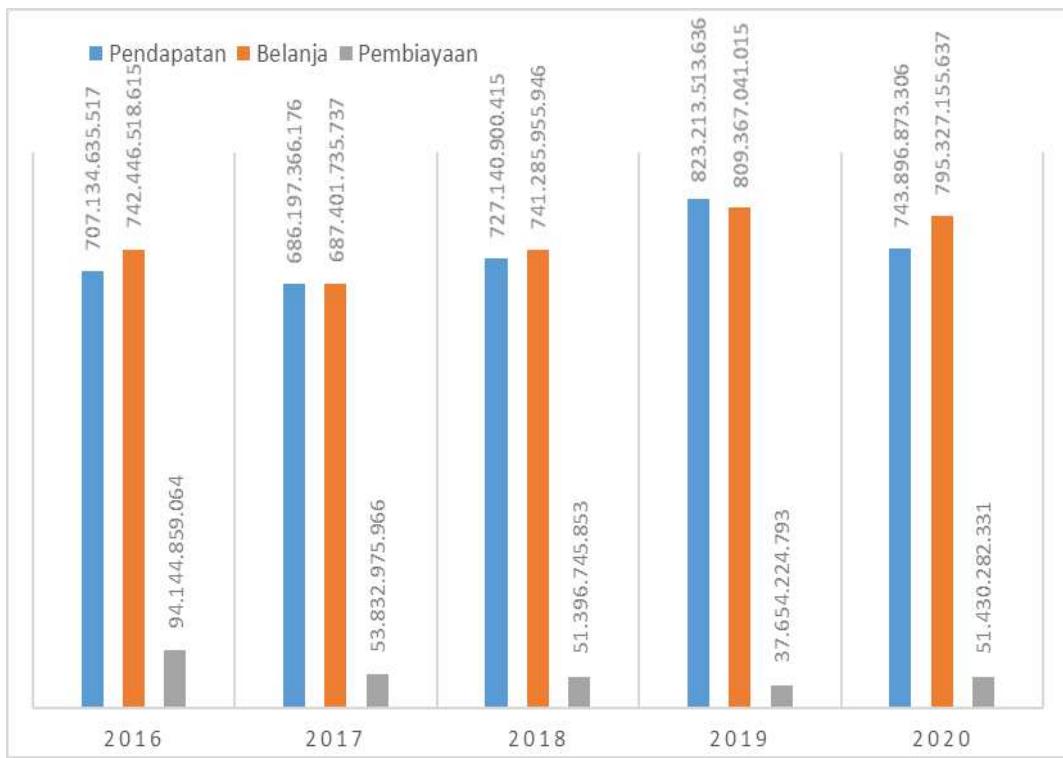
APBD berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar III.2
Struktur APBD Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar III.3 berikut.



Sumber: LRA Kota Sungai Penuh 2016-2020

**Gambar III.3
Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Tahun 2016-2020**

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada Tahun 2016 sampai Tahun 2018 belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, sehingga keuangan daerah mengalami defisit. Namun demikian defisit tersebut dapat ditutupi oleh Silpa yang ada. Surplus keuangan daerah terjadi pada Tahun 2019, disebabkan karena adanya efisiensi belanja dan adanya belanja-belanja daerah yang tidak terealisasi ditahun itu.

3.1.2 Kinerja Pendapatan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Sungai Penuh terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer dibagi menurut beberapa jenis yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan lainnya dan dana darurat.

Analisis terhadap realisasi pencapaian target pendapatan daerah menunjukkan angka yang baik yakni realisasi Tahun 2016-2020 rata-rata mencapai 98,46% dan pada Tahun 2020 menunjukkan tingkat realisasi tertinggi yakni sebesar 100,73%. Sedangkan untuk target terendah diperoleh di Tahun 2016 dan 2019 yakni sebesar 97,25%. Rata-rata pertumbuhan realisasi pun menunjukkan angka peningkatan yakni sebesar 1,09% selama Tahun 2016-2020. Berikut disajikan dalam bentuk tabel perkembangan antara target dengan realisasi selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.2
Target dan Realisasi Serta Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	727,144,429,570.00	707,134,635,517.00	97.25		
2017	705,447,412,426.00	686,197,366,176.00	97.27	(2.98)	(2.96)
2018	728,515,232,218.00	727,140,900,415.00	99.81	3.27	5.97
2019	846,456,785,206.00	823,213,513,636.00	97.25	16.19	13.21
2020	743,896,873,306.00	749,342,006,963.00	100.73	(12.12)	(8.97)
Rata-rata		98.46		1.09	1.81

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Pertumbuhan anggaran pendapatan pada APBD selama Tahun 2016-2020 menunjukkan angka fluktuasi kenaikan dan penurunan. Penurunan dibanding tahun sebelumnya terjadi pada target pendapatan Tahun 2017 dan 2020 sedangkan untuk realisasi pada Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2016 sebesar -2,96% dan realisasi pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar -8,97%. Kenaikan signifikan target dan realisasi pendapatan terjadi pada APBD Tahun 2019.

Realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2016 adalah Rp. 707.134.635.517 atau sebesar 97,25%. Pada Tahun 2017 realisasi pendapatan daerah adalah Rp. 686.197.366.176 atau sebesar 97,27%. Pada Tahun 2018 realisasi pendapatan daerah adalah Rp. 727.140.900.415 atau sebesar 99,81%. Pada Tahun 2019 realisasi pendapatan daerah adalah Rp. 823.157.323.136 atau sebesar 97,25% dan pada Tahun 2020 realisasi pendapatan daerah adalah Rp. 749.342.006.963 atau sebesar 100,73%.

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah selama Tahun 2016-2020 didominasi oleh sumber pendapatan transfer dengan porsi rata-rata 94,17%, disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,49% dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar 1,34%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah mengalami penurunan sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2017 dan kembali naik pada Tahun 2018, namun kembali mengalami penurunan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020. Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini kontribusi masing-

masing komponen dalam pendapatan daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.

Tabel III.3
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
1	Pendapatan Asli Daerah	5.18	4.58	4.70	4.25	3.74	4.49
2	Pendapatan Transfer	93.90	95.36	93.73	93.20	94.66	94.17
3	Lain-lain Pendapatan Daerah	0.92	0.06	1.57	2.56	1.59	1.34

Sumber: LRA Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2016-2020, komponen Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah (provinsi) mencapai 94,17%. Namun demikian, sebagai kota yang baru berkembang hal ini masih dianggap wajar karena masih sangat membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi dengan tetap berupaya meningkatkan tingkat kemandirian keuangan Kota Sungai Penuh.

Berikut disajikan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.4
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Tahun 2020
PENDAPATAN	707.134.635.517	686.197.366.176	727.140.900.415	823.213.513.636	749.342.006.963
PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.632.476.994	31.420.979.313	34.202.639.851	34.956.932.128	29.050.525.938
Pajak daerah	6.291.629.478	7.177.502.825	8.740.881.511	7.652.571.156	7.265.748.342
Retribusi daerah	2.950.566.253	3.260.708.745	2.904.596.243	2.828.056.407	1.428.870.223
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.294.713.593	9.282.767.164	11.104.526.944	11.199.424.467	10.802.550.806
Lain-lain PAD Yang Sah	20.095.567.670	11.700.000.579	11.452.635.152	13.276.880.098	9.553.356.567
PENDAPATAN TRANSFER	664.002.158.523	654.380.386.862	681.513.705.388	767.200.634.230	709.338.141.024
pendapatan transfer pemerintah pusat	636.223.574.193	612.342.462.192	636.558.714.821	707.418.725.795	667.005.160.069
Dana Perimbangan	590.421.034.074	561.309.821.992	571.604.011.621	608.668.101.595	576.169.593.799
Dana Transfer Umum	471.345.006.699	470.941.001.375	479.253.413.242	504.208.435.344	479.924.422.277
Bagi Hasil Pajak	10.813.742.380	10.539.102.975	9.777.285.629	7.686.925.409	9.465.385.289
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	34.844.522.319	40.885.844.400	46.943.475.613	48.621.993.935	57.884.741.988
Dana Alokasi Umum (DAU)	425.686.742.000	419.516.054.000	422.532.652.000	447.899.516.000	412.574.295.000
Dana Transfer Khusus	119.076.027.375	90.368.820.617	92.350.598.379	104.459.666.251	96.245.171.522
Dana Alokasi Khusus (DAK)	119.076.027.375	90.368.820.617	92.350.598.379	104.459.666.251	96.245.171.522
Dana Insentif Daerah	5.706.690.000		17.750.000.000	44.139.667.000	35.043.462.000
Dana Desa	40.095.850.119	51.032.640.200	47.204.703.200	54.610.957.200	55.792.104.270
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.778.584.330	42.037.924.670	44.954.990.567	59.781.908.435	42.332.980.955
Pendapatan Bagi Hasil	27.778.584.330	34.897.924.670	40.814.990.567	49.881.908.435	38.192.980.955
Pendapatan Bagi hasil pajak dari provinsi	27.778.584.330	34.897.924.670	40.814.990.567	49.881.908.435	38.192.980.955
Bantuan Keuangan	-	7.140.000.000	4.140.000.000	9.900.000.000	4.140.000.000
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	7.140.000.000	4.140.000.000	9.900.000.000	4.140.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.500.000.000	396.000.000	11.424.555.176	21.055.947.278	10.953.340.000
Pendapatan Hibah	6.500.000.000	396.000.000	11.424.289.976	20.575.947.278	10.953.340.000
Pendapatan Lainnya		-	265.200	480.000.000	-

Sumber: Data LRA APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rata-rata kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih rendah yakni selama Tahun 2016-2020 hanya berkontribusi sebesar 4,49% dengan trend menurun.

Tingkat realisasi PAD selama Tahun 2016-2020 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut secara rata-rata mencapai 86,68%. Realisasi tertinggi dan berhasil mencapai target hanya terjadi pada Tahun 2016 dan 2020, sedangkan untuk Tahun 2017-2019 realisasi tertinggi hanya sebesar 76,95% dari target ditetapkan. Diperlukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan tingkat capaian realisasi PAD. Berikut disajikan dalam perbandingan antara target dengan realisasi PAD, tingkat capaian dan tingkat pertumbuhan anggaran serta pertumbuhan realisasi selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.5
Target dan Realisasi PAD Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	35,161,697,628.00	36,632,476,994.00	104.18		
2017	42,626,159,749.00	31,420,979,313.00	73.71	21.23	(14.23)
2018	44,450,686,693.00	34,202,639,851.00	76.95	4.28	8.85
2019	47,073,181,316.00	34,956,932,128.00	74.26	5.90	2.21
2020	27,855,371,496.00	29,050,525,938.00	104.29	(40.83)	(16.90)
Rata-rata			86.68	(2.35)	(5.02)

Sumber: Data LRA APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Dari aspek target PAD, pada Tahun 2020 mengalami penurunan sangat signifikan dibanding Tahun 2019 yakni turun sebesar 40,83%. Hal ini disebabkan dampak dari Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelemahan ekonomi dan insentif pajak dan retribusi daerah. Namun demikian secara umum, pertumbuhan anggaran PAD setiap tahun mengalami kenaikan pada Tahun 2016-2019. Demikian juga terkait dengan pertumbuhan realisasi PAD yang juga naik setiap tahunnya kecuali untuk Tahun 2017 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2016 dan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019.

Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PAD yakni dengan rata-rata sebesar 39,33%. Komponen penyumbang terbesar berikutnya adalah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 27,98%. Sedangkan Pajak daerah berkontribusi rata-rata hanya sebesar

21,27% dan terendah bersumber dari retribusi daerah sebesar 10,26%. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilaksanakan. Tabel berikut menjelaskan kontribusi masing-masing komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh serta rata-rata proporsi/kontribusi selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.6
Kontribusi Komponen Realisasi PAD Tahun 2016-2020

URAIAN	KONTRIBUSI TERHADAP PAD (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
Pajak Daerah	17.18	22.84	25.56	21.89	18.88	21.27
Retribusi Daerah	8.05	10.38	8.49	16.27	8.09	10.26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.91	29.54	32.47	25.95	32.04	27.98
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	54.86	37.24	33.48	33.11	37.98	39.33

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Berikut diuraikan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2016-2020.

a) Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD berfluktuasi dan cenderung menurun Tahun 2019 dan 2020. Sedangkan pada Tahun 2016-2018 memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada Tahun 2019 target yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya yakni Tahun 2018, realisasi bahkan cenderung menurun, kecuali untuk Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang meningkat pada Tahun 2019 dibanding Tahun 2018. Pada Tahun 2020 dengan akibat dampak Pandemi Covid-19, target yang ditetapkan mengalami penurunan dibanding Tahun 2019. Selain itu target yang ditetapkan setiap tahunnya tidak berhasil dicapai. Berikut disajikan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020.

Tabel III.7
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	6,858,668,000	6,291,629,478	12,659,107,630	7,177,502,825	11,611,873,621	8,740,881,511	11,611,873,621	7,652,571,156	5,258,862,365	7,265,748,342
Pajak Hotel	260,000,000	254,345,602	440,118,733	222,291,373	888,588,000	289,387,435	888,588,000	197,136,913	70,000,000	71,672,535
Pajak Restoran	1,248,798,000	1,132,629,158	2,363,260,672	1,158,328,754	2,000,000,000	1,242,045,895	2,000,000,000	1,244,747,727	400,000,000	721,350,885
Pajak Hiburan	60,000,000	25,461,500	74,260,120	29,615,196	73,632,000	19,092,160	73,632,000	11,915,000	10,000,000	-
Pajak Reklame	500,000,000	310,518,700	791,986,790	306,427,100	478,954,000	333,964,110	478,954,000	354,620,220	250,000,000	351,027,000
Pajak Penerangan Jalan	2,300,000,000	2,291,044,850	5,272,930,068	3,164,554,731	4,225,699,621	3,571,234,122	4,225,699,621	3,365,193,762	2,700,000,000	3,305,192,174
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,400,000,000	1,491,045,316	2,430,763,366	1,102,274,806	2,335,000,000	1,081,416,320	2,335,000,000	628,051,898	150,000,000	400,452,804
Pajak Air Tanah	39,870,000	11,580,000	11,432,880	456,000	10,000,000	735,000	10,000,000	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	550,000,000	361,308,052	600,000,000	400,882,315	600,000,000	511,913,169	600,000,000	337,786,186	400,000,000	503,031,079
Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan	500,000,000	413,696,300	674,355,000	792,672,550	1,000,000,000	1,691,093,300	1,000,000,000	1,513,119,450	1,278,862,365	1,913,021,865

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Komponen terbesar Pajak Daerah bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yakni rata-rata sebesar 42,17%. Komponen terbesar kedua bersumber dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 16,21% dan komponen ketiga terbesar bersumber dari Pajak Restoran yakni sebesar 16,61%. Komponen terendah bersumber dari Pajak Air Tanah yakni hanya sebesar 0,04%. Berikut disajikan proporsi/kontribusi untuk masing-masing pajak daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.

**Tabel III.8
Kontribusi Komponen Pajak Daerah Tahun 2016-2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata -rata
Pajak Hotel	4.04	3.10	3.31	2.58	0.99	2.80
Pajak Restoran	18.00	16.14	14.21	16.27	9.93	14.91
Pajak Hiburan	0.40	0.41	0.22	0.16	0.00	0.24
Pajak Reklame	4.94	4.27	3.82	4.63	4.83	4.50
Pajak Penerangan Jalan	36.41	44.09	40.86	43.97	45.49	42.17
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.70	15.36	12.37	8.21	5.51	13.03
Pajak Air Tanah	0.18	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.74	5.59	5.86	4.41	6.92	5.70
Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan	6.58	11.04	19.35	19.77	26.33	16.61

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 10,26%. Realisasi Retribusi Daerah sangat rendah yakni rata-rata sebesar 45,25% dan bahkan pada Tahun 2019 realisasi hanya sebesar 36,93% dari target ditetapkan. Dari 32 jenis Retribusi Daerah yang diperkenankan dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah, hanya 10 retribusi yang efektif dipungut di Kota Sungai Penuh. Intensifikasi dan ekstensifikasi atas retribusi daerah sangat penting dilakukan. Berikut disajikan anggaran dan realisasi Retribusi Daerah selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.9
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016-2020

URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
	ANGGARAN	REALISASI								
RETRIBUSI DAERAH	5,074,410,000	2,950,566,253	7,170,186,570	3,260,708,745	7,179,320,570	2,904,596,243	7,658,353,070	2,828,056,407	1,306,227,750	1,428,870,223
Retribusi Jasa Umum	3,316,429,000	1,733,473,500	4,747,391,530	2,087,471,500	4,756,525,530	1,785,307,000	5,206,374,780	1,743,276,500	878,597,500	902,660,000
Retribusi Pelayanan Kesehatan	150,000,000	136,279,000	201,016,750	228,998,000	210,000,000	167,587,500	610,000,000	137,766,000	112,883,000	81,859,500
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,200,000,000	478,878,000	1,876,000,000	674,473,000	1,876,000,000	543,164,000	1,876,000,000	534,851,000	300,000,000	367,343,000
Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	601,602,067	142,484,000	806,146,770	155,797,000	806,146,770	125,920,000	806,146,770	111,429,000	55,714,500	43,722,000
Retribusi Pelayanan Pasar	1,364,826,933	975,832,500	1,864,228,010	1,028,203,500	1,864,228,010	948,635,500	1,864,228,010	959,230,500	410,000,000	409,735,500
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan / Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	150,750	-	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	1,407,981,000	1,023,746,658	1,886,778,290	1,056,393,657	1,886,778,290	820,932,243	2,049,961,540	895,414,657	402,630,250	501,103,973
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	765,000,000	737,065,158	1,025,133,500	822,569,157	1,025,133,500	570,343,743	1,025,133,500	591,830,157	255,000,000	346,786,973
Retribusi Terminal	500,000,000	213,235,000	670,016,750	99,750,000	670,016,750	90,736,000	670,016,750	78,659,000	60,000,000	59,192,000
Retribusi Tempat Khusus Parkir	7,183,000	5,120,000	9,625,220	-	9,625,220	6,008,000	9,625,220	6,818,000	3,000,000	4,250,000
Retribusi Rumah Potong Hewan	65,798,000	15,326,500	88,186,070	23,678,500	88,186,070	19,096,500	88,186,070	29,260,500	14,630,250	16,450,000
Retribusi Tempat Rekreasi	70,000,000	53,000,000	93,816,750	110,396,000	93,816,750	134,748,000	207,000,000	188,847,000	70,000,000	74,425,000
Retribusi Tera Ulang	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	350,000,000	193,346,095	536,016,750	116,843,588	536,016,750	298,357,000	402,016,750	189,365,250	25,000,000	25,106,250
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	250,000,000	120,728,125	402,016,750	106,671,938	402,016,750	298,357,000	402,016,750	189,365,250	25,000,000	25,106,250
Retribusi Izin Gangguan (HO)	100,000,000	72,617,970	134,000,000	10,171,650	134,000,000	-	-	-	-	-

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi terbesar selama 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar 61,81% dari total retribusi daerah. Retribusi Jasa Usaha berkontribusi sebesar 32,42% sedangkan Retribusi Perizinan Tertentu berkontribusi sebesar 5,77%. Pada Retribusi Jasa Umum, kontribusi terbesar bersumber dari retribusi pelayanan pasar yakni sebesar 51,82% dan terendah bersumber dari retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebesar 6,79%.

Pada Retribusi Jasa Usaha, kontribusi terbesar bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yakni sebesar 70,93% dan terendah bersumber dari Retribusi Tempat Khusus Parkir yakni sebesar 0,57%. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, jenis retribusi hanya berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan. Pada tabel berikut disajikan kontribusi masing-masing retribusi terhadap Retribusi Daerah pada Tahun 2016-2020.

**Tabel III.10
Kontribusi Komponen Retribusi Daerah Tahun 2016-2020**

URAIAN	KONTRIBUSI TERHADAP RETRIBUSI DAERAH (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
Retribusi Jasa Umum	58.75	64.02	61.46	61.64	63.17	61.81
Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.86	10.97	9.39	7.90	9.07	9.04
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	27.63	32.31	30.42	30.68	40.70	32.35
Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	8.22	7.46	7.05	6.39	4.84	6.79
Retribusi Pelayanan Pasar	56.29	49.26	53.14	55.02	45.39	51.82
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan / Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	34.70	32.40	28.26	31.66	35.07	32.42
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	72.00	77.87	69.48	66.10	69.20	70.93
Retribusi Terminal	20.83	9.44	11.05	8.78	11.81	12.38
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0.50	-	0.73	0.76	0.85	0.57
Retribusi Rumah Potong Hewan	1.50	2.24	2.33	3.27	3.28	2.52
Retribusi Tempat Rekreasi	5.18	10.45	16.41	21.09	14.85	13.60
Retribusi Tera Ulang	-	-	-	-	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	6.55	3.58	10.27	6.70	1.76	5.77
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	62.44	91.29	100.00	100.00	100.00	90.75
Retribusi Izin Gangguan (HO)	37.56	8.71	-	-	-	9.25

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 27,98% dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari investasi Pemerintah Kota Sungai Penuh pada BUMD yakni Bank Jambi.

Berikut disajikan anggaran dan realisasi serta tingkat capaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2016-2020.

Tabel III.11
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
2016	7,294,713,593.00	7,294,713,593.00	100.00
2017	8,358,970,521.00	9,282,767,164.00	111.05
2018	11,104,526,944.00	11,104,526,944.00	100.00
2019	12,214,979,639.00	11,199,424,467.00	91.69
2020	10,802,550,806.00	10,802,550,806.00	100.00

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

d) Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

Lain-lain PAD yang sah lainnya memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD yakni rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 39,33%. Tingkat realisasi cukup tinggi yakni sebesar 92,75%. Pada Tahun 2016 realisasinya mencapai 126,12%. Berikut disajikan anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.12
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2016-2020

URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	15,933,806,035	20,095,567,670	14,437,744,278	11,700,000,579	14,554,965,558	11,452,635,152	15,587,974,986	13,276,880,098	10,487,730,575	9,554,436,856
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	444,202,000	599,975,400	488,622,200	577,325,950	488,622,200	181,003,070	11,000,000	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro	2,000,000,000	1,094,236,959	2,200,000,000	1,328,364,401	2,200,000,000	1,172,485,506	2,000,000,000	1,298,978,317	1,300,000,000	2,541,803,451
Penerimaan Bunga Deposito	6,550,000,000	9,959,054,790	7,205,000,000	5,319,595,405	7,205,000,000	4,231,851,841	5,000,000,000	5,609,897,260	1,700,000,000	360,616,438
Pendapatan Denda Pajak	-	18,390,311	-	63,651,059			-	39,097,671	-	35,571,122
Pendapatan Denda Retribusi	15,000,000	625,000	16,500,000	19,975,000	16,500,000	-	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian	2,032,603,219	5,274,580,620	1,414,835,000	1,322,838,868	1,414,835,000	1,662,357,767	2,614,835,000	618,750,765	1,000,000,000	1,411,002,792
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	92,303,290	539,039,818	101,533,619	286,517,581	101,533,619	1,005,143,990	101,533,619	488,044,550	243,521,475	591,026,638
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4,799,697,526	2,609,664,772	3,011,253,459	2,781,732,315	3,128,474,739	3,199,792,978	5,860,606,367	5,222,111,534	6,244,209,100	4,614,416,415

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Kontribusi terbesar dari Lain-Lain PAD yang sah bersumber dari Pendapatan Bunga Deposito sebesar 35,60% dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar 30,47% dan. Sedangkan yang terendah bersumber dari Pendapatan Denda Retribusi sebesar 0,03%. Berikut diuraikan kontribusi komponen Lain-lain PAD yang sah lainnya Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.

Tabel III.13
Kontribusi Komponen Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2016-2020

URAIAN	KONTRIBUSI TERHADAP LAIN-LAIN PAD YANG SAH (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.99	4.93	1.58	-	-	1.90
Penerimaan Jasa Giro	5.45	11.35	10.24	9.78	26.60	12.68
Penerimaan Bunga Deposito	49.56	45.47	36.95	42.25	3.77	35.60
Pendapatan Denda Pajak	0.09	0.54	-	0.29	0.37	0.26
Pendapatan Denda Retribusi	0.00	0.17	-	-	-	0.03
Pendapatan Dari Pengembalian	26.25	11.31	14.52	4.66	14.77	14.30
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	2.68	2.45	8.78	3.68	6.19	4.75
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	12.99	23.78	27.94	39.33	48.30	30.47

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berkontribusi sangat signifikan terhadap Pendapatan Daerah yakni rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 94,17%. Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah yakni dalam hal ini Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 98,87% dari anggaran ditetapkan pada APBD. Berikut disajikan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2016-2020

URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
	ANGGARAN	REALISASI								
PENDAPATAN TRANSFER	688,482,731,942	664,002,158,523	660,661,252,677	654,380,386,862	672,235,175,549	681,513,705,388	777,989,298,326	767,200,634,230	704,208,101,810	709,338,141,025
Pendapatan transfer pemerintah pusat	654,877,019,847	636,223,574,193	615,000,785,627	612,342,462,192	630,768,755,555	636,558,714,821	727,034,307,760	707,418,725,795	666,000,082,244	667,005,160,069
Dana Perimbangan	609,010,836,847	590,421,034,074	563,904,502,627	561,309,821,992	565,747,409,555	571,604,011,621	628,217,040,760	608,668,101,595	575,152,519,244	576,169,593,799
Dana Transfer umum	464,872,597,847	471,345,006,699	466,729,285,627	470,941,001,375	462,585,479,555	479,253,413,242	515,418,470,760	504,208,435,344	475,613,062,244	479,924,422,277
Bagi Hasil Pajak	12,304,174,154	10,813,742,380	13,940,393,747	10,539,102,975	12,165,594,000	9,777,285,629	9,591,982,938	7,686,925,409	11,487,295,622	9,465,385,289
Bagi Hasil bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26,881,681,693	34,844,522,319	33,272,837,880	40,885,844,400	27,887,233,555	46,943,475,613	57,926,971,822	48,621,993,935	49,798,781,622	57,884,741,988
Dana Alokasi Umum (DAU)	425,686,742,000	425,686,742,000	419,516,054,000	419,516,054,000	422,532,652,000	422,532,652,000	447,899,516,000	447,899,516,000	414,326,985,000	412,574,295,000
Dana Transfer Khusus	144,138,239,000	119,076,027,375	97,175,217,000	90,368,820,617	103,161,930,000	92,350,598,379	112,798,570,000	104,459,666,251	99,539,457,000	96,245,171,522
Dana Alokasi Khusus (DAK)	144,138,239,000	119,076,027,375	97,175,217,000	90,368,820,617	103,161,930,000	92,350,598,379	112,798,570,000	104,459,666,251	99,539,457,000	96,245,171,522
Dana Insentif Daerah	5,706,690,000	5,706,690,000	-	-	17,750,000,000	17,750,000,000	44,139,667,000	44,139,667,000	35,043,462,000	35,043,462,000
Dana Desa	40,159,493,000	40,095,850,119	51,096,283,000	51,032,640,200	47,271,346,000	47,204,703,200	54,677,600,000	54,610,957,200	55,804,101,000	55,792,104,270
Pendapatan Transfer Antar Daerah	33,605,712,095	27,778,584,330	45,660,467,050	42,037,924,670	41,466,419,994	44,954,990,567	50,954,990,566	59,781,908,435	38,208,019,566	42,332,980,956
Pendapatan Bagi Hasil	33,605,712,095	27,778,584,330	38,520,467,050	34,897,924,670	34,326,419,994	40,814,990,567	40,814,990,566	49,881,908,435	34,068,019,566	38,192,980,956
Pendapatan Bagi hasil Pajak dari Provinsi	33,605,712,095	27,778,584,330	38,520,467,050	34,897,924,670	34,326,419,994	40,814,990,567	40,814,990,566	49,881,908,435	34,068,019,566	38,192,980,956
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	7,140,000,000	7,140,000,000	7,140,000,000	4,140,000,000	10,140,000,000	9,900,000,000	4,140,000,000	4,140,000,000
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	7,140,000,000	7,140,000,000	7,140,000,000	4,140,000,000	10,140,000,000	9,900,000,000	4,140,000,000	4,140,000,000

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Komponen penyumbang terbesar Pendapatan transfer berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dengan kontribusi sebesar 93,92% disusul oleh pendapatan transfer antar daerah sebesar 6,08%. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat terdiri atas Dana Perimbangan (89,33%), Dana Insentif Daerah (3,04%), dan Dana Desa (7,63%). Pada Dana Perimbangan, Dana Transfer Umum memberi kontribusi sebesar 82,62% sedangkan Dana Transfer Khusus dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 17,38%. Dana Transfer Umum sebesar 88,7% bersumber dari Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak (9,2%) dan Bagi Hasil Pajak sebesar 2,1%. Dana Desa menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya terhadap proporsi pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat seiring dengan kenaikan alokasi dana desa.

Pendapatan yang bersumber dari transfer antar daerah bersumber dari Pemerintah Provinsi Jambi. Komponen terbesar bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar 89,28% dan Bantuan Keuangan sebesar 10,72%. Berikut disajikan proporsi/kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.

Tabel III.15
Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2016-2020

URAIAN	KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN TRANSFER (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	95.82	93.58	93.40	92.21	94.57	93.92
Dana Perimbangan	92.80	91.67	89.80	86.04	86.36	89.33
Dana Transfer Umum	79.83	83.90	83.84	82.84	82.69	82.62
Bagi Hasil Pajak	2.29	2.24	2.04	1.52	2.42	2.10
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	7.39	8.68	9.80	9.64	10.47	9.20
Dana Alokasi Umum (DAU)	90.31	89.08	88.16	88.83	87.11	88.70
Dana Transfer Khusus (DAK)	20.17	16.10	16.16	17.16	17.31	17.38
Dana Insentif Daerah	0.90	-	2.79	6.24	5.26	3.04
Dana Desa	6.30	8.33	7.42	7.72	8.38	7.63
Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.18	6.42	6.60	7.79	5.43	6.08
Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	100.00	83.02	90.79	83.44	89.16	89.28
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	16.98	9.21	15.56	10.84	10.72

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkontribusi sebesar 1,34% secara rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2016-2020. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah.

Tingkat capaian realisasi dengan anggaran berfluktuatif, rata-rata tingkat capaian realisasi berdasarkan anggaran adalah sebesar 98,32%. Berikut disajikan anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah beserta pertumbuhannya selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.16
Anggaran dan Realisasi serta Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	3,500,000,000	6,500,000,000	185.71		
2017	2,160,000,000	396,000,000	18.33	(38.29)	(93.91)
2018	11,829,369,976	11,424,289,976	96.58	447.66	2,784.92
2019	21,394,305,564	21,055,947,278	98.42	80.86	84.31
2020	11,833,400,000	10,953,340,000	92.56	(44.69)	(47.98)
Rata-rata		98.32		111.38	681.84

Sumber: LRA da APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2021

3.1.3 Kinerja Belanja Daerah

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah Kota Sungai Penuh pada 5 (lima) tahun periode anggaran sebelumnya (Tahun 2016-2020) yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang (Tahun 2021-2026) dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Pengklasifikasian belanja daerah dilakukan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Sungai Penuh, di aspek belanja dititikberatkan pada kebijakan belanja yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah yang tercermin pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Melalui belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang bermanfaat langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama Tahun 2016-2019 realisasi belanja Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dari Rp. 742.446.518.615 pada Tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 809.367.041.015 pada Tahun 2019, akan tetapi pada Tahun 2020 realisasi belanja mengalami penurunan menjadi Rp. 711.305.687.923 dengan

rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -0,63%. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama Tahun 2016-2019 dengan memperbandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi belanja secara rata-rata mencapai 91,44%. Jika dilihat tingkat pertumbuhan anggaran secara rata-rata turun -0,29% selama Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2020 anggaran belanja daerah mengalami penurunan dari Rp. 884.111.009.998 pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 795.327.115.637 pada Tahun 2020. Penurunan belanja daerah ini juga seiring dengan penurunan pendapatan daerah sehingga diharapkan defisit anggaran tidak besar. Berikut disajikan tingkat anggaran dan realisasi serta pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun 2016-2020.

**Tabel III.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	818,010,248,273	742,446,518,615	90.76		
2017	759,280,388,393	687,401,735,737	90.53	(7.18)	(7.41)
2018	780,757,708,047	741,285,955,946	94.94	2.83	7.84
2019	884,111,009,998	809,367,041,015	91.55	13.24	9.18
2020	795,327,115,637	711,305,687,923	89.44	(10.04)	(12.12)
Rata-rata		91.44		(0.29)	(0.63)

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk belanja daerah pada Tahun 2016-2020, belanja daerah di dominasi oleh belanja operasi dengan proporsi rata-rata 63,56%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selain pengalokasian belanja terbesar untuk kebutuhan belanja operasi, disusul oleh belanja modal dengan proporsi rata-rata 23,94%. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen belanja terbesar ketiga adalah belanja transfer yakni berupa bantuan keuangan untuk pemerintah desa sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komponen terendah adalah Belanja Tidak Terduga yakni sebesar 0,96% dari total belanja daerah selama Tahun 2016-2020. Tabel berikut menyajikan informasi kontribusi komponen realisasi belanja daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.

Tabel III.18
Kontribusi Komponen Belanja Daerah Tahun 2016-2020

URAIAN	KONTRIBUSI TERHADAP BELANJA DAERAH (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
BELANJA OPERASI	64,26	62.69	61.51	65.43	63.92	63.56
BELANJA MODAL	28,55	25.22	.26.31	21.81	17.82	23.94
BELANJA TAK TERDUGA	0,02	0.00	0.00	0.03	4.75	0.96
BELANJA TRANSFER	7,16	12.09	12.17	12.73	13.50	11.53

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Pertumbuhan realisasi belanja daerah selama Tahun 2016-2020 bersifat sangat fluktuatif kenaikan dan penurunannya. Belanja operasi rata-rata selama Tahun 2016-2020 tumbuh sebesar 2,07%. Belanja daerah pada Tahun 2020 mengalami penurunan pada Tahun 2020. Berikut disajikan rincian realisasi dan rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.19
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
BELANJA OPERASI	477,120,941,082	430,961,590,677	456,001,098,447	529,550,668,686	508,402,139,119	2.07
BELANJA MODAL	212,004,597,663	173,331,166,028	195,061,445,045	176,535,574,209	141,740,457,293	(8.73)
BELANJA TAK TERDUGA	131,325,048	-	28,664,398	253,680,000	37,799,152,000	3,871.33
BELANJA TRANSFER	53,189,654,822	83,108,939,032	90,194,748,057	103,027,118,120	107,385,407,224	20.81

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2016-2020 berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar terhadap total belanja daerah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2016-2020 yakni sebesar 63,56%. Realisasi belanja operasi dibandingkan dengan anggaran rata-rata sebesar 90,61% dengan tingkat pertumbuhan anggaran sebesar -0,68% dan pertumbuhan realisasi belanja operasi sebesar -0,68%. Berikut disajikan anggaran dan realisasi belanja operasi dan tingkat capaian serta pertumbuhan anggaran dan realisasi selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	539,524,541,289.00	477,120,941,082.00	88.43		
2017	478,841,005,037.00	430,961,590,677.00	90.00	(11.25)	(9.67)
2018	482,502,619,301.00	456,001,098,447.00	94.51	0.76	5.81
2019	578,445,926,999.00	529,550,668,686.00	91.55	19.88	16.13
2020	508,402,139,119.00	450,235,040,378.00	88.56	(12.11)	(14.98)
Rata-rata			90.61	(0.68)	(0.68)

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Belanja pegawai merupakan belanja terbesar terhadap belanja operasi yakni rata-rata sebesar 59,42%. Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji pegawai, tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Komponen belanja terbesar kedua terhadap belanja operasi adalah belanja barang dan jasa yakni sebesar 37,95% dan belanja terendah adalah belanja subsidi yakni sebesar 0,03%. Sedangkan belanja bunga tidak ada karena tidak ada pinjaman daerah Kota Sungai Penuh yang dilakukan. Berikut disajikan kontribusi masing-masing komponen belanja operasi selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.21
Kontribusi Komponen Belanja Operasi Tahun 2016-2020

Uraian	Kontribusi Terhadap Belanja Operasi (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Belanja Pegawai	58,58	52,82	62,08	55,86	67,78	59,42
Belanja barang dan jasa	39,33	45,42	35,64	41,62	27,75	37,95
Belanja Subsidi	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,03
Belanja Hibah	1,74	1,42	2,09	1,90	4,15	2,26
Belanja Bantuan Sosial	0,27	0,28	0,20	0,62	0,32	0,34

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Berikut disajikan dalam bentuk rupiah anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja operasi selama Tahun 2016-2020.

Tabel III.22
Anggaran dan Realisasi Komponen Belanja Operasi Tahun 2016-2021

URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
	ANGGARAN	REALISASI								
BELANJA OPERASI	539,933,734,889	477,436,998,248	478,841,005,037	430,961,590,677	482,502,619,301	455,919,258,525	580,345,926,999	531,450,668,686	508,092,532,579	450,235,040,378
Belanja Pegawai	322,571,359,374	279,502,071,992	258,493,576,394	227,936,246,074	237,812,225,154	224,072,442,475	324,759,582,067	295,798,202,426	307,582,979,534	274,046,586,950
Belanja Barang dan Jasa	205,416,807,222	187,667,589,293	210,486,713,642	195,407,415,603	231,773,494,168	220,623,391,652	236,481,779,732	220,386,729,527	172,189,990,595	153,741,857,100
Belanja Subsidi	352,620,000	329,292,000	352,620,000	296,352,000	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	9,873,833,200	8,312,066,367	7,812,155,000	6,125,677,000	11,601,900,000	10,292,962,234	12,658,265,200	10,085,736,733	26,667,262,450	22,266,596,328
Belanja Bantuan Sosial	1,309,921,493	1,309,921,430	1,695,940,000	1,195,900,000	1,314,999,979	930,462,164	4,546,300,000	3,280,000,000	1,652,300,000	180,000,000
Belanja Bantuan Keuangan	409,193,600	316,057,166	-	-	-	-	1,900,000,000	1,900,000,000	-	-

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

b) Belanja Modal.

Belanja Modal terdiri atas belanja modal tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Realisasi belanja modal mengalami penurunan dari Tahun 2016 ke Tahun 2020, yaitu pada Tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp.212.004.597.663 menjadi Rp. 134.644.309.515 pada Tahun 2020. Tingkat realisasi belanja modal termasuk tinggi yakni sebesar 93,31%. Tabel berikut disajikan anggaran, realisasi, tingkat capaian, pertumbuhan anggaran dan pertumbuhan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.

**Tabel III.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	222,487,203,539	212,004,597,663	95.29		
2017	193,693,813,474	173,331,166,028	89.49	(12.94)	(18.24)
2018	207,001,059,570	195,061,445,045	94.23	6.87	12.54
2019	190,775,347,459	176,535,574,209	92.54	(7.84)	(9.50)
2020	141,740,457,293	134,644,309,515	94.99	(25.70)	(23.73)
Rata-rata			93.31	(9.90)	(9.73)

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020.

Dalam hal anggaran belanja modal mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan yakni rata-rata sebesar -4,64% sedangkan realisasinya mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan juga dengan rata-rata sebesar -5,07% selama Tahun 2016-2020. Komitmen kuat pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan belanja untuk pembangunan melalui belanja modal.

Komponen terbesar belanja modal adalah pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 55,57% dan diikuti oleh belanja modal gedung dan bangunan. Sebagai Kota yang relatif baru pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan serta pembangunan gedung pemerintahan menjadi prioritas dalam belanja modal dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.

**Tabel III.24
Kontribusi Komponen Belanja Modal Tahun 2016-2020**

URAIAN	KONTRIBUSI TERHADAP BELANJA MODAL (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Belanja Modal Tanah	3.21	4.20	6.38	3.52	-	3.46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.21	10.89	13.98	15.08	18.28	14.89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.37	31.25	25.49	25.91	19.88	23.18
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.02	51.70	51.32	52.98	54.83	55.57
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.19	1.96	2.83	2.51	7.01	2.90

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Berikut realisasi belanja modal Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.

**Tabel III.25
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA MODAL	212,004,597,663	173,331,166,028	195,061,445,045	176,535,574,209	134,644,309,515
Belanja Modal Tanah	6,810,023,280	7,282,629,356	12,441,301,100	6,213,614,698	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,372,141,400	18,882,441,751	27,265,254,919	26,622,358,750	24,616,439,930
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,335,858,477	54,162,115,624	49,718,914,234	45,742,835,240	26,763,269,710
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	142,076,314,886	89,615,026,919	100,109,930,695	93,521,935,828	73,830,013,840
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	410,259,620	3,388,952,378	5,526,044,097	4,434,829,693	9,434,586,035

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

c) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan selama Tahun 2016-2020. Berikut disajikan tabel mengenai anggaran, realisasi, tingkat capaian, pertumbuhan anggaran dan pertumbuhan realisasi belanja tak terduga.

**Tabel III.26
Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	2,556,716,844	131,325,048	5.14		
2017	2,825,716,844	40,000	0.00	10.52	(99.97)
2018	1,000,000,000	28,664,398	2.87	(64.61)	71,561.00
2019	2,556,716,844	253,680,000	9.92	155.67	785.00
2020	37,799,150,000	20,656,260,516	54.65	1,378.43	8,042.64
Rata-rata		14.51		370.00	20,072.17

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

d) Belanja Transfer

Belanja transfer yang dianggarkan dan direalisasikan adalah belanja transfer dalam bentuk bantuan keuangan bagi pemerintah desa. Anggaran dan realisasi belanja transfer ini setiap tahun terus meningkat selama Tahun 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 21,16% dan pertumbuhan realisasi sebesar 20,34% dengan tingkat realisasi sebesar 97,68%. Berikut disajikan data terkait anggaran, realisasi, tingkat capaian, pertumbuhan anggaran dan pertumbuhan realisasi belanja transfer pada Tahun 2016-2020.

Tabel III.27
Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Transfer Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	53,441,786,600	53,189,654,822	99.53		
2017	83,919,853,038	83,108,939,032	99.03	57.03	56.25
2018	90,254,029,175	90,194,748,057	99.93	7.55	8.53
2019	112,333,018,696	103,027,118,120	91.72	24.46	14.23
2020	107,385,407,224	105,460,470,973	98.21	(4.40)	2.36
Rata-rata		97.68		21.16	20.34

Sumber: Data LRA APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

C. Kinerja Pembiayaan dan Surplus/Defisit

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah baik terjadi defisit atau surplus anggaran. Kebijakan yang dibuat dalam penganggaran adalah kebijakan anggaran berimbang. Hal ini berarti semua SiLPA tahun sebelumnya direncanakan untuk digunakan untuk mengerakkan pembangunan pada tahun berikutnya. SiLPA juga menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Sungai penuh pada tahun anggaran tersebut.

Tabel III.28
Realisasi Defisit/Surplus serta Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	707,134,635,517	686,197,366,176	727,140,900,415	823,213,513,636	743,896,873,306
BELANJA	742,446,518,615	687,401,735,737	741,285,955,946	809,367,041,015	795,327,155,637
SURPLUS / DEFISIT	(35,311,883,098)	(1,204,369,561)	(14,145,055,531)	13,846,472,621	(51,430,282,331)
PEMBIAYAAN	94,144,859,064	53,832,975,966	51,396,745,853	37,654,224,793	51,430,282,331
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99,144,859,064	58,832,975,966	52,628,646,406	37,654,224,793	51,430,282,331
SILPA	99,144,859,064	58,832,975,966	52,628,646,406	37,654,224,793	51,430,282,331
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,000,000,000	5,000,000,000	1,231,900,553	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	231,900,553	-	-
Penyertaan Modal Daerah	5,000,000,000	5,000,000,000	1,000,000,000		
PEMBIAYAAN NETTO	94,144,859,064	53,832,975,966	51,396,745,853	37,654,224,793	51,430,282,331
SILPA	58,832,975,966	52,628,606,406	37,251,690,321	51,500,697,414	-

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi APBD Tahun 2016-2018 mengalami defisit dan di Tahun 2020 juga diperkirakan defisit. Surplus APBD terjadi pada Tahun 2019. Defisit APBD yang terjadi setiap tahunnya mampu ditutupi oleh pembiayaan neto yang bersumber utama dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Atas hal tersebut pada akhir tahun SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) karena pembiayaan neto lebih besar daripada defisit APBD. Secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Tahun 2015-2020 menunjukkan peningkatan kinerja cukup baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020.

Tabel III.29
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
PENDAPATAN	707.134.635.517	686.197.366.176	727.122.042.033	823.157.323.136	749.342.006.963
PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.632.476.994	31.420.979.313	34.184.049.670	34.900.741.628	29.050.525.939
Pajak Daerah	6.291.629.478	7.177.502.825	8.690.882.383	7.652.571.156	7.265.748.342
Retribusi Daerah	2.950.566.253	3.260.708.745	2.904.596.243	2.828.056.407	1.428.870.223
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.294.713.593	9.282.767.164	11.104.526.944	11.199.424.467	10.802.550.806
Lain-lain PAD yang sah	20.095.567.670	11.700.000.579	11.484.044.099	13.220.689.598	9.553.356.567
PENDAPATAN TRANSFER	664.002.158.523	654.380.386.862	681.513.702.388	767.200.634.230	709.338.141.025
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	636.223.574.193	612.342.462.192	636.558.711.821	707.418.725.795	667.005.160.069
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.778.584.330	42.037.924.670	44.954.990.567	59.781.908.435	42.332.980.956
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.500.000.000	396.000.000	11.424.289.976	21.055.947.278	10.953.340.000
BELANJA	742.446.518.615	687.401.695.737	740.864.563.093	809.310.850.515	711.305.687.923
BELANJA OPERASI	477.120.941.082	430.961.590.677	455.919.258.525	531.450.668.686	450.235.040.378
BELANJA MODAL	212.004.597.663	173.331.166.028	194.683.207.114	176.535.574.209	134.644.309.515
BELANJA TAK TERDUGA	131.325.048	-	28.664.398	197.489.500	20.656.260.516
BELANJA TRANSFER	53.189.654.822	83.108.939.032	90.233.433.057	101.127.118.120	105.770.077.513
SURPLUS/ (DEFISIT)	(35.311.883.098)	(1.204.329.561)	(13.742.521.060)	13.846.472.622	38.036.319.041
PEMBIAYAAN	94.144.859.064	53.832.975.966	51.396.745.853	37.583.809.709	51.447.699.141
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.144.859.064	58.832.975.966	52.628.646.406	37.583.809.709	51.447.699.141
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	1.231.900.553	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	94.144.859.064	53.832.975.966	51.396.745.853	37.583.809.709	51.447.699.141
SILPA	58.832.975.966	52.628.646.406	37.654.224.793	51.430.282.330	89.484.018.182

URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
PENDAPATAN	707.134.635.517	686.197.366.176	727.140.900.415	823.213.513.636	743.896.873.306
PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.632.476.994	31.420.979.313	34.202.639.851	34.956.932.128	27.855.371.496
Pajak daerah	6.291.629.478	7.177.502.825	8.740.881.511	7.652.571.156	5.258.862.365
Retribusi daerah	2.950.566.253	3.260.708.745	2.904.596.243	2.828.056.407	1.306.227.750
Retribusi Jasa Umum	1.733.473.500	2.087.471.500	1.785.307.000	1.743.276.500	878.597.500
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.294.713.593	9.282.767.164	11.104.526.944	11.199.424.467	10.802.550.806
Lain-lain PAD Yang Sah	20.095.567.670	11.700.000.579	11.452.635.152	13.276.880.098	10.487.730.575
PENDAPATAN TRANSFER	664.002.158.523	654.380.386.862	681.513.705.388	767.200.634.230	704.208.101.810
pendapatan transfer pemerintah pusat	636.223.574.193	612.342.462.192	636.558.714.821	707.418.725.795	666.000.082.244
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.778.584.330	42.037.924.670	44.954.990.567	59.781.908.435	38.208.019.566
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.500.000.000	396.000.000	11.424.555.176	21.055.947.278	11.833.400.000
BELANJA	742.446.518.615	687.401.735.737	741.285.955.946	809.367.041.015	795.327.155.637
BELANJA OPERASI	477.120.941.082	430.961.590.677	456.001.098.447	529.550.668.686	508.402.139.119
BELANJA MODAL	212.004.597.663	173.331.166.028	195.061.445.045	176.535.574.209	141.740.457.293
BELANJA TAK TERDUGA	131.325.048	40.000	28.664.398	253.680.000	37.799.152.000
BELANJA TRANSFER	53.189.654.822	83.108.939.032	90.194.748.057	103.027.118.120	107.385.407.224
SURPLUS / DEFISIT	(35.311.883.098)	(1.204.369.561)	(14.145.055.532)	13.846.472.622	(51.430.282.331)
PEMBIAYAAN	94.144.859.064	53.832.975.966	51.396.745.853	37.654.224.793	51.430.282.331
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.144.859.064	58.832.975.966	52.628.646.406	37.654.224.793	51.430.282.331
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	1.231.900.553	-	-
PEMBIAYAAN NETO	94.144.859.064	53.832.975.966	51.396.745.853	37.654.224.793	51.430.282.331
SILPA	58.832.975.966	52.628.606.406	37.251.690.321	51.500.697.414	-

Sumber: LRA dan APBD Kota Sungai Penuh TA 2016-2020

3.1.4 Kinerja Neraca Daerah

Neraca mengambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Jika ditinjau dari analisa atas laporan keuangan neraca Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan pendekatan rasio lancar, quick rasio, serta rasio hutang terhadap aset dan terhadap modal semuanya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berikut disajikan hasil analisa atas laporan keuangan neraca Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2020:

**Tabel III.30
Perhitungan Analisa Rasio Keuangan Neraca Tahun 2016-2020**

NO	RASIO	Tahun (%)					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Current Ratio (Aktiva Lancar/ Utang Lancar)	29,55	41,03	24,41	25,29	45,14	33,08
2	Cash Ratio (Kas/ Utang Lancar)	18,68	36,21	14,42	14,48	37,29	24,22
3	Quick Ratio ((Aktiva lancar-persediaan)/Utang Lancar)	28,60	38,88	23,29	24,42	42,50	31,54
4	Sovabilitas Ratio (Utang/Aset)	0,0028	0,0013	0,0021	0,0028	0,0017	0,0021
5	Debt to Equity Ratio (Utang/Ekuitas)	0,0028	0,0013	0,0021	0,0028	0,0017	0,0021

Sumber: Data Neraca Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

Dari Tabel III.30 terlihat rasio kinerja keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tahun 2016-2020 berkinerja dengan sangat baik. Analisa rasio dilakukan dengan menggunakan analisa likuiditas dan solvabilitas dengan berbagai instrument pengukurnya. Pada tahun 2020 aset lancar Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki kinerja yang baik, yakni setiap satu (1) rupiah utang lancar mampu ditutup dengan empat puluh lima (45) rupiah asset lancar. Rata-rata kekayaan Kota Sungai Penuh 99,0079% bersumber dari modal sendiri dan utang hanya membiayai sebesar 0,0021%. Berikut disajikan masing-masing komponen dalam neraca Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2020.

Tabel III.31
Neraca Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
ASET					
ASSET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	57.755.233.834,45	50.740.392.383,01	35.982.459.163,68	48.862.418.314,50	88.739.360.677,37
Kas di Bendahara Penerimaan					96.449,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		915.242,80	67.162.602,00	58.191.516,00	46.509.262,00
Kas di BLUD					
Kas di Bendahara FKTP			1.215.004.264,55	419.029.599,65	378.024.952,37
Kas di Bendahara BOS		845.729.975,80	418.222.160,10	2.126.066.298,05	320.026.840,82
Kas Lainnya	4.035.528.431,00	995.900.000,00	138.432.432,13	3.818.809.195,76	754.123.469,47
Setara Kas					
Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1.237.466.764,90	1.916.878.420,57			
Investasi Jangka Pendek					
Piutang Pendapatan	34.811.081.794,91	3.302.519.765,20	23.022.917.865,55	38.334.368.396,57	13.169.684.677,00
Piutang Lainnya	226.636.123,00	317.018.027,00	64.949.014,29	73.737.264,29	
Penyisihan Piutang	(2.244.128.702,78)	(566.895.972,95)	(766.052.544,00)	(910.519.856,89)	(1.070.794.117,32)
Beban Dibayar Dimuka	678.092.279,13	969.319.732,86	958.430.461,01	494.789.712,92	507.959.172,15
Persediaan	3.194.552.584,20	3.235.974.248,63	2.927.534.317,46	3.296.045.671,34	6.383.978.453,34
JUMLAH ASSET LANCAR	99.694.463.108,81	61.757.751.822,92	64.029.059.736,77	96.572.936.112,19	109.228.969.836,20
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya					
Investasi dalam Obligasi					
Investasi dalam Proyek Pembangunan					
Dana Bergulir					
Deposito Jangka Panjang					
Investasi Non Permanen Lainnya					
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	62.500.000.000,00	67.500.000.000,00	95.501.109.033,00	94.221.662.790,22	93.352.418.494,64
Investasi Permanen Lainnya					
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	62.500.000.000,00	67.500.000.000,00	95.501.109.033,00	94.221.662.790,22	93.352.418.494,64
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	62.500.000.000,00	67.500.000.000,00	95.501.109.033,00	94.221.662.790,22	93.352.418.494,64
ASET TETAP					
Tanah	77.040.642.496,86	80.937.316.952,86	91.588.995.844,18	97.102.702.544,18	96.915.882.593,04
Peralatan dan Mesin	223.984.455.746,83	225.493.815.592,75	247.583.171.000,20	266.985.031.041,00	292.646.419.108,85
Gedung dan Bangunan	253.002.970.144,88	276.905.547.511,58	326.972.340.233,61	390.508.581.751,75	404.483.853.614,90
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	656.712.017.411,87	757.860.612.660,57	835.865.973.324,60	931.142.142.738,83	1.018.769.327.510,25
Aset Tetap Lainnya	28.542.043.253,14	26.927.317.484,41	25.575.822.892,59	26.789.863.256,35	24.289.158.335,33

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Konstruksi Dalam Penggerjaan	65.840.112.178,60	54.503.469.705,41	55.865.357.584,50	34.825.762.870,17	37.802.735.296,83
Akumulasi Penyusutan	(285.994.837.946,97)	(426.553.217.875,72)	(519.624.408.813,17)	(616.842.343.059,19)	(693.816.969.238,83)
JUMLAH ASET TETAP	1.019.127.403.285,21	996.074.862.031,86	1.063.827.252.066,51	1.130.511.741.143,09	1.181.090.407.220,37
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan					
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang			212.331.023,00	202.331.023,00	202.331.023,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga					
Aset Tidak Berwujud	6.580.462.300,00	10.021.830.986,88	8.306.052.424,98	6.099.390.818,27	21.686.750.473,66
amortisasi					(17.576.948.283,67)
Aset Lain-lain	13.628.191.018,04	13.620.635.310,90	31.781.831.290,38	32.604.958.143,56	43.122.032.781,46
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain					(11.963.814.560,41)
JUMLAH ASET LAINNYA	20.208.653.318,04	23.642.466.297,78	40.300.214.738,36	38.906.679.984,83	35.470.351.434,04
JUMLAH ASET	1.201.530.519.712,06	1.148.975.080.152,56	1.263.657.635.574,64	1.360.213.020.030,33	1.419.142.146.985,25
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	159.724.633,00		51.845.150,00	6.800.000,00	94.433.727,00
Utang Bunga					
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					
Pendapatan Diterima Dimuka					

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Utang Beban		1.244.611.402,11	2.570.446.313,54	3.811.599.030,97	701.995.809,27
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.213.862.561,53	260.564.951,20	754.315,28	754.315,28	1.623.250.191,80
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.373.587.194,53	1.505.176.353,31	2.623.045.778,82	3.819.153.346,25	2.419.679.728,07
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri					
Utang Jangka Panjang Lainnya					
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	3.373.587.194,53	1.505.176.353,31	2.623.045.778,82	3.819.153.346,25	2.419.679.728,07
EKUITAS					
EKUITAS	1.198.156.932.517,53	1.147.469.903.799,25	1.261.034.589.795,82	1.356.393.866.684,08	1.416.722.467.257,18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.201.530.519.712,06	1.148.975.080.152,56	1.263.657.635.574,64	1.360.213.020.030,33	1.419.142.146.985,25

Sumber: Neraca Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2020

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

a) Kebijakan Pendapatan Daerah

Terkait dengan pajak dan retribusi daerah di Kota Sungai Penuh, kebijakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui penerapan Online System.
2. Penggalian potensi pajak dan retribusi daerah.
3. Melakukan pemutakhiran data objek pajak.
4. Melakukan Pemeriksaan pajak
5. Melakukan Penagihan Piutang Pajak
6. Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak;
7. Melakukan penyuluhan/sosialisasi
8. Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
9. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi
10. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah.
11. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi
12. Meningkatkan pengawasan.
13. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak.
14. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
15. Meningkatkan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam hal penagihan piutang pajak.
16. Menerapkan reward and punishment terhadap wajib pajak.
17. Melakukan kajian perluasan pembayaran pajak melalui Bank dan Meningkatkan kerjasama dengan Bank Jambi dalam penyertaan modal daerah.
18. Membangun sistem terintegrasi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh, Badan Pertanahan Nasional, PPAT dan Bank dalam pemungutan BPHTB.
19. Optimalisasi kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penertiban jenis papan reklame.
20. Mengoptimalkan pengoperasian pintu masuk kawasan parkir dan mesin parkir otomatis di pintu masuk terminal untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir.
21. Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dalam pemungutan retribusi kebersihan.
22. Mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
23. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah melalui Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah.

Terkait dengan kebijakan pendapatan dana transfer/Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah dilakukan upaya peningkatannya melalui penyusunan usulan DAK dan DAU oleh pemerintah daerah dengan terukur dan data yang lengkap (proposal based). Sedangkan

peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Terkait dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
2. Pengembangan aplikasi (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)
3. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah.

b) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah selain urusan wajib pelayanan dasar berpedoman pada analisis standarbelanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan pada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada Tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip *kemandirian* yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip *prioritas* yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip *efisiensi* dan *efektifitas* anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

c) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan Penerimaan pembiayaan Daerah di Kota Sungai Penuh, yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari Tahun ke Tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan Daerah di Kota Sungai Penuh diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026

Analisa kerangka pendanaan daerah tetap senantiasa memperhatikan realisasi komponen-komponen terkait pada Tahun 2016-2020, APBD Perubahan Tahun 2021 dan RAPBD Tahun 2022. Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Sungai Penuh yang dilakukan pada Tahun 2020 sedangkan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilaksanakan pada Tahun 2021 untuk masa bakti Tahun 2021-2026 sehingga terdapat irisan terkait dengan pendanaan Tahun 2021.

Dalam memproyeksikan pendanaan Tahun 2021-2026 digunakan pendekatan yakni untuk proyeksi pendanaan 2021 digunakan data yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2021 dan RAPBD Tahun 2022. Untuk memproyeksi pendanaan Tahun 2021-2026 digunakan acuan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengaitkan dengan informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Atau jika digambarkan dalam memproyeksi pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar III.4
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yakni pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Sungai Penuh ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2016 hingga 2020, kemudian proyeksi menggunakan data dasar keuangan APBD Perubahan Tahun 2021 dan RAPBD Tahun 2022 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Sungai Penuh tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat, proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.32
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	774.197.507.461	752.779.078.399	781.105.047.546	809.431.016.694	837.756.985.841	866.082.954.988
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.517.323.020	99.143.521.000	102.969.209.500	106.794.898.000	110.620.586.500	114.446.275.000
a	Pajak	12.071.439.259	12.641.873.000	13.160.504.750	13.679.136.500	14.197.768.250	14.716.400.000
b	Retribusi	7.255.833.256	7.576.966.000	7.631.474.500	7.685.983.000	7.740.491.500	7.795.000.000
c	Hasil Pengelolaan	11.218.472.786	11.218.473.000	13.413.854.750	15.609.236.500	17.804.618.250	20.000.000.000
d	Lain-lain PAD	25.971.577.719	67.706.209.000	68.763.375.500	69.820.542.000	70.877.708.500	71.934.875.000
2	PENDAPATAN TRANSFER	703.446.784.441	653.635.557.399	678.135.838.046	702.636.118.694	727.136.399.341	751.636.679.988
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	655.254.721.748	606.310.430.000	627.794.044.433	649.277.658.865	670.761.273.298	692.244.887.730
b	Transfer Antar Daerah	48.192.062.693	47.325.127.399	50.341.793.614	53.358.459.829	56.375.126.043	59.391.792.258
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.233.400.000	0	0	0	0	0
a	Pendapatan Hibah	14.233.400.000	0	0	0	0	0

Tabel III.33
Proyeksi Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	Pertumbuhan (Pert) dan Proporsi (Prop)													
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Rata - rata	
		Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop
	PENDAPATAN DAERAH	3,32		(2,77)		3,76		3,63		3,50		3,38		2,47	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	94,55	6,03	75,42	13,17	3,86	13,18	3,72	13,19	3,58	13,20	3,46	13,21	30,76	12,00
a	Pajak	66,14	21,36	4,73	12,75	4,10	12,78	3,94	12,81	3,79	12,83	3,65	12,86	14,39	14,23
b	Retribusi	407,80	12,84	4,43	7,64	0,72	7,41	0,71	7,20	0,71	7,00	0,70	6,81	69,18	8,15
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,85	19,85	0,00	11,32	19,57	13,03	16,37	14,62	14,06	16,10	12,33	17,48	11,03	15,40
d	Lain-lain PAD	171,86	45,95	160,69	68,29	1,56	66,78	1,54	65,38	1,51	64,07	1,49	62,85	56,44	62,22
2	PENDAPATAN TRANSFER	(0,83)	92,43	(7,08)	86,83	3,75	86,82	3,61	86,81	3,49	86,80	3,37	86,79	1,05	87,74
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	(1,76)	93,51	(7,47)	92,76	3,54	92,58	3,42	92,41	3,31	92,25	3,20	92,10	0,71	92,60
b	Transfer Antar Daerah	13,84	6,49	(1,80)	7,24	6,37	7,42	5,99	7,59	5,65	7,75	5,35	7,90	5,90	7,40
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29,95	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26
a	Pendapatan Hibah	29,95	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa total pendapatan daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 direncanakan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 ditargetkan jumlah pendapatan daerah Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 774.197.507.461 dan pada tahun berikutnya diproyeksikan naik rata-rata sebesar 2,47% dengan memperhatikan potensi penerimaan pendapatan daerah. Pada Tahun 2026 ditargetkan pendapatan daerah kota Sungai Penuh sebesar Rp. 866.082.954.988 atau naik 11,87% dibanding Tahun 2021.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh pada Tahun 2021-2026 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh pada Tahun 2021-2026 ditargetkan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan persentase berfluktuatif dengan memperhatikan potensi sumber pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh. Pada RAPDBP Tahun 2021, PAD ditargetkan naik sebesar 94,55% dan ditahun berikutnya hingga Tahun 2026 direncanakan kenaikan rata-rata sebesar 30,76% dengan porsi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata sebesar 12%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh berupaya untuk meningkatkan kemandirian keuangannya.

Jika ditinjau dari proporsi sumber PAD, Sektor lain-lain PAD yang sah tetap menjadi sumber pendapatan utama dari PAD dengan rata-rata proporsi sebesar 62,22% dan mengalami kenaikan rata-rata dibanding periode 5 (lima) tahun sebelumnya yang sebesar 43,42% dari total PAD. Sektor pemberi kontribusi terbesar kedua sebesar 15,4% yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Kontribusi dari sektor ini mengalami penurunan dibandingkan dengan rata-rata periode 5 (lima) tahun lalu yang sebesar 27,98%.

Sektor Pajak dan Retribusi Daerah pada periode 5 (lima) tahun lalu proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing sebesar 21,27% dan 10,26% maka pada kerangka pendanaan Tahun 2021-2026 mengalami penurunan dan kenaikan dengan proporsi rata-rata masing-masing 14,23% dan 8,15%.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam hal ini bersumber dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pendapatan Transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun secara rupiahnya dan dari kontribusinya diproyeksikan rata-rata selama Tahun 2021-2026 sebesar 87,74% dengan perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 92,6% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 7,4% terhadap total Pendapatan Transfer.

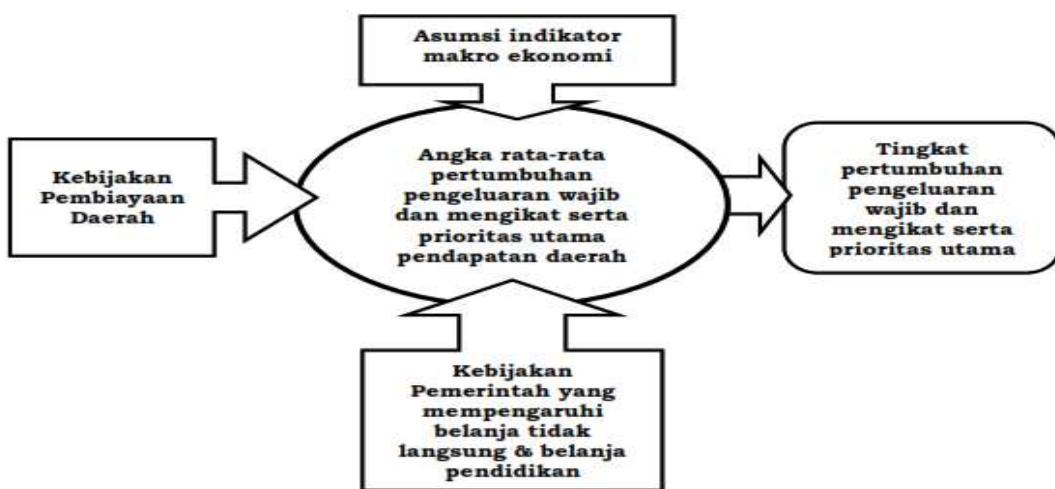
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah. Pendapatan ini diproyeksikan meningkat setiap tahunnya seiring dengan semakin meningkatkan perekonomian daerah dan nasional serta perkiraan kenaikan kesejahteraan bagi pegawai. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DAU dan

DBH) serta Dana Transfer Khusus (DAK) masih memiliki kontribusi terbesar sebagai sumber pendapatan. Walaupun secara nilai besarnya dana pendapatan transfer mengalami kenaikan, namun secara proporsi ditargetkan turun setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian keuangan kota Sungai Penuh. Pada 5 (lima) tahun sebelumnya yakni Tahun 2016-2020, proporsi pendapatan transfer sebesar 94,17% dan pada periode Tahun 2021-2026 menjadi sebesar 87,74%.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.14.233.400.000 dan pada tahun berikutnya terjadi pemindahan rekening dana BOS ke dalam rekening Pendapatan Transfer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Sungai Penuh terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Kerangka pemikiran tersebut dalam analisis proyeksi belanja daerah disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar III.5
Kerangka Pemikiran Proyeksi Belanja Daerah

Dalam melakukan proyeksi belanja daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas rill. Kapasitas rill keuangan Daerah

diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Sesuai dengan peningkatan pendapatan daerah, belanja daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 direncanakan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 4,21%. Secara lebih rinci, peningkatan terbesar didominasi oleh belanja operasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,20% dengan rata-rata proporsi sebesar 69,76%. Pertumbuhan dan proporsi ini seiring dengan pertumbuhan dan proporsi belanja modal sebesar 4,35% dan 18,19%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam upaya pencapaian target-target pembangunan.

Tabel III.34
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2026

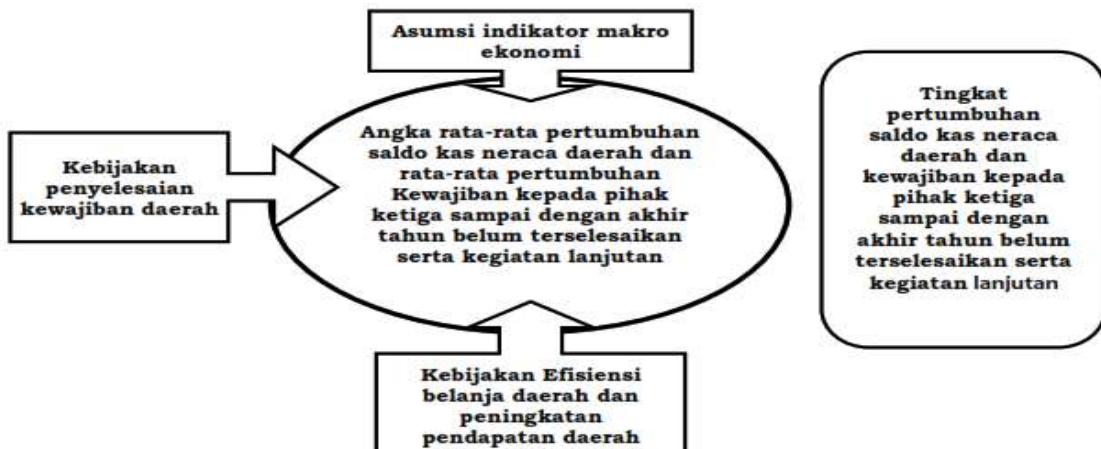
NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	BELANJA DAERAH	863.681.525.643	794.779.078.399	820.105.047.546	845.431.016.694	869.756.985.841	893.082.954.988
1	BELANJA OPERASI	578.454.837.288	554.548.013.153	576.660.581.451	600.164.674.628	609.326.786.175	629.172.160.270
a	Belanja Pegawai	316.490.326.054	340.811.365.245	349.331.649.376	358.064.940.611	367.016.564.126	376.191.978.229
b	Belanja Barang dan Jasa	255.843.817.006	207.778.882.368	217.128.932.075	226.899.734.018	237.110.222.049	247.780.182.041
c	Belanja Bunga	-	-				
d	Belanja Subsidi	-	-				
e	Belanja Hibah	5.920.694.228	5.757.765.540	10.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
f	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2	BELANJA MODAL	178.343.953.355	141.322.264.246	141.875.665.096	143.697.541.065	158.861.398.666	162.341.993.718
a	Belanja Modal Tanah	785.000.000	590.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	24.405.530.608	27.894.851.816	28.921.729.978	29.502.198.971	33.418.163.371	34.413.312.134
c	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	36.469.146.567	33.937.698.736	34.964.576.898	35.545.045.891	39.461.010.291	40.456.159.054
d	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	114.707.117.680	71.435.601.894	73.489.358.219	74.650.296.204	82.482.225.004	84.472.522.530
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.977.158.500	7.464.111.800	3.000.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
3	BELANJA TAK TERDUGA	2.400.000.000	2.100.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
a	Belanja Tak Terduga	2.400.000.000	2.100.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	104.482.735.000	96.808.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000
a	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	104.482.735.000	96.808.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000

Tabel III.35
Proyeksi Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Daerah Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	Pertumbuhan (Pert) dan Proporsi (Prop)													
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Rata - rata	
		Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop	Pert	Prop
	BELANJA DAERAH	21,42		-7,98		3,19		3,09		2,88		2,68		4,21	
1	BELANJA OPERASI	28,48	66,98	-4,13	69,77	3,99	70,32	4,08	70,99	1,53	70,06	3,26	70,45	6,20	69,76
a	Belanja Pegawai	15,49	54,71	7,68	61,46	2,50	60,58	2,50	59,66	2,50	60,23	2,50	59,79	5,53	59,41
b	Belanja Barang dan Jasa	66,41	44,23	-18,79	37,47	4,50	37,65	4,50	37,81	4,50	38,91	4,50	39,38	10,94	39,24
e	Belanja Hibah	-73,41	1,02	-2,75	1,04	73,68	1,73	50,00	2,50	-66,67	0,82	0,00	0,79	-3,19	1,32
f	Belanja Bantuan Sosial	11,11	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	1,85	0,03
2	BELANJA MODAL	32,46	20,65	-20,76	17,78	0,39	17,30	1,28	17,00	10,55	18,27	2,19	18,18	4,35	18,19
a	Belanja Modal Tanah	-	0,44	-24,84	0,42	154,24	1,06	0,00	1,04	0,00	0,94	0,00	0,92	25,88	0,80
b	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-0,86	13,68	14,30	19,74	3,68	20,39	2,01	20,53	13,27	21,04	2,98	21,20	5,90	19,43
c	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	36,27	20,45	-6,94	24,01	3,03	24,64	1,66	24,74	11,02	24,84	2,52	24,92	7,92	23,93
d	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	55,37	64,32	-37,72	50,55	2,87	51,80	1,58	51,95	10,49	51,92	2,41	52,03	5,83	53,76
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-79,04	1,11	277,52	5,28	-59,81	2,11	-16,67	1,74	-20,00	1,26	-25,00	0,92	12,83	2,07
3	BELANJA TAK TERDUGA	-88,38	0,28	-12,50	0,26	-4,76	0,24	0,00	0,24	0,00	0,23	0,00	0,22	-17,61	0,25
a	Belanja Tak Terduga	-88,38	100,00	-12,50	100,00	-4,76	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-17,61	100,00
4	BELANJA TRANSFER	-1,22	12,10	-7,34	12,18	2,85	12,14	0,00	11,78	0,00	11,45	0,00	11,15	-0,95	11,80
c	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-1,22	100,00	-7,34	100,00	2,85	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,95	100,00

3.3.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan

Analisis atas proyeksi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Analisis ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA dimasa mendatang. Adapun data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA di masa mendatang digambarkan sebagai berikut.



Gambar III.6
Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pada proyeksi Tahun 2021-2026 anggaran diproyeksikan defisit yakni pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah. Defisit yang terjadi ditutupi bersumber dari SiLPA tahun berkenaan. Selain itu dalam pembiayaan juga dilakukan penyertaan modal untuk BUMD ataupun rencana investasi penyertaan modal lainnya. Berikut disajikan proyeksi defisit dan pembiayaan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

Tabel III.36
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	PENDAPATAN DAERAH	774.197.507.461	752.779.078.399	781.105.047.546	809.431.016.694	837.756.985.841	866.082.954.988
B	BELANJA DAERAH	863.681.525.643	794.779.078.399	820.105.047.546	845.431.016.694	869.756.985.841	893.082.954.988
	SURPLUS / DEFISIT	(89.484.018.182)	(89.484.018.182)	(42.000.000.000)	(39.000.000.000)	(36.000.000.000)	(32.000.000.000)
	PEMBIAYAAN DAERAH	89.484.018.182	89.484.018.182	42.000.000.000	39.000.000.000	36.000.000.000	32.000.000.000
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	89.484.018.182	89.484.018.182	45.000.000.000	42.000.000.000	39.000.000.000	35.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89.484.018.182	45.000.000.000	42.000.000.000	39.000.000.000	35.000.000.000	30.000.000.000
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	89.484.018.182	89.484.018.182	42.000.000.000	39.000.000.000	36.000.000.000	32.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-

Tabel III.37
Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	774.197.507.461	752.779.078.399	781.105.047.546	809.431.016.694	837.756.985.841	866.082.954.988
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.517.323.020	99.143.521.000	102.969.209.500	106.794.898.000	110.620.586.500	114.446.275.000
a	Pajak	12.071.439.259	12.641.873.000	13.160.504.750	13.679.136.500	14.197.768.250	14.716.400.000
b	Retribusi	7.255.833.256	7.576.966.000	7.631.474.500	7.685.983.000	7.740.491.500	7.795.000.000
c	Hasil Pengelolaan	11.218.472.786	11.218.473.000	13.413.854.750	15.609.236.500	17.804.618.250	20.000.000.000
d	Lain-lain PAD	25.971.577.719	67.706.209.000	68.763.375.500	69.820.542.000	70.877.708.500	71.934.875.000
2	PENDAPATAN TRANSFER	703.446.784.441	653.635.557.399	678.135.838.046	702.636.118.694	727.136.399.341	751.636.679.988
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	655.254.721.748	606.310.430.000	627.794.044.433	649.277.658.865	670.761.273.298	692.244.887.730
b	Transfer Antar Daerah	48.192.062.693	47.325.127.399	50.341.793.614	53.358.459.829	56.375.126.043	59.391.792.258
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.233.400.000	0	0	0	0	0
a	Pendapatan Hibah	14.233.400.000	0	0	0	0	0
	BELANJA DAERAH	863.681.525.643	794.779.078.399	820.105.047.546	845.431.016.694	869.756.985.841	893.082.954.988
1	BELANJA OPERASI	578.454.837.288	554.548.013.153	576.660.581.451	600.164.674.628	609.326.786.175	629.172.160.270
a	Belanja Pegawai	316.490.326.054	340.811.365.245	349.331.649.376	358.064.940.611	367.016.564.126	376.191.978.229
b	Belanja Barang dan Jasa	255.843.817.006	207.778.882.368	217.128.932.075	226.899.734.018	237.110.222.049	247.780.182.041
c	Belanja Bunga	-	-				
d	Belanja Subsidi	-	-				
e	Belanja Hibah	5.920.694.228	5.757.765.540	10.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
f	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2	BELANJA MODAL	178.343.953.355	141.322.264.246	141.875.665.096	143.697.541.065	158.861.398.666	162.341.993.718
a	Belanja Modal Tanah	785.000.000	590.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	24.405.530.608	27.894.851.816	28.921.729.978	29.502.198.971	33.418.163.371	34.413.312.134
c	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	36.469.146.567	33.937.698.736	34.964.576.898	35.545.045.891	39.461.010.291	40.456.159.054
d	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	114.707.117.680	71.435.601.894	73.489.358.219	74.650.296.204	82.482.225.004	84.472.522.530

NO	URAIAN	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.977.158.500	7.464.111.800	3.000.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
3	BELANJA TAK TERDUGA	2.400.000.000	2.100.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
a	Belanja Tak Terduga	2.400.000.000	2.100.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	104.482.735.000	96.808.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000
a	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
b	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
c	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	104.482.735.000	96.808.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000
SURPLUS / DEFISIT		(89.484.018.182)	(42.000.000.000)	(39.000.000.000)	(36.000.000.000)	(32.000.000.000)	(27.000.000.000)
PEMBIAYAAN DAERAH		89.484.018.182	42.000.000.000	39.000.000.000	36.000.000.000	32.000.000.000	27.000.000.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		89.484.018.182	45.000.000.000	42.000.000.000	39.000.000.000	35.000.000.000	30.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89.484.018.182	45.000.000.000	42.000.000.000	39.000.000.000	35.000.000.000	30.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		89.484.018.182	42.000.000.000	39.000.000.000	36.000.000.000	32.000.000.000	27.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-	-	-	-

3.4 Kapasitas Ril Keuangan Daerah

Kapasitas ril keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas ril keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Berdasarkan perhitungan atas belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya dilakukan perhitungan kapasitas rill. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas rill selanjutnya dilakukan pengalokasian belanja dengan memperhatikan kebijakan prioritas belanja.

Dengan kapasitas ril yang tersedia maka belanja selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas II, digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; dan
3. Prioritas III, digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berikut disajikan perhitungan kapasitas ril Tahun 2021-2026.

Tabel III.38
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	774.197.507.461	752.779.078.399	781.105.047.546	809.431.016.694	837.756.985.841	866.082.954.988
2	SiLPA	89.484.018.182	45.000.000.000	42.000.000.000	39.000.000.000	35.000.000.000	30.000.000.000
3	Pencairan Dana Cadangan						
Total Penerimaan		863.681.525.643	797.779.078.399	823.105.047.546	848.431.016.694	872.756.985.841	896.082.954.988
Dikurangi:							
1	Belanja Pegawai	316.490.326.054	340.811.365.245	349.331.649.376	358.064.940.611	367.016.564.126	376.191.978.229
2	Belanja Bunga						
3	Belanja Subsidi						
4	Pembayaran Pokok Pinjaman						
Total Pengeluaran		316.490.326.054	340.811.365.245	349.331.649.376	358.064.940.611	367.016.564.126	376.191.978.229
Kapasitas Riil Keuangan Daerah		547.191.199.589	456.967.713.154	473.773.398.170	490.366.076.083	505.740.421.715	519.890.976.759

3.5 Kebijakan Keuangan Di Masa Mendatang

3.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pajak daerah
2. Penerimaan retribusi daerah
3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

A. Pajak Daerah

1. Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
2. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
3. Pengoptimisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
11. Penataan kelembagaan pemungut, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non-Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
15. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
16. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
17. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
18. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.

19. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
20. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
21. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
22. Penerapan sistem non tunai dalam pembayaran Pajak Daerah.

B. Retribusi Daerah

1. Revisi terhadap Peraturan Daerah terkait dengan Retribusi Daerah.
2. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
3. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
4. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
5. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
6. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah
7. Putakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
9. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
10. Penerapan sistem pembayaran secara non tunai.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan Bank Jambi serta SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Optimalisasi BUMD yang sudah didirikan sebagai bentuk ekstensifikasi penerimaan bagi daerah.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3.5.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diupayakan penguatan dan pemulihan atas dampak Pandemi Covid-19.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan.
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan untuk mendukung aktifitas ekonomi.

Kebijakan untuk belanja juga meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja bantuan keuangan untuk pemerintah desa diarahkan untuk pencapaian visi, misi Kota Sungai Penuh dan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

3.5.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD dan Bank Jambi untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dan Bank Jambi dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
4. Melakukan telaah terhadap keberadaan BUMD yang telah didirikan oleh Pemerintah Sungai Penuh.

Selain itu juga dapat dibentuk BUMD-BUMD lainnya yang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan dalam rangka percepatan pembangunan Kota Sungai Penuh serta peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh. Pembiayaan terhadap BUMD baru dapat dilakukan pada RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali analisis isu-isu strategis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Sungai Penuh kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Sungai Penuh.

Perkembangan terkini, permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Sungai Penuh, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sebagai implikasi terjadinya pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal Tahun 2020 dan hingga saat ini belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi dapat dikendalikan atau berakhir. Dampak pandemi sudah terjadi pada Tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pembangunan sebagai dampak pandemi COVID-19 harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan perbandingan capaian indikator daerah dalam tabel di bawah ini, perkembangan terkini di Kota Sungai Penuh menunjukkan beberapa capaian yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jambi dan Nasional. Capaian yang lebih rendah ditunjukkan pada Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Namun, terdapat anomali jika diperbandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pendidikan. Gini rasio, TPT, dan IDG Kota Sungai Penuh lebih rendah dibandingkan Provinsi Jambi meskipun IPM dan Indek Pendidikan Kota Sungai Penuh lebih tinggi. Pengeluaran per kapita yang

meningkat justru seiring dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Selain itu, angka kemiskinan (Gambar II.20), indeks keparahan (Gambar II.23) dan indeks kedalaman kemiskinan (Gambar II.24) Kota Sungai Penuh juga menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat seiring dengan meningkatkan produktivitas, menekan pengangguran dan kemiskinan, meminimalkan ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam perekonomian di Kota Sungai Penuh.

Tabel IV.1
**Perbandingan Capaian Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh,
 Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2020**

Indikator	Capaian Tahun 2020		
	Kota Sungai Penuh	Provinsi Jambi	Nasional
Indeks Pembangunan Manusia	75,42	71,29	71,94
Indeks Pendidikan	0,75	0,65	0,64
Indeks Kesehatan	0,80	0,79	0,79
Indeks Daya Beli (Pengeluaran Perkapita)	0,71	0,71	0,73
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,31	88,41	91,06
Pertumbuhan Ekonomi	-0,14	-0,46	-2,07
PDRB Per Kapita	82,47	56,24	56,9
Indeks ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)*	0,34	0,32	0,385
Angka Kemiskinan	3,03	7,58	9,78
Tingkat pengangguran terbuka	5,56	5,13	7,07
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	52,87	65,97	75,24

Sumber : BPS, Hasil Analisis Bappeda, 2021

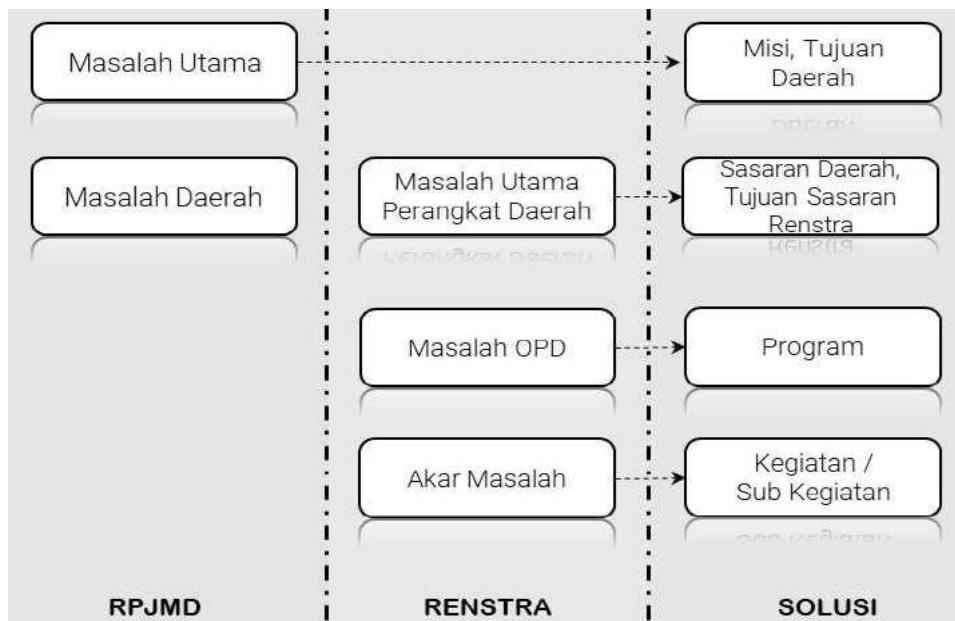
* data Tahun 2019 (data Tahun 2020 tidak tersedia).

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan Tahun 2020 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 Tahap IV. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Selanjutnya dipetakan

dengan pendekatan kerangka logis masalah pada RPJMD dan Renstra. Kerangka logis permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ditunjukkan pada gambar 4.1.



Gambar IV.1
Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah

Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah pada Tahap IV, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV.2. Selanjutnya, masalah utama tersebut akan diselesaikan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah. Sesuai dengan kerangka logis permasalahan daerah dan Perangkat Daerah yang dijelaskan dalam Gambar IV.1, maka masalah daerah akan dijabarkan dalam permasalahan renstra (masalah utama SKPD, masalah SKPD dan akar masalah) yang akan diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan dirumuskan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Tabel IV.2
**Keterkaitan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 dengan
Masalah Utama Pembangunan Daerah**

Misi RPJPD	Masalah Utama	Capaian Tahun 2020
1	2	3
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip <i>good governance and</i>	Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Reformasi Birokrasi th 2020 dengan nilai : C (Cukup baik) Akuntabilitas Keuangan Daerah : WTP perlu dipertahankan

Misi RPJPD	Masalah Utama	Capaian Tahun 2020
1	2	3
<i>clean government</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian keuangan dearah : 3,74 %. • Peningkatan PAD : minus 40,83%, • Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) nilai : B • Penyelenggaraan Pemda (nilai LPPD) : Tinggi • Kualitas Pengelolaan Arsip nilai : 35,75 (kurang) • Kualitas pelayanan publik (Nilai Kepatuhan terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan) : 69,91 (zona kuning). • Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : 1,6 (kurang) • Indeks Profesionalitas ASN : 59 (sangat rendah)
Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat dan berbudaya.	Kualitas Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan IPM : 0,08 %. • Pertumbuhan komponen pembentuk IPM 2020 : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rata – rata Lama Sekolah sebesar 2,38 %; ✓ Harapan Lama Sekolah sebesar 0,07 %; (3) Umur Harapan Hidup : 0,14 %; ✓ Pengeluaran Perkapita mengalami kontraksi sebesar -2,49 % • Belum optimalnya pendidikan karakter dan keagamaan • Pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya dalam masyarakat perlu ditingkat • Peran gender dan pemuda dalam pembangunan perlu ditingkatkan.
Mewujudkan perekonomian	Pertumbuhan ekonomi,	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) sebesar 0,34, meingkat

Misi RPJPD	Masalah Utama	Capaian Tahun 2020
1	2	3
berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.	ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran	<p>dari th 2019 (0,33)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebesar minus 0,14% Tingkat Kemiskinan : 3,03% dari 2,81% (2019) Tingkat Pengangguran Terbuka 2020 : 5,56% dari 4,17% (2019)
	Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Indeks ketahanan (bencana) daerah : 0,53 (kategori sedang) Luas kawasan banjir : 18,58% Penanggulangan Bencana kebakaran perlu ditingkatkan Penanganan persampahan : 86%, perlu ditingkatkan Penataan taman kota dan perlu ditingkatkan
Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.	Kualitas dan layanan sarana dan prasarana kota	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas dan layanan sarana dan prasarana : Jalan, transportasi (parkir, bongkar muat dan kemacetan), kualitas pelayanan air minum, sanitasi, drainase, sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, sarpras pengendali banjir, sarpras perdagangan Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 76,18 %

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

Secara sistematis uraian masalah utama, masalah daerah dan permasalahan renstra (masalah utama SKPD, masalah SKPD dan akar masalah) sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 tahap IV dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1.1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*

Dalam rangka perwujudan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*, terdapat masalah utama yaitu tata kelola pemerintahan. Hasil pemetaan masalah utama tata kelola pemerintahan dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel IV.3
Pemetaan Masalah Utama Tata Kelola Pemerintahan dan Masalah Daerah
Kota Sungai Penuh**

Masalah Utama 1	Masalah Daerah 2	Capaian Kinerja 3
Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Keuangan Daerah masih perlu dipertahakan dan ditingkatkan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020 : WTP
	Kemandirian keuangan daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah th 2020 : 3,74 %. Peningkatan PAD th 2020 minus 40,83
	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP: B
	Kualitas peyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dipertahakan dan ditingkatkan	Nilai LPPD : B
		Kualitas pengelolaan arsip : 35,75 (kategori kurang)
		Tingkat penyelesaian pelanggaran perda 80%
	Belum optimalnya Pemanfaatan dan Integrasи Teknologi Informasi	Evaluasi Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) th 2018 : 1,6 (kurang)
	Kualitas Pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Nilai Kepatuhan terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan 69,91 (zona kuning)
	Manajemen ASN masih perlu ditingkatkan	Indeks Profesionalitas ASN th 2020: 59 (Sangat Rendah)
	Belum optimalnya merit system ASN	Indeks Merit Sistem

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah SKPD) yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.4
Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan, Masalah Daerah dan Masalah SKPD

Masalah Daerah	Masalah Utama SKPD	Urusan
1	2	3
Akuntabilitas dan kinerja Keuangan Daerah masih perlu dipertahakan dan ditingkatkan	Belum optimalnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan
	Kinerja Pengawasan terhadap Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan	Unsur Pengawasan
Kemandirian keuangan daerah masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Keuangan, Kesehatan, PU-PR, Perhubungan, LH, Kominfo, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Setda
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Kualitas Perencanaan dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan	Perencanaan
	Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan	Setda
	Belum optimalnya Efektivitas Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Unsur Pengawasan
	Belum optimalnya Akuntabilitas kinerja Peerangkat Daerah	Seluruh Urusan
Kualitas peyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dipertahakan dan ditingkatkan	Belum optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Setda
	Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan	Setda
	Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah perlu ditingkatkan	Setwan
	Belum optimalnya Kualitas Kearsipan	Kearsipan
	Ketentraman dan ketertiban Masyarakat perlu ditingkatkan	Trantibum
	Pencegahan dini terhadap potensi terjadinya konflik perlu ditingkatkan	Trantibum

Masalah Daerah	Masalah Utama SKPD	Urusan
1	2	3
Pemanfaatan dan Integrasi Teknologi Informasi masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Kominfo dan Statistik
Kualitas Pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kinerja Pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Setda, Pendidikan, Kesehatan, Penanaman Modal, Kecamatan, Dukcapil
Kapasitas dan Manajemen Aparatur masih perlu ditingkatkan	Penempatan ASN tidak sesuai Kompetensi dan Kualifikasi ASN	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Kinerja ASN perlu ditingkatkan	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Penerapan Sistem Merit Dalam Kebijakan Manajemen ASN perlu dimplementasikan	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

4.1.2 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat dan berbudaya.

Dalam rangka perwujudan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat dan berbudaya, terdapat masalah utama yaitu kualitas sumber daya manusia. Hasil pemetaan masalah utama kualitas sumber daya manusia dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.5
Pemetaan Masalah Utama Kualitas Sumber Daya Manusia dan Masalah Daerah Kota Sungai Penuh

Masalah Utama	Masalah Daerah	Capaian Kinerja
1	2	3
Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas SDM perlu ditingkatkan	Indeks Pendidikan th 2020 sebesar 0,75
	Derajat Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan	Indeks Kesehatan th 2020 sebesar 0,8
	Daya beli masyarakat thd komoditas pangan dan non pangan masih perlu ditingkatkan	Indeks daya Beli (Pengeluaran Perkapita) th 2020 sebesar 0,71
	Pendidikan karakter dan keagamaan masih perlu ditingkatkan	Optimalisasi satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan

Masalah Utama	Masalah Daerah	Capaian Kinerja
1	2	3
	Belum optimalnya Pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya dlm masyarakat	Event tradisi adat dan budaya
	Peran gender dan pemuda dalam pembangunan perlu ditingkatkan	Pembangunan gender dan pemuda berprestasi

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah SKPD) yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini

Tabel IV.6
Keterkaitan Kualitas SDM, Masalah Daerah dan Masalah SKPD

Masalah Daerah	Masalah Utama SKPD	Urusan
1	2	3
Kualitas SDM perlu ditingkatkan	Kualitas Pendidikan perlu ditingkatkan	Pendidikan
	Belum optimalnya Pengaruh utamaan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pengarusutamaan Hak Anak perlu ditingkatkan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Belum optimalnya layanan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas	Perpustakaan
	Prestasi Olah Raga Pelajar perlu ditingkatkan	Kepemudaan dan Olahraga
Derajat Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan	Kualitas Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan	Kesehatan
	Belum optimalnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	Kesehatan
	Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman bagi masyarakat perlu ditingkatkan	Pangan
	Upaya kesehatan olahraga perlu ditingkatkan	Kepemudaan dan Olahraga
	Belum optimalnya pemberdayaan kesehatan keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB

Masalah Daerah	Masalah Utama SKPD	Urusan
1	2	3
Daya beli masyarakat thd komoditas pangan dan non pangan masih perlu ditingkatkan	Pengendalian terhadap kelangkaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya perlu ditingkatkan	Perdagangan
	Penguatan cadangan pangan perlu ditingkatkan	Pangan
Pendidikan karakter dan keagamaan masih perlu Ditingkatkan	Belum optimalnya penerapan kurikulum muatan lokal dan Kegiatan Keagamaan di masyarakat	Pendidikan
Pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya dalam masyarakat	Peran lembaga adat dalam pola pewarisan, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah perlu ditingkatkan	Kebudayaan, Pemdes

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

4.1.3 Mewujudkan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam rangka perwujudan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, terdapat masalah utama yaitu : (1) Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran; dan (2). Kualitas lingkungan hidup serta ketahanan daerah. Hasil pemetaan masalah utama dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.7
Pemetaan Masalah Utama Ketimpangan Pendapatan dan Masalah Daerah Kota Sungai Penuh

Masalah Utama	Masalah Daerah	Capaian Kinerja
1	2	3
Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran	Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19	Pertumbuhan ekonomi th 2020 sebesar minus 0,14
	Tingkat kemiskinan mengalami kenaikan	Tingkat Kemiskinan th 2020 : 3,03%
	Peningkatan Tingkat Pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka th 2020 : 5,56% meningkat dari th 2019 4,17%

Masalah Utama	Masalah Daerah	Capaian Kinerja
1	2	3
Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan perlu ditingkatkan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan
	Belum optimalnya Kebersihan Kota	Penanganan Sampah 86 %
	Kualitas Penanggulangan Bencana perlu ditingkatkan	Indeks Ketahanan Daerah kategori sedang (0,53)
	Belum optimlanya penanganan banjir	Luas genangan banjir 18,58
	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang perlu ditingkatkan

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah SKPD) yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.8
Keterkaitan Ketimpangan Pendapatan, Masalah Daerah dan Masalah SKPD

Masalah Daerah	Masalah Utama SKPD	Urusan
1	2	3
Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi	Belum optimalnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
	Pasar komoditas lokal perlu ditingkatkan	Perdagangan
	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan	Perdagangan
	Belum optimalnya kapasitas dan daya saing produk industri daerah	Perindustrian
	Belum optimalnya Produktivitas UMKM	Koperasi dan UKM
	Produktivitas pertanian dan perkebunan perlu ditingkatkan	Pertanian
	Produktivitas peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan	Pertanian
	Nilai Investasi perlu ditingkatkan	Penanaman modal
	Belum optimalnya Penanganan Kemiskinan	Sosial

Masalah Daerah	Masalah Utama SKPD	Urusan
1	2	3
	Belum optimalnya Perlindungan Sosial	Sosial
	Jaminan Kesehatan terhadap penduduk miskin perlu ditingkatkan	Kesehatan
	Kualitas Pelayanan Program Keluarga Berencana perlu ditingkatkan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kemandirian Masyarakat Desa perlu ditingkatkan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tingkat Pengangguran terbuka	Aksesibilitas Kesempatan Kerja perlu ditingkatkan	Tenaga Kerja
Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	penanganan limbah	Linkungan hidup
	Ruang Terbuka Hijau	Linkungan hidup
	Usaha yang taat terhadap izin lingkungan	Linkungan hidup
Kebersihan Kota	Pengelolaan persampahan	Linkungan hidup
	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Linkungan hidup
Kualitas Penanggulangan Bencana	Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Tarntibum
	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Tarntibum
	Kualitas sarpras pengendali banjir	PU-PR
	Penataan sistem drainase	PU-PR
	Kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan kedaruratan lainnya	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan kedaruratan	Tarntibum
Kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Kualitas Pemanfaatan ruang	PU-PR
	Kualitas Pengendalian pemanfaatan ruang	PU-PR

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

4.1.4 Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

Dalam rangka perwujudan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang, terdapat masalah utama yaitu kualitas dan pelayanan infrastruktur. Hasil pemetaan masalah utama dan permasalahan daerah ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel IV.9
Pemetaan Masalah Utama Kualitas Pelayanan Infrastruktur dan Masalah Daerah Kota Sungai Penuh**

Masalah Utama 1	Masalah Daerah 2	Capaian Kinerja 3
Kualitas dan Pelayanan Infrastruktur	Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan transportasi Perkotaan perlu ditingkatkan	Jalan dalam kondisi baik dan fungsional Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)
	Kualitas dan pelayanan infrastruktur dasar perlu ditingkatkan	Infrastruktur dasar dalam kondisi baik fungsional
	Kualitas Perumahan dan permukiman yang nyaman perlu ditingkatkan	Perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

Selanjutnya, masalah daerah tersebut dijabarkan ke dalam Permasalahan Renstra (masalah SKPD) yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel IV.10
Keterkaitan Kualitas Pelayanan Infrastruktur, Masalah Daerah, dan Masalah SKPD**

Masalah Daerah 1	Masalah Utama SKPD 2	Urusan 3
Pelayanan transportasi perkotaan	Kualitas sarana dan prasarana jalan perlu ditingkatkan	PU-PR
	Pelayanan transportasi perkotaan perlu ditingkatkan	Perhubungan
Kualitas pelayanan infrastruktur dasar	Akses masyarakat Air Minum perlu ditingkatkan	PU-PR
	Akses masyarakat thd Sanitasi perlu ditingkatkan	PU-PR
	Kualitas sarana dan prasarana irigasi perlu ditingkatkan	PU-PR

Masalah Daerah	Masalah Utama SKPD	Urusan
1	2	3
Perumahan dan permukiman yang nyaman	Kualitas lingkungan Perumahan dan Permukiman perlu ditingkatkan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2021

4.2 Penelaahan RPJPD Kota Sungai Penuh 2005-2025

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh 2005-2025, RPJMD ke-4 (2021-2025) ini diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan Kota Sungai Penuh Kota Pendidikan yang Berdaya Saing, Perdagangan dan Jasa yang Produktif serta Berwawasan Lingkungan, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh 2005-2025 RPJMD ke-4 (2021-2025), diarahkan untuk mewujudkan misi :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*;

Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum, menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; pengembangan sumber daya manusia aparatur; serta terlaksananya pengawasan secara baik dan berkualitas.

2. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat dan berbudaya

Membangun sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

3. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;

Mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal yang berdaya saing global serta berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan fokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, dengan memperhatikan kearifan lokal untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif, disertai dengan kemampuan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi.

4. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang; adalah peningkatan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas di Kota Sungai Penuh, dalam mengurangi kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar serta sarana dan prasarana wilayah melalui pengembangan wilayah, serta pengembangan wilayah/kawasan strategis dan cepat tumbuh.

4.3 Penelaahan RTRW Kota Sungai Penuh 2021-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031, tujuan penataan ruang wilayah Kota Sungai Penuh adalah untuk mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa serta pariwisata berskala regional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Sungai Penuh terdiri atas:

1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional;
2. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional;
4. Pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau;

5. Pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup;
6. Perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien;
7. Pengembangan kawasan strategis perspektif ekonomi; sosial budaya; serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan TPA Regional dengan Kabupaten Kerinci demikian halnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033, Pasal 22 : Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya, ayat (2) disebutkan Sistem persampahan adalah pengembangan **Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional** berada di :

1. Kabupaten Kerinci;
2. Kabupaten Muaro Jambi;
3. Kabupaten Sarolangun;
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
5. Kabupaten Bungo.

4.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dalam pembangunan daerah, perencanaan yang menyangkut optimalisasi dan efisiensi program dan kegiatan pembangunan sangat tergantung dari prioritas-prioritas yang diambil sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap berbagai isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu strategis bagi pencapaian kinerja pembangunan agar percepatan perwujudan tujuan pembangunan dapat tercapai. Isu-isu strategis tersebut merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah.

4.4.1 Isu Internasional

Pada tingkat global, isu-isu strategis yang diperkirakan akan timbul dan perlu diantisipasi sejak dini, merupakan isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, antara lain meliputi :

1. **Sustainable Development Goals (SDG's)**, Lima pergeseran transformatif seperti: mengakhiri kelaparan dan *extreme poverty*; melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan; menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan *growth* dengan pembangunan berkelanjutan; bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor-pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rumusan SDG's terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Kehilangan 17 tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- 16) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
- 17) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi,

dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik.

2. ***Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)***, pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.
3. ***Ancaman krisis ekonomi global***, Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang nantinya akan berdampak pada perekonomian beberapa Negara termasuk Indonesia. Ancaman ini bermula dari tingginya tumpukan hutang baik oleh rakyat maupun negaranya sehingga berimbang pada krisis ekonomi.
4. ***Sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbaharukan***, Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).
5. ***Antisipasi menipisnya cadangan mineral dunia; Antisipasi perubahan iklim global (global warming/climate change); dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat***

Pada tingkat Nasional dan regional yang dapat teridentifikasi dan diprediksi akan dapat berpengaruh dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, antara lain meliputi: 1) Tata kelola pemerintahan; 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 3) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur; pertumbuhan ekonomi nasional yang berkembang secara fluktuatif; 4) koordinasi pembangunan regional antar kabupaten/kota se Provinsi Jambi, belum berjalan secara optimal; lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU no. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membawa dampak terhadap proses perumusan perencanaan pembangunan daerah.

6. *Terjadinya Pandemi Covid 19*

Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) telah melanda secara global. Berbagai negara kini tengah fokus tidak hanya pada masalah kesehatan warganya, tetapi juga pada dampak sosial ekonomi akibat pandemi ini.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pandemi virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Pandemi ini pun berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Dengan terjadinya wabah corona ini, tidak dapat dipungkiri jumlah penduduk miskin akan semakin bertambah, mereka yang semula berada pada kondisi hampir miskin akan menjadi miskin, bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka yang sebelum wabah berada pada kelas pendapatan menengah akan ikut terbawa arus dan jatuh menjadi miskin. Belum lagi tingginya angka PHK akibat kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk itu perhatian khusus untuk mengatasi masalah ini harus diupayakan apda program pembangunan ke depan.

4.4.2 Isu atau Kebijakan Nasional

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Tenaga Kerja
3. Investasi
4. Perdagangan
5. Institusi
6. Pendidikan
7. Kesehatan
8. Karakter bangsa
9. Infrastruktur
10. Kewilayahuan
11. Lingkungan Hidup dan Bencana
12. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan SDM Membangun SDM : pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur : Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi : Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi : Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi : Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



**Gambar IV.2
Misi Presiden 2020-2024**

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan mental dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income (GNI)* per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada Tahun 2024. Sasaran makro pembangunan nasional yang diproyeksi di Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV.11
Target Kinerja Nasional Tahun 2024 dalam RPJMN 2020-2024**

No	Indikator Pembangunan	Target 2024 (RPJMN 2020-2024)
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,2-6,5 %
2	Tingkat Kemiskinan	6,0-7,0%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6-4,3%
4	Rasio Gini	0,360-0,374
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,54
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,3%

Sumber : RPJMN 2020-2024

Desain perencanaan jangka menengah tersebut kini harus mengalami berbagai pergeseran ketika Tahun 2020, tahun awal periode RPJMN, difokuskan pada penanganan Covid-19. APBN 2020 difokuskan untuk mitigasi Covid-19 agar dampak ekonomi dan sosial akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih. Penanganan pandemi Covid-19

mengubah rencana dan strategi pembangunan berbagai sektor yang telah dipersiapkan Pemerintah Indonesia, salah satunya target pembangunan yang berubah seiring dengan perubahan proses kerja.

Indonesia harus dapat menyusun skenario sendiri dengan asumsi bahwa obat paten dan vaksin baru akan lama ditemukan, dan yang pasti tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Bagaimana menggerakkan ekonomi ketika kehidupan normal baru memerlukan perubahan budaya yang sangat drastis akan perilaku masyarakat. Pemerintah memberikan panduan bagaimana kehidupan normal baru yang harus dilakukan masyarakat dalam 7 norma, yaitu: (1) cuci tangan; (2) menghindari menyentuh area wajah; (3) menerapkan etika batuk dan bersin saat batuk atau bersin karena tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh; (4) gunakan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain; (5) Jaga jarak sosial agar terhindar dari paparan virus; (6) isolasi mandiri. Ini dilakukan bagi yang merasa tidak sehat, seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas; dan (7) menjaga kesehatan dengan memastikan kesehatan fisik, berjemur sinar matahari pagi, mengonsumsi makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan.

Untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini, pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, tetap dengan rencana semula yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman Covid-19.

Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbarui sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca Covid-19.

Ketiga, merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca Covid-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Dalam hal ini semua program yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya, dan dijadwal ulang periode pelaksanaannya.

4.4.3 Isu atau Kebijakan Provinsi Jambi

Perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi 2005-2025 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dasar Manusia
2. Infrastruktur Daerah
3. Sumberdaya Pertanian dan Lingkungan Hidup
4. Perekonominan Daerah
5. Tata Pemerintahan

Visi daerah untuk Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah: **TERWUJUDNYA JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif** melalui; perkuatan perekonomian daerah yang berbasis keunggulan komparatif masing-masing daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan. Kemudian, perkuatan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis; mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; pendayagunaan iptek; dan pembangunan infrastruktur yang baik dan mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan daerah secara terintegrasi.
2. **Mewujudkan masyarakat ber-IMTAQ, berbudaya dan berdaya saing** melalui; perkuatan Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan umat beragama, interaksi antar budaya, pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik** melalui; peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi; perkuatan peran masyarakat sipil; otonomi daerah; jaminan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; serta peningkatan mutu tata kelola pemerintahan yang baik.
4. **Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenram dan taat hukum** melalui; peningkatan kemampuan dan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas. Disamping itu juga dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sistem keamanan swakarsa, pemberian struktur hukum dan taat hukum serta penegakan hukum secara adil dan konsekuensi.
5. **Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata** melalui; pengurangan kesejangan sosial ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan daerah tertinggal, kemiskinan secara bertahap, penyediaan akses yang sama bagi masyarakat dalam pelayanan sosial dan ekonomi, serta menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
6. **Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan** melalui; Pemanfaatan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan sekarang dan mendatang. Kemudian, melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan konservasi. Disamping itu, pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan harus berkesinambungan; pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus mendukung peningkatan kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta pendayagunaan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahap IV (2021-2025) Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah diprioritaskan untuk menghasilkan kelembagaan pemerintah yang tanggap terhadap tantangan

- yang semakin beragam dan semakin kompleks dengan pelayanan publik yang prima dan berdaya guna.
2. Pembangunan ekonomi diprioritaskan pada penguatan sektor industri yang telah berhasil dengan cara memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional dan pasar internasional dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada keunggulan daerah.
 3. Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan fasilitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat dengan standar pelayanan prima dan peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan kesehatan, dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
 4. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan daya saing melalui:
 - a. Mengembangkan sekolah yang memiliki keunggulan melalui pengembangan kualitas dan kurikulum pendidikan.
 - b. Membudayakan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip “pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua”.
 - c. Memantapkan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan memasuki tahap tuntas paripurna, yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana.
 - d. Merintis Program Wajib Belajar lima belas tahun dengan memasuki tahap akselerasi dan pemantapan, melalui upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil, bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan keperguruan tinggi.
 - e. Pengembangan Lembaga PAUD bagi semua anak usia 0-6 tahun pada lembaga PAUD serta meningkatnya kualitas penyelenggaran PAUD melalui pemantapan lembaga PAUD.
 - f. Mengembangkan pendidikan menengah kejuruan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional, yang memiliki keunggulan kompetitif.
 - g. Membangun pendidikan tinggi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan potensi dan keunggulan daerah.
 - h. Menyediakan fasilitas internet untuk e-learning untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan pada tataran pendidikan tinggi.
 5. Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya peningkatan kepedulian dan keaktifan masyarakat dalam menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, kesehatan tempat pelayanan dan ruang publik, serta responsive terhadap penyakit.
 6. Pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya pemantapan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah kerukunan hidup

- baik inter umat beragama maupun antar umat beragama. Selain itu, pembangunan keagamaan diprioritaskan juga pada upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
- 7. Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada usaha mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi dalam masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelestarian budaya. Serta upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat.
 - 8. Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada pemanfaatan akses ketenagakerjaan terhadap peluang-peluang usaha yang semakin beragam dan modern, melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, pembudayaan pelaksanaan hubungan industrial ditujukan untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.
 - 9. Pembangunan pemuda diprioritaskan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga mampu mensejahterakan dirinya dan mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan olahraga diprioritaskan untuk mempertahankan keunggulan olahraga di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat.
 - 10. Pemberdayaan perempuan diprioritaskan terwujudnya kultur kesetaraan gender di masyarakat; kemandirian wanita untuk mengatasi persoalannya, mensejahterakan dirinya dan kemampuannya berperan nyata dalam lingkungan masyarakatnya. Selain itu, diprioritaskan pula upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
 - 11. Pembangunan sosial diprioritaskan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas.
 - 12. Pembangunan IPTEK diprioritaskan pada pemanfaatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan nilai guna ekonomi atas hasil penerapan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan aktifitas ekonomi.
 - 13. Pembangunan industri diprioritaskan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbarukan, penanganan industri ramah lingkungan dan penguatan jaringan industri.
 - 14. Pembangunan perdagangan diprioritaskan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.
 - 15. Pembangunan pertanian diprioritaskan untuk peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian yang sehat dan berdaya saing di pasaran.

16. Pembangunan perikanan diprioritaskan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Timur potensi perairan Sungai Batanghari, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk sampingan, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan, pengembangan wisata kelautan.
17. Pembangunan parawisata diprioritaskan pada upaya pengkayaan obyek wisata, atraksi dan budaya yang menjunjung kekhasan daerah, pengembangan paket wisata terpadu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan promosi kegiatan pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pengembangan Koperasi dan UMKM diprioritaskan pada pengembangan jaringan kelembagaan Koperasi dan UMKM untuk mengatasi persaingan global. Pengembangan jaringan kelembagaan ini dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan Koperasi dan UMKM.
19. Pembangunan investasi daerah diprioritaskan pada penciptaan dan pencitraan Jambi sebagai salah satu daerah tujuan utama investasi tingkat nasional.
20. Pembangunan energi diprioritaskan pada pemantapan desa mandiri energi, melalui efisiensi energi, konservasi dan hemat energi. Kemudian, pengembangan infrastruktur energi, melalui investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif, pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan.
21. Pengembangan infrastruktur wilayah diprioritaskan untuk pemantapan kemampuan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan peningkatan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat melalui:
 - a. Membangun infrastruktur wilayah strategis dengan membangun jalan dan jembatan yang berkualitas melalui terealisasinya pembangunan jalan dan jembatan Batanghari III.
 - b. Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan pembangunan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung sudah terealisasi. Sedangkan, infrastruktur transportasi udara, diprioritaskan pengembangan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menjadi Bandar Udara internasional dan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Bandar Udara Depati Parbo menjadi Bandar Nasional yang berkualitas.
 - c. Pembangunan sumberdaya air diprioritaskan pada upaya peningkatan konversasi sumberdaya air melalui upaya peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat untuk melestarikan hutan.
 - d. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, diprioritaskan melalui pelaksanaan konsep Desa Punya Internet, pelaksanaan konsep *Jambi Cyber Province*, peningkatan ketersediaan air bersih, dan sanitasi lingkungan yang berkualitas.

- e. Pembangunan pusat logistik nasional untuk penanganan bencana wilayah Jambi Barat yang berpusat di Kota Muara Bungo.
22. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diprioritaskan pada pemantapan daya dukung lingkungan, untuk melestarikan lingkungan, serta perbaikan mutu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemantapan daya dukung lingkungan harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui peningkatan mutu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.
23. Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada upaya peningkatan kemandirian keluarga kecilyang sehat dan sejahtera, serta peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembangunan politik diprioritaskan pada konsolidasi demokrasi, penataan dan penguatan daerah otonom serta kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Diprioritaskan pula terbentuknya kelembagaan sosial-politik yang mengedepankan kepentingan daerah sehingga melahirkan kondisi lingkungan sosial-politik yang kondusif dan mampu mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang kuat, bersih dan berwibawa.
25. Pembangunan Hukum diprioritaskan pada perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia, perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat serta memantapkan budaya hukum.
26. Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diprioritaskan untuk memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari hari serta penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.
27. Pembangunan aparatur pemerintah diprioritaskan pada penguatan aparatur dalam fasilitasi dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha, pemantapan birokrasi pemerintahan dan budaya organiasasi, penataan standarisasi kualitas pelayanan, peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya serta pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel. Dalam pembangunan desa, upaya pemerintah diprioritaskan kepada pengembangan kelembagaan masyarakat desa agar mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri, dan pembangunan sarana dan prasarana desa.
28. Pembangunan Keuangan Daerah diprioritaskan pada pemantapan peranan sektor swasta diharapkan semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pembangunan Bidang Keuangan

- Daerah diprioritaskan pula pada penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.
29. Penataan ruang diprioritaskan pemerataan pembangunan antar wilayah, sehingga tidak didapati lagi daerah tertinggal. Seluruh masyarakat telah menikmati sarana dan prasarana dasar yang berkualitas baik diperkotaan maupun perdesaan. Penataan Ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir. Kemudian, pembangunan kawasan andalan terus didorong sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan. Pemerintah berkewajiban untuk mendorong keterlibatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dalam proses pemanfaatan sumberdaya kawasan. Pembangunan kawasan andalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, yaitu pertumbuhan yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan tanpa mengurangi daya dukung lingkungan hidup.

Beberapa kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jambi dengan lokus di Kota Sungai Penuh, antara lain :

1. Pengembangan Kawasan strategis nasional : Kawasan strategis nasional meliputi kawasan Taman Nasional; **Kerinci Seblat**, Berbak, Bukit Tiga Puluh dan Bukit Dua belas.
2. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas sudut kepentingan; ekonomi, sosial budaya dan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Untuk kepentingan ekonomi ditumbuhkembangkan Kota; Jambi, Muara Bulian, Sengeti, Muara Bungo, Muara Tebo, Bangko, Sarolangun, **Sungai Penuh** dan kawasan pantai Timur Jambi dan Kerinci. Kemudian, untuk kepentingan sosial budaya ditumbuhkembangkan kawasan wisata Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ditumbuhkembangkan kawasan yang berada di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.
3. Sistem perkotaan di Provinsi Jambi diprioritaskan untuk dikembangkan secara berhirarki, sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi, potensi dan rencana pengembangan, diantaranya yaitu : Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan menjadi PKW yang berada pada Kota; Muaro Sabak, **Sungai Penuh**, Bangko, Sengeti, dan Muaro Tebo.
4. Pengembangan Infrastruktur: membangun jalan dan jembatan yang berkualitas melalui terealisasinya pembangunan jalan dan jembatan Batanghari III, Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan pembangunan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung sudah terealisasi, pengembangan Bandar Udara Sultan Taha Jambi menjadi Bandar Udara internasional dan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Bandar Udara Depati Parbo menjadi Bandara Nasional yang berkualitas, pelaksanaan konsep Desa Punya Internet, pelaksanaan konsep *Jambi Cyber Province*, peningkatan ketersediaan air bersih, dan sanitasi lingkungan.

4.4.4 Isu atau Kebijakan Kabupaten Kerinci dan Pesisir Selatan

Kebijakan-kebijakan kabupaten tetangga akan mempengaruhi pembangunan wilayah. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat akan memberikan dampak pada pemerintah level Provinsi maupun level Kabupaten/Kota dalam hal ini Kota Sungai Penuh. Sehingga perlu adanya kajian terhadap berbagai kabupaten tetangga.

Kota Sungai Penuh berbatasan langsung dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil mempertimbangkan kedua Kabupaten tersebut, agar terciptanya keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitarnya. Penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran kondisi, keterkaitan dan keselarasan antar kebijakan.

Pembangunan Kabupaten Kerinci 2019-2024 diarahkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kerinci yang maju, mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh serta meratanya pembangunan antar wilayah, yang didukung oleh ketersedian infrastuktur sarana prasarana wilayah dan SDM berkualitas serta berdaya saing, melalui :

- 1 Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penggerak perekonomian daerah;
- 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sosial budaya, kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat;
- 3 Peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah serta ketahanan pangan, energi dan peningkatan investasi daerah;
- 4 Percepatan pemerataan pembangunan dan penanganan kesenjangan antar wilayah serta penanganan daerah terisolir/tertinggal melalui peningkatan perhatian pada wilayah pemekaran;
- 5 Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan peran serta stakeholder dalam pembangunan;
- 6 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis tata ruang serta pengelolaan bencana alam;
- 7 Peningkatan stabilitas keamanan, politik, demokrasi dan penegakkan hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 RPJMD ke-4 (2021-2025), diarahkan untuk :

- 1 Pembangunan ekonomi pangan diarahkan pada Era Persiapan Industri Pangan Lokal yang berdaya saing nasional.
- 2 Penumbuhan Industri Pangan yang didukung oleh UMKM, Memantapkan SDM di bidang industri pangan, Memantapkan lembaga dan peraturan untuk mendukung industri pangan,

- 3 Penerapan dan pengembangan Riset dan teknologi tepat guna di bidang pangan, Pemantapan Infrastruktur Pedesaan, Peningkatan Produktifitas Pertanian, Peningkatan Infrastruktur Pengairan, kebutuhan energi masyarakat diharapkan dapat dipenuhi 100 persen.
- 4 Pembangunan kawasan wisata untuk menjangkau potensi wisata lainnya terutama wisata alam dan wisata budaya. Kawasan Mandeh Rubiah diharapkan pemugarannya dapat tuntas 100 persen, sehingga destinasi wisata di Pesisir Selatan semakin mantap.
- 5 Pada akhir periode perencanaan ditargetkan sumbangaan sektor sekunder terhadap pembentukan PDRB Kabupaten telah mencapai 31,5 persen, dan pendapatan perkapita masyarakat mencapai Rp. 52,362 juta, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,2 persen, umur harapan hidup meningkat menjadi 70,38 tahun, lama sekolah menjadi 11,02 tahun dan angka IPM menjadi 78,6.

4.4.5 Isu Strategis Pembangunan Kota Sungai Penuh 2021-2026

Dalam pembangunan daerah Kota Sungai Penuh selama ini memiliki berbagai permasalahan yang cukup beragam baik permasalahan setiap tahunnya (terus mengiringi) maupun permasalahan baru yang muncul berdasarkan kondisi global. Permasalahan tersebut akan membentuk suatu rumusan-rumusan yang jika diintegrasikan dengan kajian dan analisis isu-isu strategis pembangunan akan memberikan sebuah antisipasi dan jalan keluar permasalahan selama ini.

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting dan mendasar, mendesak berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan dimasa mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) Tahun ke depan. Pemilihan isu strategis di Kota Sungai Penuh mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

1. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah Kota Sungai Penuh;
2. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
3. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
4. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
5. Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah;
6. Janji politik harus diwujudkan.

Dengan berdasar pada pertimbangan diatas, isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kota Sungai Penuh periode 5 (lima) Tahun 2021-2026 mendatang.,

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional dan amanat dalam RPJPD, dengan melihat dari fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan pada tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipandang mendasar saat ini dikaitkan dengan tantangan yang akan dihadapi pada Tahun 2021-2026, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Sungai Penuh sebagai berikut :

1. Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam aspek Sosial Budaya, pendidikan, dan kesehatan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang mempunyai daya saing dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
4. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan utilitas dan Standar Pelayanan Minimum
5. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk pembangunan yang berbasis bencana dan berkelanjutan.

4.4.6 Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Dengan Isu Pokok Pembangunan dari Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi perlu disandingkan dengan permasalahan pokok pembangunan yang tercantum dalam visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Hal ini untuk melihat keselarasan antara isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi dengan permasalahan pokok pembangunan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV.12
Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi dengan Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi	Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
1. Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	2. Tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN
	5 Peningkatan PAD
	7 Ketentraman dan Ketertiban
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam aspek pendidikan, kesehatan dan Sosial Budaya,	1. Kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Ekonomi Kreatif	3. Pemantapan Struktur Perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi

Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi	Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
yang mempunyai daya saing dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.	daerah
4. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan utilitas dan Standar Pelayanan Minimum	4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan permukiman
5. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk pembangunan yang berbasis bencana dan berkelanjutan.	6. Pelestarian lingkungan hidup

Sumber : Hasil Analisis, 2020

4.4.7 Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang

Berdasarkan dokumen RPJP Kota Sungai Penuh 2005-2025 maka RPJMD ke-4 (2021-2026) ini diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan Kota Sungai Penuh Kota Pendidikan yang Berdaya Saing, Perdagangan dan Jasa yang Produktif serta Berwawasan Lingkungan, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera. Keterkaitan Isu Strategis pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan tahapan pembangunan RPJPD Kota Sungai Penuh Periode keempat sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel IV.13
Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Sungai Penuh**

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025	Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip <i>good governance and clean government</i> ,	1. Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>clean</i>

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025	Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026
	<i>Government</i> dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat dan berbudaya;	2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam aspek Sosial Budaya, pendidikan, dan kesehatan.
3. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;	3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang mempunyai daya saing dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
4. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;	4. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan utilitas dan Standar Pelayanan Minimum. 5. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk pembangunan yang berbasis bencana dan berkelanjutan.

Sumber : Bappeda, Hasil Analisis, 2020

4.4.8 Penjelasan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

Penjelasan dari isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* secara umum mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif

dan inovatif serta efektif dan efisien. Selain itu, untuk penyediaan pelayanan publik juga diarahkan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat diakses oleh berbagai pihak. Adapun tujuan akhir yang hendak dicapai dari prinsip diatas adalah semata-mata untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik.

Prioritas utama Kota Sungai Penuh dalam peningkatan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan yang prima (*one stop service*) meliputi penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (SPBE) menuju pengembangan kota pintar (*smart city*); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Peningkatan pelayanan publik diupayakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas organisasi Perangkat Daerah yang mengarah pada kepuasan masyarakat.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam aspek sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kota Sungai Penuh maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan global. Selain itu, Peningkatan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai agama, adat dan budaya sebagai modal sosial bagi generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan peran kelembagaan daerah, lembaga sosial masyarakat, pemangku adat dan budaya sehingga dapat terwujud masyarakat dan generasi pemuda yang bermartabat dan berkarakter.

Berdasarkan pendidikan maka kualitas sumber daya manusia mempunyai tuntutan yang sesuai dengan perubahan masa depan khususnya melalui pemanfaatan teknologi. Sehingga dalam peningkatan mutu dan daya saing pendidikan diperlukan manajemen pelayanan pendidikan baik dari sumber daya guru yang berkompeten maupun penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimum.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan akses pendidikan yang layak khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial melalui beasiswa masyarakat miskin. Berkaitan dengan peningkatan mutu SDM dalam pengelolaan pemerintahan maka juga perlu didukung dengan penyediaan beasiswa bagi aparatur sipil negara untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S2 dan S3) sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Dalam rangka pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat, maka diperlukan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum. Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari *Universal Health Coverage (UHC)*. Hal ini merupakan perwujudan dalam akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Adapun kebijakan UHC ini mempunyai

tujuan untuk: Kesetaraan dalam mengakses layanan kesehatan, Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang baik sehingga kondisi kesehatan penerima layanan akan semakin baik; dan Perlindungan masyarakat dari risiko finansial.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kreatif yang mempunyai daya saing dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi unggulan yang ada pada masing-masing wilayah. Selain itu, untuk mengantisipasi persaingan global maka produk unggulan juga harus mempunyai daya saing dengan yang lain.

Perkembangan ekonomi kreatif tidak terlepas dari inovasi dan kreatifitas guna meningkatkan nilai tambah. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Pandemi Covid-19 mempunyai dampak pengaruh besar terhadap kondisi perekonomian yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, Pandemi Covid-19 juga dapat memberikan dampak positif dalam menumbuhkan usaha kreatif baru yang dapat dikembangkan.

Selain itu, pemerintah telah berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan wujud pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi ekonomi yang terdapat dalam desa dengan pengelolaan secara partisipatif. Implementasi Bumdes dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga keuangan atau unit usaha yang dikelola oleh masyarakat secara partisipatif sesuai dengan potensi unggulan desa. Dengan demikian, Bumdes diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

4. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan utilitas dan Standar Pelayanan Minimum.

Kebutuhan akan sarana dan prasarana publik menjadi semakin meningkat seiring dengan perkembangan perkotaan Sungai Penuh. Meskipun secara umum sudah terlayani namun keberadaannya masih belum memadai sesuai dengan standar pelayanan minimum dan belum menjangkau seluruh wilayah.

Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan hendaknya dapat mempertimbangkan perkembangan kebutuhan kota di masa depan dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang serius.

5. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis bencana dalam upaya mewujudkan kota Sungai Penuh sebagai *Compact City*.

Kondisi geografis Kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh perbukitan dan sebagian besar merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat mempunyai dampak risiko terhadap potensi kebencanaan seperti banjir, longsor, gempa, likuifaksi. Bencana banjir di Kota Sungai Penuh dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama di bagian hulu Daerah Aliran Sungai Batang Bungkal dan Sungai Ampuh yang bersatu masuk kedalam badan air Sungai Batang Bungkal.

Selain itu, peresapan air hujan di bagian hulu tersebut kurang baik sehingga air langsung mengalir ke bagian daerah aliran sungai di sekitarnya yang langsung mengalir masuk ke Sungai Batang Bungkal yang melintasi Kota Sungai Penuh. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap bangunan fisik, jembatan, bangunan rumah yang berada di sekitar tepian sungai batang bungkal.

Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan hidup. Selain Banjir, persampahan juga menjadi salah satu permasalahan perkotaan di Sungai Penuh. Diperlukan upaya dan komitmen pemerintah daerah yang serius untuk mengatasi permasalahan ini. Pengelolaan sampah untuk skala desa dan kelurahan perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan potensinya, maka pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pihak Swasta sehingga dapat menjadi potensi ekonomi baru bagi daerah.

Tabel IV.14

Keterkaitan Isu Strategis Kota Sungai Penuh, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jambi serta Isu Strategis KLHS

No	Isu Strategis Kota Sungai Penuh	Masalah Daerah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jambi	Isu Strategis KLHS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.	1 Akuntabilitas Keuangan Daerah masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan Kemandirian keuangan daerah (PAD) masih . perlu ditingkatkan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 3 perlu ditingkatkan . Kualitas penyelenggaraan 4 Pemerintah Daerah . perlu dipertahankan dan ditingkatkan Belum optimalnya Pemanfaatan dan 5 Integrasikan Teknologi Informasi Kualitas Pelayanan publik masih 6 perlu ditingkatkan Manajemen ASN masih perlu ditingkatkan 7 Belum optimalnya merit system ASN 8 .	16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	5 Institusi 10 Kewilayahahan 12 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	5 Tata Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan

No	Isu Strategis Kota Sungai Penuh	Masalah Daerah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jambi	Isu Strategis KLHS
1	2	3	4	5	6	7
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam aspek sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan	1 Kualitas SDM perlu ditingkatkan 2 Derajat Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan 3 Daya beli masyarakat thd komoditas pangan dan non pangan masih perlu Ditingkatkan Pendidikan karakter dan keagamaan masih perlu Ditingkatkan Pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya dlm masyarakat	2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; Mencapai kesetaraan gender dan 5 memberdayakan kaum perempuan;	6 Pendidikan 7 Kesehatan 8 Karakter bangsa	1 Kebutuhan Dasar Manusia	Kebutuhan Dasar Manusia
3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kreatif yang mempunyai daya saing dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	1 Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19 3 Tingkat kemiskinan mengalami kenaikan 4 Peningkatan Tingkat Pengangguran terbuka	1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,	1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi 2 Tenaga kerja 3 Investasi 4 Perdagangan	4 Perekonomian Daerah	4 Penurunan ekonomi masyarakat setelah covid 19.

No	Isu Strategis Kota Sungai Penuh	Masalah Daerah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jambi	Isu Strategis KLHS
1	2	3	4	5	6	7
			kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara			
4	Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan utilitas dan Standar Pelayanan Minimum	1 Kualitas dan Pelayanan transportasi Perkotaan perlu ditingkatkan Kualitas dan pelayanan infrastruktur dasar perlu ditingkatkan Kualitas Perumahan dan permukiman yang nyaman perlu ditingkatkan	6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	9 Infrastruktur	2 Infrastruktur Daerah	5 Tingginya intensitas alih fungsi lahan .

No	Isu Strategis Kota Sungai Penuh	Masalah Daerah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jambi	Isu Strategis KLHS
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis bencana dalam upaya mewujudkan kota Sungai Penuh sebagai <i>Compact and Smart City</i> .	1 Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan perlu ditingkatkan Belum optimalnya penanganan Kebersihan Kota Kualitas 3 Penanggulangan Bencana perlu ditingkatkan Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 4	12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 13 15	11 Lingkungan Hidup dan Bencana	3 Sumberdaya Pertanian dan Lingkungan Hidup	1 Peningkatan frekuensi banjir dan bencana lainnya. 2 Penurunan Kualitas Air 3 Peningkatan Timbulan sampah

Sumber : Bappeda, Hasil analisis 2021

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota, yaitu :

“ Terwujudnya Kota Sungai Penuh Menjadi Kota Pendidikan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Sejahtera” dengan slogan “ **Maju dan Berkeadilan** ”.

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

Pendidikan : Diartikan bahwa Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi pusat pendidikan yang berkualitas, maju dan mandiri berwawasan lingkungan dan bertaraf Internasional sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, tangguh menghadapi tantangan dan berguna bagi bangsa dan masyarakat.

Ekonomi Kerakyatan yang mandiri : Diartikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang usaha kecil dan menengah, jasa, perdagangan, koperasi, home industri dan sektor ekonomi lainnya serta menggali sumber daya yang ada, sehingga terwujud masyarakat yang dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

Religius : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh di harapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama secara nyata, baik dan benar sehingga tercermin dalam pola pikir, bertingkah laku dan kehidupan bermasyarakat sebagai pencitraan diri sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Budaya : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh adalah masyarakat yang beradat, memiliki corak budaya yang beraneka ragam dan berbagai suku akan dibina menjadi khasanah kekayaan. budaya Kota Sungai Penuh sehingga menjadi aset wisata di Propinsi Jambi.

Sejahtera : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesejahteraan yang baik, sehingga dapat hidup layak, aman dan tenram.

5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, rumusan misi ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama, dan budaya**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, dilandasi dengan nilai agama dan budaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlaq dan berguna bagi bangsa dan masyarakat.

- 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN**

Peningkatan kinerja pemerintahan, aparatur yang disiplin dan inovatif serta bebas dari KKN, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang.

- 3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah**

Pemantapan struktur perekonomian masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat Kota Sungai Penuh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta mengembangkan potensi Kota Sungai Penuh.

- 4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman**

Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam mengembangkan perekonomian Kota Sungai Penuh melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pemenuhan prasarana dasar pemukiman, perumahan dan sarana penunjang.

- 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Peningkatan sektor pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, tanpa membebani ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat.

- 6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup**

Menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mewujudkan wilayah Kota Sungai Penuh yang nyaman sebagai upaya mitigasi terhadap bencana alam.

- 7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban**

Menjaga dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang kondusif dan kenyamanan dalam beraktifitas dan berusaha.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1
**Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 dengan
Misi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026**

Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025		Misi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026	
1.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip <i>good governance and clean government</i> ;	2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN
		5.	Meningkatkan PAD
		7.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
2.	Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat dan berbudaya;	1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya
3.	Mewujudkan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;	3.	Pemantapan Struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah
4.	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;	4.	Pemerataan dalam peningkatkan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman
		6.	Menciptakan pelestarian lingkungan hidup

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berlandaskan nilai agama dan budaya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berbudaya, dan berakhhlak mulia, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indeks pembangunan manusia, ditandai dengan :

1. Terwujudnya karakter masyarakat yang berakhhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila. Dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi IPTEK dan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Perilaku masyarakat yang berbudaya, meningkatnya peradaban, harkat, martabat, menguatnya jati diri, kepribadian, menguatnya ketahanan dan modal sosial masyarakat.

B. Sasaran

Misi 1 memiliki 6 (enam) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas SDM yang kompeten

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas SDM yang kompeten adalah indeks pendidikan dan Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Satuan Nasional Pendidikan (SNP) Plus

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah indeks kesehatan.

3. Meningkatnya daya beli masyarakat

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya daya beli masyarakat adalah indeks daya beli (pengeluaran perkapita).

4. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan

Indikator yang menggambarkan meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan adalah persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dan jumlah rumah tahfizd.

5. Meningkatnya pelestarian budaya dalam masyarakat

Indikator yang menggambarkan meningkatnya pelestarian budaya dalam masyarakat adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya

6. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan

Indikator yang menggambarkan meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Gender dan persentase pemuda yang berprestasi.

2. Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerjanya, ditandai dengan :

1. Agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani sampai pada level pemerintahan desa.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, *downsizing* dan *rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi; proses bisnis administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja, program dan proses perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran.
3. Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan melayani, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan *e-government* sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta

membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

B. Sasaran

Misi 2 memiliki 6 (enam) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah

Indikator yang menggambarkan pencapaian meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Indikator yang menggambarkan pencapaian meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah Nilai Evaluasi SAKIP Kota,

3. Meningkatnya kualitas peyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator yang menggambarkan pencapaian meningkatnya kualitas peyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Nilai LPPD Kota, dan kualitas pengelolaan arsip.

4. Meningkatnya pemanfaatan dan Integrasi Teknologi

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya pemanfaatan dan Integrasi Teknologi Informasi Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Nilai Kepatuhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan.

6. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur adalah Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Merit Sistem

3. Misi 3 : Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah adalah meningkatnya kemandirian ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing, dan meningkatkan perekonomian Kota Sungai Penuh yang merata dan inklusif, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita serta Indeks Ketimpangan masyarakat (Gini rasio) sebagai indikator kinerjanya, ditandai dengan :

- 1 Adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Konsep pertumbuhan ekonomi di Kota Sungai Penuh dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/penurunan pengangguran). *Pro growth* stategy juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor perdagangan dan jasa, UMKM, industri, pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor*, dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.
- 2 Penerapan konsep pembangunan ekonomi, harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya.

B. Sasaran

Misi 3 memiliki 8 (delapan) sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kinerja sektor perdagangan adalah pertumbuhan sektor perdagangan.

2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum) dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Sungai Penuh

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya realisasi investasi Kota Sungai Penuh adalah pertumbuhan realisasi investasi daerah.

4. Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan adalah pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan

5. Meningkatnya sentra kegiatan ekonomi masyarakat

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya sentra kegiatan ekonomi masyarakat adalah jumlah sentra produk unggulan daerah

6. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian masyarakat

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian masyarakat adalah Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UMKM.

7. Menurunnya jumlah penduduk miskin

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja menurunnya jumlah penduduk miskin adalah tingkat kemiskinan

8. Menurunnya angka pengangguran

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja menurunnya angka pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

4. Misi 4 : Pemerataan dalam meningkatkan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman

Dalam rangka pencapaian misi 4, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi pemerataan dalam peningkatkan prasarana dan sarana wilayah dan permukiman adalah Meningkatkan ketersedian dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas yang dapat dilihat atau diukur dari indeks kualitas pelayanan infrastruktur sebagai indikator kinerjanya, ditandai dengan :

1. Terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang

matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

2. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak, serta penanganan *backlog* rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman.

C. Sasaran

Misi 4 memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi perkotaan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi perkotaan adalah Indeks Kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan dan tingkat pelayanan *jalan (level of service)*.
2. Meningkatnya kualitas dan layanan Infrastruktur wilayah dan kota
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas dan layanan Infrastruktur wilayah dan kota adalah persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik fungsional.
3. Meningkatnya kualitas dan layanan Infrastruktur permukiman
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas dan layanan Infrastruktur permukiman adalah indeks kualitas infrastruktur permukiman.
4. Meningkatnya perumahan dan permukiman yang nyaman
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya perumahan dan permukiman yang nyaman adalah persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

5. Misi 5 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka pencapaian misi 5, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan PAD adalah meningkatkan tata kelola pengelolaan PAD yang akuntabel, efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari persentase peningkatan PAD sebagai indikator kinerjanya.

Optimalisasi pendapatan daerah melalui tata kelola pendapatan daerah merupakan salah satu solusi yang diterapkan untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya penurunan penerimaan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Kreativitas dan inisiatif pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil.

B. Sasaran

Misi 5 memiliki 1 (satu) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah adalah persentase PAD terhadap pendapatan, pertumbuhan pajak dan retribusi daerah serta efisiensi pengelolaan PAD.

6. Misi 6 : Menciptakan pelestarian lingkungan hidup

Dalam rangka pencapaian misi 6, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi 5 menciptakan pelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup sebagai indikator kinerjanya, ditandai dengan :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui konservasi lingkungan, pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
2. Meningkatnya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

3. Pengembangan/pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan kapasitas pengendalian daya rusak air.

B. Sasaran

Misi 6 memiliki 4 (empat) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas air sungai, udara dan tutupan lahan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas air sungai, udara dan tutupan lahan adalah indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan
2. Terciptanya kebersihan kota
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terciptanya kebersihan kota adalah persentase penanganan sampah
3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanggulangan bencana
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanggulangan bencana adalah indeks ketahanan daerah, tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) dan persentase luas kawasan bebas genangan banjir
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Misi 7 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban

Dalam rangka pencapaian misi 7, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan ketentraman dan ketertiban adalah mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh yang dapat dilihat atau diukur dari angka konflik dan pelanggaran perda dan ketertiban, ketentraman umum sebagai indikator kinerjanya, yang ditandai dengan terwujudnya ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan

kehidupannya secara layak dan bermartabat. Peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga serta peningkatan upaya penegakan Perda.

B. Sasaran

Misi 7 memiliki 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif adalah Angka konflik social

2. Terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan adalah tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman serta ketertiban umum.

Tabel V.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD
Kota Sungai Penuh Tahun 2021–2026
Visi : “Maju dan Berkeadilan”

Tabel V.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD
Kota Sungai Penuh Tahun 2021–2026
Visi : "Maju dan Berkeadilan"

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama, dan budaya												
Tujuan 1.1. Meningkatkan sumber daya manusia yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Berakhhlak Mulia	Indeks Pembangunan Manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu : 1. Indeks Kesehatan; 2. Indeks Pendidikan; 3. Indeks Pengeluaran. IPM Dihitung Sebagai Rata-Rata Geometrik Dari Indeks Kesehatan, Pendidikan. Sumber: BPS	indeks	75,42	75,94	76,46	76,97	77,49	78,01	78,53	78,53	
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Kualitas SDM yang kompeten dan produktif	Indeks Pendidikan	Indeks dari hasil kombinasi antara harapan lama sekolah (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS); Sumber: BPS	Indeks	0,75	0,77	0,76	0,78	0,79	0,8	0,81	0,81	Dinas Pendidikan (OPD Utama); Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas PPPA (OPD)
	Percentase SMP yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar tambahan (SNP Plus)	(Jumlah SMP yang menerapkan SNP Plus / Jumlah total satuan pendidikan) x 100% Satuan pendidikan yang menerapkan SNP Plus mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan dan kriteria tambahan, yakni bertaraf internasional berbasis nilai-nilai agama dan budaya. Perhitungan Skor SNP Plus menggunakan bobot 80% untuk capaian SNP (sesuai Permendiknas) dan 20% untuk capaian Plus sesuai kriteria yang ditetapkan.	%	N.A	N.A	20	40	60	80	100	100	Dinas Pendidikan
	Percentase SD yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar	(Jumlah SD yang menerapkan SNP Plus / Jumlah total satuan pendidikan) x 100%	%	N.A	N.A	10	25	45	65	100	100	Dinas Pendidikan

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
	Persentase capaian SNP Plus	Rata-rata capaian SNP Plus Kota Sungai Penuh dari seluruh SD dan SMP.	%	N.A	N.A							Dinas Pendidikan
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Sumber: BPS	Indeks	0,8	0,8	0,81	0,81	0,82	0,82	0,83	0,83	Dinas Kesehatan (OPD Utama); Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Ketahanan Pangan (OPD Pendukung)
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks daya Beli (Pengeluaran Perkapita)	Indeks Rata-rata pengeluaran per kapita setahun. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Sumber: BPS	Indeks	0,71	0,71	0,71	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian (OPD Utama); Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh; Dinas Ketahanan Pangan (OPD Pendukung)
Sasaran 1.1.4. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter (muatan lokal)	(Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter / Jumlah total satuan pendidikan) x 100%	%	85	90	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan (OPD Utama); Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Pendukung)
	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan keagamaan	(Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan keagamaan / Jumlah total satuan pendidikan) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan (OPD Utama); Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Pendukung)
	Jumlah Rumah Tahfidz yang dimaksud termasuk existing dan baru	Rmh Tahfidz	N.A	9	11	12	13	15	16	16		Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
Sasaran 1.1.5. Meningkatnya pelestarian budaya dalam masyarakat	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah aktivitas (Event) tradisi adat dan budaya	festival	0	0	2	4	4	4	4	4	Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (OPD Utama) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPD Pendukung)

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
Sasaran 1.1.6. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks yang menunjukkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki. Sumber: BPS	%	94,31	94,42	94,53	94,64	94,75	94,86	94,97	94,97	Dinas PPPA
	Persentase Pemuda Berprestasi	(Jumlah pemuda berprestasi / Jumlah pemuda yang mengikuti lomba) x 100%	%	N.A (pandemi)	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1	Dinas Kepora
Misi 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN												
Tujuan 2.1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh (PermenpanRB No. 26 Tahun 2020)	Kategori	C	C	C	CC	CC	CC	B	B	
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah (OPD Utama), Inspektorat Daerah; Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Pendukung)
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber: Balitbangda Kota Sungai Penuh	Indeks	N.A	75	76	77	78	79	80	80	Badan Keuangan Daerah (OPD Utama), Inspektorat Daerah; Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh; Badan Penelitian dan Pengembangan (OPD Pendukung)
Sasaran 2.1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Sungai Penuh	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A	A	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Utama); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Inspektorat Daerah; dan Semua SKPD (OPD Pendukung)

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
Sasaran 2.1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kualitas Pengelolaan Arsip	Diambil dari komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020)	Predikat	kurang	cukup	cukup	baik	baik	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kategori	T	T	T	ST	ST	ST	ST	ST	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh(OPD Utama); Sekretariat DPRD; Badan Penelitian dan Pengembangan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPD Pendukung)
Sasaran 2.1.4. Meningkatnya pemanfaatan dan Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,5	1,5	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,05	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sasaran 2.1.5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	Hasil Evaluasi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah (Ombudsman)	Kategori	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Utama); Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian: Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Kecamatan (OPD Pendukung)
Sasaran 2.1.6. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN	Kategori	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik	Baik	BKPSDM (OPD Utama); Seluruh OPD (OPD Pendukung)
	Indeks Sistem Merit	ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah; diukur mandiri oleh BKPSDM	Indeks	N.A	0,51	0,53	0,56	0,61	0,63	0,66	0,66	BKPSDM (OPD Utama); Seluruh OPD (OPD Pendukung)

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
Misi 3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah												
Tujuan 3.1. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). : PDRB Tahun t - PDRB (t-1)/ PDRB (t-1) x 100	%	-0,14	3,64	3,72	3,8	3,88	3,96	4,04	4,04	
Sasaran 3.1.1. Meningkatkan Kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; : PDRB Sektor Perdagangan Besar dan EceranTahun t - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan EceranTahun (t - 1) / PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun (t - 1) x 100	%	-3,05	6,5	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha ekonomi Kreatif dalam total 17 kategori	Pelaku Ekraf	45	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	Jumlah PDRB kategori Jasa Akomodasi, Makanan dan Minuman tahun t - Jumlah PDRB kategori Jasa Akomodasi, Makanan dan Minuman tahun ke (t-1) /(Jumlah PDRB kategori Jasa Akomodasi, Makanan dan Minuman tahun ke (t-1) x 100	%	-5,43	2,43	2,5	2,53	2,56	2,59	2,62	2,62	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Sungai Penuh	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah yang terdata dalam OSS	(Jumlah Realisasi Investasi tahun t - Realisasi Investasi tahun ke t-1)/Jumlah Realisasi Investasi tahun ke t-1) x 100	%	N.A	20	22	24	25	27	28	28	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB untuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, :PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan PerikananTahun t - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan PerikananTahun (t - 1) / PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan PerikananTahun (t - 1) x 100	%	1,98	2,57	2,59	2,61	2,63	2,65	2,67	2,67	Dinas TPHP; Dinas Peternakan dan Perikanan

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
Tujuan 3.2. Meningkatkan perekonomian Kota Sungai Penuh yang merata dan inklusif	Indeks ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)	Tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna.	Indeks	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3	0,3	0,3	0,3	
Tujuan 3.2. Meningkatkan perekonomian Kota Sungai Penuh yang merata dan inklusif	PDRB Per Kapita	PDRB / jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam periode tertentu	Juta/Jiwa/Thn	82,47	83,17	83,67	84,17	84,67	85,17	85,67	85,67	
Sasaran 3.2.1. Meningkatnya sentra kegiatan ekonomi masyarakat	Jumlah sentra produk unggulan daerah	Jumlah akumulatif sentra produk unggulan daerah	Produk Unggulan	6	6	7	7	8	8	8	8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sasaran 3.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Omzet Koperasi	Omset Koperasi Tahun t - Omset Koperasi Tahun (t - 1) / Omset Koperasi Tahun (t - 1) x 100%	%	0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pertumbuhan Omzet UMKM	Omset UMKM Tahun t - Omset UMKM Tahun (t - 1) / Omset UMKM Tahun (t - 1) x 100%	%	0	1	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 3.2.3. Menurunnya jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin: persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (Sumber: BPS Prov. Jambi)	%	3,03	3	2,97	2,93	2,9	2,87	2,84	2,84	Dinas Sosial (OPD Utama); Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD Pendukung)
Sasaran 3.2.4. Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	(Jumlah pengangguran usia angkatan kerja / Jumlah penduduk usia kerja) / x 100%	%	5,56	5,21	5,15	5,09	5,03	4,97	4,91	4,91	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
Misi 4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman												
Tujuan 4.1. Meningkatkan ketersedian dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Persentase pemenuhan infrastruktur kota	Rata-rata dari target/capaian sasaran di bawah tujuan ini.	%	N.A	68,18	71,28	74,31	77,5	80,69	82,41	82,41	
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan Pelayanan transportasi perkotaan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik fungsional	Luas irigasi kota yang berkondisi baik fungsional / Luas irigasi kota x 100	%	58	60	62	64	66	68	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik fungsional	(Panjang jalan yang berkondisi baik fungsional/ total panjang jalan dan jembatan) x 100	%	70,69	72	74	76	78	80	82	82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Ukuran kualitas suatu jalan (mempertimbangkan faktor kenyamanan dan geometrik jalan) dan digunakan sebagai ukuran untuk membatasi volume lalu lintas suatu jalan. Klasifikasi B: arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas; kepadatan rendah; hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan; pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan dan lajur jalan yang digunakan. Sumber: MKJI 1997; Kementerian PU	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	Dinas Perhubungan

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur permukiman	Percentase Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Rata-rata dari pemenuhan air minum rumah tangga, sanitasi rumah tangga, listrik (PLN/Non PLN), dan jalan lingkungan	%	N.A	69,06	70,38	71,43	73,23	75,04	76,73	76,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya perumahan dan permukiman yang nyaman	Percentase desa dengan lingkungan permukiman kategori tidak kumuh	(Jumlah desa dengan permukiman tidak kumuh / Jumlah total desa) x 100	%	N.A	56,52	66,67	76,81	86,96	97,1	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Misi 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)												
Tujuan 5.1. Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan PAD yang akuntabel, efektif dan efisien	Percentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (PAD/PD)	(Jumlah PAD (Rp) / Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)) x 100	%	3,88	7,3	13,17	13,18	13,19	13,2	13,21	13,21	Bakeuda (OPD Utama); Dinas Kesehatan; Dinas PU; Dishub; LH; Kominfo; Budpar; Peternakan; Perdagri; Setda (OPD Pendukung)
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	((Jumlah Pajak Daerah (Rp) tahun t - Jumlah Pajak Daerah (Rp) tahun t-1) / Jumlah Pajak Daerah (Rp) tahun t-1) x 100 Angka pertumbuhan positif menunjukkan kenaikan nilai pendapatan (Rp) dari tahun sebelumnya.	%	-4,59	66,14	4,73	4,1	3,94	3,79	3,65	3,65	Bakeuda (OPD Utama); Dinas Kesehatan; Dinas PU; Dishub; LH; Kominfo; Budpar; Peternakan; Perdagri; Setda (OPD Pendukung)
	Tingkat Kemandirian Daerah (PAD/Pendapatan Transfer)	(Jumlah PAD (Rp) / Jumlah Pendapatan Transfer (Rp)) x 100	%	4,45	8,03	15,17	15,18	15,2	15,21	15,23	15,23	Bakeuda (OPD Utama); Dinas Kesehatan; Dinas PU; Dishub; LH; Kominfo; Budpar; Peternakan; Perdagri; Setda (OPD Pendukung)

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
	Pertumbuhan Retribusi Daerah	((Jumlah Retribusi Daerah (Rp) tahun t - Jumlah Retribusi Daerah (Rp) tahun t-1) / Jumlah Retribusi Daerah (Rp) tahun t-1) x 100 Angka pertumbuhan positif menunjukkan kenaikan nilai pendapatan (Rp) dari tahun sebelumnya.	%	-49,48	407,8	4,43	0,72	0,71	0,71	0,7	0,7	Bakeuda (OPD Utama); Dinas Kesehatan; Dinas PU; Dishub; LH; Kominfo; Budpar; Peternakan; Perdagri; Setda (OPD Pendukung)
Misi 6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup												
Tujuan 6.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(30 % x (Indeks Pencemaran Air))+ (30 % (Indeks Pencemaran Udara)) + (40 % x (Indeks Tutupan Lahan))	Indeks	87,82	78,7	78,85	79	79,15	79,3	79,45	79,45	
Sasaran 6.1.1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air	Indeks	82,5	89,38	89,49	89,59	89,7	89,8	89,91	89,91	Dinas LH
	Indeks Kualitas Udara	Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara	Indeks	91,8	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59	61,59	Dinas LH
	Indeks Tutupan Lahan	Hasil Perhitungan Indeks Tutupan Lahan	Indeks	88,83	89,16	89,48	89,81	90,14	90,47	90,8	90,8	Dinas LH dan Dinas Perkim

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
Sasaran 6.1.2. Terciptanya Kebersihan Kota	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani / Volume produksi sampah x 100% (Volume sampah yang ditangani adalah total jumlah penanganan sampah pada tahap pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir akhir sampah)	%	86	100	100	100	100	100	100	100	Dinas LH (OPD Utama), Dinas PUPR (OPD Pendukung)
	Persentase desa dengan sarana dan prasarana sampah (TPS3R) dalam kondisi baik fungsional	(Jumlah desa yang memiliki TPS3R dalam kondisi baik fungsional/Jumlah total desa) x 100%	%	N.A	8,7	23,19	52,17	81,16	95,65	100	100	Dinas LH (OPD Utama), Dinas PUPR; Kecamatan & Desa/Kel (OPD Pendukung)
Sasaran 6.1.3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Hasil penilaian Indeks ketahanan daerah (Berdasarkan Juknis BPBD Pusat, meliputi 71 Indikator)	Indeks	0.53 (sedang)	0.55 (sedang)	0.56 (sedang)	0.57 (sedang)	0.58 (sedang)	0.59 (sedang)	0.6 (sedang)	0.6 (sedang)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial
	Persentase luas kawasan bebas genangan banjir	(Luas kawasan bebas banjir / Luas wilayah Kota Sungai Penuh) x 100%	%	81,42	82,5	84,5	87,5	92	95	97	97	Dinas PUPR
	Tingkat waktu tanggap (response time) maksimal	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran. Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapkan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	menit	14	14	14	13	13	12	12	12	Dinas Damkar
	Persentase desa dengan drainase dalam kondisi baik fungsional	(Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik fungsional / Panjang total drainase lingkungan) x 100%	%	N.A	75,73	77,23	78,73	80,23	81,73	83,23	83,23	Dinas PUPR (OPD Utama); Kecamatan & Desa/Kel (OPD Pendukung)

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Formula/Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
Sasaran 6.1.4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang wilayah	%	76,18	78,22	80,16	82,06	84,12	86,02	88,32	88,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban												
Tujuan 7.1. Mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh	Angka konflik sosial, pelanggaran perda dan Trantibum	Jumlah akumulatif konflik sosial, pelanggaran perda dan trantibum dalam 1 tahun	konflik dan pelanggaran	3	0	0	0	0	0	0	0	
Sasaran 7.1.1. Terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif	Angka konflik sosial	Jumlah konflik sosial dalam 1 tahun	Jumlah	N.A	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran 7.1.2. Terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Utama); Kecamatan
	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	(Jumlah Perda/Perkadaya yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	%	80	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Utama); Kecamatan

* Apabila terjadi perubahan nomenklatur SKPD, maka penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

BAB VI

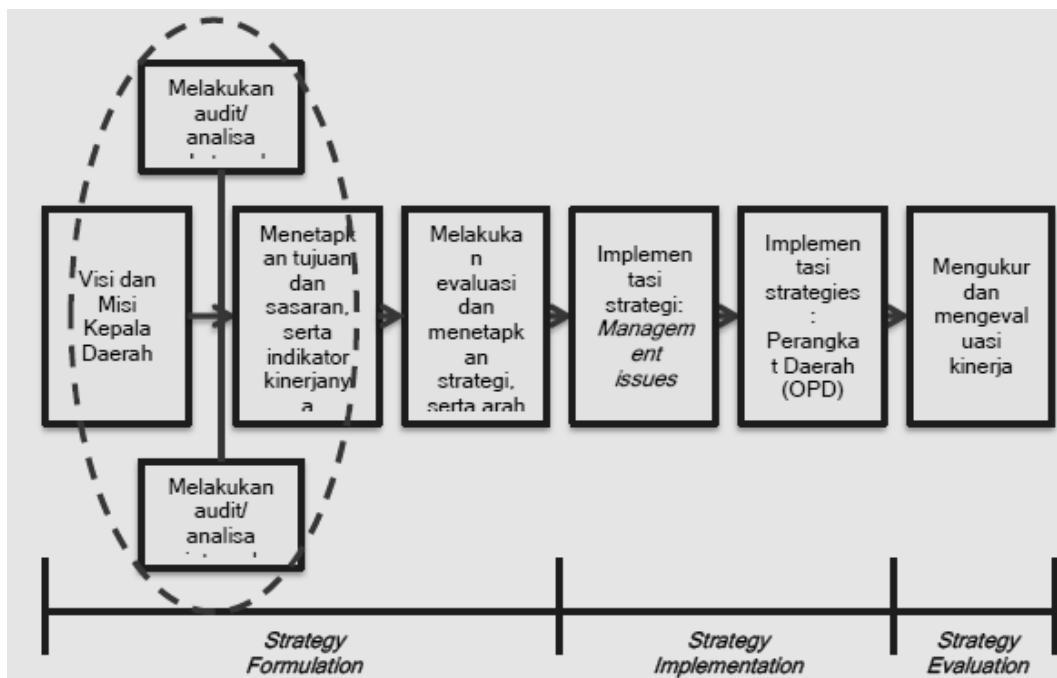
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Sungai Penuh yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan wujud pelaksanaan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Sungai Penuh yang dibuat ini mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis (analisa internal dan eksternal) yang ada di Kota Sungai Penuh, dan berpedoman kepada prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Sungai Penuh. Dari proses tersebut diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih dan selaras.

Dari gambar di bawah ini, terlihat bahwa perumusan strategi dibuat berdasarkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindakan. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.



Gambar VI.1
Penerapan Model Manajemen Strategis yang Komprehensif dalam
Merumuskan RPJMD Kota Sungai Penuh

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama, dan budaya

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal terhadap pencapaian misi Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama, dan budaya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI.1
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi I

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama, dan budaya		
<i>Strengths</i>	Indeks Pendidikan lebih tinggi dari Provinsi Jambi dan Nasional	
	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai (SD, SMP, SMA, & Perguruan Tinggi)	
	Pengembangan pendidikan karakter dan berbasis muatan lokal belum optimal	
	Indeks Kesehatan lebih tinggi dari Provinsi Jambi dan Nasional	
<i>Weaknesses</i>	Indeks Daya Beli lebih rendah dibandingkan Nasional	
	IDG lebih rendah meskipun IPG tinggi	

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
	Rasio KDRT masih tinggi (0,262%)
Opportunities	Tren pengembangan dan minat pendidikan berbasis agama semakin meningkat
	Kelembagaan adat dalam kehidupan masyarakat masih tinggi
Threats	Persaingan di pasar kerja nasional/internasional tinggi
	Migrasi penduduk ke Kota Sungai Penuh dalam eksplorasi peluang kerja
	Tingginya pengaruh keterbukaan informasi terhadap penurunan nilai-nilai agama dan budaya, serta kearifan local
	Melemahnya nilai sosial, adat, dan budaya, serta kearifan lokal

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal terhadap pencapaian misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI.2
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi II

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	
Strengths	Tren Nilai SAKIP meningkat
	Tren Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat (92,6)
	Mayoritas ASN berpendidikan S1 ke atas (73%)
	Penambahan aset dari Kabupaten Kerinci
Weaknesses	Indeks Reformasi Birokrasi masih rendah (40,54/100) dengan komponen kinerja organisasi yang rendah (4,43/10)
	Kurangnya ASN fungsional tertentu
	Level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP masih sedang
	Proporsi ASN pelaksana (Gol II) sangat rendah
	Perilaku ASN yang kurang proaktif membawa perubahan
	Integrasi lintas SKPD masih rendah
	Transparansi mutasi/promosi jabatan masih rendah
	Belum optimalnya penegakan Perda
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan
	Penataan aset belum optimal
	Indeks SPBR masih rendah
	Indeks Profesionalitas ASN masih rendah
Opportunities	Komponen anggaran berbasis kinerja (SAKIP) masih stagnan
	Kebijakan Nasional untuk pemangkasan struktur birokrasi semakin mendesak

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
	Penghargaan pemerintah secara Nasional kepada kab/kota yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
Threats	Politisasi ASN

3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal terhadap pencapaian misi Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI.3
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi III

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah	
<i>Strengths</i>	Ketersediaan jasa pariwisata di pusat kota
	Pertumbuhan sektor pertanian tetap positif dalam situasi pandemi
	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar relatif tinggi
<i>Weaknesses</i>	Layanan perizinan usaha belum optimal
	Pemasaran produk asli daerah belum optimal
	Pemasaran destinasi wisata belum optimal
	Daya saing produk asli daerah masih rendah
	Pertumbuhan ekonomi cenderung menurun sejak 2016
	Tingkat kemiskinan meningkat
	Gini rasio meningkat
	Pembinaan Koperasi dan UMKM belum optimal
	Pemberdayaan UMKM belum optimal
	Dampak dan manfaat pembangunan terhadap perekonomian belum optimal
	Penciptaan lapangan kerja masih rendah
	Pemanfaatan teknologi pertanian masih rendah
	Optimasi lahan pertanian belum optimal
	Jumlah produk pertanian yang memenuhi standar kualitas produksi masih rendah
	Pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan belum optimal
	IKM yang memenuhi standar kelayakan produksi masih rendah
	Kerjasama bidang penanaman modal belum optimal
<i>Opportunities</i>	Pengelolaan sarana dan prasarana pasar belum optimal
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi (5,56%)
	Penyaluran bantuan sosial kepada PMKS belum optimal (64,12%)

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
	Posisi strategis di antara Kerinci hilir dan mudik, Muko-Muko, Painan, dan Bangko
Threats	Produk impor (online) semakin meningkat
	Ekspansi produk dari transaksi daring meningkat

4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal terhadap pencapaian misi Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI.4
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi IV

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman	
Strengths	Rasio rumah layak huni telah mencapai 90,92%
	Kondisi jalan dalam kondisi baik sudah mencapai 70,69%
Weaknesses	Kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana prasarana permukiman masih rendah
	Penataan bongkar muat belum optimal
	Penataan PKL belum optimal
	Standar kualitas pembangunan infrastruktur belum merata
	Pembangunan infrastruktur belum terintegrasi
	Luas irigasi dalam kondisi baik masih 50%
	Rekayasa lalu lintas belum optimal
	Sarana prasarana parkir publik belum optimal
	Masih ada lingkungan permukiman kumuh
Opportunities	Minat kunjungan semakin meningkat
Threats	Ekspansi jasa konstruksi dari luar kota
	Sumber air baku rendah
	Kepadatan kendaraan bermotor semakin tinggi
	Kesadaran tertib lalu lintas masih rendah

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal terhadap pencapaian misi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI.5
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi V

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
<i>Strengths</i>	
<i>Weaknesses</i>	Belum optimal identifikasi sumber PAD
	Tata kelola PAD masih rendah (pendataan, pengendalian, dan kebijakan)
	Pemanfaatan aset daerah belum optimal
	Pertumbuhan PAD cenderung menurun
<i>Opportunities</i>	Penambahan aset dari Kab. Kerinci
	Sektor jasa semakin meningkat
	Kerja sama dengan swasta masih terbuka
<i>Threats</i>	Kesadaran wajib pajak masih rendah
	Kebocoran PAD

6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal terhadap pencapaian misi Menciptakan pelestarian lingkungan hidup, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI.6
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi VI

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup	
<i>Strengths</i>	Aparatur penanggulangan bencana sudah memadai
<i>Weaknesses</i>	Konservasi lingkungan masih rendah
	Pengembangan RTH belum optimal
	Pengelolaan persampahan belum optimal
	Kebijakan (<i>reward & punishment</i>) pengelolaan sampah masih lemah
	Sarana prasarana persampahan belum memadai
	Penataan jaringan drainase belum optimal
	Kesesuaian dengan RTRW/RDTR belum optimal
	Integrasi pembangunan infrastruktur belum optimal
	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai
<i>Opportunities</i>	Peran serta pihak swasta masih terbuka
	Kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana cukup tinggi
	Kerjasama dengan kab/kota tetangga masih terbuka (DAS, TPA regional, naturalisasi/normalisasi sungai, dll)
<i>Threats</i>	Limpahan air sungai dari kab tetangga semakin tinggi
	Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah masih rendah
	Luas genangan banjir semakin tinggi
	Limpasan air hujan semakin tinggi

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
	Kerawanan bencana cukup tinggi
	Kepadatan permukiman di pusat kota rentan terhadap kebakaran

7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal terhadap pencapaian misi Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel VI.7
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Misi VII**

Misi	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban	
<i>Strengths</i>	Pencapaian SPM trantib relatif tinggi (95,49%)
<i>Weaknesses</i>	Penegakan Perda (<i>reward & punishment</i>) belum optimal Kesadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda belum optimal Masih adanya pelanggaran Perda trantibum Tingkat kinerja trantibum per kecamatan dan desa/kel belum optimal
<i>Opportunities</i>	Angka konflik sosial relatif rendah Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga trantib masih bisa ditingkatkan
<i>Threats</i>	Ancaman bahaya narkoba yang masuk ke Sungai Penuh

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan konsistensi misi, tujuan dan sasaran yang melahirkan strategi.

**Tabel VI.8
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kota sungai Penuh 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya			
Meningkatkan sumber daya manusia yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Berakhhlak Mulia	Meningkatnya Kualitas SDM yang kompeten dan produktif	1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan
		2	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
		3	Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kecamatan
		4	Meningkatkan budaya baca
		5	Meningkatkan kesetaraan dan pengarusutamaan gender

Tujuan	Sasaran	Strategi	
		6	Meningkatkan pembinaan olahraga di satuan pendidikan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	7	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan
		8	Pemerataan layanan kesehatan sampai ke desa/kelurahan
		9	Meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedic
		10	Optimalisasi keikutsertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		11	Meningkatkan budaya hidup sehat
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	12	Menjaga daya beli dan perlindungan social
		13	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perekonomian
		14	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam perekonomian keluarga
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	15	Meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter sejak dini
		16	Meningkatkan penerapan pendidikan muatan local
	Meningkatnya pelestarian budaya dalam masyarakat	17	Mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya local
		18	Memperkuat kelembagaan seni dan budaya
		19	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat dari tingkat Desa
	Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam	20	Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
		21	Meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan
		22	Memperkuat kelembagaan dan pembinaan pemuda dalam pembangunan
Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN			
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional,	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah	1	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset Daerah
		2	Meningkatkan transparansi informasi keuangan dan aset daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	
akuntabel, transparan dan mengayomi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	3	Memperkuat sistem nilai budaya kerja dan integritas birokrasi melalui penerapan manajemen kinerja
		4	Meningkatkan transparansi informasi program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	5	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan dan integrasi Teknologi Informasi	6	Mengembangkan Big Data Informasi yang terintegrasi (satu data)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7	Mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik
	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	8	Meningkatkan kualitas manajemen ASN dan pemerataan yang proporsional sesuai dengan kompetensinya
Misi 3 : Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah			
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan Kinerja sektor perdagangan	1	Meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan
	Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	2	Meningkatkan destinasi dan daya tarik pariwisata
		3	Meningkatkan kelembagaan/komunitas pelaku usaha ekonomi kreatif
	Meningkatnya realisasi investasi Kota Sungai Penuh	4	Meningkatkan Daya Tarik Investasi
	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan	5	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan
Meningkatkan perekonomian Kota Sungai Penuh yang merata dan inklusif	Meningkatnya sentra kegiatan ekonomi masyarakat	6	Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat
	Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Masyarakat	7	Meningkatkan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro
	Menurunnya jumlah penduduk miskin	8	Menurunkan angka kemiskinan melalui penanggulangan kemiskinan
	Menurunnya Angka Pengangguran	9	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	
Misi 4 : Pemerataan dalam meningkatkan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman			
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi perkotaan	1	Meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur jalan, irigasi, dan transportasi perkotaan
	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur permukiman	2	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih dan air limbah
		3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman
	Meningkatnya perumahan dan permukiman yang nyaman	4	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman
Misi 5 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan PAD yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	1	Meningkatkan tata kelola pendapatan asli daerah (PAD)
Misi 6 : Menciptakan pelestarian lingkungan hidup			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	Meningkatnya kualitas air sungai, udara dan tutupan lahan	1	Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan
		2	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Terciptanya Kebersihan Kota	3	Meningkatkan penanganan persampahan
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya Penanggulangan Bencana	4	Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah
		5	Menurunkan luas genangan banjir
	Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	6	Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang
Misi 7 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban			
Mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh	Terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif	1	Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat
	Terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan		

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai

Penuh Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif dan spasial. Dalam sub bab ini, disajikan deskripsi pendekatan spasial yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh. Dalam konteks mewujudkan keselarasan menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026, maka strategi dan arah kebijakan kewilayahan ditujukan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan. Adapun rumusan tujuan penataan ruang Kota Sungai Penuh yaitu: Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk “ Mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa serta pariwisata berskala regional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan ”.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang tersebut, maka kebijakan penataan ruangnya adalah:

1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan Berskala regional;
2. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala Lokal dan regional;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana Prasarana umum skala lokal dan regional;
4. Pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau;
5. Pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian Lingkungan hidup;
6. Perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien;
7. Pengembangan kawasan strategis perspektif ekonomi; sosial budaya; serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mencapai kebijakan penataan ruang tersebut, maka strategi-strategi pengembangan Kota Sungai Penuh yang akan dilakukan meliputi:

1. Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional meliputi :
 - a. Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi darat ke bandar udara;
 - c. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa berskala regional;
 - d. Mengembangkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara regional; dan
 - e. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
2. Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional meliputi :
 - a. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;

- b. Mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) dan jalan lingkar luar (*outer ring road*);
 - c. Meningkatkan pelayanan moda transportasi untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota secara terintegrasi; dan
 - d. Mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan umum dalam kota.
3. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional meliputi :
- a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - b. Mengembangkan sistem prasarana energi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;
 - d. Mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - e. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan;
 - f. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih;
 - g. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - h. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
4. Strategi pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau meliputi :
- a. Mengembangkan kerjasama antar wilayah perbatasan dalam Mempertahankan fungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
 - d. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air;
 - e. Mengelola dan melestarikan sumberdaya hutan melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar;
 - f. Mengamankan benda cagar budaya dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah;
 - g. Menetapkan daerah evakuasi bencana;
 - h. Mewujudkan jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan wilayah yang berbatasan.
 - i. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - j. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi; dan
 - k. Meningkatkan dan menyediakan ruang terbuka hijau 30% secara proporsional di seluruh wilayah kota.

5. Strategi pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup meliputi :
 - a. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. Mengendalikan kegiatan pertanian pada kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan;
 - c. Mengembangkan dan memanfaatkan kawasan hutan produksi pola partisipasi masyarakat dengan pertanian konservasi; dan
 - d. Mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan.
6. Strategi Perwujudan pengembangan kegiatan budidaya yang optimal dan efisien meliputi :
 - a. Menetapkan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Mendorong pengembangan kawasan budidaya secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi;
 - c. Mengembangkan wilayah tanaman hortikultura sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahan secara optimal; dan
 - d. Memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budidaya.
7. Strategi Kebijakan penetapan kawasan strategis kota dari perspektif ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
 - a. Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekowisata, perdagangan dan jasa skala kota dan industri kecil;
 - b. Menetapkan kawasan pendidikan dan pelatihan serta kawasan kebudayaan Islam; dan
 - c. Menetapkan kawasan strategis berupa Taman Nasional Kerinci Seblat dan kawasan resapan air.
8. Strategi Kebijakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi :
 - a. Mendukung menetapkan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Arah kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh ditetapkan berdasarkan isu strategis, pembangunan kota, janji politik, serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting. Hasil perumusan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI.9
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota sungai Penuh 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan											
			Tahun I (2021)	Tahun II (2022)	Tahun III (2023)	Tahun IV (2024)	Tahun V (2025)	Tahun VI (2026)						
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya														
Meningkatkan sumber daya manusia yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Berakhhlak Mulia	Meningkatnya Kualitas SDM yang kompeten dan produktif	1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan	Pemenuhan dan peningkatan kualitas standar pelayanan pendidikan minimal										
		2		Pemberian bantuan beasiswa kepada masyarakat miskin/kurang mampu										
		3	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas/mutu pendidikan karakter										
		4	Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kecamatan	Peningkatan kualitas dan penyelenggaraan pendidikan informal										
		5	Meningkatkan budaya baca	Peningkatan kapasitas perpustakaan daerah dan sekolah										
		6	Meningkatkan kesetaraan dan pengarusutamaan gender	Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas										
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		7	Meningkatkan pembinaan olahraga di satuan pendidikan	Penguatan wadah dan apresiasi sesuai minat dan bakat peserta didik dalam olahraga										
		8	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Pemenuhan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan minimal kesehatan sesuai standarnya										
		9	Pemerataan layanan kesehatan sampai ke desa/kelurahan	Pemenuhan dan peningkatan kualitas standar pelayanan kesehatan minimal										
		10	Meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis	Peningkatan mutu tenaga kesehatan										
		11	Optimalisasi keikutsertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin/kurang mampu										
Meningkatkan budaya hidup sehat														
Optimalisasi penanganan Covid-19 dan penyakit menular lainnya secara komprehensif dan terintegrasi														

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Tahun I (2021)	Tahun II (2022)	Tahun III (2023)	Tahun IV (2024)	Tahun V (2025)	Tahun VI (2026)	
			Peningkatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat						
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	12	Menjaga daya beli dan perlindungan sosial	Pengendalian harga komoditas pangan dan non-pangan						
	13	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perekonomian	Peningkatan pemberdayaan masyarakat secara inklusif dalam perekonomian						
	14	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam perekonomian keluarga							
Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	15	Meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter sejak dini	Peningkatan peran keluarga dalam pendidikan karakter						
	16	Meningkatkan penerapan pendidikan muatan lokal		Penerapan kurikulum muatan lokal	Penguatan akhlak dan kearifan lokal	Peningkatan peran tokoh agama, adat, dan keluarga	Satu wilayah, satu rumah tahlidz		
Meningkatnya pelestarian budaya dalam masyarakat	17	Mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya lokal		Penyelenggaraan even/festival seni dan budaya daerah, serta pemberdayaan komunitas					
	18	Memperkuat kelembagaan seni dan budaya		Peningkatan peran lembaga adat dalam pola pewarisan, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal					
	19	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat dari tingkat Desa							
Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam	20	Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan		Peningkatan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan					
	21	Meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan		Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan					
	22	Memperkuat kelembagaan dan pembinaan pemuda dalam pembangunan							

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan					
			Tahun I (2021)	Tahun II (2022)	Tahun III (2023)	Tahun IV (2024)	Tahun V (2025)	Tahun VI (2026)
Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN								
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah	1	Meningkatkan pengeloaan keuangan dan aset Daerah	Penerapan SOP dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah				
		2	Meningkatkan transparansi informasi keuangan dan aset daerah	Optimalisasi penyerahan aset dari Kab. Kerinci				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	3	Memperkuat sistem nilai budaya kerja dan integritas birokrasi melalui penerapan manajemen kinerja	Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengedalian program pembangunan daerah yang terintegrasi				
		4	Meningkatkan transparansi informasi program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah	Peningkatan kualitas review dokumen perencanaan dan pelaporan				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	5	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemenuhan dan penerapan standar pelayanan minimal				
				Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan				
				Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan				
	Meningkatnya pemanfaatan dan integrasi Teknologi Informasi	6	Mengembangkan Big Data Informasi yang terintegrasi (satu data)	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses birokrasi				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7	Mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas prosedur operasional berstandar	Satu desa/kelurahan, satu Wi-Fi			
	Peningkatan layanan satu atap (one stop service)							

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan					
			Tahun I (2021)	Tahun II (2022)	Tahun III (2023)	Tahun IV (2024)	Tahun V (2025)	Tahun VI (2026)
	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	8 Meningkatkan kualitas manajemen ASN dan pemerataan yang proporsional sesuai dengan kompetensinya		Penerapan sistem merit dan manajemen ASN yang profesional dan transparan				
Misi 3 : Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah								
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan Kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan		Pengembangan pasar tradisional dan modern				
	Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	2 Meningkatkan destinasi dan daya tarik pariwisata		Peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung parawisata				
	Meningkatnya realisasi investasi Kota Sungai Penuh	3 Meningkatkan kelembagaan/komunitas pelaku usaha ekonomi kreatif		Pemberdayaan pelaku usaha ekonomi kreatif/Corner-M				
	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan	4 Meningkatkan Daya Tarik Investasi		Peningkatan kualitas layanan perizinan usaha				
Meningkatkan perekonomian Kota Sungai Penuh yang	Meningkatnya sentra kegiatan ekonomi masyarakat	5 Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan		Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah				
		6 Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat		Pembinaan dan pengembangan usaha sektor formal dan informal		Pembangunan sentra ekonomi terpadu sesuai dengan potensi wilayah (one village, one product)		
				Optimalisasi usaha ekonomi masyarakat				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan								
			Tahun I (2021)	Tahun II (2022)	Tahun III (2023)	Tahun IV (2024)	Tahun V (2025)	Tahun VI (2026)			
merata dan inklusif	Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Masyarakat	7	Meningkatkan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro	Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM Pembedayaan koperasi dan UMKM							
	Menurunnya jumlah penduduk miskin			Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial/pelayanan dasar Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi Pengentasan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan							
	Menurunnya Angka Pengangguran	9	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja	Perencanaan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja							
Misi 4 : Pemerataan dalam meningkatkan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman											
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi perkotaan	1	Meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur jalan, irigasi, dan transportasi perkotaan	Pemenuhan standard kualitas infrastruktur perkotaan		Peningkatan/pengembangan jalan lingkar					
	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur permukiman	2	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih dan air limbah	Pemenuhan standard kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman							
		3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman	Penurunan lingkungan permukiman kumuh							
	Meningkatnya perumahan dan permukiman yang nyaman	4	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni							

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan					
			Tahun I (2021)	Tahun II (2022)	Tahun III (2023)	Tahun IV (2024)	Tahun V (2025)	Tahun VI (2026)
Misi 5 : Meningkatkan PAD								
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan PAD yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	1 Meningkatkan tata kelola pendapatan asli daerah (PAD)	Penguatan kebijakan pengelolaan PAD				Id Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	
Misi 6 : Menciptakan pelestarian lingkungan hidup								
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	1 Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan	Penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup				Car free day	
	Terciptanya Kebersihan Kota	2 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengembangan, penataan, dan optimalisasi RTH dan taman kota					
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya Penanggulangan Bencana	3 Meningkatkan penanganan persampahan	Penguatan kebijakan dan optimalisasi penerapan SOP dalam penanganan persampahan					
							Pengembangan bank sampah dan penerapan 3R, transfer depo/TPST, dan kerja sama TPA regional	
	Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	4 Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah	Optimalisasi penerapan SOP dalam penanggulangan bencana					
							Optimalisasi dan penataan sistem jaringan drainase	
		5 Menurunkan luas genangan banjir	Penguatan kerja sama dalam pengendalian banjir					
							Pembuatan embung dalam pengendalian banjir	
		6 Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang	Penguatan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan					
			Tahun I (2021)	Tahun II (2022)	Tahun III (2023)	Tahun IV (2024)	Tahun V (2025)	Tahun VI (2026)
Misi 7 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban								
Mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh	Terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif	1 Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat			Penguatan kebijakan trantibum (reward & punishment)			
	Terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan				Peningkatan swaraksa masyarakat dan infrastruktur pengawasan keamanan			

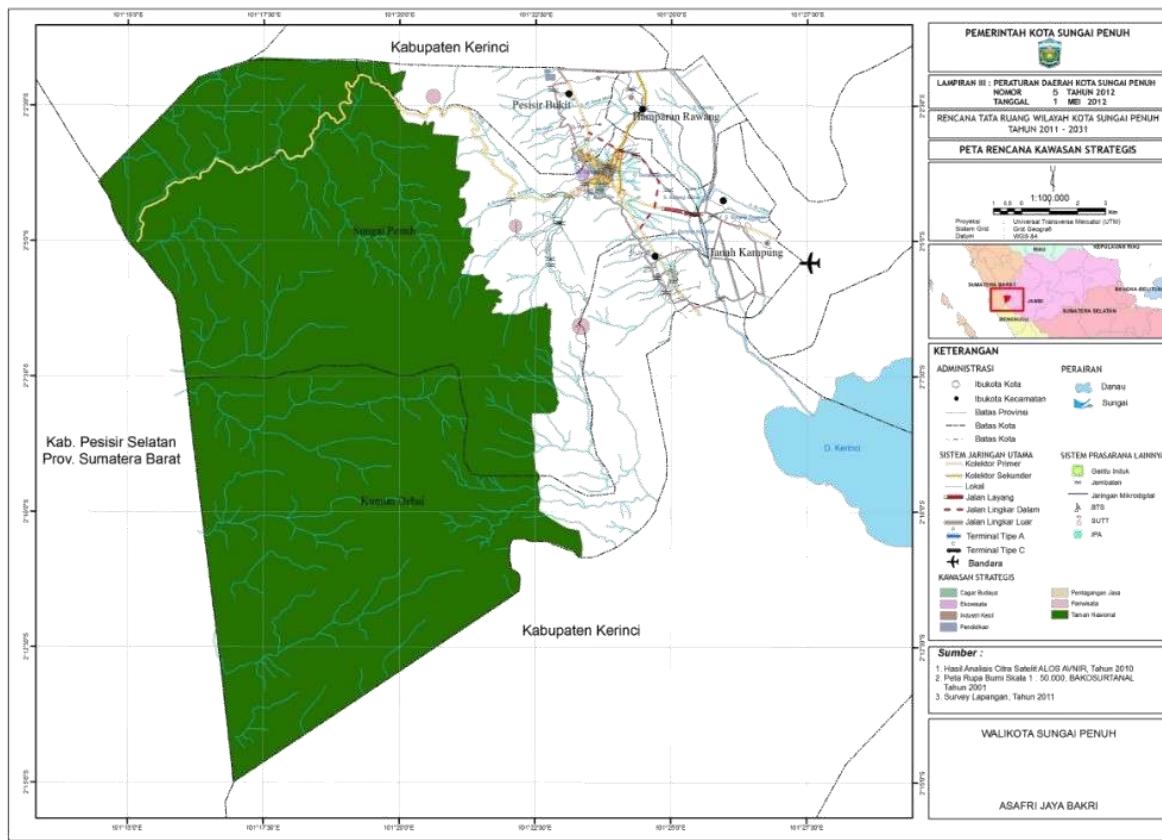
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh, maka tema pembangunan Kota Sungai Penuh untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel VI.10
Tema Pembangunan Kota Sungai Penuh

2022	Pemulihan ekonomi dan ketahanan bencana yang didukung oleh infrastruktur yang berkualitas
2023	Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan perekonomian kota serta tata kelola pemerintahan
2024	Pemantapan pelayanan dasar, infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan perekonomian kota serta tata kelola pemerintahan
2025	Pemantapan kualitas pelayanan dasar, infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan perekonomian kota serta tata kelola pemerintahan
2026	Pemantapan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota

6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan

Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031, pengembangan kawasan strategis kota meliputi: a) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan c) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031, 2021

Gambar VI.2
Kawasan Strategis Kota Sungai Penuh

6.3.1 Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dengan kriteria diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
- Kawasan yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan
- Kriteria lainnya pada aspek ekonomi yang dapat ditentukan oleh Kota sesuai dengan karakteristik dan kepentingan pembangunan kota.

Berdasarkan kriteria di atas maka ditetapkan Kawasan strategis dari perspektif ekonomi mencakup :

1. Kawasan Ekowisata

Kawasan wisata Taman Bunga Puti Senang, Bukit Kayangan, Bukit Sentiong, dan Bukit Tapan serta kawasan wisata lainnya dapat dijadikan kawasan strategis karena memiliki keunggulan sektoral yang dapat dikembangkan. Pada kawasan-kawasan ini potensi ekonomi yang dapat diarahkan adalah pariwisata berbasis lingkungan dan pendidikan. Setiap kawasan strategis ekowisata ini memiliki keunggulan masing-masing yakni:

- a. Keberadaan Kawasan Bukit Sentiong yang terletak di pusat Kota Sungai Penuh dilalui oleh jaringan jalan kolektor menjadikan kawasan ini dapat menjadi kawasan pariwisata andalan Kota Sungai Penuh dengan tetap berbasis lingkungan. Di samping itu adanya pemetaan kondisi yang cukup komprehensif merupakan pondasi dalam pengembangan masterplan kawasan ini.
 - b. Kawasan Taman Bunga Puti Senang telah didukung adanya pengembangan masterplan, infrastruktur, dan potensi Bunga-bunga di dalamnya. Dari sisi aksesibilitas lokasi ini cukup mudah dijangkau dari penjuru kota dan mampu memberikan suasana yang sangat berbeda dibandingkan di pusat kota.
 - c. Kawasan strategis Bukit Kayangan berlokasi cukup strategis karena memiliki akses dekat dengan kota yang merupakan tempat memandang panorama alam, dimana kita dapat memandang dari ketinggian dengan melihat Kota Sungai Penuh, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, hamparan sawah yang membentang dan desa-desa tempat tinggal penduduk tertata di sepanjang pinggiran bukit hijau. Di Taman Bukit Khayangan kita dapat pula mendengar suara -suara siamang dan kicauan burung yang saling bersahutan pada pagi hari dan sore hari. Pengembangan kawasan memerlukan suatu revitalisasi dengan adanya suatu landasan Masterplan pengembangan.
 - d. Kawasan Bukit Tapan memiliki Letak strategis karena terdapat perbukitan dan pepohonan yang rindang, namun demikian kawasan ini memerlukan pengembangan yang lebih terencana secara komprehensif dan sebaiknya berada di dalam suatu kelembagaan pengelolaan yang sama dengan kawasan strategis lainnya
2. Kawasan Strategis Industri Kecil ; Dikembangkan tersebar sesuai dengan kondisi dan potensi industri kerajinan yang telah berkembang di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai. Pengembangan kawasan Industri kecil ini diarahkan untuk dapat membentuk sentra industri yang diarahkan untuk dikembangkan di Kecamatan Hamparan Rawang, berupa peningkatan aksesibilitas terhadap bahan baku kerajinan (rotan), kemudahan pemasaran dengan mengembangkan outlet pemasaran yang

dipadukan dengan jasa wisata berupa hotel dan restoran yang terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.

3. Kawasan Pusat Perdagangan : Berada di Kecamatan Sungai Penuh yaitu Kinca Plaza dan Pasar Beringin di Kelurahan Pasar Sungai Penuh dan Pasar Tanjung Bajure di Desa Pasar Baru yang dipertahankan untuk menjadi pusat pelayanan skala kota. Kawasan perdagangan dan jasa ini didorong untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa skala wilayah dengan didukung oleh sistem pergerakan lingkar dalam kota, sehingga dapat dihindari terjadinya penumpukan fungsi dan pergerakan pada satu pusat kawasan saja. Kawasan ini cukup potensial untuk berkembang mengingat posisi kawasan sekarang termasuk kawasan yang cepat tumbuh dan berada pada simpul pergerakan primer, kawasan ini juga diarahkan untuk tumbuh secara terbatas dengan kepadatan sedang sehingga dapat menghindari terjadinya lompatan pertumbuhan kawasan yang tidak terarah dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan budaya pertanian di sekitarnya. Arahan pengembangan kawasan ini diawali dengan penyusunan suatu studi rencana rinci tata ruang dengan konsep rancang kota yang dapat memadukan antara konsep tradisional dan modern, keberadaan fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dengan jaringan prasarana pejalan kaki, pengaturan gedung parkir, dan penyediaan ruang terbuka hijau.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari perspektif ekonomi meliputi :

- a. Penataan ruang kawasan ekowisata, industri kecil, perdagangan dan jasa.
- b. Mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan ekowisata, industri kecil, perdagangan dan jasa skala kota dan skala wilayah.

6.3.2 Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial dan Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya Kota Sungai Penuh meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan sosial budaya kota dengan kriteria sebagai berikut:

- Merupakan tempat pendidikan dan pelatihan skala regional
- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya setempat.
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri kota.
- Merupakan aset kota yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kota.
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya mencakup; tempat pendidikan dan pelatihan skala kota dan regional, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat/budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi, tempat perlindungan peninggalan budaya, tempat yang memberikan perlindungan

terhadap keanekaragaman budaya, tempat yang memiliki potensi konflik sosial, hasil cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri. Dalam hal ini kawasan strategis yang dipromosikan dengan perspektif sosial dan budaya adalah kawasan pendidikan tinggi dan pusat pelatihan di Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Sungai Penuh serta Pelestarian Kawasan Kebudayaan Islam, berupa pelestarian kawasan Masjid Agung Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh dan Pusat pengkajian Islam di Kecamatan Hamparan Rawang.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari perspektif sosial budaya meliputi :

- a. Menata bangunan dan lingkungan.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan.
- c. Mempertahankan nilai sejarah kawasan.
- d. Mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan pendidikan, pelatihan dan kawasan wisata.

6.3.3 Kawasan Strategis dari Perspektif Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi tempat perlindungan keanekaragaman hayati; kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan hampir punah; kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun menimbulkan kerugian; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup; kawasan rawan bencana; dan/atau kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Adapun kriteria Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kota Sungai Penuh meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup adalah:

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Merupakan aset kabupaten berupa kawasan lindung kabupaten yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian bagi Kota;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro wilayah kota;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- Rawan bencana alam skala kota; atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan di Kota Sungai Penuh meliputi kawasan lindung yaitu:

1. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan luas wilayah 23.177,6 ha (59,20 % dari luas wilayah Kota Sungai Penuh). Keberadaan TNKS ini bukan menjadi suatu kendala dalam pengembangan, namun perlu dicari kesesuaian atau alternatif-alternatif baru yang dalam mengembangkan wilayah Kota Sungai Penuh dengan tetap berkomitmen terhadap pelestarian TNKS. Dalam hal ini pelestarian TNKS tersebut perlu dilihat sebagai peluang pengembangan, yaitu dengan menerapkan konsep pembangunan dan pelestarian secara terpadu, khususnya pengelolaan kawasan lindung (TNKS) dan pengembangan kawasan Daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara arif dan terpadu.
2. Kawasan resapan air dengan luas wilayah seluas 195,12 ha. Kawasan resapan air di sebagian wilayah Kota Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu dengan mempertahankan, melindungi dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar kawasan tersebut.

6.4 Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 menjelaskan KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS ini disusun sebelum dirumuskannya RPJMD dengan fokus kajian pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJMD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026, skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menurut kategori urusan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Tabel VI.11
Arah Kebijakan Bidang Pendidikan Kategori SPM

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkatkan kualitas pendidik	Peningkatan Kualifikasi pendidikan Guru SD/MI/sederajat
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatkan kualitas pendidik	Peningkatan Kualifikasi pendidikan Guru SMP/MTs/sederajat
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Meningkatkan kualitas pendidik	Peningkatan Kualifikasi pendidikan Guru SMA/MA/sederajat
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait dalam meningkatkan pendidikan layanan khusus/ bencana sosial	Peningkatan proses belajar mengajar pelayanan khusus
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Mengembangkan kapasitas dan kualitaskelembagaan serta partisipasi publik dalam kemampuan membaca dan matematika	Pengembangan kelompok belajardan perpustakaan lokal.(membaca dan matematika). Peningkatan partisipasi siswa SMA dan Mahasiswa dalam mendukung peningkatan kemampuan membaca.
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkatkan kuantitas sarpras sekolah	Peningkatan jumlah ruang kelas dan unit sekolah baru
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatkan kuantitas sarpras sekolah	Peningkatan jumlah ruang kelas dan unit sekolah baru
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkatkan infrastruktur pendidikan, kualitas guru, dan beasiswa untuk siswa SD/SMP/SMA sederajat	Peningkatan infrastruktur sekolah Peningkatan kualifikasi guru S1/DIV Peningkatan beasiswa dari sumber pemerintah dan non pemerintah
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkatkan akses listrik dan internet ke seluruh sekolah Meningkatkan sarana parasarasekolah.	Peningkatan akses listrik dan internet ke seluruh sekolah Peningkatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan
		Meningkatkan fasilitas usaha Kesehatan sekolah.	Peningkatan usaha Kesehatan sekolah dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Seumber : KLHS RPJMD 2021-2026

2. Bidang Kesehatan

Tabel VI.12
Arah Kebijakan Bidang Kesehatan Kategori SPM

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.4.1.(a)	Percentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta SDM Sesuai Standar	Pemenuhan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
			Pemenuhan Kompetensi tenaga Kesehatan
1.4.1.(b)	Percentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatkan cakupan Imunisasi dan Peningkatan SDM Imunisasi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
			Pemenuhan Kompetensi tenaga Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keluarga berencana	Peningkatan komunikasi keluarga berencana berbasis mesjid dan organisasi masyarakat.
1.4.1.(d)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Mengembangkan perlindungan sumber air dan jaringan air minum	Revitalisasi peran tokoh adat dalam perlindungan sumber air.
2.2.2.(b)	Percentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor tentang ASI eksklusif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta SDM Sesuai Standar	Pemenuhan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
			Pemenuhan Kompetensi tenaga Kesehatan
3.1.2.(a)	Percentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta SDM Sesuai Standar	Pemenuhan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
			Pemenuhan Kompetensi tenaga Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Memperkuat sistem Informasi TB Terpadu dengan RS Puskesmas, Klinik dan Dokter Mandiri	Peningkatan pencegahan Pengendalian Penyakit menular
3.4.1.(a)	Percentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Meningkatkan aksi multi sektor terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Peningkatan Promosi Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Meningkatkan Skrining dan deteksi dini	Peningkatan pencegahan Pengendalian Penyakit
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta SDM Sesuai Standar	Pemenuhan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatkan intensitas pelayanan KB	Pengembangan sositim informasi dan publikasi informasi KB.

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

Tabel VI.13
Arah Kebijakan Bidang Kesehatan Kategori Non-SPM

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatkan Koordinasi dengan Sektor terkait dalam mempertahankan UHC	Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi	Pemenuhan Gizi Ibu Hamil dan Balita
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi	Pemenuhan Gizi Ibu Hamil dan Balita
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Meningkatkan Skrining dan deteksi dini	Peningkatan pencegahan Pengendalian Penyakit tidak menular
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurunnya Angka Kematian Akibat Bunuh Diri	Peningkatan Iman dan Takwa
			Pengembangan Jasa Konseling
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Meningkatkan sistem informasi dan koordinasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba.	Peningkatan partisipasi publik dalam pengendalian penyalahgunaan narkoba.
			Pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dalam pengendalian penyalahgunaan narkoba
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Mengembangkan kapasitas publik dalam upaya penurunan konsumsi alkohol	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahaya alkohol.
			Pengembangan pola pengawasan konsumsi alkohol .
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta SDM Sesuai Standar	Pemenuhan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
			Pemenuhan Kompetensi tenaga Kesehatan

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
			Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta SDM Sesuai Standar	Pemenuhan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Pemenuhan Kompetensi tenaga Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkatkan aksi multi sektor terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Peningkatan Promosi Kesehatan
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Mengembangkan sistem informasi kependudukan, kesehatan remaja dan pendidikan terintegrasi	Peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel VI.14
Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Kategori SPM

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Mengembangkan perlindungan sumber air dan jaringan air minum	Pengembangan infrastruktur air minum.
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan infrastruktur sanitasi publik	Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam penyediaan sarana sanitasi. Pengembangan regulasi pengadaan sanitasi untuk pemukiman baru.
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatkan sarana dan prasarana serta akses publik terhadap layanan air minum layak	Pengembangan kerjasama berbasis jasa ekosistem dengan masyarakat untuk pelestarian sumber air.
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku .	Optimalisasi penyediaan air baku untuk rumah tangga	Peningkatan kapasitas infrastruktur penyedia air baku
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatkan Tangkapan Air / resapan Air yang ada di hulu agar dapat berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Mengembangkan, meningkatkan infrastruktur sanitasi yang layak utk rumah tangga.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja IPLT	Mengembangkan sistem pengelolaan lumpur tinja	Pengembangan kapasitas SDM pengelola sistem pengolahan lumpur tinja
			Pengembangan dan standarisasi IPLT pada setiap rumah maupun terpadu pada perumahan
			Pengembangan regulasi untuk mendorong penyediaan IPLT terpadu pada kawasan baru
			Pengembangan sistem pencemar membayar (<i>polluter pays</i>)

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

Tabel VI.15
Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Kategori Non-SPM

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Intensifikasi pola hidup sehat dan higienis	Peningatan partisipasi publik menuju desa higienis.
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Mengembangkan public awareness untuk STBM	Peningkatan peran tokoh masyarakat untuk STBM
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Mengembangkan sistem pengelolaan lumpur tinja	Pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sistem pengolahan lumpur tinja
			Pengembangan dan peningkatan sarpras pengolahan limbah tinja
			Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ulang lumpur tinja
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkatkan peluang peran serta masyarakat dalam perencanaan Pembangunan	Diversifikasi pola dan lokasi dialog Publik

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel VI.16
Arah Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat Kategori Non-SPM

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Mengendalikan pengembangan pemukiman berbasis tata ruang	Peningkatan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang.

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat SPM

Tabel VI.17
Arah Kebijakan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kategori SPM

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.5.1(a)	jumlah Lokasi Penguatan pengurangan resiko bencana daerah	Meningkatkan sarana dan prasana tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Peningkatan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana bagi korban bencana
			Peningkatan SDM di kawasan rawan bencana melalui Desa Tangguh Bencana
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Optimalisasi infrastruktur siaga bencana	Peningkatan kapasitas lokal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana .
			Pengembangan partisipasi publik dalam penanggulangan bencana.
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Mengembangkan pola pencegahan bencana yang sistematis dan terencana	Peningkatan kualitas informasi kebencanaan dan pola pencegahan serta penanggulangan bencana
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Meningkatkan kajian kelayakan infrastruktur publik	Peningkatan kapasitas publik dalam perencanaan infra struktur .
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Meningkatkan perencanaan bebas daya dukung dan daya tampung (kerwanan bencana)	Peningkatan ketersediaan informasi spasial rawan bencana.

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

Tabel VI.18
Arah Kebijakan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,
& Perlindungan Masyarakat Kategori Non-SPM

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.5.2 (a)	jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Meningkatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana	Peningkatan ekonomi bagi warga terkena bencana
1.5.3	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Mengembangkan dokumen Strategi Pengurangan Resiko (PRB) tingkat Daerah	Pengembangan dokumen Strategi Pengurangan Resiko (PRB) tingkat Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Mengembangkan bangunan publik tahan gempa, aman banjir berbasis kajian.	Pengembangan kebijakan perizinan pendirian bangunan dan infrastruktur publik untuk menekan kerugian ekonomi
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatkan pengelolaan persampahan	Pengembangan kelembagaan pengelolaan persampahan. Pengembangan regulasi pengelolaan persampahan pada sumber. Peningkatan komunikasi publik tentang pengelolaan persampahan. Pengembangan insentif dan disincentif untuk ketataan pengelolaan persampahan. Peningkatan Pendataan inventarisasi sumber persampahan. Pengembangan infrastruktur / sarana persampahan. Peningkatan Kerja Sama antar Daerah dalam pengelolaan persampahan. Pengembangan kelembagaan pengelolaan persampahan. Pengembangan regulasi pengelolaan persampahan pada sumber. Peningkatan komunikasi publik tentang pengelolaan persampahan. Pengembangan insentif dan disincentif untuk ketataan pengelolaan persampahan. Peningkatan Pendataan inventarisasi sumber persampahan. Pengembangan infrastruktur / sarana persampahan. Peningkatan Kerja Sama antar Daerah dalam pengelolaan persampahan
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatkan swakarsa masyarakat dan infrastruktur pengawasan keamanan	Peningkatan kapasitas kelembagaan keamanan lokal. Peningkatan infra struktur pengendalian kriminalitas

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

6. Bidang Sosial

**Tabel VI.19
Arah Kebijakan Bidang Sosial Kategori SPM**

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.3.1.(c)	Percentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatkan Koordinasi dengan sektor terkait	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas yang miskin
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial
		Mengembangkan upaya peningkatan kapasitas disabilitas	Peningkatan akses disabilitas kepada sumber ekonomi
			Peningkatan pendidikan ketampilan untuk disabilitas
			Pengembangan infra struktur publik yang ramah disabilitas .
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Mengembangkan Sistem Pendampingan Sosial Psikologis	Pengembangan Sistem Trauma Healing
			Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Pendamping

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

**Tabel VI.20
Arah Kebijakan Bidang Sosial Kategori Non-SPM**

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Meningkatkan kapasitas difabel dalam dunia usaha	Peningkatan infrastruktur pendidikan unyyuk difabel
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Mendaya gunakan partisipasi publik mendorong kebebasan sipil	Fasilitasi pengembangan Lembaga Bantuan Hukum Pengembangan infrastruktur keterbukaan informasi.

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

7. Bidang Lainnya

Tabel VI.21
Arah Kebijakan Bidang Lainnya

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Mengembangkan dukungan bagi pelayanan penerangan (listrik)	Peningkatan koordinasi pelayanan listrik rumah tangga
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui penyuluhan dan pendampingan	Peningkatan kemandirian pangan masyarakat. Peningkatan desa swasembada pangan. Peningkatan sistem kewaspadaan kerawanan pangan dan gizi masyarakat. Peningkatan kelembagaan pangan masyarakat di desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung pembangunan ketahanan pangan.
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Peningkatan konsumsi pangan lokal Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
		Menumbuhkembangkan budaya masyarakat untuk konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	Peningkatan promosi dan sosialisasi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
			Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal. Pengembangan industri pangan lokal.
		Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pangan	Peningkatan kerjasama instansi lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkatkan Mutu Pengolahan Produk Pertanian/ Perkebunan	Pengembangan Prasarana dan Sarana untuk Meningkatkan Mutu Pengolahan Produk Pertanian/Perkebunan.
		Meningkatkan SDM Petani	Penyediaan Alat Pasca Panen dan Pengelolaan Produk Pertanian.

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
		Meningkatkan Kelembagaan Petani diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi dengan komoditi yang laku di pasar (membangun akses pasar).	Pendampingan Penggunaan Alat Pasca Panen dan Pengelolaan Produksi Pertanian.
		Meningkatkan Kualitas Produk Pertanian yang mampu bersaing dengan produk non pertanian melalui sistem budidaya mampu agroindustri.	Mengajukan KUR
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Mengembangkan kapasitas dan kualitaskelembagaan serta partisipasi publik dalam kemampuan membaca dan matematika	Peningkatan partisipasi siswa SMA dan Mahasiswa dalam mendukung peningkatan kemampuan membaca.
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatkan kapasitas perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	Pengembangan regulasi peningkatan peran perempuan dalam organisasi kemasyarakatan
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Revitalisasi kearifan adat dan agama pencegahan pernikahan dini	Peningkatan peran tokoh adat dan agama mengurangi potensi pernikahan dini
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatkan pengetahuan perempuan tentang kehidupan berkeluarga sehatsejahtera	Pemberdayaan perempuan untuk usaha produktif guna mencegah perkawinan dini
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Meningkatkan pengetahuan perempuan tentang kehidupan berkeluarga sehatsejahtera	Pemberdayaan perempuan untuk usaha produktif guna mencegah perkawinan dini
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Mengembangkan sistem informasi kependudukan , kesehatan remaja dan pendidikan terintegrasi	Peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Mengembangkan dukungan penyediaan infrastruktur telekomunikasi	Pengembangan kerjasama penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan pemanfaatan telekomunikasi yang produktif & bertanggung jawab.
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber daya air minum layak.	Meningkatkan infrastruktur akses terhadap layanan sumber daya air yang layak	Peningkatan pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai air baku	Mengembangkan kerjasama dengan daerah sekitar dalam rangka peningkatan kualitas daerah tangkapan air	Pengembangan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan jasa ekosistem pemanfaatan air
			Pengembangan kerjasama antar daerah dalam perbaikan infrastruktur dan fasilitas pemanfaatan jasa ekosistem air
			Pengembangan sistem Incentif dan disincentifuntuk peningkatan kualitas DTA
			Penganekaragaman tanaman pertanian dan pelindung
			Peningkatan RTH private dikawasan permukiman dan perkantoran
			Pengendalian pertumbuhan permukiman di daerah sempadan sungai
			Peningkatan vegetasi pelindung di daerah sempadan sungai
			Pengembangan kualitas informasi daerah tangkapan air
			Penganekaragaman media informasi DTA
			Peningkatan kerjasama antar pemda dan lembaga terkait (BPDAS, BKSDA, TNKS) dalam rehabilitasi lahan kritis
			Pengayaan jenis lokal dalam rehabilitasi lahan

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
			kritis.
		Mengembangkan sistem pemantauan kualitas air sungai terintegrasi	Pengembangan pelatihan monitoring sistem kualitas air Pengembangan laboratorium LH Pengembangan sistem pelaporan dini kualitas air Peningkatan kerja samadan koordinasi dalam penyediaan data kualitas Lingkungan hidup
			Peningkatan peran organisasi lokal dalam pengelolaan dan pemantauan kualitas air
			Pengembangan basis data spasial kualitas air untuk perencanaan. Peningkatan pemanfaatan data kualitas air dalam perencanaan pembangunan
			Pengembangan Teknologi pemantauan kualitas air
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Mengembangkan Insentif Ekonomi dan Insentif Sosial untuk Mendorong Penghematan Penggunaan Air Pertanian/Perkebunan dan Industri.	Pengembangan Regulasi Penghematan Air untuk Pertanian/Perkebunan Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait terhadap Penggunaan Air Pertanian/Perkebunan Penyuluhan tentang Penghematan Air Pertanian/Perkebunan. Pengembangan Regulasi Penghematan Air untuk Pertanian/Perkebunan. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait terhadap Penggunaan Air Pertanian/Perkebunan. Penyuluhan tentang Penghematan Air Pertanian/ Perkebunan.

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
		Mengurangkan penggunaan air untuk pertanian/ perkebunan/industri	Meningkatnya jumlah unit industri penerima penghargaanproper lingkungan
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Mendorong partisipasi dunia usaha mengembangkan energi terbarukan	Pengembangan insentif ekonomiuntuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Mengembangkan ragam sumber energi primer terbarukan	Pengembangan kemitraan untuk diversifikasi energi primer terbarukan
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Fasilitasi Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Perusahaan dan pekerja yang mengikuti program jamsostek
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	Jumlah pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu)
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatkan Kualitas Data Base UMKM dan Koperasi	Peningkatan Validitas Data Base UMKM dan Koperasi
		Pengembangan Sistim Informasi UMKM dan Koperasi	Peningkatan Kualitas Data Base UMKM dan Koperasi ke Perbankkan
		Meningkatkan kualitaspengelolaan keuangan kelompok/cluster IKM	Meningkatnya Jumlah Lembaga keuangan mikro swadaya/ koperasi IMKM terbangun
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	MengarusutamakanpertumbuhanIKM	Meningkatnya Jumlah dan kapasitas produksi IKM
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Mendorong peningkatan kredit IKM	Terfasilitasinya Jumlah penyaluran dan pengembalian kredit bagi IKM
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Mengembangkan informasi kebutuhanlayanan mobile broadband untuk kerjasama pembangunan infra struktur	Peningkatankapasitas masyarakat dalam pemanfaatan mobile broadband.
			Fasilitasi keudahan pengembangan infrastruktur telekomunikasi
11.2.1. (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Mengoptimalkan kawasan tertib lalu lintas	Penyusunan Master Plan jaringan induk lalu lintas
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap	Mengembangkan kapasitas dan dukungan dalam pengelolaan lahan dan rehabilitasi lahan kritis	Pemberdayaan masyarakat lokal dalam rehabilitasi lahan kritis .

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
	luas lahan keseluruhan.		
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Mengembangkan e lanning, e budgeting dan e procurement.	Peningkatan kapasitas sdm dan infrastruktur perencanaan
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Meningkatkan partisipasi publik dalam pemanfaatan sumber daya alam berbasis pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Revitalisasi kerapatan adat dalam pemanfaatan SDA.
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi publik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.berkelanjutan	Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkatkan validitas data perencanaan dan efisiensi pembiayaan kegiatan	Pengembangan basis data satu pintu.
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Pengembangan ketjasama intensif dalam penyusunan dokumen perencanaan
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Mengarus utamakan e procurement dalam pengadaan belanja pemerintah	Peningkatan komunikasi intensif antara pemerintah dan penyedia jasa pengadaan .
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan	Peningkatan keterbukaan pengambilan keputusan. Intensifikasi media komunikasi dalam meningkatkan transparansi pengambilan keputusan.
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Mengembangkan lembaga penerimaan pengelola pengaduan publik .	Peningkatan keterbukaan pelayanan publik(BERBASIS IT)
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatkan kualitas dan validitas data kependudukan	Peningkatan kapasitas pelayanan pada institusi DUKCAPIL
16.9.1.(a)	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk 40%	Menyediakan /menyiapkan UU, PP pencatatan sipil	

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
	Berpendidikan Bahaw		
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Membuat regulasi tentang pentingnya PPID untuk keterbukaan informasi publik	Pengembangan regulasi PPID
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Mengembangkan kemitraan penyediaan <i>fixed broadband</i> .	Peningkatan kapasitas masyarakat pemanfaat layanan pita lebar (broad band)
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Mendorong peningkatan pengembangan <i>mobile broadband</i>	Peningkatan ragam manfaat <i>mobile broadband</i> dan percepatan penyediaan infrastruktur.
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkatkan kapasitas penduduk usia produktif dalam pemanfaatan internet	Pengembangan pelatihan bertingkat pemanfaatan internet dalam peningkatan promosi wisata dan penawaran produk.
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Mengembangkan basis data pendukung penawaran proyek skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.	Elaborasi regulasi dan peluang berbasis kondisi lokal untuk KPBU
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Mengembangkan ragam dan jenis proyek yang dapat ditawarkan untuk KPBU	Pengembangan pembiayaan proyek pola KPBU melalui akurasi perencanaan sejak dini.
17.18.1.(a)	Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkatkan dan mempertahankan kualitas data yang dihasilkan	Meningkatkan kualitas data dengan cara meningkatkan kemampuan petugas lapangan sebelum melakukan survei dan sensus serta dengan merekrut petugas yang berkompeten
17.18.1.(b)	Persentase Konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	1. Meningkatkan keberagaman data yang dihasilkan 2. Meningkatkan akurasi data	BPS terus meningkatkan keberagaman data yang dihasilkan guna untuk memenuhi kebutuhan pengguna data BPS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem Informasi Rujukan statistik (SiRuSa)	Membangun kerjasama dengan instansi terkait untuk membangun sistem informasi	Menyediakan statistik dasar dan memlakukan pembinaan untuk kegiatan statistik sektoral guna untuk membangun sistem informasi statistik yang lebih baik
17.18.1.(d)	Persentase Indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	Meningkatkan kualitas data yang terkait indikator SDGs	Memantau perkembangan yang menjadi indikator-indikator SDGs
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Membangun sistem perstatistikian kependudukan	Melakukan senus penduduk dengan menggunakan database dukcapil, yang nantinya betujuan untuk membangun sistem yang lebih baik Membangun kerjasama dengan pihak terkait untuk membangun sistem kependudukan. Kerjasama dengan pihak /instansi terkait utk membangun sistem statistik kependudukan
17.19.2.(c)	Jumlah Pengunjung Eksternal yang mengakses data dan informasi Statistik melalui website.	Membangun dan mengembangkan website BPS	Memberikan kemudahan didalam mengakses website BPS dan kemudahan mendownload data yang dibutuhkan oleh pengguna Membangun tampilan website dengan tampilan yang menarik dan mudah di pahami.
		Meningkatkan kualitas data. Memperbanyak ragam data yang dihasilkan	Melakukan sensus dan survey sesuai kebutuhan para pengguna data
17.19.2.(d)	Persentase Konsumen yang Puas terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkatkan pelayanan statistik terpadu	Meningkatkan pelayanan perpustakaan dengan petugas standby selama jam kerja. Memberi kemudahan akses semua data yg tersedia di website.
		Pengembangan teknologi untuk mendukung kebutuhan para pengguna data	Menyediakan publikasi. Menyediakan PC bagi pengunjung. Ruang perpustakaan yang nyaman.

Seumber : KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

6.5 Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2021-2026 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:

1. Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam aspek Sosial Budaya, pendidikan, dan kesehatan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang mempunyai daya saing dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
4. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan utilitas dan Standar Pelayanan Minimum
5. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk pembangunan yang berbasis bencana dan berkelanjutan.

Program pembangunan daerah merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mendukung program strategis nasional, provinsi
2. Mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal
3. Permasalahan pembangunan daerah.

Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Penentuan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh.

Tabel VI.22
Program Pembangunan Daerah Melalui Janji-Janji Kampanye Walikota dan Wakil Walikota

Tage Line	Program	Perangkat Daerah
Sumber Daya Manusia yang Unggul & Berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu Wilayah Satu Rumah Tahfidz ▪ Pembinaan dan Penghargaan bagi : Siswa Berprestasi, Pemuda Berprestasi, Atlet Berprestasi, Masyarakat berprestasi ▪ Satu rumah satu sarjana ▪ Insentif Guru Ngaji ▪ Pembinaan BKMT dan Pemuda ▪ Penanganan COVID-19 	Bagian Kesra Setda Dinas Pendidikan; Diskepora; Dinas LH Dinas Pendidikan Bagian Kesra Setda; Bagian Kesra Setda, Dinas Pemdes, Diskepora Dinas Kesehatan: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Budpar
Pemerintahan yang Profesional & Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian Aset ▪ Media Pengaduan Online ▪ Satu Desa Satu Jaringan Wifi ▪ Kemudahan dalam Pengurusan Izin Usaha 	Bakeuda, Bagian Tapem Setda, Inspektorat Dinas Kominfo Dinas Kominfo; Dinas Pemdes Dinas PMPTSP; Dinas TPHP; Dinas Koperasi UKM
Perekonomian yang Maju & Produktif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM ▪ Peningkatan Kesejahteraan Petani ▪ Korner-M ▪ Satu Wilayah Satu Produk Unggulan (<i>One Vilage One Product</i>) ▪ Pengelolaan Tempat Wisata 	Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Ekobang Setda Dinas TPHP Dinas Budpar, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagri Dinas Perdagri, Dinas Koperasi dan UKM Dinas Budpar, Satpol PP
Sarana & Prasarana yang Merata & Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan Banjir ▪ Penataan Pasar, Bongkar Muat, Parkir dan PKL 	Dinas PUPR; BPBD, Dinas LH Dinas Perdagri, Dishub, Dinas PUPR

Tage Line	Program	Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan : Jalan, Drainase dan Fasilitas Umum Lainnya 	Dinas PUPR; Dishub, LH
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Infrastruktur Skala Desa: Prasarana, Sarana dan Utilitas umum 	Dinas PUPR; Dinas Perkim
Kemandirian Keuangan Daerah yang Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan PAD 	Bakeuda,
Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan Masalah Persampahan 	Dinas LH; Dinas PUPR
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan Lapangan Merdeka dan Taman Kota 	Dinas LH; Dinas PUPR
Kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Tertib	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 	Satpol PP, Badan Kesbangpol

**Tabel VI.23
Program Pembangunan Daerah**

Tabel VI.23
Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Misi	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama, dan budaya				143.951.458.979		146.624.095.078		147.637.750.975		151.894.347.248		156.223.649.608		160.933.728.759			
Tujuan	1.1. Meningkatkan sumber daya manusia yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Berakhhlak Mulia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,42	75,94	143.951.458.979	76,46	146.624.095.078	76,97	147.637.750.975	77,49	151.894.347.248	78,01	156.223.649.608	78,53	160.933.728.759	78,53	
Sasaran	1.1.1. Meningkatnya Kualitas SDM yang kompeten dan produktif	Indeks Pendidikan	Indeks	0,75	0,77	42.525.897.923	0,76	32.928.443.397	0,78	34.173.543.544	0,79	34.828.731.974	0,8	35.839.374.149	0,81	37.385.786.546	0,81	
Sasaran	1.1.1.1. Meningkatnya Kualitas SDM yang kompeten dan produktif	Persentase SMP yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar tambahan (SNP Plus)	%	N.A	N.A		20		40		60		80		100		Dinas Pendidikan	
Sasaran	1.1.1.2. Meningkatnya Kualitas SDM yang kompeten dan produktif	Persentase SD yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar tambahan (SNP Plus)	%	N.A	N.A		10		25		45		65		100		Dinas Pendidikan	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				38.322.780.032		29.609.294.258		30.710.253.636		31.259.878.112		32.166.527.113		33.616.409.616		Dinas Pendidikan	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	93,47	100	28.996.470.264	100	21.243.640.143	100	22.932.893.831	100	23.821.671.303	100	24.908.585.344	100	26.521.532.719	100	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melekat Huruf	%	98,59	98,87	4.345.973.314	98,97	3.422.490.438	99	3.112.054.312	99,12	2.944.350.025	99,18	2.838.469.092	99,21	2.770.799.697	99,21	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (rata-rata APK SD dan SMP)	%	100,6	100	1.207.214.810	100	967.977.094	100	848.742.085	100	772.288.531	100	725.623.678	100	687.922.683	100	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (rata-rata APM SD dan SMP)	%	96,19	96,44	1.207.214.810	96,85	967.977.094	97,26	848.742.085	97,66	772.288.531	98,07	725.623.678	98,48	687.922.683	98,48	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa berprestasi mendapat beasiswa	%	79	80	724.328.886	80	691.412.210	85	678.993.668	87	675.752.465	88	682.939.932	90	649.704.756	90	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa kurang mampu berprestasi melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri	%	49	50	579.463.109	50	414.847.326	52	424.371.043	58	434.412.299	60	448.179.330	62	458.615.122	62	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa kurang mampu/miskin yang mendapat bantuan/beasiswa	%	N.A	N.A	965.771.848	80	795.124.041	83	735.576.474	86	675.752.465	90	640.256.186	92	611.486.830	92	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	%	80	83	296.342.991	85	1.105.825.912	87	1.128.880.138	90	1.163.362.493	92	1.196.849.873	95	1.228.425.126	95	Dinas Pendidikan
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Perlindungan Anak				358.361.907		197.420.559		201.536.377		207.692.433		213.670.858		219.307.915		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	NA	0	90.504.935	0	50.387.727	0	51.438.209	0	51.527.356	0	52.206.270	0	52.711.111	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa/kelurahan layak anak	%	NA	58	122.110.973	65	76.962.323	68	78.566.831	72	82.448.770	75	85.626.358	75	88.757.812	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (KK Outcome)	%	100	100	145.745.999	100	70.070.509	100	71.531.337	100	73.716.307	100	75.838.230	100	77.838.992	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3.327.400.118		2.942.395.347		3.078.681.564		3.172.497.413		3.265.081.470		3.350.853.707		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHHRAGAAN	Persentase Atlet Pelajar Yang Berprestasi di Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional	%	N.A	N.A	3.327.400.118	7,69	2.942.395.347	42,4	3.078.681.564	8,97	3.172.497.413	42,4	3.265.081.470	12,82	3.350.853.707	12,82	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				517.355.866		179.333.233		183.071.967		188.664.016		194.094.708		199.215.308		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Angka Kunjungan Perpustakaan pertahun	%	98,58	0,06	517.355.866	0,06	179.333.233	0,07	183.071.967	0,07	188.664.016	0,08	194.094.708	0,08	199.215.308	0,08	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran	1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0,8	91.239.345.698	0,81	100.289.525.893	0,81	102.309.998.078	0,82	105.438.931.297	0,82	108.476.013.581	0,83	111.313.590.022	0,83	Dinas Kesehatan (OPD Utama); Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Ketahanan Pangan (OPD Pendukung)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				86.620.388.440		95.605.013.885		97.598.184.391		100.579.382.423		103.474.559.132		106.204.421.496		Dinas Kesehatan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	%	85	87	62.671.227.381	90	64.193.801.620	92	66.590.222.132	94	66.375.319.864	96	68.400.176.326	98	72.806.116.008	98	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	%	65	70	17.175.680.328	75	28.819.691.620	80	28.342.107.502	85	31.523.084.070	90	32.312.986.373	95	30.497.846.071	95	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	4.474.519.640	100	1.595.553.641	100	1.649.123.863	100	1.633.190.908	100	1.683.448.296	100	1.794.072.888	100	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	100	1.318.937.953	100	688.196.311	100	702.543.807	100	724.003.451	100	744.843.884	100	764.494.331	100	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMSI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	%	90	90	695.551.143	92	98.968.062	92	101.031.345	92	104.117.411	92	107.114.430	95	109.940.319	95	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	%	79,8	79,8	284.471.995	80	208.802.631	80	213.155.742	80	219.666.719	80	225.989.823	80	231.951.879	80	Dinas Kesehatan
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.032.149.662		689.061.256		703.426.784		724.913.399		745.780.026		765.455.169		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Konsumsi Energi	kkal/ kap/ hari	2.301.00	2.290,00	848.226.812	2.280,00	564.279.025	2.270,00	576.043.097	2.260,00	593.638.697	2.250,00	610.726.582	2.240,00	626.838.750	2.240,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penyusunan Peta Ketahanan Pangan Daerah	%	100	100	94.804.978	100	56.523.881	100	57.702.289	100	59.464.842	100	61.176.537	100	62.790.494	100	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	%	90	91	89.117.872	92	68.258.350	92,5	69.681.398	93	71.809.860	93,5	73.876.907	94	75.825.925	94	Dinas Ketahanan Pangan
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.553.896.224		3.897.749.626		3.983.592.152		4.108.858.934		4.230.419.649		4.317.425.279		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1,6	1,55	460.971.132	1,5	488.211.743	1,46	493.166.156	1,43	510.448.117	1,39	522.493.425	1,35	533.006.139	1,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,17	2,15	987.933.696	2,13	1.012.939.735	2,12	1.031.164.799	2,11	1.022.077.148	2,1	1.047.859.573	2,09	1.073.258.620	2,09	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	%	21	21	1.574.805.481	21	1.614.666.098	22	1.639.990.322	22	1.706.813.949	22	1.749.869.214	22	1.792.284.259	22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	%	76,25	85	179.266.551	86	190.965.245	87	200.572.604	88	214.097.648	89	224.486.971	90	233.577.962	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penyuluhan terhadap PUS dan WUS di lokus desa stunting dan pentingnya metode MKJP untuk mengatur jarak kehamilan	%	100	100	345.036.039	100	367.552.626	100	386.044.002	100	412.075.782	100	432.072.211	100	449.569.728	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase sosialisasi dan pembinaan terhadap kader pendamping desa tentang stunting	%	100	100	3.523.703	100	137.485.649	100	143.171.858	100	149.751.563	100	156.085.080	100	145.063.736	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Sosialisasi dan Pembinaan 1000 HPK terhadap kader pendamping desa kepada Keluarga yang berisiko stunting	%	100	100	2.359.622	100	85.928.530	100	89.482.411	100	93.594.727	100	97.553.175	100	90.664.835	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPERMUDAAN DAN OLAHRAGA					32.911.372		97.701.126		24.794.751		25.776.541		25.254.774		26.288.078		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Olahraga rekreasi yang dilestarikan	%	N.A	20	32.911.372	20	97.701.126	50	24.794.751	55	25.776.541	60	25.254.774	65	26.288.078	65	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sasaran	1.1.3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks daya Beli (Pengeluaran Perkapita)	Indeks	0,71	0,71	1.502.961.001	0,71	1.296.804.428	0,72	1.327.862.061	0,72	1.460.364.427	0,73	1.407.812.472	0,73	1.444.953.335	0,73	Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian (OPD Utama); Sekretariat Daerah; Dinas Ketahanan Pangan (OPD Pendukung)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					344.721.542		260.537.057		265.968.727		274.092.910		281.982.671		289.421.928		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Pengujian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	4,14	5	123.295.884	25	92.785.603	45	94.719.995	65	97.613.277	85	100.423.074	100	103.072.432	100	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Stabilitas Harga Pangan	%	CV < 30 %	CV < 30	126.909.375	CV < 30	96.472.448	CV < 30	98.483.703	CV < 30	101.491.950	CV < 30	104.413.395	CV < 30	107.168.025	CV < 30	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi (Kkal/ Kap/ Hari)	Kkal/ Kap/ Hari	3.436.00	3.439.00	94.516.283	2.500.00	71.279.006	2.500.00	72.765.029	2.500.00	74.987.683	2.500.00	77.146.202	2.500.00	79.181.471	2.500.00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				361.852.134			303.853.066		310.187.786		319.662.667		328.864.154		337.540.238		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	%	20	22	361.852.134	24	303.853.066	26	310.187.786	28	319.662.667	30	328.864.154	32	337.540.238	32	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	%	50	55		60		65		70		75		80		80	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				796.387.325			732.414.305		751.705.548		866.608.850		796.965.647		817.991.169		Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusa, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	%	NA	90	796.387.325	90	732.414.305	90	751.705.548	95	866.608.850	95	796.965.647	95	817.991.169	95	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
Sasaran	1.1.4. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter (muatan lokal)	%	85	90	4.308.181.571	100	8.637.658.728	100	6.282.307.540	100	6.514.024.871	100	6.743.023.455	100	6.932.844.618	100	Dinas Pendidikan (OPD Utama); Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Pendukung)
Sasaran	1.1.4. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan keagamaan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan (OPD Utama); Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Pendukung)
Sasaran	1.1.4. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Jumlah Rumah Tahfidz yang difasilitasi dan dibina	Rmh Tahfidz	N.A	9		11		12		13		15		16		16	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				130.668.826			219.313.673		223.885.916		230.724.652		237.366.060		243.628.243		Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Penerapan Muatan Lokal	%	100	100	22.815.192	100	38.702.413	100	38.806.892	100	39.392.014	100	40.005.516	100	40.604.707	100	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	22.815.192	100	38.702.413	100	41.792.038	100	45.019.444	100	48.006.619	100	50.755.884	100	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	22.815.192	100	38.702.413	100	41.792.038	100	45.019.444	100	48.006.619	100	50.755.884	100	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata Nilaian UN SD	nilai	79,12	79,12	31.111.625	79,38	51.603.217	79,51	50.747.474	79,64	50.646.875	79,77	50.673.653	79,9	50.755.884	79,9	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata Nilaian UN SMP	nilai	65,84	65,85	31.111.625	65,85	51.603.217	65,86	50.747.474	65,87	50.646.875	65,88	50.673.653	65,89	50.755.884	65,89	Dinas Pendidikan
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				4.177.512.745			8.418.345.055		6.058.421.624		6.283.300.219		6.505.657.395		6.689.216.375		Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumah tahfidz yang dibina	%	NA	NA	4.177.512.745	13	8.418.345.055	38	6.058.421.624	75	6.283.300.219	88	6.505.657.395	100	6.689.216.375	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
Sasaran	1.1.5. Meningkatnya pelestarian budaya dalam masyarakat	Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam masyarakat	festival	0	0	1.767.370.016	2	1.938.108.933	4	1.978.514.571	4	2.038.949.545	4	2.097.640.691	4	2.152.980.578	4	Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (OPD Utama) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPD Pendukung)
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.605.059.476			1.545.286.368		1.577.502.453		1.625.688.259		1.672.483.682		1.716.607.091		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat (LPM) yang berperan Aktif	%	N.a	4,6	1.605.059.476	9,23	1.545.286.368	15,38	1.577.502.453	23,07	1.625.688.259	30,76	1.672.483.682	40,76	1.716.607.091	40,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				162.310.540			392.822.565		401.012.118		413.261.286		425.157.009		436.373.487		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang dilestarikan	Warisan	5	5	127.130.471	6	356.016.666	7	363.438.891	8	374.540.361	9	385.321.502	4	395.487.041	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Keaktifan Kelompok Seni Budaya	%	50	55	35.180.069	65	36.805.899	65	37.573.227	70	38.720.925	70	39.835.507	72	40.886.446	72	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sasaran	1.1.6. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,31	94,42	2.607.702.770	94,53	1.533.553.699	94,64	1.565.525.181	94,75	1.613.345.134	94,86	1.659.785.260	94,97	1.703.573.660	94,97	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran	1.1.6. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda Berprestasi	%	N.A (pandemi)	0,4		0,4		0,5		0,6		0,8		1		1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				976.473.515			352.831.373		360.187.191		371.189.336		381.874.017		391.948.605		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang responsif gender	%	100	100	779.803.864	100	228.243.546	100	233.001.961	100	240.119.152	100	247.030.980	100	253.548.143	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK Outcome)	%	0,26	0,25	26.704.829	0,2	28.476.416	0,15	27.332.489	0,1	26.443.108	0,08	25.501.293	0,05	24.500.888	0,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)	%	100	100	57.388.602	100	66.224.224	100	69.342.467	100	73.184.846	100	76.994.450	100	80.698.895	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	%	20	20	112.576.220	35	29.887.187	50	30.510.274	65	31.442.230	80	32.347.294	80	33.200.679	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1.631.229.255		1.180.722.326		1.205.337.990		1.242.155.798		1.277.911.243		1.311.625.055		Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK Outcome)	%	45	50	1.631.229.255	50	1.180.722.326	55	1.205.337.990	60	1.242.155.798	65	1.277.911.243	70	1.311.625.055	70	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK OUTCOME)	%	4,85	5,1		5,1		5,3		5,49		5,68		5,88		5,88	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
Misi	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN				142.675.676.032		131.086.098.558		136.868.165.765		140.943.732.443		145.084.066.391		148.934.407.789					
Tujuan	2.1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	142.675.676.032	C	131.086.098.558	CC	136.868.165.765	CC	140.943.732.443	CC	145.084.066.391	B	148.934.407.789	B			
Sasaran	2.1.1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	116.141.406.446	WTP	106.360.267.402	WTP	108.573.641.226	WTP	111.798.149.519	WTP	115.110.846.878	WTP	118.147.697.397	WTP	Badan Keuangan Daerah (OPD Utama), Inspektorat Daerah; Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Pendukung)		
Sasaran	2.1.1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N.A	75		76		77		78		79		80		80	Badan Keuangan Daerah (OPD Utama), Inspektorat Daerah; Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh; Badan Penelitian dan Pengembangan (OPD Pendukung)		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					1.394.884.465		1.293.675.050		1.316.623.658		1.264.898.776		1.395.897.406		1.432.723.925		Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kerberhasilan Pengadaan barang dan Jasa	%	NA	NA	1.061.849.766	94	971.785.960	94	1.002.274.065	96	962.898.722	96	1.062.620.863	98	1.090.654.891	98	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	NA	15	333.034.699	15	321.889.090	13	314.349.593	10	302.000.054	8	333.276.543	5	342.069.034	5	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
5.02	KEUANGAN					112.691.879.768		103.406.966.517		105.562.791.903		108.787.273.887		111.918.714.687		114.871.350.480		Badan Keuangan Daerah		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Anggaran sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	%	11,05	6,5	3.036.165.717	6,45	2.712.558.236	6,3	3.731.794.121	6,1	3.845.784.123	6	3.956.484.988	5,9	4.060.864.843	5,9	Badan Keuangan Daerah		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga Kesehatan (IKK Outcome)	%	31,28	31,5	1.265.707.600	31,75	1.081.217.823	32	1.462.872.613	32,3	1.507.556.978	32,7	1.550.951.994	33	1.591.869.157	33	Badan Keuangan Daerah		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi transfer expenditures) (IKK Outcome)	%	65,67	65,8	107.295.218.798	66	98.578.856.578	66,25	99.312.227.526	66,75	102.345.782.084	67,15	105.291.804.594	67,65	108.069.609.467	67,65	Badan Keuangan Daerah		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusutan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan (IKK Outcome)	%	80	82	460.057.781	84	377.390.786	85	423.798.743	87	395.846.301	90	395.139.916	90	405.564.484	90	Badan Keuangan Daerah		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci	%	80	83	296.057.016	100	404.381.903	100	384.423.023	100	359.067.682	100	358.426.928	100	367.882.935	100	Badan Keuangan Daerah		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	%	80	82	338.672.856	84	252.561.191	85	247.675.877	87	333.236.719	90	365.906.267	90	375.559.594	90	Badan Keuangan Daerah		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					2.054.642.213		1.659.625.835		1.694.225.665		1.745.976.856		1.796.234.785		1.843.622.992		Inspektorat Daerah		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Target Pengawasan	%	100	100	2.054.642.213	100	1.659.625.835	100	1.694.225.665	100	1.745.976.856	100	1.796.234.785	100	1.843.622.992	100	Inspektorat Daerah		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sasaran	2.1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	B	B	4.595.215.178	B	3.770.653.992	BB	3.849.264.475	BB	3.966.842.683	A	4.081.028.218	A	4.188.693.766	A	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Utama); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Inspektorat Daerah; dan Semua SKPD (OPD Pendukung)
5.01	PERENCANAAN					4.261.149.820		3.486.184.077		3.558.863.940		3.667.571.680		3.773.142.702		3.872.685.625		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam Renja	%	100	100	1.203.852.788	100	1.132.845.538	100	1.156.463.068	100	1.190.671.990	100	1.224.945.474	100	1.254.325.620	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Target IKU daerah yang di monitoring dan evaluasi	%	100	100	244.166.306	100	307.356.967	100	313.764.736	100	323.046.099	100	332.344.979	100	340.316.226	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD	%	100	100	206.091.879	100	220.207.650	100	224.798.533	100	233.083.894	100	239.793.212	100	249.852.419	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program dan Kegiatan kedalam Dokumen Perencanaan Bidang Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	100	100	1.724.652.250	100	1.208.549.870	100	1.349.959.968	100	1.391.195.345	100	1.431.240.892	100	1.467.605.749	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Target Kinerja Program Bidang Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	100	100	882.386.597	100	617.224.052	100	513.877.635	100	529.574.352	100	544.818.145	100	560.585.611	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					334.065.358		284.469.915		290.400.535		299.271.003		307.885.516		316.008.141		Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	%	100	100	334.065.358	100	284.469.915	100	290.400.535	100	299.271.003	100	307.885.516	100	316.008.141	100	Inspektorat Daerah
Sasaran	2.1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kualitas Pengelolaan Arsip	Predikat	kurang	cukup	14.097.495.658	cukup	16.081.062.193	baik	19.016.553.293	baik	19.570.847.073	Memuaskan	20.107.948.464	Memuaskan	20.647.065.618	Memuaskan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran	2.1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Kategori	T	T													Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh(OPD Utama); Sekretariat DPRD; Badan Penelitian dan Pengembangan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPD Pendukung)
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					0		0		243.000.000		267.300.000		294.030.000		323.433.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Mandiri	%	57	58,5	0	60,9	0	63,8	143.000.000	71,7	157.300.000	82,59	173.030.000	90,59	190.333.000	90,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA AKTIF	Persentase Pengembangan BUMDes Aktif	%	N.A	58,45	0	60,9	0	63,8	100.000.000	71,7	110.000.000	82,59	121.000.000	90,59	133.100.000	90,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					456.252.512		48.641.436		49.655.511		51.172.270		52.645.263		54.034.149		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (IKK Outcome)	%	N.a	100	365.450.456	100	25.196.305	100	25.279.169	100	26.804.522	100	27.576.090	100	28.303.602	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (IKK Outcome)	%	N.a	100	90.802.056	100	23.445.131	100	24.376.342	100	24.367.748	100	25.069.173	100	25.730.547	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					205.992.777		201.240.391		205.435.845		211.711.012		217.805.112		223.551.239		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (IKK Outcome)	%	94,69	40	205.992.777	40	201.240.391	50	205.435.845	60	211.711.012	70	217.805.112	80	223.551.239	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					3.004.805.401		1.817.696.067		4.212.824.931		4.298.052.090		4.376.490.429		4.478.934.873		Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LPDP kategori Baik	%	N.A	N.A	1.131.155.512	90	722.986.571	90	1.495.571.461	90	1.479.938.663	100	1.458.647.923	100	1.478.764.608	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang disusun	%	100	100	1.873.649.889	100	1.094.709.496	100	2.717.253.470	100	2.818.113.427	100	2.917.842.506	100	3.000.170.265	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.02	SEKRETARIAT DPRD					9.705.209.356		13.670.590.968		13.955.595.045		14.381.877.488		14.795.859.715		15.186.203.592		Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	%	60	100	6.558.533.510	100	8.597.505.440	100	8.868.252.196	100	9.135.470.469	100	9.395.572.187	100	9.585.054.481	100	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	3.146.675.846	100	5.073.085.528	100	5.087.342.849	100	5.246.407.019	100	5.400.287.528	100	5.601.149.111	100	Sekretariat DPRD
5.05	PENELEITIAN DAN PENGEMBANGAN					725.235.612		342.893.331		350.041.961		360.734.213		371.117.945		380.908.765		Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELEITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbang	%	90,91	100	261.084.820	100	179.588.709	33	184.254.749	33	190.586.885	33	196.781.211	33	201.208.216	33	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELEITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	%	90,91	100	275.589.533	100	102.915.767	14	103.829.345	14	106.060.205	14	108.166.694	14	112.041.876	14	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELEITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	67.688.657	100	28.831.734	100	29.580.834	100	30.597.415	100	31.591.872	100	32.302.597	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELEITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	120.872.602	100	31.557.121	100	32.377.033	100	33.489.708	100	34.578.168	100	35.356.076	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
Sasaran	2.1.4. Meningkatnya pemanfaatan dan Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,5	1,5	1.902.077.086	1,65	547.657.593	1,75	559.075.142	1,85	576.152.445	1,95	592.736.988	2,05	608.374.555	2,05	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.736.080.636		498.186.429		508.572.605		524.107.276		539.193.699		553.418.689		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	1	1	1.736.080.636	1,2	498.186.429	1,4	508.572.605	1,6	524.107.276	1,8	539.193.699	2	553.418.689	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							165.996.450		49.471.164		50.502.537		52.045.169		53.543.289		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	165.996.450	50	49.471.164	55	50.502.537	60	52.045.169	65	53.543.289	70	54.955.866	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sasaran	2.1.5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	Kategori	Sangat Baik	Baik	2.849.374.851	Baik	2.423.699.590	Baik	2.927.205.205	Baik	3.029.981.659	Sangat Baik	3.132.126.161	Sangat Baik	3.228.866.286	Sangat Baik	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (OPD Utama); Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Kecamatan (OPD Pendukung)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					491.624.693		296.230.990		302.406.806		311.644.010		320.614.681		329.073.128		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)	%	100	100	238.729.725	100	140.477.755	100	143.406.431	100	147.786.871	100	152.040.915	100	156.052.053	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)	%	100	100	50.257.619	100	29.573.517	100	30.190.065	100	31.112.239	100	32.007.805	100	32.852.234	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran (IKK Outcome)	%	80	85	67.545.783	90	42.059.906	95	42.936.770	100	44.248.300	100	45.521.987	100	46.722.947	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	80	82,5	67.545.783	85	42.059.906	87,5	42.936.770	90	44.248.300	92,5	45.521.987	95	46.722.947	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta nikah	%	80	84	67.545.783	88	42.059.906	92	42.936.770	96	44.248.300	100	45.521.987	100	46.722.947	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.471.408.078		1.335.860.415		1.363.710.395		1.405.365.788		1.445.819.231		1.483.962.784		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	292.249.204	50	244.767.890	55	229.050.179	60	214.231.506	65	208.869.936	70	202.871.668	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	292.249.204	50	244.767.890	55	229.050.179	60	214.231.506	65	208.869.936	70	202.871.668	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	4	9	729.298.484	16	504.392.299	19	499.000.699	22	503.591.482	25	529.972.925	28	555.820.030	28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	78.805.593	50	170.966.168	55	203.304.669	60	236.655.647	65	249.053.217	70	261.199.709	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	78.805.593	100	170.966.168	100	203.304.669	100	236.655.647	100	249.053.217	100	261.199.709	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					163.255.621		203.654.778		207.900.567		214.251.021		220.418.234		226.233.301		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan tepat waktu	%	N.A	95	163.255.621	95	203.654.778	95	207.900.567	95	214.251.021	95	220.418.234	95	226.233.301	95	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					381.443.833		367.334.019		553.187.437		573.720.840		594.024.015		610.784.573		Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SPM kategori Baik	%	N.A	N.A	381.443.833	80	367.334.019	80	553.187.437	90	573.720.840	90	594.024.015	100	610.784.573	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
7.01	KECAMATAN					341.642.626		220.619.388		500.000.000		525.000.000		551.250.000		578.812.500		KECAMATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	49.051.067	100	22.807.908	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Hamparan Rawang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	38.730.240	90	26.094.752	95	50.000.000	95	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Koto Baru
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	41.723.561	95	26.187.950	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Kumun Debai
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	100	31.360.518	100	22.104.015	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Pesisir Bukit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	37.499.279	90	29.887.187	90	75.000.000	95	78.750.000	95	82.687.500	100	86.821.875	100	Kecamatan Pondok Tinggi
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	42.094.460	90	12.624.945	90	75.000.000	95	78.750.000	95	82.687.500	100	86.821.875	100	Kecamatan Sungai Bungkal
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	100	80.799.164	100	66.183.229	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Sungai Penuh
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	20.384.337	100	14.729.402	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Tanah Kampung
Sasaran	2.1.6. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Sangat Rendah	3.090.106.813	Rendah	1.902.757.788	Rendah	1.942.426.424	Sedang	2.001.759.064	Sedang	2.059.379.682	Baik	2.113.710.167	Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; SEMUA SKPD	
Sasaran	2.1.6. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	N.A	0,51			0,53		0,56		0,61		0,63		0,66		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; SEMUA SKPD
5.03	KEPEGAWAIAN					1.546.939.837		1.709.348.377		1.744.984.820		1.798.286.482		1.850.050.143		1.898.858.103		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN	%	N.a	100	253.557.708	100	280.177.966	100	175.175.588	100	252.316.664	100	259.579.598	100	266.427.818	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan	%	N.a	90	264.568.222	93	292.344.441	94	182.782.430	95	263.273.288	96	270.851.607	97	277.997.205	97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterpenuhan formasi ASN	%	N.a	80	969.734.964	82	1.071.544.507	83	669.961.461	84	964.988.575	85	992.765.763	85	1.018.956.876	85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N.a	81	29.539.471	83	32.640.731	84	358.532.671	85	158.853.977	86	163.426.587	87	167.738.102	87	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N.a	8	14.769.736	15	16.320.366	30	179.266.335	45	79.426.989	60	81.713.294	75	83.869.051	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N.a	100	14.769.736	100	16.320.366	100	179.266.335	100	79.426.989	100	81.713.294	100	83.869.051	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.543.166.976		193.409.411		197.441.604		203.472.582		209.329.539		214.852.064		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan	%	N.a	85	697.367.466	87	87.403.005	89	89.225.180	91	91.950.619	93	94.597.417	95	97.093.083	95	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	N.a	20	72.951.750	20,1	9.143.246	20,2	9.333.864	20,3	9.618.973	20,4	9.895.855	20,5	10.156.927	20,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	N.a	4	75.480.294	5	9.460.155	5,25	9.657.380	5,5	9.952.371	5,75	10.238.850	6	10.508.971	6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	%	N.a	40	697.367.466	45	87.403.005	50	89.225.180	55	91.950.619	60	94.597.417	65	97.093.083	65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Misi	3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah				11.794.634.367		9.155.003.358		10.134.781.156		10.383.085.165		10.373.594.623		10.726.557.498			
Tujuan	3.1. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi	%	-0,14	3,64	7.536.697.865	3,72	5.836.130.586	3,8	6.751.298.983	3,88	6.899.837.844	3,96	6.793.369.303	4,04	7.027.277.632	4,04	
Sasaran	3.1.1. Meningkatkan Kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan perdagangan	%	-3,05	6,5	2.399.828.628	6,6	2.117.009.066	6,9	2.161.144.407	7,2	2.227.157.927	7,5	2.291.266.650	7,8	2.351.714.770	7,8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.399.828.628		2.117.009.066		2.161.144.407		2.227.157.927		2.291.266.650		2.351.714.770		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	peringkatan sarana prasarana perdagangan, pasar rakyat, PKS	%	65	65	1.271.498.143	70	1.344.923.407	75	1.372.962.330	75	1.414.900.330	80	1.455.628.224	80	1.494.030.560	80	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase jumlah UMKM yang menjadi ekspor	%	na	1	393.213.192	1,25	174.341.923	1,5	177.976.598	1,75	183.413.006	2	188.692.548	2,25	193.670.628	2,25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	milyar	0,69	1	393.213.192	1,25	174.341.923	1,5	177.976.598	1,75	183.413.006	2	188.692.548	2	193.670.628	2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaranya	%	n.a	1	304.799.171	2	363.200.145	3	370.081.377	4	382.897.624	5	396.776.735	6	0	6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rasio produk lokal terhadap produk luar	%	n.a	0,2	37.104.930	0,2	60.201.668	0,25	62.147.504	0,3	62.533.961	0,35	61.476.595	0,4	470.342.954	0,4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sasaran	3.1.2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekraf	45	50	621.454.505	55	713.747.712	60	922.124.824	65	1.010.935.261	70	1.099.347.204	75	1.186.993.326	75	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sasaran	3.1.2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	%	-5,43	2,43		2,5		2,53		2,56		2,59		2,62		2,62	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					621.454.505		713.747.712		922.124.824		1.010.935.261		1.099.347.204		1.186.993.326		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	%	0,07	4,22	209.974.752	7,41	150.311.290	8,15	200.000.000	8,95	250.000.000	9,86	300.000.000	10,8	350.000.000	10,8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (IKK Outcome)	%	0	5		6		7		8		9		10		10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	-66	16		18		20		22		24		25		25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDDB ADHB	%	1,08	0,4		217.506.687	0,4	437.547.594	0,41	446.056.767	0,41	459.065.054	0,41	471.659.520	0,42	483.481.669	0,42
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	%	10,55	10	2.347.634	12	5.343.842	13	6.068.057	14	6.870.207	15	7.687.684	16	8.511.657	16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi		3	5	33.150.279	7	32.875.905	9	120.000.000	11	130.000.000	13	140.000.000	15	150.000.000	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase capaian pembinaan Pelaku ekonomi kreatif	%	66,6	66,6	104.770.366	66,6	49.880.684	66,6	96.774.194	66,6	108.552.632	66,6	120.000.000	66,6	131.250.000	66,6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase capaian pembinaan pelaku pariwisata dan industri pariwisata	%	N.A	13,8	53.704.787	13,8	37.788.397	13,8	53.225.806	13,8	56.447.368	13,8	60.000.000	13,8	63.750.000	13,8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
Sasaran	3.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Sungai Penuh	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah yang terdata dalam OSS	%	N.A	20	788.507.613	22	722.256.804	24	737.314.393	25	759.836.125	27	781.708.002	28	802.330.997	28	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					788.507.613		722.256.804		737.314.393		759.836.125		781.708.002		802.330.997		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan	ada	ada	241.676.668	ada	137.029.464	ada	139.886.250	ada	144.159.164	ada	148.308.784	ada	152.221.462	ada	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	event promosi	ada	ada	158.722.418	ada	185.838.885	ada	189.713.249	ada	195.508.159	ada	201.135.860	ada	206.442.220	ada	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru per tahun	%	97,05	27,05	388.108.527	34,05	399.388.455	44,05	407.714.894	54,05	420.168.802	64,05	432.263.358	74,05	443.667.315	74,05	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
Sasaran	3.1.4. Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,98	2,57	3.726.907.119	2,59	2.283.117.004	2,61	2.930.715.359	2,63	2.901.908.531	2,65	2.621.047.447	2,67	2.686.238.539	2,67	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					881.913.905		231.127.578		235.946.119		243.153.242		250.152.406		256.751.918		Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	4,2	5	3.995.450	5,25	5.544.290	5,51	5.659.877	5,79	5.832.761	6,08	6.000.657	6,38	6.158.967	6,38	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan tangkap (IKK Outcome)	ton	459,01	481,96	3.995.450	506,05	10.395.543	531,36	10.612.269	557,92	10.936.428	585,82	11.251.233	615	11.548.062	615	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	%	5	5	615.443.426	5,25	114.147.807	5,51	117.443.426	5,79	119.833.051	6,08	122.081.371	6,38	130.096.367	6,38	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan budidaya(IKK Outcome)	ton	224,36	235,58	169.719.932	247,36	29.310.690	259,73	29.005.890	272,71	31.089.651	286,35	33.185.640	300,67	29.266.893	300,67	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/t hn	33,84	34,86	42.266.499	35,9	42.423.322	36,98	42.640.654	38,09	43.901.499	39,23	45.002.141	40,41	45.896.091	40,41	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	79	90	46.493.148	104	29.305.926	120	30.584.003	138	31.559.852	158	32.631.364	173	33.785.538	173	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2.844.993.214		2.051.989.426		2.694.769.240		2.658.755.289		2.370.895.041		2.429.486.621		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian perhektar pertahanan	%	1	1	490.173.887	1	309.702.301	1	316.158.965	1	325.816.240	1	335.194.858	1	344.037.958	1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi ternak	ton	821,61	839,69	5.724.951	867,4	61.042.437	890,81	62.995.101	910,41	65.584.024	940,46	68.119.944	965,85	70.547.064	965,85	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ternak (Sapi dan Kambing)	Ekor	4559 Sapi/ 9381 Kambng	4787 Sapi/ 9662 Kambng	62.974.457	5026 Sapi/ 9952 Kambng	11.466.535	5278 Sapi/ 10251 Kambng	11.652.273	5541 Sapi/ 10558 Kambng	11.959.947	5819 Sapi/ 10875 Kambng	12.260.922	6109 Sapi/ 11201 Kambng	12.545.945	6109 Sapi/ 11201 Kambng	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok peternak yang memanfaatkan Bahan Baku lokal sebagai pakan ternak	%	Na	17,44	40.074.654	18,49	27.114.983	19,78	27.053.538	21,17	27.263.461	22,65	27.443.447	24,23	27.575.922	24,23	Dinas Peternakan dan Perikanan		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	%	101,92	102	1.700.579.357	102	1.037.828.201	102	1.059.464.813	102	1.091.826.833	102	1.123.255.059	102	1.152.888.737	102	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	ton	n.a	2.267,00		2.309,80		2.343,60		2.378,50		2.412,40		2.446,30		2.446,30		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	ton	n.a	42.619,00		43.053,24		43.492,50		43.936,78		44.385,08		44.837,40		44.837,40		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi perkebunan	ton	n.a	453		457,54		462,11		466,74		471,43		476,19		476,19		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	%	35	39		42		47	600.000.000	51	500.000.000	56	150.000.000	62	150.000.000	62	Dinas Peternakan dan Perikanan	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (IKK Outcome)	%	-11	-9	109.681.897	-7	218.306.408	-5	229.157.919	-3	230.068.706	-2	236.692.861	-1	242.794.528	-1	Dinas Peternakan dan Perikanan	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Produksi Olahan Produk Peternakan	ton	1.500,00	1.545,00	340.973.274	1.591,00	194.136.770	1.639,00	191.883.862	1.688,00	203.834.062	1.738,00	209.699.794	1.791,00	215.374.843	1.791,00	Dinas Peternakan dan Perikanan	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	%	50	80	94.810.737	82	192.391.791	85	196.402.769	86	202.402.016	88	208.228.156	90	213.721.624	90	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
Tujuan	3.2. Meningkatkan perekonomian Kota Sungai Penuh yang merata dan inklusif	Indeks ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)	Indeks	0,34	0,33	4.257.936.502	0,32	3.318.872.772	0,31	3.383.482.173	0,3	3.483.247.321	0,3	3.580.225.320	0,3	3.699.279.866	0,3		
Tujuan	3.2. Meningkatkan perekonomian Kota Sungai Penuh yang merata dan inklusif	PDRB Per Kapita	Juta/Jw/a.Thn	82,47	83,17		83,67		84,17		84,67		85,17		85,67				
Sasaran	3.2.1. Meningkatnya sentra kegiatan ekonomi masyarakat	Jumlah sentra produk unggulan daerah	Produk Unggulan	6	6	1.289.164.341	7	1.010.751.037	7	1.031.823.145	8	1.063.340.833	8	1.093.949.090	8	1.122.809.618	8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.289.164.341		1.010.751.037		1.031.823.145		1.063.340.833		1.093.949.090		1.122.809.618		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKK Outcome)	%	0,1	0,1	546.360.505	15	390.836.597	20	441.920.569	25		0	30	479.883.433	35	495.974.285	35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIN (IKK Outcome)	%	0,25	0,25	672.443.699	30	550.177.671	35	518.711.937	40	989.975.631	45	538.588.638	45	549.367.082	45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	%	0,1	0,1	70.360.137	15	69.736.769	20	71.190.639	25	73.365.202	30	75.477.019	35	77.468.251	35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Sasaran	3.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Omzet Koperasi	%	0	1,9	1.174.203.244	1,9	638.844.346	1,9	652.162.952	1,9	672.083.682	1,9	691.429.603	1,9	709.670.878	1,9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Sasaran	3.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Omzet UMKM	%	0	1		1,01		1,01		1,01		1,01		1,01		1,01		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					1.174.203.244		638.844.346		652.162.952		672.083.682		691.429.603		709.670.878		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%		60,93	49.882.322	62,91	29.887.187	64,9	30.510.274	66,23	31.442.230	67,55	32.347.294	68,87	33.200.679	68,87	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat	%		74,31	80.411.585	75,07	37.314.103	75,84	38.092.026	76,6	39.255.571	77,36	40.385.543	77,36	41.450.993	77,36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang dilatih	%		28,12	437.543.560	27,54	402.680.030	26,98	411.075.091	26,45	423.631.639	25,93	435.825.872	25,44	447.323.816	25,44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya jumlah SDM Pengurus Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	Koperasi		569	221.364.149	581	24.905.989	593	25.425.228	605	26.201.858	617	26.956.078	629	27.667.233	629	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas SDM UMKM yang dilatih -> Persentase SDM UMKM yang dilatih	%		5,52	37.200.206	6,35	19.070.872	7,16	19.468.461	7,96	23.015.996	8,74	23.678.511	9,5	24.303.197	9,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Produk UKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikat Halal	%		1,01	31.000.172	1,28	19.070.872	1,54	19.468.461	1,8	23.015.996	2,05	23.678.511	2,4	24.303.197	2,4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang dilakukan Updating Pendataan	%		1,14	176.080.975	1,13	28.606.308	1,11	29.202.691	1,1	24.188.988	1,09	24.885.267	1,08	25.541.790	1,08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang menjadi wira usaha kecil	%	0	0,56	140.720.275	0,61	77.308.985	0,67	78.920.720	0,73	81.331.404	0,78	83.672.527	0,83	85.879.973	0,83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran	3.2.3. Menurunnya jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	%	3,03	3	1.557.504.004	2,97	1.461.440.349	2,93	1.487.326.056	2,9	1.529.171.919	2,87	1.569.901.875	2,84	1.635.920.134	2,84	Dinas Sosial (OPD Utama); Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD Pendukung)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.410.334.405		1.023.667.484		1.045.008.874		1.076.929.327		1.107.928.729		1.137.158.069		Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	85	85	428.191.692	90	392.528.802	90	400.712.231	90	412.952.238	95	424.839.065	95	436.047.155	95	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	6,25	6,31	72.807.280	6,82	74.636.077	6,9	74.731.723	6,93	77.464.827	7	80.077.799	7,2	84.464.452	7,2	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Sosial	%	19,1	19,13	91.835.441	19,3	100.243.815	19,9	103.794.060	20,12	106.514.138	20,35	109.196.999	20,55	109.803.788	20,55	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh layanan Jaminan Sosial	%	25	25	817.499.992	30	456.258.790	40	465.770.860	50	479.998.124	60	493.814.866	70	506.842.674	70	Dinas Sosial
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					147.169.599		437.772.865		442.317.182		452.242.592		461.973.146		498.762.065		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1,6	1,55	67.238.079	1,5	53.068.729	1,46	54.026.983	1,43	55.523.791	1,39	57.076.379	1,35	56.726.608	1,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	%	18,84	18,11	17.783.708	17,49	13.622.415	16,96	13.944.395	16,51	14.409.689	16,13	14.836.180	15,8	17.135.342	15,8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	66,23	66,58	38.599.638	66,9	28.152.991	67,19	28.818.415	67,45	29.780.024	67,69	30.661.439	67,69	31.433.151	67,69	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40,04	40,5	14.856.899	40,93	11.352.013	41,31	11.620.329	41,66	12.008.074	41,98	12.363.484	41,98	12.674.658	41,98	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga pra sejahtera, sejahtera I dan sejahtera II yang ikut ber-KB	%	25,5	24,5	8.691.275	23,3	331.576.717	22,58	333.907.060	21,6	340.521.014	20,86	347.035.664	19,87	380.792.306	19,87	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran	3.2.4. Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,56	5,21	237.064.913	5,15	207.837.040	5,09	212.170.020	5,03	218.650.887	4,97	224.944.752	4,91	230.879.236	4,91	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					237.064.913		207.837.040		212.170.020		218.650.887		224.944.752		230.879.236		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja (IKK Outcome)	Juta Rp/Tenaga Kerja	108,62	112,57	76.818.193	116,76	69.736.769	121,2	71.190.639	125,9	73.365.202	130,89	75.477.019	136,18	77.468.251	136,18	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	N.A	100	160.246.720	100	138.100.271	100	140.979.381	100	145.285.685	100	149.467.733	100	153.410.985	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Misi	4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman					86.888.049.231		54.063.499.806		58.377.920.474		59.207.770.327		61.670.614.558		64.223.364.121		
Tujuan	4.1. Meningkatkan ketersedian dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Persentase pemenuhan infrastruktur kota	%	N.A	68,18	86.888.049.231	71,28	54.063.499.806	74,31	58.377.920.474	77,5	59.207.770.327	80,69	61.670.614.558	82,41	64.223.364.121	82,41	
Sasaran	4.1.1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan Pelayanan transportasi perkotaan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik fungsional	%	58	60	74.983.236.247	62	38.268.930.555	64	37.954.066.509	66	38.241.403.085	68	40.215.945.319	70	42.307.703.888	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran	4.1.1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan Pelayanan transportasi perkotaan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik fungsional	%	70,69	72		74		76		78		80		82		82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran	4.1.1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan Pelayanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	B		B		B		B		B		B		B	Dinas Perhubungan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					72.637.231.387		36.524.974.850		36.173.752.867		36.406.708.641		38.328.439.210		40.370.401.656		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Cakupan Pelayanan Irigasi Kondisi Baik	Ha	2.057,43	2.094,23	11.945.945,004	2.164,04	4.089.027,918	2.233,85	3.061.582,271	2.303,66	2.283.105,933	2.373,47	3.222.588,874	2.443,27	4.338.389,948	2.443,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	70,69	72	58.479.817,295	74	28.620.914,441	76	29.228.184,328	78	30.131.805,323	80	31.001.701,898	82	31.830.921,592	82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang dibangun	%	4	2,96	1.421.473,508	4,4	2.908.743,809	5,92	2.958.803,306	7,4	3.038.354,127	8,88	3.123.260,323	10,35	3.194.324,244	10,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	0,21	0,08	789.995,580	0,25	906.288,682	0,42	925.182,962	0,58	953.443,258	0,75	980.888,115	1	1.006.765,872	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				2.346.004,860		1.743.955,705		1.780.313,642		1.834.694,444		1.887.506,109		1.937.302,232		Dinas Perhubungan			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	72,09	75,5	1.036.318,037	84,41	812.188,158	85,5	801.141,139	87,74	825.612,500	96,12	849.377,749	100	871.786,004	100	Dinas Perhubungan		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Kategori	B	B	1.309.686,823	B	931.767,547	B	979.172,503	B	1.009.081,944	A	1.038.128,360	A	1.065.516,228	A	Dinas Perhubungan		
Sasaran	4.1.2. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur permukiman	Persentase Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Permukiman	%	N.A	69,06	11.160.967,623	70,38	15.055.457,134	71,43	15.369.332,860	73,23	15.838.798,815	75,04	16.294.718,511	76,73	16.724.605,231	76,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				8.196.608,424		14.196.877,358		14.492.853,438		14.935.546,777		15.365.466,370		15.770.837,591		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jarigan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	58,33	59,64	3.358.540,034	61,82	7.114.328,387	64	7.262.647,695	68,98	7.484.489,845	73,96	7.699.930,824	77,41	7.903.070,142	77,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	59,66	60,07	4.838.068,390	61,69	7.082.548,971	62,19	7.230.205,743	62,93	7.451.056,932	63,68	7.665.535,546	65,49	7.867.767,449	65,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				2.964.359,199		858.579,776		876.479,422		903.252,038		929.252,141		953.767,640		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Permukiman yang didukung oleh PSU	%	70	70	2.964.359,199	76	858.579,776	82	876.479,422	88	903.252,038	94	929.252,141	100	953.767,640	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Sasaran	4.1.3. Meningkatnya perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase desa dengan lingkungan permukiman kategori tidak kumuh	%	N.A	56,52	743.845,361	66,67	739.112,117	76,81	5.054.521,105	86,96	5.127.568,427	97,1	5.159.950,728	100	5.191.055,002	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				743.845,361		739.112,117		5.054.521,105		5.127.568,427		5.159.950,728		5.191.055,002		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	%	90,92	0	341.787,434	100	473.986,847	100	483.868,511	100	498.648,579	100	513.002,175	100	526.536,181	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (IKK Outcome)	%	65,3	65,3	402.057,927	50	265.125,270	40	270.652,594	30	278.919,848	20	286.948,553	5	294.518,821	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase berkurangnya kawasan permukiman kumuh	%	N.a	N.a	0	3	0	4	4.300.000,000	4	4.350.000,000	4	4.360.000,000	4	4.370.000,000	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Misi	5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				1.077.317,231		1.110.784,511		1.133.942,114		1.168.579,090		1.202.216,630		1.233.933,469					
Tujuan	5.1. Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan PAD yang akuntabel, efektif dan efisien	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (PAD/PD)	%	3,88	7,3	1.077.317,231	13,17	1.110.784,511	13,18	1.133.942,114	13,19	1.168.579,090	13,2	1.202.216,630	13,21	1.233.933,469	13,21	Badan Keuangan Daerah (OPD Utama);		
Sasaran	5.1.1. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-4,59	66,14	1.077.317,231	4,73	1.110.784,511	4,1	1.133.942,114	3,94	1.168.579,090	3,79	1.202.216,630	3,65	1.233.933,469	3,65	Badan Keuangan Daerah (OPD Utama);		
Sasaran	5.1.1. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	Tingkat Kemandirian Daerah (PAD/Pendapatan Transfer)	%	4,45	8,03		15,17		15,18			15,2			15,23		15,23	Badan Keuangan Daerah (OPD Utama);		
Sasaran	5.1.1. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	Pertumbuhan Retribusi Daerah	%	-49,48	407,8		4,43		0,72		0,71		0,71		0,7		0,7	Badan Keuangan Daerah (OPD Utama);		
5.02	KEUANGAN				1.077.317,231		1.110.784,511		1.133.942,114		1.168.579,090		1.202.216,630		1.233.933,469		Badan Keuangan Daerah			
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan PAD	%	-16,76	45,3	623.325,323	30,25	485.167,313	24,1	494.575,325	21,44	636.158,149	17,89	654.469,956	16,7	671.736,161	16,7	Badan Keuangan Daerah		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD	%	3,84	6,03	453.991,908	8,71	625.617,198	9,62	639.366,789	10,1	532.420,941	10,7	547.746,674	11,23	562.197,308	11,23	Badan Keuangan Daerah		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Misi	6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup					77.549.631.569		55.135.811.987		57.014.309.670		60.023.226.963		60.877.231.311		61.452.509.553			
Tujuan	6.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	87,82	78,7	77.549.631.569	78,85	55.135.811.987	79	57.014.309.670	79,15	60.023.226.963	79,3	60.877.231.311	79,45	61.452.509.553	79,45		
Sasaran	6.1.1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	82,5	89,38	2.423.324.601	89,49	3.735.212.655	89,59	3.813.084.258	89,7	3.929.557.319	89,8	4.042.669.595	89,91	4.149.323.169	89,91	Dinas Lingkungan Hidup	
Sasaran	6.1.1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,8	61,09		61,19		61,29		61,39		61,49		61,59		61,59	Dinas Lingkungan Hidup	
Sasaran	6.1.1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	88,83	89,16		89,48		89,81		90,14		90,47		90,8		90,8	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					2.423.324.601		3.735.212.655		3.813.084.258		3.929.557.319		4.042.669.595		4.149.323.169		Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kenaikan Nilai IKLH	%	65	65	465.850.300	67	521.233.534	69	532.100.195	71	548.353.531	73	564.137.883	75	579.020.950	75	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Terpelihara	%	90	90	1.957.474.301	90	3.213.979.121	90	3.034.910.258	90	3.066.673.203	90	3.100.430.439	90	2.918.688.126	90	Dinas Perumahan, Kawasan Perumikan dan Pertanahan	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kenaikan luasan RTH	%	0	0	0	30	0	40	246.073.805	50	314.530.585	60	378.101.273	60	651.614.093	60	Dinas Lingkungan Hidup	
Sasaran	6.1.2. Terciptanya Kebersihan Kota	Persentase penanganan sampah	%	86	100	7.972.855.032	100	8.090.718.859	100	8.259.393.927	100	8.511.682.318	100	8.756.691.024	100	8.987.709.754	100	Dinas Lingkungan Hidup (OPD Utama); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Sasaran	6.1.2. Terciptanya Kebersihan Kota	Persentase desa dengan sarana dan prasarana sampah (TPS3R) dalam kondisi baik fungsional	%	N.A	8,7		23,19		52,17		81,16		95,65					100	Dinas Lingkungan Hidup (OPD Utama); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kecamatan & Desa/Kelurahan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					759.757.808		2.342.705.146		2.391.545.794		2.464.597.067		2.535.540.473		2.602.433.017		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Persampahan	%		18,18	759.757.808	36,36	1.561.803.431	54,55	1.434.927.476	72,73	1.426.871.986	90,91	2.535.540.473	100	2.602.433.017	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan TPS-3R Tingkat Desa	%	N.A	N.A	0	27,27	780.901.715	63,64	956.618.318	100	1.037.725.081	N.A	0	N.A	0	N.A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7.213.097.224		5.748.013.713		5.867.848.133		6.047.085.251		6.221.150.551		6.385.276.737		Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah melalui 3 R	%	24	26	7.213.097.224	27	5.748.013.713	28	5.867.848.133	30	6.047.085.251	32	6.221.150.551	32	6.385.276.737	32	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase peningkatan pelayanan persampahan	%	30	35		40		45		50		55		55		55	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Fasilitasi pembangunan TPS 3R Tingkat Desa	Desa	6	6		16		36		56		66		69		69	Dinas Lingkungan Hidup	
Sasaran	6.1.3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,53	0,55	47.600.168.533	0,56	28.677.523.790	0,57	30.004.419.862	0,58	32.188.303.055	0,59	32.241.079.343	0,6	32.060.879.580	0,6 (sedang)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial	
Sasaran	6.1.3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya Penanggulangan Bencana	Persentase luas kawasan bebas genangan banjir	%	81,42	82,5		84,5		87,5		92		95		97		97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Sasaran	6.1.3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) maksimal	menit	14	14		14		13		13		12		12		12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	
Sasaran	6.1.3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya Penanggulangan Bencana	Persentase desa dengan drainase dalam kondisi baik fungsional	%	N.A	75,73		77,23		78,73		80,23		81,73		83,23		83,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kecamatan & Desa/Kel (OPD Pendukung)	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					42.407.801.594		25.088.274.641		26.724.007.831		28.412.303.784		28.356.387.963		28.073.702.402		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Rasio	81,42	82,5	29.066.909.081	84,5	10.263.312.602	87,5	11.589.975.420	92	12.815.992.819	95	12.311.137.313	97	11.605.146.485	97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dalam kondisi baik	%	68,96	70,23	4.821.109.628	72,01	10.625.603.075	73,36	8.397.229.120	74,39	9.397.433.915	75,47	9.276.372.001	76,1	10.759.226.819	76,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase Perkotaan yang Terbangun	%	0,15	41,65	8.519.782.885	49,14	1.675.141.782	52,31	3.943.560.019	55,73	2.724.105.736	58,58	3.020.346.244	60,67	1.743.126.548	60,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Trotoar Drainase dalam Kondisi Baik	%	76,95	77,76	0	82,69	1.356.817.112	85,45	832.050.738	88,22	894.068.599	91,23	882.625.041	93,58	731.957.961	93,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Trotoar Drainase yang Terbangun	%	0,13	3,32	0	7,56	1.167.400.070	14,07	1.961.192.534	22,05	2.580.702.715	31,82	2.865.907.364	42,24	3.234.244.589	42,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.048.525.983		3.213.418.771		3.280.412.031		3.380.614.283		3.477.925.238		3.569.679.745		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKK Outcome)	%	100	100	4.048.525.983	100	3.213.418.771	100	3.280.412.031	100	3.380.614.283	100	3.477.925.238	100	3.569.679.745	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1.143.840.956		375.830.378		385.607.683		395.384.988		406.766.142		417.497.433		Dinas Sosial	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	100	100	1.143.840.956	100	375.830.378	100	385.607.683	100	395.384.988	100	406.766.142	100	417.497.433	100	Dinas Sosial
Sasaran	6.1.4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	76,18	78,22	19.553.283.403	80,16	14.632.356.683	82,06	14.937.411.623	84,12	15.393.684.271	86,02	15.836.791.349	88,32	16.254.597.050	88,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				19.553.283.403		14.632.356.683		14.937.411.623		15.393.684.271		15.836.791.349		16.254.597.050		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum	%		14,71	17.847.891.166	34,31	10.380.001.179	47,55	9.697.418.410	66,18	9.977.268.014	80,39	13.646.508.457	100	5.402.025.198	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Keputusan PBG (Persejutuan Bandungan dan Gedung) Kab/Kota	Rasio	N.A	0,04	329.799.708	0,04	210.985.907	0,04	216.822.757	0,04	245.387.848	0,04	369.194.861	0,04	8.983.439.937	0,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terbangun Rumah Tahfiz	%	N.A	N.A	0	25	2.358.780.679	62,5	3.305.502.974	100	3.400.893.692	100	0	100	0	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	%	76,18	78,22	1.375.592.529	80,16	1.682.588.918	82,06	1.717.667.482	84,12	1.770.134.717	86,02	1.821.088.031	88,32	1.869.131.915	88,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	7. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban				4.347.729.483		2.489.655.834		3.189.141.356		3.303.675.536		3.418.374.475		3.531.472.133			
Tujuan	7.1. Mewujudkan kerukunan dan ketenteraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh	Angka konflik sosial, pelanggaran perda dan Trantibum	konflik dan pelanggaran	3	0	4.347.729.483	0	2.489.655.834	0	3.189.141.356	0	3.303.675.536	0	3.418.374.475	0	3.531.472.133	0	
Sasaran	7.1.1. Terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif	Angka konflik sosial	Jumlah	N.A	0	49.361.004	0	100.143.744	0	102.231.538	0	105.354.265	0	108.386.886	0	111.246.345	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					49.361.004		100.143.744		102.231.538		105.354.265		108.386.886		111.246.345		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	33,33	100	49.361.004	100	100.143.744	100	102.231.538	100	105.354.265	100	108.386.886	100	111.246.345	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran	7.1.2. Terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	4.298.368.479	100	2.389.512.090	100	3.086.909.818	100	3.198.321.271	100	3.309.987.589	100	3.420.225.788	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Utama); Kecamatan
Sasaran	7.1.2. Terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	%	80	100				100			100			100		100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Utama); Kecamatan
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.955.774.611		2.161.839.846		2.206.909.818		2.274.321.271		2.339.787.589		2.401.515.788		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	%	N.A	100	1.858.082.492	100	1.015.446.319	100	1.040.587.645	100	1.076.000.600	100	1.110.278.348	100	1.142.571.676	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	N.A	100	1.858.082.492	100	1.015.446.319	100	1.040.587.645	100	1.076.000.600	100	1.110.278.348	100	1.142.571.676	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	100	239.609.627	100	130.947.208	100	125.734.528	100	122.320.071	100	119.230.893	100	116.372.436	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
7.01	KECAMATAN					342.593.868		227.672.244		880.000.000		924.000.000		970.200.000		1.018.710.000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	32.869.082	100	17.856.128	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Hampanar Rawang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	23.653.068	100	18.236.962	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Koto Baru
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	0	100	0	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Kumun Debai
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	17.389.005	100	24.905.989	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Pesisir Bukit

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	0	100	0	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000	100	138.915.000	100	Kecamatan Pondok Tinggi
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	10.051.448	100	4.881.574	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000	100	138.915.000	100	Kecamatan Sungai Bungkal
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	244.371.275	100	149.990.137	100	140.000.000	100	147.000.000	100	154.350.000	100	162.067.500	100	Kecamatan Sungai Penuh
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	14.259.990	100	11.801.454	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Tanah Kampung

* Apabila terjadi perubahan nomenklatur SKPD, maka penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten untuk melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian juga peraturan yang sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan Pendidikan minimal 20 % dari Belanja Daerah, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Urusan Kesehatan minimal 10 % dari Belanja Daerah.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya. Dalam hal ini pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun.

7.1 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan gambaran keuangan daerah yang dijelaskan dalam bab III, proyeksi belanja daerah dan kapasitas riil keuangan daerah Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel VII.1
Proyeksi Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	BELANJA DAERAH	863.681.525.643	794.779.078.399	820.105.047.546	845.431.016.694	869.756.985.841	893.082.954.988
1	BELANJA OPERASI	578.454.837.288	554.548.013.153	576.660.581.451	600.164.674.628	609.326.786.175	629.172.160.270
a	Belanja Pegawai	316.490.326.054	340.811.365.245	349.331.649.376	358.064.940.611	367.016.564.126	376.191.978.229
b	Belanja Barang dan Jasa	255.843.817.006	207.778.882.368	217.128.932.075	226.899.734.018	237.110.222.049	247.780.182.041
c	Belanja Bunga	-	-				
d	Belanja Subsidi	-	-				
e	Belanja Hibah	5.920.694.228	5.757.765.540	10.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
f	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2	BELANJA MODAL	178.343.953.355	141.322.264.246	141.875.665.096	143.697.541.065	158.861.398.666	162.341.993.718
a	Belanja Modal Tanah	785.000.000	590.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
b	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	24.405.530.608	27.894.851.816	28.921.729.978	29.502.198.971	33.418.163.371	34.413.312.134
c	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	36.469.146.567	33.937.698.736	34.964.576.898	35.545.045.891	39.461.010.291	40.456.159.054
d	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	114.707.117.680	71.435.601.894	73.489.358.219	74.650.296.204	82.482.225.004	84.472.522.530
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.977.158.500	7.464.111.800	3.000.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
3	BELANJA TAK TERDUGA	2.400.000.000	2.100.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
a	Belanja Tak Terduga	2.400.000.000	2.100.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	104.482.735.000	96.808.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000
a	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	104.482.735.000	96.808.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000	99.568.801.000

Sumber : LRA Bakeuda, Hasil Analisis, 2021

Tabel VII.2
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	774.197.507.461	752.779.078.399	781.105.047.546	809.431.016.694	837.756.985.841	866.082.954.988
2	SiLPA	89.484.018.182	45.000.000.000	42.000.000.000	39.000.000.000	35.000.000.000	30.000.000.000
3	Pencairan Dana Cadangan						
Total Penerimaan		863.681.525.643	797.779.078.399	823.105.047.546	848.431.016.694	872.756.985.841	896.082.954.988
Dikurangi:							
1	Belanja Pegawai	316.490.326.054	340.811.365.245	349.331.649.376	358.064.940.611	367.016.564.126	376.191.978.229
2	Belanja Bunga						
3	Belanja Subsidi						
4	Pembayaran Pokok Pinjaman						
Total Pengeluaran		316.490.326.054	340.811.365.245	349.331.649.376	358.064.940.611	367.016.564.126	376.191.978.229
Kapasitas Riil Keuangan Daerah		547.191.199.589	456.967.713.154	473.773.398.170	490.366.076.083	505.740.421.715	519.890.976.759

Sumber : LRA Bakeuda, Hasil Analisis, 2021

7.2 Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan non urusan.

Tabel VII.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sungai Penuh

Tabel VII.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sungai Penuh

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				286.531.008.158		229.430.509.164		238.613.669.650		245.827.873.729		252.795.646.033		259.361.701.121			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				38.453.448.858		29.828.607.931		30.934.139.552		31.490.602.764		32.403.893.173		33.860.037.859		Dinas Pendidikan	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Percentase Capaian SPM Pendidikan	%	93,47	100	28.996.470.264	100	21.243.640.143	100	22.932.893.831	100	23.821.671.303	100	24.908.585.344	100	26.521.532.719	100	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek Huruf	%	98,59	98,87	4.345.973.314	98,97	3.422.490.438	99	3.112.054.312	99,12	2.944.350.025	99,18	2.838.469.092	99,21	2.770.799.697	99,21	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (rata-rata APK SD dan SMP)	%	100,6	100	1.207.214.810	100	967.977.094	100	848.742.085	100	772.288.531	100	725.623.678	100	687.922.683	100	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (rata-rata APM SD dan SMP)	%	96,19	96,44	1.207.214.810	96,85	967.977.094	97,26	848.742.085	97,66	772.288.531	98,07	725.623.678	98,48	687.922.683	98,48	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Percentase siswa berprestasi mendapat beasiswa	%	79	80	724.328.886	80	691.412.210	85	678.993.668	87	675.752.465	88	682.939.932	90	649.704.756	90	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Percentase siswa kurang mampu berprestasi melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri	%	49	50	579.463.109	50	414.847.326	52	424.371.043	58	434.412.299	60	448.179.330	62	458.615.122	62	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Percentase siswa kurang mampu/miskin yang mendapat bantuan/beasiswa	%	N.A	N.A	965.771.848	80	795.124.041	83	735.576.474	86	675.752.465	90	640.256.186	92	611.486.830	92	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Percentase Penerapan Muatan Lokal	%	100	100	22.815.192	100	38.702.413	100	38.806.892	100	39.392.014	100	40.005.516	100	40.604.707	100	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	22.815.192	100	38.702.413	100	41.792.038	100	45.019.444	100	48.006.619	100	50.755.884	100	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	22.815.192	100	38.702.413	100	41.792.038	100	45.019.444	100	48.006.619	100	50.755.884	100	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata Nilai UN SD	nilai	79,12	79,12	31.111.625	79,38	51.603.217	79,51	50.747.474	79,64	50.646.875	79,77	50.673.653	79,9	50.755.884	79,9	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata Nilai UN SMP	nilai	65,84	65,85	31.111.625	65,85	51.603.217	65,86	50.747.474	65,87	50.646.875	65,88	50.673.653	65,89	50.755.884	65,89	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Percentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	%	80	83	296.342.991	85	1.105.825.912	87	1.128.880.138	90	1.163.362.493	92	1.196.849.873	95	1.228.425.126	95	Dinas Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				86.620.388.440		95.605.013.885		97.598.184.391		100.579.382.423		103.474.559.132		106.204.421.496		Dinas Kesehatan	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	85	87	62.671.227.381	90	64.193.801.620	92	66.590.222.132	94	66.375.319.864	96	68.400.176.326	98	72.806.116.008	98	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	%	65	70	17.175.680.328	75	28.819.691.620	80	28.342.107.502	85	31.523.084.070	90	32.312.986.373	95	30.497.846.071	95	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	4.474.519.640	100	1.595.553.641	100	1.649.123.863	100	1.633.190.908	100	1.683.448.296	100	1.794.072.888	100	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	100	1.318.937.953	100	688.196.311	100	702.543.807	100	724.003.451	100	744.843.884	100	764.494.331	100	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	%	90	90	695.551.143	92	98.968.062	92	101.031.345	92	104.117.411	92	107.114.430	95	109.940.319	95	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	%	79,8	79,8	284.471.995	80	208.802.631	80	213.155.742	80	219.666.719	80	225.989.823	80	231.951.879	80	Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				144.042.270.756		93.324.796.285		95.270.428.883		98.180.524.155		101.006.649.748		103.071.971.716		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Cakupan Pelayanan Irigasi Kondisi Baik	Ha	2.057.43	2.094.23	11.945.945.004	2.164.04	4.089.027.918	2.233.85	3.061.582.271	2.303.66	2.283.105.933	2.373.47	3.222.588.874	2.443.27	4.338.389.948	2.443.27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Rasio	81,42	82,5	29.066.909.081	84,5	10.263.312.602	87,5	11.589.975.420	92	12.815.992.819	95	12.311.137.313	97	11.605.146.485	97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	58,33	59,64	3.358.540.034	61,82	7.114.328.387	64	7.262.647.695	68,98	7.484.489.845	73,96	7.699.930.824	77,41	7.903.070.142	77,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Persampahan	%		18,18	759.757.808	36,36	1.561.803.431	54,55	1.434.927.476	72,73	1.426.871.986	90,91	2.535.540.473	100	2.602.433.017	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan TPS-3R Tingkat Desa	% N.A	N.A	0	27,27	780.901.715	63,64	956.618.318	100	1.037.725.081	N.A	0	N.A	0	N.A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	59,66	60,07	4.838.068.390	61,69	7.082.548.971	62,19	7.230.205.743	62,93	7.451.056.932	63,68	7.665.535.546	65,49	7.867.767.449	65,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dalam kondisi baik	%	68,96	70,23	4.821.109.628	72,01	10.625.603.075	73,36	8.397.229.120	74,39	9.397.433.915	75,47	9.276.372.001	76,1	10.759.226.819	76,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase Perkotaan yang Terbangun	% 0,15	41,65	8.519.782.885	49,14	1.675.141.782	52,31	3.943.560.019	55,73	2.724.105.736	58,58	3.020.346.244	60,67	1.743.126.548	60,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Trotoar Drainase dalam Kondisi Baik	%	76,95		82,69	1.356.817.112	85,45	832.050.738	88,22	894.068.599	91,23	882.625.041	93,58	731.957.961	93,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Trotoar Drainase yang Terbangun	% 0,13	3,32		7,56	1.167.400.070	14,07	1.961.192.534	22,05	2.580.702.715	31,82	2.865.907.364	42,24	3.234.244.589	42,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum	%		14,71	17.847.891.166	34,31	10.380.001.179	47,55	9.697.418.410	66,18	9.977.268.014	80,39	13.646.508.457	100	5.402.025.198	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Keputusan PBG (Persetujuan Bandungan dan Gedung) Kab/Kota	Rasio N.A	0,04	329.799.708	0,04	210.985.907	0,04	216.822.757	0,04	245.387.848	0,04	369.194.861	0,04	8.983.439.937	0,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terbangun Rumah Tahfiz	% N.A	N.A	0	25	2.358.780.679	62,5	3.305.502.974	100	3.400.893.692	100	0	100	0	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Sub SWP Prioritas Pusat Kota yang disusun RTBL	%		20	487.588.140	40	539.607.607	60	550.857.330	80	567.683.615	100	584.024.383	100	0	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	70,69	72	58.479.817.295	74	28.620.914.441	76	29.228.184.328	78	30.131.805.323	80	31.001.701.898	82	31.830.921.592	82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang dibangun	% 4	2,96	1.421.473.508	4,4	2.908.743.809	5,92	2.958.803.306	7,4	3.038.354.127	8,88	3.123.260.323	10,35	3.194.324.244	10,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	0,21	0,08	789.995.580	0,25	906.288.682	0,42	925.182.962	0,58	953.443.258	0,75	980.888.115	1	1.006.765.872	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	%	76,18	78,22	1.375.592.529	80,16	1.682.588.918	82,06	1.717.667.482	84,12	1.770.134.717	86,02	1.821.088.031	88,32	1.869.131.915	88,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					3.708.204.560		1.597.691.893		5.931.000.527		6.030.820.465		6.089.202.869		6.144.822.642		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	%	90,92	0	341.787.434	100	473.986.847	100	483.868.511	100	498.648.579	100	513.002.175	100	526.536.181	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (IKK Outcome)	% 65,3	65,3	402.057.927	50	265.125.270	40	270.652.594	30	278.919.848	20	286.948.553	5	294.518.821	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase berkurangnya kawasan permukiman kumuh	% N.a	N.a	0	3	0	4	4.300.000.000	4	4.350.000.000	4	4.360.000.000	4	4.370.000.000	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Permukiman yang didukung oleh PSU	%	70	70	2.964.359.199	76	858.579.776	82	876.479.422	88	903.252.038	94	929.252.141	100	953.767.640	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.152.520.183		7.674.901.308		7.834.907.423		8.074.229.607		8.306.646.240		8.525.791.906		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	%	N.A	100	1.858.082.492	100	1.015.446.319	100	1.040.587.645	100	1.076.000.600	100	1.110.278.348	100	1.142.571.676	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	N.A	100	1.858.082.492	100	1.015.446.319	100	1.040.587.645	100	1.076.000.600	100	1.110.278.348	100	1.142.571.676	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	100	239.609.627	100	130.947.208	100	125.734.526	100	122.320.071	100	119.230.893	100	116.372.436	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Satlinmas dalam upaya penanggulangan bencana	%	N.A	20	79.754.859	20	140.317.771	20	161.433.055	20	187.293.869	20	216.672.986	20	249.750.225	20	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	96	100	967.724.030	100	1.154.981.765	100	1.169.331.337	100	1.193.854.380	100	1.215.388.817	100	1.232.818.298	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian SPM Penanggulangan Bencana	%	N.A	100	1.844.666.086	100	956.563.135	100	968.447.541	100	988.757.678	100	1.006.592.634	100	1.021.027.839	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana dalam Kondisi Baik	%	51	51	256.074.614	55	47.780.020	60	48.373.641	65	49.388.126	70	50.278.976	75	51.000.011	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKK Outcome)	%	100	100	4.048.525.983	100	3.213.418.771	100	3.280.412.031	100	3.380.614.283	100	3.477.925.238	100	3.569.679.745	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.554.175.361		1.399.497.862		1.045.008.874		1.472.314.315		1.514.694.871		1.554.655.502		Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	85	85	428.191.692	90	392.528.802	90	400.712.231	90	412.952.238	95	424.839.065	95	436.047.155	95	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelanggang dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	6,25	6,31	72.807.280	6,82	74.636.077	6,9	74.731.723	6,93	77.464.827	7	80.077.799	7,2	84.464.452	7,2	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Sosial	%	19,1	19,13	91.835.441	19,3	100.243.815	19,9	103.794.060	20,12	106.514.138	20,35	109.196.999	20,55	109.803.788	20,55	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh layanan Jaminan Sosial	%	25	25	817.499.992	30	456.258.790	40	465.770.860	50	479.998.124	60	493.814.866	70	506.842.674	70	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	100	100	1.143.840.956	100	375.830.378	100	385.607.683	100	395.384.988	100	406.766.142	100	417.497.433	100	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.571.632.057		29.264.915.010		32.433.029.092		33.729.880.684		34.989.330.942		36.208.001.098		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					385.744.930		279.006.859		384.823.585		393.523.701		421.972.780		449.939.414		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan Mikro	Dokumen	N.A	2 Dokumen	56.869.084	0	0	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	120.000.000	1 Dokume	140.000.000	1 Dokume	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja (IKK Outcome)	Juta Rp/Tenaga Kerja	108,62	112,57	76.818.193	116,76	69.736.769	121,2	71.190.639	125,9	73.365.202	130,89	75.477.019	136,18	77.468.251	136,18	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	N.A	100	160.246.720	100	138.100.271	100	140.979.381	100	145.285.685	100	149.467.733	100	153.410.985	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pelaku usaha/perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP,PKB,LKS,Bripartit dan Tripartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	N.A	50	91.810.933	50	71.169.819	50	72.653.565	50	74.872.814	50	77.028.028	50	79.060.178	50	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.364.989.767		590.599.634		602.912.438		621.328.779		639.213.722		656.077.437		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang responsif gender	%	100	100	779.803.864	100	228.243.546	100	233.001.961	100	240.119.152	100	247.030.980	100	253.548.143	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK Outcome)	%	0,26	0,25	26.704.829	0,2	28.476.416	0,15	27.332.489	0,1	26.443.108	0,08	25.501.293	0,05	24.500.888	0,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)	%	100	100	57.388.602	100	66.224.224	100	69.342.467	100	73.184.846	100	76.994.450	100	80.698.895	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	%	20	20	112.576.220	35	29.887.187	50	30.510.274	65	31.442.230	80	32.347.294	80	33.200.679	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen data gender dan anak	Dokumen	1	2	30.154.345	2	40.347.702	2	41.188.870	2	42.447.010	2	43.668.847	2	44.820.917	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	NA	0	90.504.935	0	50.387.727	0	51.438.209	0	51.527.356	0	52.206.270	0	52.711.111	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa/kelurahan layak anak	%	NA	58	122.110.973	65	76.962.323	68	78.566.831	72	82.448.770	75	85.626.358	75	88.757.812	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)	%	100	100	145.745.999	100	70.070.509	100	71.531.337	100	73.716.307	100	75.838.230	100	77.838.992	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.376.871.204		949.598.313		1.619.395.511		1.714.006.309		1.814.262.697		1.920.027.097		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah lantai jemur	lantai jemur	N.A	0	0	0	0	2	300.000.000	4	330.000.000	6	363.000.000	8	399.300.000	8	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Lumbung Pangan	Lumbung Pangan	0	0	0	0	0	2	350.000.000	4	385.000.000	6	423.500.000	8	465.850.000	8	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Konsumsi Energi	kkal/ kap/ hari	2.301.00	2.290,00	848.226.812	2.280,00	564.279.025	2.270,00	576.043.097	2.260,00	593.638.697	2.250,00	610.726.582	2.240,00	626.838.750	2.240,00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	4,14	5	123.295.884	25	92.785.603	45	94.719.995	65	97.613.277	85	100.423.074	100	103.072.432	100	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Stabilitas Harga Pangan	%	CV < 30 %	CV < 30	126.909.375	CV < 30	96.472.448	CV < 30	98.483.703	CV < 30	101.491.950	CV < 30	104.413.395	CV < 30	107.168.025	CV < 30	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi (Kkal/ Kap/ Hari)	Kkal / Kap/ Hari	3.436,00	3.439,00	94.516.283	2.500,00	71.279.006	2.500,00	72.765.029	2.500,00	74.987.683	2.500,00	77.146.202	2.500,00	79.181.471	2.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penyusunan Peta Ketahanan Pangan Daerah	%	100	100	94.804.978	100	56.523.881	100	57.702.289	100	59.464.842	100	61.176.537	100	62.790.494	100	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	%	90	91	89.117.872	92	68.258.350	92,5	69.681.398	93	71.809.860	93,5	73.876.907	94	75.825.925	94	Dinas Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					76.903.249		59.774.374		866.020.548		942.884.460		1.014.694.588		1.086.401.358		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (IKK Outcome)	%	N.a	100	30.898.930	100	0	100	135.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	170.000.000	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Kasus yang tertangani	%	N.a	N.a	0	100	29.887.187	100	30.510.274	100	31.442.230	100	32.347.294	100	33.200.679	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penyelesaian Penetapan Tanah Ulayat	%	N.a	N.a	0	100	0	100	320.000.000	100	340.000.000	100	360.000.000	100	380.000.000	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Penyelesaian Tanah Kosong	%	N.a	100	46.004.319	100	29.887.187	100	30.510.274	100	31.442.230	100	32.347.294	100	33.200.679	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Izin Yang Dikeluarkan	%	N.a	N.a	0	100	0	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.10	PROGRAM PENATA.Guna.TANAH	Bertambahnya Aset Pemerintah Daerah Berupa Tanah	%	N.a	N.a	0	100	0	100	230.000.000	100	260.000.000	100	290.000.000	100	320.000.000	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					10.077.518.231		9.936.627.385		10.143.785.899		10.453.634.231		10.754.542.008		11.038.267.975		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun	%	45	50	134.278.301	75	93.349.241	100	95.295.383	100	98.206.241	100	101.033.107	100	103.698.559	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kenaikan Nilai IKLH	%	65	65	465.850.300	67	521.233.534	69	532.100.195	71	548.353.531	73	564.137.883	75	579.020.950	75	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Terpelihara	%	90	90	1.957.474.301	90	3.213.979.121	90	3.034.910.258	90	3.066.673.203	90	3.100.430.439	90	2.918.688.126	90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KFANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kenaikan luasan RTH	%	0	0	0	30	0	40	246.073.805	50	314.530.585	60	378.101.273	60	651.614.093	60	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang tertangani sesuai dengan petunjuk teknis	%	15	15	30.154.345	18	22.315.766	21	22.781.004	24	23.476.865	27	24.152.646	30	24.789.840	30	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH	%	50	55	131.788.558	60	123.112.695	65	125.679.345	70	129.518.300	75	133.246.483	75	136.761.787	75	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	70	70	80.545.933	75	102.406.891	80	104.541.867	85	107.735.164	90	110.836.320	95	113.760.400	95	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	%	60	60	34.174.924	80	60.192.794	80	61.447.692	80	63.324.650	80	65.147.450	80	66.866.167	80	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	30.154.345	100	52.023.630	100	53.108.217	100	54.730.441	100	56.305.856	100	57.791.316	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah persampahan	%	24	26	7.213.097.224	27	5.748.013.713	28	5.867.848.133	30	6.047.085.251	32	6.221.150.551	32	6.385.276.737	32	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase peningkatan pelayanan persampahan	%	30	35		40		45		50		55		55		55	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Fasilitasi pembangunan TPS 3R Tingkat Desa	Desa	6	6		16		36		56		66		69		69	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.577.767.497		471.409.505		481.237.437		495.937.136		510.212.683		523.673.098		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)	%	100	100	238.729.725	100	140.477.755	100	143.406.431	100	147.786.871	100	152.040.915	100	156.052.053	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)	%	100	100	50.257.619	100	29.573.517	100	30.190.065	100	31.112.239	100	32.007.805	100	32.852.234	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran (IKK Outcome)	%	80	85	67.545.783	90	42.059.906	95	42.936.770	100	44.248.300	100	45.521.987	100	46.722.947	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	80	82,5	67.545.783	85	42.059.906	87,5	42.936.770	90	44.248.300	92,5	45.521.987	95	46.722.947	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta nikah	%	80	84	67.545.783	88	42.059.906	92	42.936.770	96	44.248.300	100	45.521.987	100	46.722.947	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	%	N.A	65	1.037.943.095	70	148.551.074	75	151.648.062	80	156.280.248	85	160.778.774	90	165.020.434	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen profil kependudukan	Dokumen	50	50	48.199.709	50	26.627.441	60	27.182.569	65	28.012.878	65	28.819.228	70	29.579.536	70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.597.261.613		2.296.031.491		2.586.899.088		2.682.794.962		2.779.054.965		2.874.017.811		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Mandiri	%	57	58,5	0	60,9	0	63,8	143.000.000	71,7	157.300.000	82,59	173.030.000	90,59	190.333.000	90,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Pengembangan BUMDes Aktif	%	N.A	58,45	0	60,9	0	63,8	100.000.000	71,7	110.000.000	82,59	121.000.000	90,59	133.100.000	90,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa/ Kelurahan	%	20	20	992.202.137	40	750.745.123	60	766.396.635	80	789.806.703	100	812.541.283	100	833.977.720	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat (LPM) yang berperan Aktif	%	N.a	4,6	1.605.059.476	9,23	1.545.286.368	15,38	1.577.502.453	23,07	1.625.688.259	30,76	1.672.483.682	40,76	1.716.607.091	40,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.701.065.823		4.335.522.491		4.425.909.334		4.561.101.526		4.692.392.795		4.816.187.344		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1,6	1,55	67.238.079	1,5	53.068.729	1,46	54.026.983	1,43	55.523.791	1,39	57.076.379	1,35	56.726.608	1,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	%	18,84	18,11	17.783.708	17,49	13.622.415	16,96	13.944.395	16,51	14.409.689	16,13	14.836.180	15,8	17.135.342	15,8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	66,23	66,58	38.599.638	66,9	28.152.991	67,19	28.818.415	67,45	29.780.024	67,69	30.661.439	67,69	31.433.151	67,69	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40,04	40,5	14.856.899	40,93	11.352.013	41,31	11.620.329	41,66	12.008.074	41,98	12.363.484	41,98	12.674.658	41,98	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1,6	1,55	460.971.132	1,5	488.211.743	1,46	493.166.156	1,43	510.448.117	1,39	522.493.425	1,35	533.006.139	1,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,17	2,15	987.933.696	2,13	1.012.939.735	2,12	1.031.164.799	2,11	1.022.077.148	2,1	1.047.859.573	2,09	1.073.258.620	2,09	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	%	21	21	1.574.805.481	21	1.614.666.098	22	1.639.990.322	22	1.706.813.949	22	1.749.869.214	22	1.792.284.259	22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	%	76,25	85	179.266.551	86	190.965.245	87	200.572.604	88	214.097.648	89	224.486.971	90	233.577.962	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penyaluhan terhadap PUS dan WUS di lokus desa stunting dan pentingnya metode MKJP untuk mengatasi jarak kehamilan	%	100	100	345.036.039	100	367.552.626	100	386.044.002	100	412.075.782	100	432.072.211	100	449.569.728	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase sosialisasi dan pembinaan terhadap kader pendamping desa tentang stunting	%	100	100	3.523.703	100	137.485.649	100	143.171.858	100	149.751.563	100	156.085.080	100	145.063.736	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Sosialisasi dan Pembinaan 1000 HPK terhadap kader pendamping desa kepada Keluarga yang berisiko stunting	%	100	100	2.359.622	100	85.928.530	100	89.482.411	100	93.594.727	100	97.553.175	100	90.664.835	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga pra sejahtera, sejahtera I dan sejahtera II yang ikut ber - KB	%	25,5	24,5	8.691.275	23,3	331.576.717	22,58	333.907.060	21,6	340.521.014	20,86	347.035.664	19,87	380.792.306	19,87	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				2.346.004.860		1.743.955.705		1.780.313.642		1.834.694.444		1.887.506.109		1.937.302.232		Dinas Perhubungan	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	72,09	75,5	1.036.318.037	84,41	812.188.158	85,5	801.141.139	87,74	825.612.500	96,12	849.377.749	100	871.786.004	100	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Kategori	B	B	1.309.686.823	B	931.767.547	B	979.172.503	B	1.009.081.944	A	1.038.128.360	A	1.065.516.228	A	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.207.488.714		1.834.046.844		1.872.283.000		1.929.473.064		1.985.012.930		2.037.381.473		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	292.249.204	50	244.767.890	55	229.050.179	60	214.231.506	65	208.869.936	70	202.871.668	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	292.249.204	50	244.767.890	55	229.050.179	60	214.231.506	65	208.869.936	70	202.871.668	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	4	9	729.298.484	16	504.392.299	19	499.000.699	22	503.591.482	25	529.972.925	28	555.820.030	28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	78.805.593	50	170.966.168	55	203.304.669	60	236.655.647	65	249.053.217	70	261.199.709	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	78.805.593	100	170.966.168	100	203.304.669	100	236.655.647	100	249.053.217	100	261.199.709	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	1	1	1.736.080.636	1,2	498.186.429	1,4	508.572.605	1,6	524.107.276	1,8	539.193.699	2	553.418.689	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.174.203.244		638.844.346		652.162.952		672.083.682		691.429.603		709.670.878		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%		60,93	49.882.322	62,91	29.887.187	64,9	30.510.274	66,23	31.442.230	67,55	32.347.294	68,87	33.200.679	68,87	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSF/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat	%		74,31	80.411.585	75,07	37.314.103	75,84	38.092.026	76,6	39.255.571	77,36	40.385.543	77,36	41.450.993	77,36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang dilatih	%		28,12	437.543.560	27,54	402.680.030	26,98	411.075.091	26,45	423.631.639	25,93	435.825.872	25,44	447.323.816	25,44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya jumlah SDM Pengurus Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	Koperasi		569	221.364.149	581	24.905.989	593	25.425.228	605	26.201.858	617	26.956.078	629	27.667.233	629	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase Capaian Peningkatan Kapasitas SDM UMKM yang dilatih -> Percentase SDM UMKM yang dilatih	%		5,52	37.200.206	6,35	19.070.872	7,16	19.468.461	7,96	23.015.996	8,74	23.678.511	9,5	24.303.197	9,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase Produk UKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikat Halal	%		1,01	31.000.172	1,28	19.070.872	1,54	19.468.461	1,8	23.015.996	2,05	23.678.511	2,4	24.303.197	2,4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase Usaha Mikro Yang dilakukan Updating Pendataan	%		1,14	176.080.975	1,13	28.606.308	1,11	29.202.691	1,1	24.188.988	1,09	24.885.267	1,08	25.541.790	1,08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Percentase usaha Mikro yang menjadi wira usaha kecil	%	0	0,56	140.720.275	0,61	77.308.985	0,67	78.920.720	0,73	81.331.404	0,78	83.672.527	0,83	85.879.973	0,83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					1.038.607.746		985.701.895		1.006.251.780		1.036.988.374		1.066.838.075		1.094.983.363		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan	ada	ada	241.676.668	ada	137.029.464	ada	139.886.250	ada	144.159.164	ada	148.308.784	ada	152.221.462	ada	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	event promosi	ada	ada	158.722.418	ada	185.838.885	ada	189.713.249	ada	195.508.159	ada	201.135.860	ada	206.442.220	ada	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Percentase penerbitan perizinan dan non perizinan tepat waktu	%	N.A	95	163.255.621	95	203.654.778	95	207.900.567	95	214.251.021	95	220.418.234	95	226.233.301	95	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru per tahun	%	97.05	27.05	388.108.527	34.05	399.388.455	44.05	407.714.894	54.05	420.168.802	64.05	432.263.358	74.05	443.667.315	74.05	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Percentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	95	100	86.844.512	100	59.790.313	100	61.036.820	100	62.901.228	100	64.711.839	100	66.419.065	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPERMUDAAN DAN OLAHARGA					4.991.540.745		4.220.818.799		4.308.814.305		4.440.429.752		4.568.247.487		4.688.766.840		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK Outcome)	%	45	50	1.631.229.255	50	1.180.722.326	55	1.205.337.990	60	1.242.155.798	65	1.277.911.243	70	1.311.625.055	70	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK OUTCOME)	%	4,85	5,1		5,1		5,3		5,49		5,68		5,88		5,88		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Percentase Atlet Pelajar Yang Berprestasi di Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional	%	N.A	N.A	3.327.400.118	7,69	2.942.395.347	42,4	3.078.681.564	8,97	3.172.497.413	42,4	3.265.081.470	12,82	3.350.853.707	12,82	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Percentase Olahraga rekreasi yang dilestarikan	%	N.A	20	32.911.372	20	97.701.126	50	24.794.751	55	25.776.541	60	25.254.774	65	26.288.078	65	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					456.252.512		48.641.436		49.655.511		51.172.270		52.645.263		54.034.149		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (IKK Outcome)	%	N.a	100	365.450.456	100	25.196.305	100	25.279.169	100	26.804.522	100	27.576.090	100	28.303.602	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (IKK Outcome)	%	N.a	100	90.802.056	100	23.445.131	100	24.376.342	100	24.367.748	100	25.069.173	100	25.730.547	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					165.996.450		49.471.164		50.502.537		52.045.169		53.543.289		54.955.866		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	165.996.450	50	49.471.164	55	50.502.537	60	52.045.169	65	53.543.289	70	54.955.866	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					310.066.829		444.291.145		653.553.713		767.407.797		880.862.128		993.548.216		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang dilestarikan	Warisan	5	5	127.130.471	6	356.016.666	7	363.438.891	8	374.540.361	9	385.321.502	4	395.487.041	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Keaktifan Kelompok Seni Budaya	%	50	55	35.180.069	65	36.805.899	65	37.573.227	70	38.720.925	70	39.835.507	72	40.886.446	72	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah sejarah lokal	Dokumen	3	3	19.097.752	4	20.821.407	5	21.255.491	6	21.904.753	7	22.535.282	8	23.129.807	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	20	20	28.144.055	24	30.647.173	28	31.286.104	32	32.241.758	36	33.169.837	40	34.044.922	40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan jumlah koleksi permuseuman daerah	koleksi	10	10	100.514.482	13	0	16	200.000.000	19	300.000.000	22	400.000.000	24	500.000.000	24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					517.355.866		179.333.233		183.071.967		188.664.016		194.094.708		199.215.308		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Angka Kunjungan Perpustakaan pertahun	%	98,58	0,06	517.355.866	0,06	179.333.233	0,07	183.071.967	0,07	188.664.016	0,08	194.094.708	0,08	199.215.308	0,08	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					205.992.777		201.240.391		765.435.845		891.711.012		982.805.112		1.073.551.239		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (IKK Outcome)	%	94,69	40	205.992.777	40	201.240.391	50	205.435.845	60	211.711.012	70	217.805.112	80	223.551.239	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Kegiatan	99,48	2	0	2	0	3	560.000.000	3	680.000.000	4	765.000.000	4	850.000.000	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					9.375.158.046		7.089.115.818		8.211.906.414		8.417.666.418		8.369.106.636		8.660.753.638		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					881.913.905		231.127.578		235.946.119		243.153.242		250.152.406		256.751.918		Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	4,2	5	3.995.450	5,25	5.544.290	5,51	5.659.877	5,79	5.832.761	6,08	6.000.657	6,38	6.158.967	6,38	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produk Perikanan tangkap (IKK Outcome)	ton	459,01	481,96	3.995.450	506,05	10.395.543	531,36	10.612.269	557,92	10.936.428	585,82	11.251.233	615	11.548.062	615	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	%	5	5	615.443.426	5,25	114.147.807	5,51	117.443.426	5,79	119.833.051	6,08	122.081.371	6,38	130.096.367	6,38	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produk Perikanan budidaya(IKK Outcome)	ton	224,36	235,58	169.719.932	247,36	29.310.690	259,73	29.005.890	272,71	31.089.651	286,35	33.185.640	300,67	29.266.893	300,67	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/t hn	33,84	34,86	42.266.499	35,9	42.423.322	36,98	42.640.654	38,09	43.901.499	39,23	45.002.141	40,41	45.896.091	40,41	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	79	90	46.493.148	104	29.305.926	120	30.584.003	138	31.559.852	158	32.631.364	173	33.785.538	173	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				621.454.505		713.747.712		922.124.824		1.010.935.261		1.099.347.204		1.186.993.326		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	%	0,07	4,22	209.974.752	7,41	150.311.290	8,15	200.000.000	8,95	250.000.000	9,86	300.000.000	10,8	350.000.000	10,8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (IKK Outcome)	%	0	5		6		7		8		9		10		10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	-66	16		18		20		22		24		25		25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	%	1,08	0,4	217.506.687	0,4	437.547.594	0,41	446.056.767	0,41	459.065.054	0,41	471.659.520	0,42	483.481.669	0,42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	%	10,55	10	2.347.634	12	5.343.842	13	6.068.057	14	6.870.207	15	7.687.684	16	8.511.657	16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi		3	5	33.150.279	7	32.875.905	9	120.000.000	11	130.000.000	13	140.000.000	15	150.000.000	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase capaian pembinaan Pelaku ekonomi kreatif	%	66,6	66,6	104.770.366	66,6	49.880.684	66,6	96.774.194	66,6	108.552.632	66,6	120.000.000	66,6	131.250.000	66,6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase capaian pembinaan pelaku pariwisata dan industri pariwisata	%	N.A	13,8	53.704.787	13,8	37.788.397	13,8	53.225.806	13,8	56.447.368	13,8	60.000.000	13,8	63.750.000	13,8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.599.812.673		2.473.529.865		3.306.597.942		3.301.878.652		3.046.748.781		3.139.338.336		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian perhektar pertahan	%	1	1	490.173.887	1	309.702.301	1	316.158.965	1	325.816.240	1	335.194.858	1	344.037.958	1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi ternak	ton	821,61	839,69	5.724.951	867,4	61.042.437	890,81	62.995.103	910,41	65.584.024	940,46	68.119.944	965,85	70.547.064	965,85	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ternak (Sapi dan Kambing)	Ekor	4559 Sapi/ 9381 Kambing	4787 Sapi/ 9662 Kambing	62.974.457	5026 Sapi/ 9952 Kambing	11.466.535	5278 Sapi/ 10251 Kambing	11.652.273	5541 Sapi/ 10558 Kambing	11.959.947	5819 Sapi/ 10875 Kambing	12.260.922	6109 Sapi/ 11201 Kambing	12.545.945	6109 Sapi/ 11201 Kambing	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok peternak yang memanfaatkan Bahan baku lokal sebagai pakan ternak	%	Na	17,44	40.074.654	18,49	27.114.983	19,78	27.053.538	21,17	27.263.461	22,65	27.443.447	24,23	27.575.922	24,23	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	%	101,92	102	1.700.579.357	102	1.037.828.201	102	1.059.464.813	102	1.091.826.833	102	1.123.255.059	102	1.152.888.737	102	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	ton		2.267,00		2.309,80		2.343,60	0	2.378,50	0	2.412,40	0	2.446,30	0	2.446,30	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	ton		42.619,00		43.053,24		43.492,50	0	43.936,78	0	44.385,08	0	44.837,40	0	44.837,40	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi perkebunan	ton		453		457,54		462,11	0	466,74	0	471,43	0	476,19	0	476,19	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	%	35	39	0	42	0	47	600.000.000	51	500.000.000	56	150.000.000	62	150.000.000	62	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (IKK Outcome)	%	-11	-9	109.681.897	-7	218.306.408	-5	229.157.919	-3	230.068.706	-2	236.692.861	-1	242.794.528	-1	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Produksi Olahan Produk Peternakan	ton	1.500,00	1.545,00	340.973.274	1.591,00	194.136.770	1.639,00	191.883.862	1.688,00	203.834.062	1.738,00	209.699.794	1.791,00	215.374.843	1.791,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	%	50	80	94.810.737	82	192.391.791	85	196.402.769	86	202.402.016	88	208.228.156	90	213.721.624	90	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rekomendasi izin usaha pertanian	Rekomendasi	0	1	0	1	0	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	241.576.500	1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	35	35	754.819.459	38	421.540.439	40	430.328.702	42	443.473.363	43	456.238.740	45	468.275.215	45	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.982.812.622		2.659.959.626		2.715.414.384		2.798.358.430		2.878.909.155		2.954.860.440		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha perdagangan sesuai ketentuan	%	0,1	10	50.257.241	12	69.736.769	14	71.190.639	16	73.365.202	18	75.477.019	20	77.468.251	20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	peningkatan sarana prasarana perdagangan, pasar rakyat, PKS	%	65	65	1.271.498.143	70	1.344.923.407	75	1.372.962.330	75	1.414.900.330	80	1.455.628.224	80	1.494.030.560	80	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	%	20	22	361.852.134	24	303.853.066	26	310.187.786	28	319.662.667	30	328.864.154	32	337.540.238	32	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	%	50	55		60		65		70		75		80		80	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase jumlah UMKM yang menjadi ekspor	%	na	1	393.213.192	1,25	174.341.923	1,5	177.976.598	1,75	183.413.006	2	188.692.548	2,25	193.670.628	2,25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Eksport Bersih Perdagangan	milyar	0,69	1	393.213.192	1,25	174.341.923	1,5	177.976.598	1,75	183.413.006	2	188.692.548	2	193.670.628	2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	170.874.619	100	169.360.725	100	172.891.552	100	178.172.634	100	183.301.332	100	188.137.181	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasarannya	%	n.a	1	304.799.171	2	363.200.145	3	370.081.377	4	382.897.624	5	396.776.735	6	0	6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rasio produk lokal terhadap produk luar	%	n.a	0,2	37.104.930	0,2	60.201.668	0,25	62.147.504	0,3	62.533.961	0,35	61.476.595	0,4	470.342.954	0,4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.289.164.341		1.010.751.037		1.031.823.145		1.063.340.833		1.093.949.090		1.122.809.618		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKK Outcome)	%	0,1	0,1	546.360.505	15	390.836.597	20	441.920.569	25	0	30	479.883.433	35	495.974.285	35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	%	0,25	0,25	672.443.699	30	550.177.671	35	518.711.937	40	989.975.631	45	538.588.638	45	549.367.082	45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	%	0,1	0,1	70.360.137	15	69.736.769	20	71.190.639	25	73.365.202	30	75.477.019	35	77.468.251	35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				19.460.243.125		26.300.055.464		26.848.358.243		27.668.458.263		28.464.894.607		29.215.854.507				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				9.755.033.769		12.629.464.496		12.892.763.198		13.286.580.775		13.669.034.892		14.029.650.915		Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase rumah tahan lams yang dibina	%	NA	4.177.512.745	13	8.418.345.055	38	6.058.421.624	75	6.283.300.219	88	6.505.657.395	100	6.689.216.375	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase Perangkat Daerah dengan Nilai LPPD kategori Baik	%	N.A	1.131.155.512	90	722.986.571	90	1.495.571.461	90	1.479.938.663	100	1.458.647.923	100	1.478.764.608	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase produksi hukum yang disusun	%	100	100	1.873.649.889	100	1.094.709.496	100	2.717.253.470	100	2.818.113.427	100	2.917.842.506	100	3.000.170.265	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase Perangkat Daerah dengan Nilai SPBM kategori Baik	%	N.A	381.443.833	80	367.334.019	80	553.187.437	90	573.720.840	90	594.024.015	100	610.784.573	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, Perusa, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	%	NA	90	796.387.325	90	732.414.305	90	751.705.548	95	866.608.850	95	796.965.647	95	817.991.169	95	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase kerberhasilan Pengadaan barang dan jasa	%	NA	NA	1.061.849.766	94	971.785.960	94	1.002.274.065	96	962.898.722	96	1.062.620.863	98	1.090.654.891	98	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	NA	15	333.034.699	15	321.889.090	13	314.349.593	10	302.000.054	8	333.276.543	5	342.069.034	5	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				9.705.209.356		13.670.590.968		13.955.595.045		14.381.877.488		14.795.859.715		15.186.203.592		Sekretariat DPRD		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Percentase Perda yang ditetapkan	%	60	100	6.558.533.510	100	8.597.505.440	100	8.868.252.196	100	9.135.470.469	100	9.395.572.187	100	9.585.054.481	100	Sekretariat DPRD	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Percentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	3.146.675.846	100	5.073.085.528	100	5.087.342.849	100	5.246.407.019	100	5.400.287.528	100	5.601.149.111	100	Sekretariat DPRD	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				121.845.689.244		110.249.586.224		112.548.066.342		115.985.917.934		119.324.571.646		122.472.588.506				
5.01	PERENCANAAN				4.261.149.820		3.486.184.077		3.558.863.940		3.667.571.680		3.773.142.702		3.872.685.625		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Konsistensi Program RKPD kedalam Renja	%	100	100	1.203.852.788	100	1.132.845.538	100	1.156.463.068	100	1.190.671.990	100	1.224.945.474	100	1.254.325.620	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Capaian Target IKU daerah yang di monitoring dan evaluasi	%	100	100	244.166.306	100	307.356.967	100	313.764.736	100	323.046.099	100	332.344.979	100	340.316.226	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD	%	100	100	206.091.879	100	220.207.650	100	224.798.533	100	233.083.894	100	239.793.212	100	249.852.419	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Keselarasan Program dan Kegiatan kedalam Dokumen Perencanaan Bidang Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	100	100	1.724.652.250	100	1.208.549.870	100	1.349.959.968	100	1.391.195.345	100	1.431.240.892	100	1.467.605.749	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Capaian Target Kinerja Program Bidang Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	100	100	882.386.597	100	617.224.052	100	513.877.635	100	529.574.352	100	544.818.145	100	560.585.611	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.02	KEUANGAN				113.769.196.999		104.517.751.028		106.696.734.017		109.955.852.977		113.120.931.317		116.105.283.949		Badan Keuangan Daerah		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Anggaran sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	%	11,05	6,5	3.036.165.717	6,45	2.712.558.236	6,3	3.731.794.121	6,1	3.845.784.123	6	3.956.484.988	5,9	4.060.864.843	5,9	Badan Keuangan Daerah	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga Kesehatan (IKK Outcome)	%	31,28	31,5	1.265.707.600	31,75	1.081.217.823	32	1.462.872.613	32,3	1.507.556.978	32,7	1.550.951.994	33	1.591.869.157	33	Badan Keuangan Daerah	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi transfer expenditures) (IKK Outcome)	%	65,67	65,8	107.295.218.798	66	98.578.856.578	66,25	99.312.227.526	66,75	102.345.782.084	67,15	105.291.804.594	67,65	108.069.609.467	67,65	Badan Keuangan Daerah	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan (IKK Outcome)	%	80	82	460.057.781	84	377.390.786	85	423.798.743	87	395.846.301	90	395.139.916	90	405.564.484	90	Badan Keuangan Daerah		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci	%	80	83	296.057.016	100	404.381.903	100	384.423.023	100	359.067.682	100	358.426.928	100	367.882.935	100	Badan Keuangan Daerah		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	%	80	82	338.672.856	84	252.561.191	85	247.675.877	87	333.236.719	90	365.906.267	90	375.559.594	90	Badan Keuangan Daerah		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan PAD	%	-16,76	45,3	623.325.323	30,25	485.167.313	24,1	494.575.325	21,44	636.158.149	17,89	654.469.956	16,7	671.736.161	16,7	Badan Keuangan Daerah		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD	%	3,84	6,03	453.991.908	8,71	625.617.198	9,62	639.366.789	10,1	532.420.941	10,7	547.746.674	11,23	562.197.308	11,23	Badan Keuangan Daerah		
5.03	KEPEGAWAIAN				1.546.939.837		1.709.348.377		1.744.984.820		1.798.286.482		1.850.050.143		1.898.858.103		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN	%	N.a	100	253.557.708	100	280.177.966	100	175.175.588	100	252.316.664	100	259.579.598	100	266.427.818	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan	%	N.a	90	264.568.222	93	292.344.441	94	182.782.430	95	263.273.288	96	270.851.607	97	277.997.205	97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterpenuhan formasi ASN	%	N.a	80	969.734.964	82	1.071.544.507	83	669.961.461	84	964.988.575	85	992.765.763	85	1.018.956.876	85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N.a	81	29.539.471	83	32.640.731	84	358.532.671	85	158.853.977	86	163.426.587	87	167.738.102	87	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N.a	8	14.769.736	15	16.320.366	30	179.266.335	45	79.426.989	60	81.713.294	75	83.869.051	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N.a	100	14.769.736	100	16.320.366	100	179.266.335	100	79.426.989	100	81.713.294	100	83.869.051	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.543.166.976		193.409.411		197.441.604		203.472.582		209.329.539		214.852.064		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan	%	N.a	85	697.367.466	87	87.403.005	89	89.225.180	91	91.950.619	93	94.597.417	95	97.093.083	95	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	N.a	20	72.951.750	20,1	9.143.246	20,2	9.333.864	20,3	9.618.973	20,4	9.895.855	20,5	10.156.927	20,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	N.a	4	75.480.294	5	9.460.155	5,25	9.657.380	5,5	9.952.371	5,75	10.238.850	6	10.508.971	6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	%	N.a	40	697.367.466	45	87.403.005	50	89.225.180	55	91.950.619	60	94.597.417	65	97.093.083	65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				725.235.612		342.893.331		350.041.961		360.734.213		371.117.945		380.908.765		Badan Penelitian dan Pengembangan			
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbang	%	90,91	100	261.084.820	100	179.588.709	33	184.254.749	33	190.586.885	33	196.781.211	33	201.208.216	33	Badan Penelitian dan Pengembangan		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	%	90,91	100	275.589.533	100	102.915.767	14	103.829.345	14	106.060.205	14	108.166.694	14	112.041.876	14	Badan Penelitian dan Pengembangan		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	67.688.657	100	28.831.734	100	29.580.834	100	30.597.415	100	31.591.872	100	32.302.597	100	Badan Penelitian dan Pengembangan		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	120.872.602	100	31.557.121	100	32.377.033	100	33.489.708	100	34.578.168	100	35.356.076	100	Badan Penelitian dan Pengembangan		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				2.388.707.571		1.944.095.750		1.984.626.200		2.045.247.859		2.104.120.301		2.159.631.133			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				2.388.707.571		1.944.095.750		1.984.626.200		2.045.247.859		2.104.120.301		2.159.631.133		Inspektorat Daerah	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Target Pengawasan	%	100	100	2.054.642.213	100	1.659.625.835	100	1.694.225.665	100	1.745.976.856	100	1.796.234.785	100	1.843.622.992	100	Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	%	100	100	334.065.358	100	284.469.915	100	290.400.535	100	299.271.003	100	307.885.516	100	316.008.141	100	Inspektorat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.190.635.454		2.464.185.272		3.339.000.000		3.529.650.000		3.732.202.500		3.947.489.625			
7.01	KECAMATAN				3.190.635.454		2.464.185.272		3.339.000.000		3.529.650.000		3.732.202.500		3.947.489.625		KECAMATAN	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	49.051.067	100	22.807.908	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Hamparan Rawang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	38.730.240	100	26.094.752	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Koto Baru
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	41.723.561	100	26.187.950	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Kumun Debai
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	100	31.360.518	100	22.104.015	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Pesisir Bukit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	37.499.279	100	29.887.187	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.687.500	100	86.821.875	100	Kecamatan Pondok Tinggi
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	42.094.460	100	12.624.945	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.687.500	100	86.821.875	100	Kecamatan Sungai Bungkal
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	100	80.799.164	100	66.183.229	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Sungai Penuh
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	20.384.337	100	14.729.402	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	Kecamatan Tanah Kampung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	237.941.424	100	194.298.793	100	225.000.000	100	236.250.000	100	248.062.500	100	260.465.625	100	Kecamatan Hamparan Rawang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	170.303.596	100	139.197.779	100	135.000.000	100	141.750.000	100	148.837.500	100	156.279.375	100	Kecamatan Koto Baru
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	179.771.689	100	132.515.801	100	150.000.000	100	157.500.000	100	165.375.000	100	173.643.750	100	Kecamatan Kumun Debai
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	126.336.853	100	93.270.687	100	180.000.000	100	189.000.000	100	198.450.000	100	208.372.500	100	Kecamatan Pesisir Bukit
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	272.950.116	100	278.628.280	100	285.000.000	100	299.250.000	100	314.212.500	100	329.923.125	100	Kecamatan Pondok Tinggi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	320.446.299	100	278.654.930	100	165.000.000	100	173.250.000	100	181.912.500	100	191.008.125	100	Kecamatan Sungai Bungkal
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	467.470.378	100	368.382.004	100	180.000.000	100	189.000.000	100	198.450.000	100	208.372.500	100	Kecamatan Sungai Penuh
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	157.692.245	100	129.519.312	100	165.000.000	100	173.250.000	100	181.912.500	100	191.008.125	100	Kecamatan Tanah Kampung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	32.869.082	100	17.856.128	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Hamparan Rawang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	23.653.068	100	18.236.962	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Koto Baru		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	0	100	0	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Kumun Debai		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	17.389.005	100	24.905.989	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Pesisir Bukit		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	0	100	0	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000	100	138.915.000	100	Kecamatan Pondok Tinggi		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	10.051.448	100	4.881.574	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000	100	138.915.000	100	Kecamatan Sungai Bungkal		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	244.371.275	100	149.990.137	100	140.000.000	100	147.000.000	100	154.350.000	100	162.067.500	100	Kecamatan Sungai Penuh		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	14.259.990	100	11.801.454	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	Kecamatan Tanah Kampung		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	1.482.589	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Pondok Tinggi		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	0	100	5.558.394	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sungai Penuh		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	22.613.246	100	39.276.171	100	78.000.000	100	85.800.000	100	94.380.000	100	103.818.000	100	Kecamatan Hamparan Rawang		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	47.317.192	100	27.049.199	100	51.000.000	100	56.100.000	100	61.710.000	100	67.881.000	100	Kecamatan Koto Baru		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	62.465.629	100	48.658.233	100	54.000.000	100	59.400.000	100	65.340.000	100	71.874.000	100	Kecamatan Kumun Debai		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	56.990.857	100	47.341.204	100	54.000.000	100	59.400.000	100	65.340.000	100	71.874.000	100	Kecamatan Pesisir Bukit		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	145.975.614	100	70.029.664	100	48.000.000	100	52.800.000	100	58.080.000	100	63.888.000	100	Kecamatan Pondok Tinggi		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	140.394.105	100	78.039.270	100	51.000.000	100	56.100.000	100	61.710.000	100	67.881.000	100	Kecamatan Sungai Bungkal		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	56.945.564	100	58.178.748	100	60.000.000	100	66.000.000	100	72.600.000	100	79.860.000	100	Kecamatan Sungai Penuh		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	39.301.564	100	27.295.171	100	78.000.000	100	85.800.000	100	94.380.000	100	103.818.000	100	Kecamatan Tanah Kampung		
8	UNSR PEMERINTAHAN UMUM					802.147.365		821.372.381		838.496.329		864.108.728		888.982.090		912.435.185				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					802.147.365		821.372.381		838.496.329		864.108.728		888.982.090		912.435.185		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	%	97,13	70	139.780.301	70	88.027.239	75	89.862.428	80	92.607.333	85	95.273.034	90	97.786.524	90	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang memahami pendidikan politik	%	92,35	75	466.397.251	75	472.310.274	80	482.156.985	80	496.884.774	85	511.187.598	90	524.673.732	90	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan ormas	%	NA	80	47.762.397	85	24.569.037	90	25.081.252	95	25.847.374	100	26.591.391	100	27.292.924	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase etnis /suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan bangsa	%	NA	70	98.846.412	70	136.322.087	75	139.164.126	80	143.414.982	86	147.543.181	90	151.435.660	90	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	33,33	100	49.361.004	100	100.143.744	100	102.231.538	100	105.354.265	100	108.386.886	100	111.246.345	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
X	NON-URUSAN					384.516.304.623		387.215.243.316		395.287.895.277		407.362.213.079		419.088.131.085		430.144.500.175		
X.XX	NON-BIDANG URUSAN					384.516.304.623		387.215.243.316		395.287.895.277		407.362.213.079		419.088.131.085		430.144.500.175		Semua SKPD
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	124.980.614.172	100	121.234.539.631	100	123.762.033.734	100	127.542.423.027	100	131.213.730.642	100	134.675.406.904	100	Dinas Pendidikan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	49.866.894.802	100	56.203.195.807	100	57.207.198.209	100	58.897.238.033	100	60.533.667.333	100	62.070.300.212	100	Dinas Kesehatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100		100	566.431.409	100	749.515.032	100	831.015.801	100	915.112.655	100	1.000.898.746	100	Dinas Kesehatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	9.302.463.963	100	9.058.958.512	100	9.213.822.009	100	9.493.518.975	100	9.764.905.525	100	10.020.493.010	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	50	51,61		54,79		58,01		61,24		64,47		67,69		67,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100		100	34.844.842	100	37.697.731	100	40.714.146	100	43.868.792	100	43.868.792	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	6.296.336.241	100	6.043.610.388	100	6.169.607.399	100	6.358.061.944	100	6.541.078.705	100	6.713.645.226	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	87	100	88	100	90	100	90	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	85	85		100		100		90		90		100		100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100	2.455.946.982	100	2.507.148.493	100	2.583.730.922	100	2.658.103.596	100	2.728.229.596	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	2.679.914.717	100	2.770.554.757	100	2.757.599.297	100	2.815.089.645	100	2.901.078.332	100	2.984.585.849	100	3.063.325.093	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	3.305.181.328	100	3.330.480.513	100	3.399.914.273	100	3.503.766.796	100	3.604.622.695	100	3.699.719.731	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	257.059.833	100	259.027.472	100	264.427.669	100	272.504.779	100	280.348.826	100	287.744.980	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	224.585.663	100	226.304.732	100	231.022.726	100	238.079.461	100	244.932.576	100	251.394.380	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	3.460.883.053	100	100	3.621.212.876	100	3.696.707.815	100	3.809.626.084	100	3.919.286.140	100	4.022.684.616	100	Dinas Sosial	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100		100	100		100		Dinas Sosial						
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100		100	100		100		Dinas Sosial						
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	2.614.326.015	100	3.858.982.247	100	3.939.434.195	100	4.059.766.694	100	4.176.627.045	100	4.286.814.681	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	3.105.638.255	100	3.052.606.535	100	3.116.247.186	100	3.211.434.919	100	3.303.876.047	100	3.391.038.795	100	Dinas Ketahanan Pangan		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	3.760.925.306	100	4.968.425.302	100	5.046.967.225	100	5.194.718.652	100	5.337.668.909	100	5.471.750.458	100	Dinas Ketahanan Pangan		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Ketahanan Pangan		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Lingkungan Hidup		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Lingkungan Hidup		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	2.801.203.058	100	3.507.141.770	100	3.580.258.558	100	3.689.619.811	100	3.795.825.487	100	3.895.966.828	100	Dinas Lingkungan Hidup		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Lingkungan Hidup		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	3.341.200.414	100	3.641.284.280	100	3.717.197.666	100	3.830.741.811	100	3.941.009.683	100	4.044.981.270	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	2.925.039.228	100	3.681.235.163	100	3.757.981.444	100	3.872.771.355	100	3.984.249.047	100	4.089.361.373	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	3.120.905.596	100	2.732.269.290	100	2.781.161.605	100	2.853.729.095	100	2.914.881.043	100	2.983.248.790	100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	3.865.250.526	100	3.853.231.318	100	3.928.617.274	100	4.043.534.989	100	4.154.710.504	100	4.258.978.096	100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	N.a	N.a		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	3.977.399.381	100	3.840.015.728	100	3.920.072.263	100	4.039.813.339	100	4.156.099.334	100	4.265.745.408	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	2.932.458.863	100	2.926.692.756	100	2.987.708.360	100	3.078.969.795	100	3.167.597.914	100	3.251.165.377	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	2.932.458.863	100	2.926.692.756	100	2.987.708.360	100	3.078.969.795	100	3.167.597.914	100	3.251.165.377	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	3.945.385.265	100	4.090.830.596	100	4.174.078.629	100	4.298.432.750	100	4.418.931.542	100	4.533.303.128	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	38.440.839	100	41.295.015	100	44.242.133	100	48.814.493	100	53.528.447	100	57.201.959	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	3.766.689.294	100	3.269.017.715	100	3.337.170.100	100	3.439.106.063	100	3.538.100.703	100	3.631.442.758	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	10.702.322.702	100	13.222.625.328	100	13.498.290.231	100	13.910.604.010	100	14.311.020.633	100	14.688.573.502	100	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	3.905.979.663	100	3.825.934.692	100	3.871.204.744	100	3.985.932.980	100	4.096.691.776	100	4.200.290.424	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	4.616.996.908	100	4.561.985.846	100	4.646.702.664	100	4.776.914.573	100	4.901.217.812	100	5.015.702.092	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	98.466.878	100	107.023.020	100	119.911.501	100	135.598.884	100	153.040.131	100	172.276.383	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan serta pendokumentasiannya	%	100	100	26.417.093.609	100	29.216.133.337	100	29.791.959.089	100	30.690.561.034	100	31.568.121.499	100	32.394.930.993	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM kategori Baik	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD se Kota Sungai Penuh	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	34.620.369.626	100	26.601.551.388	100	27.156.139.747	100	27.985.641.144	100	28.791.207.598	100	29.550.776.275	100	Sekretariat DPRD		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	N.A	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	4.696.835.463	100	4.974.316.514	100	5.078.020.917	100	5.233.132.266	100	5.383.767.936	100	5.525.802.322	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	9.504.877.922	100	8.315.138.498	100	8.488.492.260	100	8.747.778.604	100	8.999.583.340	100	9.237.010.048	100	Badan Keuangan Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Keuangan Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Keuangan Daerah		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	4.579.245.865	100	4.912.313.176	100	5.014.724.936	100	5.167.902.869	100	5.316.660.912	100	5.456.924.882	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	2.822.895.951	100	3.098.100.980	100	3.162.690.098	100	3.259.296.459	100	3.353.115.281	100	3.441.577.057	100	Badan Penelitian dan Pengembangan		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Penelitian dan Pengembangan		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Penelitian dan Pengembangan		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	6.181.016.294	100	5.866.328.263	100	5.988.629.301	100	6.171.555.756	100	6.349.203.939	100	6.516.708.425	100	Inspektorat Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	4.242.903.012	100	4.040.330.933	100	4.124.563.633	100	4.250.551.028	100	4.372.903.105	100	4.488.268.889	100	Kecamatan Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Sungai Penuh		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	1.678.461.354	100	1.599.186.530	100	1.632.526.324	100	1.682.392.868	100	1.730.820.534	100	1.776.482.984	100	Kecamatan Pesisir Bukit		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Pesisir Bukit		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Pesisir Bukit		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	1.937.943.097	100	1.817.674.722	100	1.855.569.550	100	1.912.249.091	100	1.967.293.166	100	2.019.194.229	100	Kecamatan Hamparan Rawang		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Hamparan Rawang		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Hamparan Rawang		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	90	90	2.224.635.871	100	2.159.661.546	100	2.204.686.106	100	2.272.029.632	100	2.337.429.987	100	2.399.095.987	100	Kecamatan Kumun Debai		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	90	90	1.788.131.953	100	1.676.994.941	100	1.711.956.882	100	1.764.249.684	100	1.815.033.597	100	1.862.917.752	100	Kecamatan Kumun Debai		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	90	90		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Kumun Debai		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Tanah Kampung		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Tanah Kampung		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	3.087.234.598	100	3.075.932.106	100	3.140.059.048	100	3.235.974.130	100	3.329.121.618	100	3.416.950.394	100	Kecamatan Tanah Kampung		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Pondok Tinggi		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Pondok Tinggi		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Pondok Tinggi		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	3.514.669.118	100	3.754.002.730	100	3.832.266.068	100	3.949.325.049	100	4.063.006.339	100	4.170.196.437	100	Kecamatan Sungai Bungkal		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Sungai Bungkal		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Sungai Bungkal		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	90	90		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Sungai Bungkal		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	90	90	1.188.129.830	100	1.215.253.897	100	1.240.589.474	100	1.278.484.061	100	1.315.285.215	100	1.349.985.025	100	Kecamatan Koto Baru		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	90	90		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Koto Baru		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	90	90		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Koto Baru		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	90	90		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Koto Baru		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	2.912.259.064	100	2.827.224.821	100	2.886.166.721	100	2.974.326.502	100	3.059.942.466	100	3.140.669.766	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	790.849.278	100	767.144.959	100	783.138.375	100	807.059.830	100	830.291.040	100	852.195.751	100	Dinas Pendidikan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	80	82		86,92		86,92		88,56		90,2		91,84		91,84	Dinas Pendidikan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	1.056.834.390	100	1.191.120.289	100	1.212.398.219	100	1.248.215.412	100	1.282.896.432	100	1.315.462.455	100	Dinas Kesehatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	231.878.868	90	225.809.104	90	229.669.325	95	236.641.222	95	243.405.968	95	249.776.897	95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	30	32,31		36,92		41,54		46,15		50,77		55,38		55,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	138.978.861	100	133.400.450	100	136.181.579	100	140.341.331	100	144.381.055	100	148.190.111	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahanan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahanan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	80.111.248	100	73.416.134	100	74.946.711	100	77.236.006	100	79.459.244	100	81.555.535	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	96.026.510	100	95.577.478	100	97.570.075	100	100.550.414	100	103.444.757	100	106.173.833	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	27.524.708	100	27.735.393	100	28.313.620	100	29.178.477	100	30.018.380	100	30.810.324	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	74.795.403	100	75.367.917	100	76.939.185	100	79.289.341	100	81.571.684	100	83.723.705	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	192.769.689	100	201.699.990	100	205.905.026	100	212.194.524	100	218.302.542	100	224.061.793	100	Dinas Sosial
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Sosial
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	57.534.489	100	84.926.123	100	86.696.660	100	89.344.865	100	91.916.656	100	94.341.598	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	79.937.660	100	78.572.648	100	80.210.728	100	82.660.816	100	85.040.207	100	87.283.735	100	Dinas Ketahanan Pangan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	160.324.116	100	211.798.516	100	215.146.671	100	221.445.153	100	227.538.965	100	233.254.714	100	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	77.418.767	100	96.929.278	100	98.950.057	100	101.972.549	100	104.907.828	100	107.675.503	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	50	100	70.914.977	100	77.284.077	100	78.895.294	100	81.305.200	100	83.645.570	100	85.852.304	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	92.251.186	100	116.100.429	100	118.520.886	100	122.141.183	100	125.657.016	100	128.972.095	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	257.704.054	100	225.613.000	100	229.650.209	100	235.642.359	100	240.691.889	100	246.337.252	100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%		100	76.357.092	100	76.119.655	100	77.608.886	100	79.879.058	100	82.075.304	100	84.135.085	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100.509.054	100	104.716.893	100	106.900.028	100	110.165.357	100	113.336.466	100	116.326.504	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	30		30		35		35		40		45		45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	112.576.220	100	108.687.716	100	110.953.634	100	114.342.783	100	117.634.139	100	120.737.559	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	90.643.960	100	90.465.726	100	92.351.753	100	95.172.695	100	97.912.241	100	100.495.358	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	30		35		35		35		40		45		45	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	94.336.973	100	97.814.675	100	99.805.195	100	102.778.590	100	105.659.802	100	108.394.509	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%		25	30	35		35		35		35		40		40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	136.825.338	100	118.747.372	100	121.223.014	100	124.925.847	100	128.521.837	100	131.912.495	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%		100	100	145.114.768	100	179.288.016	100	183.025.807	100	188.616.446	100	194.045.769	100	199.165.078	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	115.591.708	100	113.222.896	100	114.562.596	100	117.957.809	100	121.235.552	100	124.301.401	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%		0,25	30	35		35		35		40		50		50	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	118.160.254	100	116.752.386	100	118.920.497	100	122.252.938	100	125.434.162	100	128.364.095	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%		0,05	10	20		20		20		25		25		25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%		100	100	583.838.367	100	645.699.328	100	658.425.526	100	678.285.330	100	697.680.100	100	715.953.235	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%		100	100	269.013.642	100	206.704.328	100	211.013.693	100	217.459.239	100	223.718.802	100	229.620.944	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	127.880.052	100	135.434.988	100	138.258.533	100	142.481.727	100	146.583.062	100	150.450.211	100	Sekretariat DPRD
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%		100	100	35		35		35		40		50		50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%		25	30											50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	141.651.039	100	123.920.372	100	126.503.860	100	130.368.000	100	134.120.642	100	137.659.008	100	Badan Keuangan Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%		100		100		100		100		100		100		100	Badan Keuangan Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	273.198.361	100	293.069.198	100	299.179.096	100	308.317.710	100	317.192.632	100	325.560.798	100	Badan Kepergawainan dan Pengembangan SDM
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%		100		100		100		100		100		100		100	Badan Kepergawainan dan Pengembangan SDM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	110.214.129	100	120.958.940	100	123.480.688	100	127.252.484	100	130.915.446	100	134.369.252	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	80	80		100		100		100		100		100		100	Badan Penelitian dan Pengembangan
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	168.163.241	100	159.601.710	100	162.929.082	100	167.905.854	100	172.739.022	100	177.296.217	100	Inspektorat Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Inspektorat Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	92.084.583	100	87.688.121	100	89.516.240	100	92.250.570	100	94.906.002	100	97.409.809	100	Kecamatan Sungai Penuh
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Sungai Penuh
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	50	50	36.444.340	100	34.723.050	100	35.446.955	100	36.529.705	100	37.581.212	100	38.572.678	100	Kecamatan Pesisir Bukit
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	25		35		35		35		40		50		50	Kecamatan Pesisir Bukit
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	19.020.788	100	17.840.361	100	18.212.297	100	18.768.603	100	19.308.857	100	19.818.262	100	Kecamatan Hamparan Rawang
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Hamparan Rawang
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	57.196.761	100	55.526.231	100	56.683.840	100	58.415.284	100	60.096.767	100	61.682.238	100	Kecamatan Kumun Debai
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	90	90		90		95		95		100		100		100	Kecamatan Kumun Debai
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	52.805.283	100	49.523.299	100	50.555.759	100	52.100.016	100	53.599.715	100	55.013.781	100	Kecamatan Tanah Kampung
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Tanah Kampung
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	76.917.702	100	76.636.103	100	78.233.810	100	80.623.511	100	82.944.259	100	85.132.491	100	Kecamatan Pondok Tinggi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	90	90		90		90		95		95		100		100	Kecamatan Pondok Tinggi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	87.598.371	100	93.563.437	100	95.514.045	100	98.431.582	100	101.264.934	100	103.936.502	100	Kecamatan Sungai Bungkal
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	90	90		90		90		95		95		100		100	Kecamatan Sungai Bungkal

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	55.699.095	100	56.970.661	100	58.158.384	100	59.934.869	100	61.660.093	100	63.286.808	100	Kecamatan Koto Baru
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	90	90		90		95		95		100		100		100	Kecamatan Koto Baru
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	78.532.467	100	76.239.420	100	77.828.857	100	80.206.188	100	82.514.923	100	84.691.829	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

* Apabila terjadi perubahan nomenklatur SKPD, maka penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Sungai Penuh. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Sementara itu, Indikator Program dan Kegiatan (serta sub kegiatan) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sungai Penuh. Mengingat dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan keseluruhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka cakupan indikator kinerja yang dituangkan dalam Bab VIII RPJMD ini meliputi IKU dan IKD. Indikator Program yang tertuang di Bab VII serta indikator kinerja kegiatan (dan sub kegiatan) akan tertuang secara terperinci dalam dokumen Rencana Strategis setiap perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Catatan tentang IKU Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh periode 2021-2026, sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah yang disusun berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh terpilih untuk periode Tahun 2021-2026.
2. Dalam upaya mewujudkan misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berlandaskan nilai agama dan budaya tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berbudaya, dan berakhhlak mulia, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indeks pembangunan manusia.
3. Dalam upaya mewujudkan misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN.
4. Dalam upaya mewujudkan misi pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah, maka terdapat dua aspek yang dijadikan tujuan dalam RPJMD yakni pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pemerataan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita serta indeks gini digunakan sebagai indikator tujuan dalam upaya pencapaian misi tersebut. Indeks gini merupakan indikator ketimpangan pendapatan yang mana menunjukkan bahwa walikota Sungai Penuh *concern* dalam pemerataan pembangunan, selain terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Dalam upaya mewujudkan misi pemerataan dalam peningkatkan prasarana dan sarana wilayah dan permukiman tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan ketersedian dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas.
6. Dalam upaya mewujudkan misi meningkatkan PAD tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan tata kelola pengelolaan PAD yang akuntabel, efektif dan efisien.
7. Dalam upaya mewujudkan misi menciptakan pelestarian lingkungan hidup tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah.
8. Dalam upaya mewujudkan misi meningkatkan ketentraman dan ketertiban tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh.

Penetapan IKU dan IKD serta target pencapaiannya menjadi sangat penting dalam rangka pengendalian dan evaluasi proses pembangunan apakah sudah berada di arah yang sesuai dan tepat seperti yang telah direncanakan.

Evaluasi terhadap IKU dan IKD juga akan mengarahkan penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja pembangunan di masa mendatang. Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tercermin dari capaian IKU dan IKD yang ditetapkan. Pencapaian IKU dan IKD juga menjadi jaminan aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Makro Daerah, Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Sungai Penuh periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel VIII.1
Indikator Makro Daerah Kota Sungai Penuh 2021-2026

No	Indikator Makro Daerah	Satuan	Data Awal RPJMD (Th 2020)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,14	3,64	3,72	3,8	3,88	3,96	4,04	4,04
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,03	3	2,97	2,93	2,9	2,87	2,84	2,84
3	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,56	5,21	5,15	5,09	5,03	4,97	4,91	4,91
4	Indeks ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)	Indeks	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,42	75,94	76,46	76,97	77,49	78,01	78,53	78,53

Tabel VIII.2
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,42	75,94	76,46	76,97	77,49	78,01	78,53	78,53
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	C	CC	CC	CC	B	B
3	Pertumbuhan ekonomi	%	-0,14	3,64	3,72	3,80	3,88	3,96	4,04	4,04
4	Indeks ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)	Indeks	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
5	Persentase pemenuhan infrastruktur kota	%	N.A	68,18	71,28	74,31	77,50	80,69	82,41	82,41
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (PAD/PD)	%	3,88	7,30	13,17	13,18	13,19	13,20	13,21	13,21
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	87,82	78,70	78,85	79,00	79,15	79,30	79,45	79,45
8	Angka konflik sosial, pelanggaran perda dan Trantibum	konflik dan pelanggaran	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel VIII.3
Indikator Kinerja Utama Kota Sungai Penuh 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,75	0,77	0,76	0,78	0,79	0,8	0,81	0,81
2	Persentase SMP yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar tambahan (SNP Plus)	%	N.A	N.A	20	40	60	80	100	100
3	Persentase SD yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar tambahan (SNP Plus)	%	N.A	N.A	10	25	45	65	100	100
4	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0,8	0,81	0,81	0,82	0,82	0,83	0,83
5	Indeks daya Beli (Pengeluaran Perkapita)	Indeks	0,71	0,71	0,71	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73
6	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter (muatan lokal)	%	85	90	100	100	100	100	100	100
7	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Rumah Tahfidz yang difasilitasi dan dibina	Rmh Tahfidz	N.A	9	11	12	13	15	16	16
9	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	0	0	2	4	4	4	4	4
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,31	94,42	94,53	94,64	94,75	94,86	94,97	94,97
11	Persentase Pemuda Berprestasi	%	N.A (pandemi)	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1
12	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N.A	75	76	77	78	79	80	80
14	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A	A
15	Kualitas Pengelolaan Arsip	Predikat	kurang	cukup	cukup	baik	baik	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
16	Nilai LPPD	Kategori	T	T	T	ST	ST	ST	ST	ST
17	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,5	1,5	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,05
18	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	Kategori	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
19	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik	Baik
20	Indeks Sistem Merit	Indeks	N.A	0,51	0,53	0,56	0,61	0,63	0,66	0,66
21	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	-3,05	6,5	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8
22	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekraf	45	50	55	60	65	70	75	75
23	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	%	-5,43	2,43	2,5	2,53	2,56	2,59	2,62	2,62
24	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah yang terdata dalam OSS	%	N.A	20	22	24	25	27	28	28
25	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,98	2,57	2,59	2,61	2,63	2,65	2,67	2,67
26	Jumlah sentra produk unggulan daerah	Produk Unggulan	6	6	7	7	8	8	8	8
27	Pertumbuhan Omzet Koperasi	%	0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

No.	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
28	Pertumbuhan Omzet UMKM	%	0	1	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
29	Tingkat Kemiskinan	%	3,03	3	2,97	2,93	2,9	2,87	2,84	2,84
30	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,56	5,21	5,15	5,09	5,03	4,97	4,91	4,91
31	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik fungsional	%	58	60	62	64	66	68	70	70
32	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik fungsional	%	70,69	72	74	76	78	80	82	82
33	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
34	Persentase Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Permukiman	%	N.A	69,06	70,38	71,43	73,23	75,04	76,73	76,73
35	Persentase desa dengan lingkungan permukiman kategori tidak kumuh	%	N.A	56,52	66,67	76,81	86,96	97,1	100	100
36	Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-4,59	66,14	4,73	4,1	3,94	3,79	3,65	3,65
37	Tingkat Kemandirian Daerah (PAD/Pendapatan Transfer)	%	4,45	8,03	15,17	15,18	15,2	15,21	15,23	15,23
38	Pertumbuhan Retribusi Daerah	%	-49,48	407,8	4,43	0,72	0,71	0,71	0,7	0,7
39	Indeks Kualitas Air	Indeks	82,5	89,38	89,49	89,59	89,7	89,8	89,91	89,91
40	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,8	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59	61,59
41	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	88,83	89,16	89,48	89,81	90,14	90,47	90,8	90,8
42	Persentase penanganan sampah	%	86	100	100	100	100	100	100	100
43	Persentase desa dengan sarana dan prasarana sampah (TPS3R) dalam kondisi baik fungsional	%	N.A	8,7	23,19	52,17	81,16	95,65	100	100
44	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.53 (sedang)	0.55 (sedang)	0.56 (sedang)	0.57 (sedang)	0.58 (sedang)	0.59 (sedang)	0.6 (sedang)	0.6 (sedang)

No.	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
45	Persentase luas kawasan bebas genangan banjir	%	81,42	82,5	84,5	87,5	92	95	97	97
46	Tingkat waktu tanggap (response time rate) maksimal	menit	14	14	14	13	13	12	12	12
47	Persentase desa dengan drainase dalam kondisi baik fungsional	%	N.A	75,73	77,23	78,73	80,23	81,73	83,23	83,23
48	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	76,18	78,22	80,16	82,06	84,12	86,02	88,32	88,32
49	Angka konflik sosial	Jumlah	N.A	0	0	0	0	0	0	0
50	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
51	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	%	80	100	100	100	100	100	100	100

Tabel VIII.4
Indikator Kinerja Daerah Kota Sungai Penuh 2021-2026

Tabel VIII.4
Indikator Kinerja Daerah Kota Sungai Penuh 2021-2026

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,42	75,94	76,46	76,97	77,49	78,01	78,53	78,53
2	Pertumbuhan ekonomi	%	-0,14	3,64	3,72	3,8	3,88	3,96	4,04	4,04
3	Indeks ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)	Indeks	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3	0,3	0,3	0,3
4	PDRB Per Kapita	Juta/ Jiwa/Thn	82,47	83,17	83,67	84,17	84,67	85,17	85,67	85,67
5	Indeks Pendidikan	Indeks	0,75	0,77	0,76	0,78	0,79	0,8	0,81	0,81
6	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0,8	0,81	0,81	0,82	0,82	0,83	0,83
7	Indeks daya Beli (Pengeluaran Perkapita)	Indeks	0,71	0,71	0,71	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73
8	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	-3,05	6,5	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8
9	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekraf	45	50	55	60	65	70	75	75
10	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	%	-5,43	2,43	2,5	2,53	2,56	2,59	2,62	2,62
11	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,98	2,57	2,59	2,61	2,63	2,65	2,67	2,67
12	Jumlah sentra produk unggulan daerah	Produk Unggulan	6	6	7	7	8	8	8	8
13	Pertumbuhan Omzet Koperasi	%	0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
14	Pertumbuhan Omzet UMKM	%	0	1	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
15	Tingkat Kemiskinan	%	3,03	3	2,97	2,93	2,9	2,87	2,84	2,84
16	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,56	5,21	5,15	5,09	5,03	4,97	4,91	4,91
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	72.11	72.35	72.39	72.44	72.51	72.57	72.57	72.57
18	Angka Kematian bayi	jiwa/1000 KH	5.49	8	8	8	7	7	7	7
19	Angka Kematian Ibu	jiwa/100.000 KH	68.58	130	130	129.5	129	129	128	128
20	Prevalensi balita Stunting	%	N.A	35	34	33	32	31	31	31

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
21	Angka melek huruf	%	98,59	98,87	98,97	99	99,12	99,18	99,21	99,21
22	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10.32	10.57	10.82	11.07	11.32	11.57	11.82	11.82
23	Harapan lama sekolah	Tahun	14.79	14.8	14.81	14.82	14.83	14.84	14.85	14.86
II	ASPEK DAYA SAING									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	C	CC	CC	CC	B	B
2	Persentase pemenuhan infrastruktur kota	%	N.A	68,18	71,28	74,31	77,5	80,69	82,41	82,41
3	Tingkat Kemandirian Daerah (PAD/Pendapatan Transfer)	%	4,45	8,03	15,17	15,18	15,2	15,21	15,23	15,23
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	87,82	78,7	78,85	79	79,15	79,3	79,45	79,45
5	Angka konflik sosial, pelanggaran perda dan Trantibum	konflik dan pelanggaran	3	0	0	0	0	0	0	0
6	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter (muatan lokal)	%	85	90	100	100	100	100	100	100
7	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Rumah Tahfidz yang difasilitasi dan dibina	Rmh Tahfidz	N.A	9	11	12	13	15	16	16
9	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	0	0	2	4	4	4	4	4
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,31	94,42	94,53	94,64	94,75	94,86	94,97	94,97
11	Persentase Pemuda Berprestasi	%	N.A (pandemi)	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1
12	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	B	B	BB	BB	A	A	A	A
14	Kualitas Pengelolaan Arsip	Predikat	kurang	cukup	cukup	baik	baik	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
15	Nilai LPPD	Kategori	T	T	T	ST	ST	ST	ST	ST

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
16	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,5	1,5	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,05
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	Kategori	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
18	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik	Baik
19	Indeks Sistem Merit	Indeks	N.A	0,51	0,53	0,56	0,61	0,63	0,66	0,66
20	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah yang terdata dalam OSS	%	N.A	20	22	24	25	27	28	28
21	Percentase jaringan irigasi dalam kondisi baik fungsional	%	58	60	62	64	66	68	70	70
22	Percentase jaringan jalan dalam kondisi baik fungsional	%	70,69	72	74	76	78	80	82	82
23	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
24	Percentase Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Permukiman	%	N.A	69,06	70,38	71,43	73,23	75,04	76,73	76,73
25	Percentase desa dengan lingkungan permukiman kategori tidak kumuh	%	N.A	56,52	66,67	76,81	86,96	97,1	100	100
26	Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-4,59	66,14	4,73	4,1	3,94	3,79	3,65	3,65
27	Percentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (PAD/PD)	%	3,88	7,3	13,17	13,18	13,19	13,2	13,21	13,21
28	Pertumbuhan Retribusi Daerah	%	-49,48	407,8	4,43	0,72	0,71	0,71	0,7	0,7
29	Indeks Kualitas Air	Indeks	82,5	89,38	89,49	89,59	89,7	89,8	89,91	89,91
30	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,8	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59	61,59
31	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	88,83	89,16	89,48	89,81	90,14	90,47	90,8	90,8
32	Percentase penanganan sampah	%	86	100	100	100	100	100	100	100
33	Percentase desa dengan sarana dan prasarana sampah (TPS3R) dalam kondisi baik fungsional	%	N.A	8,7	23,19	52,17	81,16	95,65	100	100

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
34	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.53 (sedang)	0.55 (sedang)	0.56 (sedang)	0.57 (sedang)	0.58 (sedang)	0.59 (sedang)	0.6 (sedang)	0.6 (sedang)
35	Persentase luas kawasan bebas genangan banjir	%	81,42	82,5	84,5	87,5	92	95	97	97
36	Tingkat waktu tanggap (response time rate) maksimal	menit	14	14	14	13	13	12	12	12
37	Persentase desa dengan drainase dalam kondisi baik fungsional	%	N.A	75,73	77,23	78,73	80,23	81,73	83,23	83,23
38	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	76,18	78,22	80,16	82,06	84,12	86,02	88,32	88,32
39	Angka konflik sosial	Jumlah	N.A	0	0	0	0	0	0	0
40	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	%	80	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
III	ASPEK PELAYANAN UMUM										
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										Dinas Pendidikan
1.01.02	Percentase Capaian SPM Pendidikan	%	93,47	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.01.02	Angka Melek Huruf	%	98,59	98,87	98,97	99	99,12	99,18	99,21	99,21	Dinas Pendidikan
1.01.02	Angka Partisipasi Kasar (rata-rata APK SD dan SMP)	%	100,6	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.01.02	Angka Partisipasi Murni (rata-rata APM SD dan SMP)	%	96,19	96,44	96,85	97,26	97,66	98,07	98,48	98,48	Dinas Pendidikan
1.01.02	Percentase siswa berprestasi mendapat beasiswa	%	79	80	80	85	87	88	90	90	Dinas Pendidikan
1.01.02	Percentase siswa kurang mampu berprestasi melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri	%	49	50	50	52	58	60	62	62	Dinas Pendidikan
1.01.02	Percentase siswa kurang mampu/miskin yang mendapat bantuan/beasiswa	%	N.A	N.A	80	83	86	90	92	92	Dinas Pendidikan
1.01.03	Percentase Penerapan Muatan Lokal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.01.03	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.01.03	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.01.03	Rata-rata Niai UN SD	nilai	79,12	79,12	79,38	79,51	79,64	79,77	79,9	79,9	Dinas Pendidikan
1.01.03	Rata-rata Niai UN SMP	nilai	65,84	65,85	65,85	65,86	65,87	65,88	65,89	65,89	Dinas Pendidikan
1.01.04	Percentase ketercukupan pendidikan dan tenaga kependidikan	%	80	83	85	87	90	92	95	95	Dinas Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										Dinas Kesehatan
1.02.02	Percentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	%	85	87	90	92	94	96	98	98	Dinas Kesehatan
1.02.02	Percentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	%	65	70	75	80	85	90	95	95	Dinas Kesehatan
1.02.02	Percentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.02.03	Percentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
1.02.04	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	%	90	90	92	92	92	92	95	95	Dinas Kesehatan
1.02.05	Persentase Rumah Tangga Sehat	%	79,8	79,8	80	80	80	80	80	80	Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	Luas Cakupan Pelayanan Irigasi Kondisi Baik	Ha	2.057,43	2.094,23	2.164,04	2.233,85	2.303,66	2.373,47	2.443,27	2.443,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Rasio	81,42	82,5	84,5	87,5	92	95	97	97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	58,33	59,64	61,82	64	68,98	73,96	77,41	77,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Persampahan	%		18,18	36,36	54,55	72,73	90,91	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan TPS-3R Tingkat Desa	%	N.A	N.A	27,27	63,64	100	N.A	N.A	N.A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	59,66	60,07	61,69	62,19	62,93	63,68	65,49	65,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Persentase Drainase Perkotaan dalam kondisi baik	%	68,96	70,23	72,01	73,36	74,39	75,47	76,1	76,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Presentase Panjang Drainase Perkotaan yang Terbangun	%	0,15	41,65	49,14	52,31	55,73	58,58	60,67	60,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Persentase Trotoar Drainase dalam Kondisi Baik	%	76,95	77,76	82,69	85,45	88,22	91,23	93,58	93,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
1.03.06	Persentase Panjang Trotoar Drainase yang Terbangun	%	0,13	3,32	7,56	14,07	22,05	31,82	42,24	42,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	Persentase Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum	%		14,71	34,31	47,55	66,18	80,39	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	Rasio Kepatuhan PBG (Persetujuan Bandungan dan Gedung) Kab/Kota	Rasio	N.A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	Terbangun Rumah Tahfiz	%	N.A	N.A	25	62,5	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	Persentase Jumlah Sub SWP Prioritas Pusat Kota yang disusun RTBL	%		20	40	60	80	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	70,69	72	74	76	78	80	82	82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Persentase Panjang Jalan yang dibangun	%	4	2,96	4,4	5,92	7,4	8,88	10,35	10,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	0,21	0,08	0,25	0,42	0,58	0,75	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	%	76,18	78,22	80,16	82,06	84,12	86,02	88,32	88,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	%	90,92	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
1.04.03	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (IKK Outcome)	%	65,3	65,3	50	40	30	20	5	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04	Persentase berkurangnya kawasan permukiman kumuh	%	N.a	N.a	3	4	4	4	4	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05	Cakupan Permukiman yang didukung oleh PSU	%	70	70	76	82	88	94	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	%	N.A	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	N.A	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	Persentase Satlinmas dalam upaya penanggulangan bencana	%	N.A	20	20	20	20	20	20	20	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	96	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Persentase capaian SPM Penanggulangan Bencana	%	N.A	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana dalam Kondisi Baik	%	51	51	55	60	65	70	75	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
1.05.04	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKK Outcome)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										Dinas Sosial
1.06.02	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	85	85	90	90	90	95	95	95	Dinas Sosial
1.06.04	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	6,25	6,31	6,82	6,9	6,93	7	7,2	7,2	Dinas Sosial
1.06.04	Persentase Capaian SPM Sosial	%	19,1	19,13	19,3	19,9	20,12	20,35	20,55	20,55	Dinas Sosial
1.06.05	Persentase keluarga miskin yang memperoleh layanan Jaminan Sosial	%	25	25	30	40	50	60	70	70	Dinas Sosial
1.06.06	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan Mikro	Dokumen	N.A	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokume	1 Dokume	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.03	Tingkat produktivitas tenaga kerja (IKK Outcome)	Juta Rp/Tenaga Kerja	108,62	112,57	116,76	121,2	125,9	130,89	136,18	136,18	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.07.04	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	N.A	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
2.07.05	Persentase pelaku usaha/perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP,PKB,LKS,Bripartit dan Tripartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	N.A	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Persentase kegiatan perangkat daerah yang responsif gender	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK Outcome)	%	0,26	0,25	0,2	0,15	0,1	0,08	0,05	0,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	%	20	20	35	50	65	80	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Dokumen data gender dan anak	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	NA	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Persentase desa/kelurahan layak anak	%	NA	58	65	68	72	75	75	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	Jumlah lantai jemur	lantai jemur	N.A	0	0	2	4	6	8	8	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
2.09.02	Jumlah Lumbung Pangan	Lumbung Pangan	0	0	0	2	4	6	8	8	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Angka Konsumsi Energi	kkal/ kap/ hari	2.301,00	2.290,00	2.280,00	2.270,00	2.260,00	2.250,00	2.240,00	2.240,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	4,14	5	25	45	65	85	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Persentase Stabilitas Harga Pangan	%	CV < 30 %	CV < 30	Dinas Ketahanan Pangan						
2.09.03	Angka Ketersediaan Energi (Kkal/ Kap/ Hari)	Kkal / Kap/ Hari	3.436,00	3.439,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	Persentase Penyusunan Peta Ketahanan Pangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	%	90	91	92	92,5	93	93,5	94	94	Dinas Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.04	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (IKK Outcome)	%	N.a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.05	Persentase Jumlah Kasus yang tertangani	%	N.a	N.a	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.07	Persentase Penyelesaian Penetapan Tanah Ulayat	%	N.a	N.a	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.08	Persentase Penyelesaian Tanah Kosong	%	N.a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.09	Persentase Izin Yang Dikeluarkan	%	N.a	N.a	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.10	Bertambahnya Aset Pemerintah Daerah Berupa Tanah	%	N.a	N.a	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun	%	45	50	75	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Persentase kenaikan Nilai IKLH	%	65	65	67	69	71	73	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Persentase RTH Terpelihara	%	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.11.04	Presentase kenaikan luasan RTH	%	0	0	30	40	50	60	60	60	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Persentase Limbah B3 yang tertangani sesuai dengan petunjuk teknis	%	15	15	18	21	24	27	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH	%	50	55	60	65	70	75	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	70	70	75	80	85	90	95	95	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	%	60	60	80	80	80	80	80	80	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Persentase pengurangan sampah melalui 3 R	%	24	26	27	28	30	32	32	32	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Persentase peningkatan pelayanan persampahan	%	30	35	40	45	50	55	55	55	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Fasilitasi pembangunan TPS 3R Tingkat Desa	Desa	6	6	16	36	56	66	69	69	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
2.12.02	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Kepemilikan akta kelahiran (IKK Outcome)	%	80	85	90	95	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Kepemilikan akta nikah	%	80	84	88	92	96	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	%	N.A	65	70	75	80	85	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	Dokumen profil kependudukan	Dokumen	50	50	50	60	65	65	70	70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Persentase Desa Mandiri	%	57	58,5	60,9	63,8	71,7	82,59	90,59	90,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Persentase Pengembangan BUMDes Aktif	%	N.A	58,45	60,9	63,8	71,7	82,59	90,59	90,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa/ Kelurahan	%	20	20	40	60	80	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Persentase Kelembagaan Masyarakat (LPM) yang berperan Aktif	%	N.a	4,6	9,23	15,38	23,07	30,76	40,76	40,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1,6	1,55	1,5	1,46	1,43	1,39	1,35	1,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	Persentase Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	%	18,84	18,11	17,49	16,96	16,51	16,13	15,8	15,8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
2.14.02	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	66,23	66,58	66,9	67,19	67,45	67,69	67,69	67,69	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40,04	40,5	40,93	41,31	41,66	41,98	41,98	41,98	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1,6	1,55	1,5	1,46	1,43	1,39	1,35	1,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Persentase TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,17	2,15	2,13	2,12	2,11	2,1	2,09	2,09	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	%	21	21	21	22	22	22	22	22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Rasio Akseptor KB	%	76,25	85	86	87	88	89	90	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Persentase penyuluhan terhadap PUS dan WUS di lokus desa stunting dan pentingnya metode MKJP untuk mengatur jarak kehamilan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	Persentase sosialisasi dan pembinaan terhadap kader pendamping desa tentang stunting	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	Persentase Sosialisasi dan Pembinaan 1000 HPK terhadap kader pendamping desa kepada Keluarga yang berisiko stunting	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	Persentase keluarga pra sejahtera, sejahtera I dan sejahtera II yang ikut ber - KB	%	25,5	24,5	23,3	22,58	21,6	20,86	19,87	19,87	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										Dinas Perhubungan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
2.15.02	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	72,09	75,5	84,41	85,5	87,74	96,12	100	100	Dinas Perhubungan
2.15.02	Kinerja lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Kategori	B	B	B	B	B	A	A	A	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	50	55	60	65	70	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	50	55	60	65	70	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	4	9	16	19	22	25	28	28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	Persentase Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	50	55	60	65	70	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.03	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	1	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%		60,93	62,91	64,9	66,23	67,55	68,87	68,87	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
2.17.04	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat	%		74,31	75,07	75,84	76,6	77,36	77,36	77,36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	Persentase pengurus koperasi yang dilatih	%		28,12	27,54	26,98	26,45	25,93	25,44	25,44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	Meningkatnya jumlah SDM Pengurus Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	Koperasi		569	581	593	605	617	629	629	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas SDM UMKM yang dilatih -> Persentase SDM UMKM yang dilatih	%		5,52	6,35	7,16	7,96	8,74	9,5	9,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	Persentase Produk UKM yang Terstandarisasi dan Tersertifikat Halal	%		1,01	1,28	1,54	1,8	2,05	2,4	2,4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	Persentase Usaha Mikro Yang dilakukan Updating Pendataan	%		1,14	1,13	1,11	1,1	1,09	1,08	1,08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	Persentase usaha Mikro yang menjadi wira usaha kecil	%	0	0,56	0,61	0,67	0,73	0,78	0,83	0,83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.18.02	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.18.03	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	event promosi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.18.04	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan tepat waktu	%	N.A	95	95	95	95	95	95	95	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.18.05	Nilai Investasi Baru per tahun	%	97.05	27.05	34.05	44.05	54.05	64.05	74.05	74.05	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
2.18.06	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	95	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK Outcome)	%	45	50	50	55	60	65	70	70	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK OUTCOME)	%	4,85	5,1	5,1	5,3	5,49	5,68	5,88	5,88	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Persentase Atlet Pelajar Yang Berprestasi di Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional	%	N.A	N.A	7,69	42,4	8,97	42,4	12,82	12,82	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Persentase Olahraga rekreasi yang dilestarikan	%	N.A	20	20	50	55	60	65	65	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.20.02	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (IKK Outcome)	%	N.a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.20.02	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (IKK Outcome)	%	N.a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21.02	Tingkat keamanan informasi pemerintah (IKK Outcome)	%	N.a	N.a	50	55	60	65	70	70	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
2.22.02	Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang dilestarikan	Warisan	5	5	6	7	8	9	4	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03	Persentase Keaktifan Kelompok Seni Budaya	%	50	55	65	65	70	70	72	72	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04	Jumlah sejarah lokal	Dokumen	3	3	4	5	6	7	8	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	20	20	24	28	32	36	40	40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.06	Pengelolahan jumlah koleksi permuseuman daerah	koleksi	10	10	13	16	19	22	24	24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	Angka Kunjungan Perpustakaan pertahun	%	98,58	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (IKK Outcome)	%	94,69	40	40	50	60	70	80	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Kegiatan	99,48	2	2	3	3	4	4	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.03	Persentase Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	4,2	5	5,25	5,51	5,79	6,08	6,38	6,38	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.03	Jumlah Total Produksi Perikanan tangkap (IKK Outcome)	ton	459,01	481,96	506,05	531,36	557,92	585,82	615	615	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.04	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	%	5	5	5,25	5,51	5,79	6,08	6,38	6,38	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
3.25.04	Jumlah Total Produksi Perikanan budidaya(IKK Outcome)	ton	224,36	235,58	247,36	259,73	272,71	286,35	300,67	300,67	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.06	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/thn	33,84	34,86	35,9	36,98	38,09	39,23	40,41	40,41	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.06	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	79	90	104	120	138	158	173	173	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	%	0,07	4,22	7,41	8,15	8,95	9,86	10,8	10,8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (IKK Outcome)	%	0	5	6	7	8	9	10	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (IKK Outcome)	%	-66	16	18	20	22	24	25	25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	%	1,08	0,4	0,4	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	Tingkat hunian akomodasi	%	10,55	10	12	13	14	15	16	16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.04	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi		3	5	7	9	11	13	15	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05	Persentase capaian pembinaan Pelaku ekonomi kreatif	%	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05	Persentase capaian pembinaan pelaku pariwisata dan industri pariwisata	%	N.A	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.02	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	%	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.02	Jumlah Produksi ternak	ton	821,61	839,69	867,4	890,81	910,41	940,46	965,85	965,85	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
3.27.02	Populasi Ternak (Sapi dan Kambing)	Ekor	4559 Sapi/ 9381 Kambing	4787 Sapi/ 9662 Kambing	5026 Sapi/ 9952 Kambing	5278 Sapi/ 10251 Kambing	5541 Sapi/ 10558 Kambing	5819 Sapi/ 10875 Kambing	6109 Sapi/ 11201 Kambing	6109 Sapi/ 11201 Kambing	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.02	Persentase kelompok peternak yang memanfaatan Bahan Baku lokal sebagai pakan ternak	%	Na	17,44	18,49	19,78	21,17	22,65	24,23	24,23	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.03	Nilai Tukar Petani	%	101,92	102	102	102	102	102	102	102	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.03	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	ton		2.267,00	2.309,80	2.343,60	2.378,50	2.412,40	2.446,30	2.446,30	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.03	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	ton		42.619,00	43.053,24	43.492,50	43.936,78	44.385,08	44.837,40	44.837,40	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.03	Peningkatan Produksi perkebunan	ton		453	457,54	462. 11	466,74	471,43	476,19	476,19	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.03	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	%	35	39	42	47	51	56	62	62	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.04	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (IKK Outcome)	%	-11	-9	-7	-5	-3	-2	-1	-1	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.04	Produksi Olahan Produk Peternakan	ton	1.500,00	1.545,00	1.591,00	1.639,00	1.688,00	1.738,00	1.791,00	1.791,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.05	persentase cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	%	50	80	82	85	86	88	90	90	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.06	Rekomendasi izin usaha pertanian	Rekomendasi	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.07	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	35	35	38	40	42	43	45	45	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
3.30.02	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha perdagangan sesuai ketentuan	%	0,1	10	12	14	16	18	20	20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03	peningkatan sarana prasarana perdagangan, pasar rakyat, PK5	%	65	65	70	75	75	80	80	80	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredara dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	%	20	22	24	26	28	30	32	32	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05	Persentase jumlah UMKM yang menjadi ekspor	%	na	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05	Ekspor Bersih Perdagangan	milyar	0,69	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaranya	%	n.a	1	2	3	4	5	6	6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	%	50	55	60	65	70	75	80	80	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKK Outcome)	%	0,1	0,1	15	20	25	30	35	35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	%	0,25	0,25	30	35	40	45	45	45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	%	0,1	0,1	15	20	25	30	35	35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.02	Persentase rumah taifidz yang dibina	%	NA	NA	13	38	75	88	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
4.01.02	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LPPD kategori Baik	%	N.A	N.A	90	90	90	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.02	Persentase produk hukum yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.02	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SPM kategori Baik	%	N.A	N.A	80	80	90	90	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.03	Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	%	NA	90	90	90	95	95	95	95	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.03	Persentase kerberhasilan Pengadaan barang dan Jasa	%	NA	NA	94	94	96	96	98	98	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.01.03	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	NA	15	15	13	10	8	5	5	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
4.02	SEKRETARIAT DPRD										Sekretariat DPRD
4.02.02	Persentase Perda yang ditetapkan	%	60	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
4.02.02	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
5.01	PERENCANAAN										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam Renja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	Persentase Capaian Target IKU daerah yang di monitoring dan evaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	Persentase Keselarasan Program dan Kegiatan kedalam Dokumen Perencanaan Bidang Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
5.01.03	Persentase Capaian Target Kinerja Program Bidang Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02	KEUANGAN										Badan Keuangan Daerah
5.02.02	Rasio Anggaran sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	%	11,05	6,5	6,45	6,3	6,1	6	5,9	5,9	Badan Keuangan Daerah
5.02.02	Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga Kesehatan (IKK Outcome)	%	31,28	31,5	31,75	32	32,3	32,7	33	33	Badan Keuangan Daerah
5.02.02	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi transfer expenditures) (IKK Outcome)	%	65,67	65,8	66	66,25	66,75	67,15	67,65	67,65	Badan Keuangan Daerah
5.02.03	Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan (IKK Outcome)	%	80	82	84	85	87	90	90	90	Badan Keuangan Daerah
5.02.03	Persentase Aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci	%	80	83	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan Daerah
5.02.03	Manajemen Aset	%	80	82	84	85	87	90	90	90	Badan Keuangan Daerah
5.02.04	Persentase Kenaikan PAD	%	-16,76	45,3	30,25	24,1	21,44	17,89	16,7	16,7	Badan Keuangan Daerah
5.02.04	Rasio PAD terhadap APBD	%	3,84	6,03	8,71	9,62	10,1	10,7	11,23	11,23	Badan Keuangan Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN										Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN	%	N.a	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	Persentase keterisian jabatan	%	N.a	90	93	94	95	96	97	97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
5.03.02	Persentase keterpenuhan formasi ASN	%	N.a	80	82	83	84	85	85	85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N.a	81	83	84	85	86	87	87	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N.a	8	15	30	45	60	75	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N.a	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.04.02	Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan	%	N.a	85	87	89	91	93	95	95	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.04.02	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	N.a	20	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.04.02	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	N.a	4	5	5,25	5,5	5,75	6	6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.04.02	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	%	N.a	40	45	50	55	60	65	65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	Persentase implementasi rencana kelitbangam	%	90,91	100	100	33	33	33	33	33	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangam	%	90,91	100	100	14	14	14	14	14	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
5.05.02	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
6.01	INSPEKTORAT DAERAH										Inspektorat Daerah
6.01.02	Persentase Capaian Target Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
6.01.03	Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
7.01	KECAMATAN										KECAMATAN
7.01.02	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Hamparan Rawang
7.01.02	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Koto Baru
7.01.02	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kumun Debai
7.01.02	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pesisir Bukit
7.01.02	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
7.01.02	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Bungkal
7.01.02	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	90	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
7.01.02	Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanah Kampung
7.01.03	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Hamparan Rawang
7.01.03	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Koto Baru
7.01.03	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kumun Debai
7.01.03	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pesisir Bukit
7.01.03	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
7.01.03	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Bungkal

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
7.01.03	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
7.01.03	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanah Kampung
7.01.04	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Hamparan Rawang
7.01.04	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Koto Baru
7.01.04	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kumun Debai
7.01.04	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pesisir Bukit
7.01.04	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
7.01.04	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Bungkal
7.01.04	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
7.01.04	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanah Kampung
7.01.05	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
7.01.05	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
7.01.06	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Hamparan Rawang
7.01.06	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Koto Baru
7.01.06	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kumun Debai
7.01.06	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pesisir Bukit
7.01.06	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
7.01.06	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Bungkal

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
7.01.06	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
7.01.06	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanah Kampung
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	%	97,13	70	70	75	80	85	90	90	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang memahami pendidikan politik	%	92,35	75	75	80	80	85	90	90	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	Persentase pemberdayaan ormas	%	NA	80	85	90	95	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	persentase etnis /suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan bangsa	%	NA	70	70	75	80	86	90	90	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	33,33	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
X.XX	NON-BIDANG URUSAN										Semua SKPD
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Semua SKPD
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Semua SKPD
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Semua SKPD
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Semua SKPD
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	SKPD Pengelola PAD sesuai kewenangan urusan pemerintahan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	50	51,61	54,79	58,01	61,24	64,47	67,69	67,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	85	85	87	88	90	90	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	N.a	N.a	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan serta pendokumentasiannya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD se Kota Sungai Penuh	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	N.A	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan Daerah
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan Daerah
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan Daerah
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pesisir Bukit
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pesisir Bukit
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pesisir Bukit
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Hamparan Rawang
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Hamparan Rawang

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Hamparan Rawang
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kumun Debai
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kumun Debai
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kumun Debai
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanah Kampung
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanah Kampung
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanah Kampung
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Bungkal
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Bungkal
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Bungkal
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Koto Baru

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Koto Baru
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Koto Baru
X.XX.01	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
X.XX.01	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
X.XX.01	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
X.XX.01	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM kategori Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Semua SKPD
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	80	82	86,92	86,92	88,56	90,2	91,84	91,84	Dinas Pendidikan
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Semua SKPD
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Semua SKPD
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	90	90	95	95	95	95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	30	32,31	36,92	41,54	46,15	50,77	55,38	55,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	50	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%		100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	30	30	30	35	40	45	45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	30	35	35	35	40	45	45	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	30	35	35	35	35	40	40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	0,25	30	35	35	35	40	50	50	Dinas Peternakan dan Perikanan
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	0,05	10	20	20	20	25	25	25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100		100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	30	35	35	35	40	50	50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan Daerah

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan Daerah
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%		100	100	100	100	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	80	80	100	100	100	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sungai Penuh
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	50	50	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pesisir Bukit
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	25	25	35	35	35	40	50	50	Kecamatan Pesisir Bukit
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Hamparan Rawang
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Hamparan Rawang
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kumun Debai
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	90	90	90	95	95	100	100	100	Kecamatan Kumun Debai
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanah Kampung
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanah Kampung

Kode	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	SKPD Penanggung Jawab *
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	100	100	100	95	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	90	90	90	90	95	95	100	100	Kecamatan Pondok Tinggi
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	100	100	100	95	100	100	Kecamatan Sungai Bungkal
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	90	90	90	90	95	95	100	100	Kecamatan Sungai Bungkal
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Koto Baru
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	90	90	90	95	95	100	100	100	Kecamatan Koto Baru
X.XX.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
X.XX.01	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

* Apabila terjadi perubahan nomenklatur SKPD, maka penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2026—2031 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini dapat menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kota Sungai Penuh serta RPJMD Provinsi Jambi yang berlaku.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Walikota menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
2. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
3. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
4. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD;
5. Bappeda Kota Sungai Penuh melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah lingkup Kota Sungai Penuh.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh disusun sebagai penjabaran atas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Sehingga diharapkan, penggerahan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh ke dalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta Indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan, Walikota dan Wakil juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh di masa yang akan datang.

Lampiran I
PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO

No	Indikator Pembangunan	RPJMN 2020-2024					RPJMD Provinsi					RPJMD Kota Sungai Penuh				
		Target					Target					Target				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	5,40	6,00	6,40	6,70	-0,46		4,70	4,90	5,15	-0,14	3,64	3,72	3,80	3,88
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,29	6,85	6,35	5,75	5,35	7,97		7,9	7,84	7,6	3,03	3	3,0	2,93	2,9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70	3,50	3,40	2,90	2,60	5,13		5	4,61	4,56	5,56	5,06	4,56	4,06	3,56
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					74,60- 84,23	71,29		72,14	72,62	73,07	75,42	75,94	76,46	76,97	77,49
5	Rasio Gini					0,360 - 0,474	0,316		0,315	0,314	0,314	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30
6	Penurunan Emisi GRK (%)					27,3										

Lampiran II
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI JAMBI

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024										RPJMD Provinsi Jambi										RPJMD Kota Sungai Penuh										Keterangan					
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					2020	2021	2022	2023	2024										
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024															
PN	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS																																			
PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (Persen)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terharukan Kewenangan Provinsi			100	100	100																						
		Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68,0	68,0	68,8	69,2	70,3					178	634	1.289																						
PP	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m³)	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada			81,04	86,01	90,16	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	81,42	82,5	84,5	87,5	92	Program													
												81,04	86,01	90,16	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Luas Cakupan Pelayanan Irigasi Kondisi Baik	2.057,43	2.094,23	2.164,04	2.233,85	2.303,66	Program												
PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	skor ph			92,5	93,2	95,2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Pengguna Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	4,14	5	25	45	65	Program													
		Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a))	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0					85,5	85	84,5	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	3.436,00	3.439,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Program												
		Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0					2140	2195	2195,5	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	3.436,00	3.439,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Program												
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Under-nutrition) (%)	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0					60,5	61	61,5	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka Konsumsi Energi	2.301,00	2290	2280	2270	2260	Program												
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity)	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0					7,5	6,5	5,5	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penyusunan Peta Ketahanan Pangan Daerah	100	100	100	100	100	Program												
		Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1*) (juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9					19,61	19,61	19,61	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Sejauh Daerah	90	91	92	92,5	93	Program												
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	<80					10.687,49	16.400,53	27.613,89	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah Total Produksi Perikanan tangkap (IKK Outcome)	459,01	481,9563	506,054115	531,356821	557,9247	Program												
		Konservasi kawasan kelautan										60%	65%	70%		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Total Produksi Perikanan budidaya (IKK Outcome)	224,36	235,58	247,36	259,73	272,71	Program												
PP	Pengembangan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Rincian			7%	7,50%	8%	Sasaran	3.1.2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	45	50	55	60	65	Sasaran													
															Sasaran	3.1.2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	-5,43	2,43	2,5	2,53	2,56	Sasaran													
															2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase SDM UMKM yang dilatih	0	5,52	6,35	7,16	7,96	Program													
															3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase jumlah UMKM yang menjadi eksportir	0,693	1	1,25	1,5	1,75	Program													
															3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi nema	nara	1	2	3	4	Program													

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi Jambi						RPJMD Kota Sungai Penuh						Keterangan								
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target									
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024					
PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)													4.01.03	PROGRAM Perekonomian DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusa, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dilakukan	NA	90	90	90	95	Program			
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan		19,60%	21,60%	23,60%	Sasaran	3.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Omzet UMKM	0	1	1,01	1,01	1,01	Sasaran			
															2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Produk UKM yang Terstandarisasi dan Tercertifikasi Halal	0	1,01	1,28	1,54	1,8	Program			
															2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang dilakukan Updating Pendataan	0	1,14	1,13	1,11	1,1	Program			
															2.17.08	PROGRAM PENGBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang menjadi wira usaha kecil	0	0,56	0,61	0,67	0,73	Program			
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam		20	KSP/USP	25	KSP/USP	27	KSP/USP	Sasaran	3.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Omzet Koperasi	0	1,9	1,9	1,9	1,9	Sasaran
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi		2,69%		3,69%		4,69%		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya jumlah SDM Pengurus Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	0	569	581	593	605	Program
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun		5%		5%		5%		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang dilatih	0	28,12	27,54	26,98	26,45	Program
									PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkinerja baik		40%		45%		50%		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	0	60,93	62,91	64,9	66,23	Program
									PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat		43%		45%		47%		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPS yang sehat dan cukup sehat	0	74,31	75,07	75,84	76,6	Program
PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1	PROGRAM PENGEKALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		30%		31%		32%		Sasaran	3.1.4. Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	1,98	2,57	2,59	2,61	2,63	Sasaran	
									Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota		10%		10%		10%		3.27.05	PROGRAM PENGEKALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	50	80	82	85	86	Program	
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi		7%		8%		9%		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (IKK Outcome)	-11	-9	-7	-5	-3	Program
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan di Kab/Kota		11%		13%		15%		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	35	39	42	47	51	Program
									Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukan di Kab/Kota		8,50%		9%		9,50%		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	101,92	102	102	102	102	Program	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan di Kab/Kota		15%		17%		19%		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	1	1	1	1	1	Program
									Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukan Kab/Kota		14,50%		15%		15,50%		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi ternak	821,61	839,69	867,4	890,81	910,41	Program	

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi Jambi					RPJMD Kota Sungai Penuh					Keterangan							
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024		
Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan, pelaku utama dan aparatur pertanian yang diberdayakan/ditina sejalan		1,70%	2,20%	2,70%		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	35	35	38	40	42	Program
											1%	1,50%	2%										
											5%	5,50%	6%										
								PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan yang dicelekatkan		100%	100%	100%			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rekomendasi izin usaha pertanian	0	1	1	1	1	Program
											10%	10%	10%										
	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		54.480,9 ton	54.807,8 ton	55.136,7 ton		Sasaran	3.1.4. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	1,98	2,57	2,59	2,61	2,63	Sasaran
Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		16%	18%	19%		Sasaran	3.1.2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertambahan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	-5,43	2,43	2,5	2,53	2,56	Sasaran

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi Jambi					RPJMD Kota Sungai Penuh					Keterangan						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata						3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD ADIBB	1,08	0,4	0,4	0,41	0,41	Program						
								3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	10,55	10	12	13	14	Program						
								3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	0,07	4,22	7,41	8,15	8,95	Program						
								3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (IKK Outcome)	0	5	6	7	8	Program						
								3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (IKK Outcome)	-66	16	18	20	22	Program						
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KECAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif						Sasaran	3.1.2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	45	50	55	60	65	Sasaran						
								3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KECAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi	3	5	7	9	11	Program						
								3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase capaian pembinaan Pelaku ekonomi kreatif	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	Program						
								3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase capaian pelaku pariwisata dan industri pariwisata	N.A	13,8	13,8	13,8	13,8	Program						
								Sasaran	3.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Sungai Penuh	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah yang terdapat dalam OSS	N.A	20	22	24	25	Sasaran						
								2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kecamatan/Kota	95	100	100	100	100	Program						
Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	nilai indeks kepusingan masyarakat						2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kecamatan/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	Program						
								2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru per tahun	97,05%	27,05%	34,05%	44,05%	54,05%	Program						
								2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kecamatan/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	Program						
								2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan Mikro	N.A	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	Program						
								2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK Outcome)	N.A	100	100	100	100	Program						
	Penyediaan lapangan kerja per tahun fluta	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Layanan RTKD		3.2.4. Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,56	5,21	5,15	5,09	5,03	Sasaran					
												2,07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja (IKK Outcome)	108,62	112,57	116,76	121,2	125,9	Program		
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (2,2-4,5)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan		2,07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja (IKK Outcome)	108,62	112,57	116,76	121,2	125,9	Program				
	Kontribusi tenaga kerja industri	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan		2,07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja (IKK Outcome)	108,62	112,57	116,76	121,2	125,9	Program				

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi Jambi						RPJMD Kota Sungai Penuh						Keterangan			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan	Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0	PROGRAM PENGAWSAN KETENAGAKERJAAN	Persentase penurunan Pelanggaran Norma Norma Tenaga	76%	77%	78%	2,07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja (IKK Outcome)	108,62	112,57	116,76	121,2	125,9	Program	
		Jumlah tenaga kerja pariwisata (0,92*) (Juta)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0			2,07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja (IKK Outcome)	108,62	112,57	116,76	121,2	125,9	Program				
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0			2,19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK Outcome)	4,85	5,1	5,1	5,3	5,49	Program				
		Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2			3,30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase jumlah UMKM yang menjadi ekspor	na	1	1,25	1,5	1,75	Program				
		Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0			3,30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Eksport Bersih Perdagangan	0,693	1	1,25	1,5	1,75	Program				
		Nilai devisa pariwisata (8,91*) (USD miliar) (USD miliar)	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0			3,1.1. Meningkatkan Kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	-3,05	6,5	6,6	6,9	7,2	Sasaran					
										3,30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Eksport Bersih Perdagangan	0,693	1	1,25	1,5	1,75	Program				
										3,2.1. Meningkatnya sentra kegiatan ekonomi masyarakat	Jumlah sentra produksi unggulan daerah	6	6	7	7	8	Sasaran					
										3,31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKK Outcome)	0,1	0,1	15	20	25	Program				
										3,31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	0,25	0,25	30	35	40	Program				
										3,31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarakan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	0,1	0,1	15	20	25	Program				
										3,1.2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	-5,43	2,43	2,5	2,53	2,56	Sasaran					
										3,26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	0,07	4,22	7,41	8,15	8,95	Program				
										3,26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (IKK Outcome)	0	5	6	7	8	Program				
										3,26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (IKK Outcome)	-66	16	18	20	22	Program				
										3,30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha perdagangan sesuai ketentuan	0,1	10	12	14	16	Program				
										3,30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasar pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana	20	22	24	26	28	Program				

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi Jambi						RPJMD Kota Sungai Penuh						Keterangan					
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			
								PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	Nilai IKM Pelayanan Pemerkasaan dan Sertifikasi Mutu	77 (B Indeks)	78 (B Indeks)	79 (B Indeks)			3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100	100	100	100	Program	
PP	Pengukuran Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4																	
		Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0																	
		Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.																	
PN	MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN																							
PP	Pembangunan Wilayah Sumatera	Laju pertumbuhan PDRB Sumatera (persen/tahun)					6									Tujuan	3.1. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi	-0,14	3,64	3,72	3,8	3,88	Tujuan
															Sasaran	3.1.1. Meningkatkan Kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	-3,05	6,5	6,6	6,9	7,2	Sasaran	
															Sasaran	3.1.2. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	-5,43	2,43	2,5	2,53	2,56	Sasaran	
															3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IJK Outcome)	0,07	4,22	7,41	8,15	8,95	Program	
															3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	1,08	0,4	0,4	0,41	0,41	Program	
															3.26.04	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	10,55	10	12	13	14	Program	
															3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Produk Kreatif yang bersertifikasi	3	5	7	9	11	Program	
															3.26.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase capaian pembinaan pelaku ekonomi kreatif	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	Program	
															Tujuan	3.2. Meningkatkan pembangunan pariwisata dan industri pariwisata	Pembentukan pelaku pariwisata dan industri pariwisata	N.A	13,8	13,8	13,8	13,8	Program	

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi Jambi						RPJMD Kota Sungai Penuh						Keterangan					
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Program	Target				Bidang Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Program	Target											
			2020	2021		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024							
PN	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING																							
PP	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7						98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam <i>Perwujudanprogram</i>		5%	7,50%	8,00%	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	85	85	90	90	90	Program
		Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (PKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)			60,32%	60,35%	60,39%	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga prasejahtera, sejahtera I dan sejahtera II yang ikut ber-KB	25,5	24,5	23,3	22,58	21,6	Program	
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)			65,44%	65,48%	65,50%	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase TFR (Angka Kelahiran Total)	2,17	2,15	2,13	2,12	2,11	Program	
	PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk			1,72%	1,70%	1,68%	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,6	1,55	1,5	1,46	1,43	Program	
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial	65,2					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam <i>Perwujudanprogram</i>			5%	7,50%	8,00%	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	85	85	90	90	90	Program	
															1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pant <i>congo</i>	6,25	6,31	6,82	6,9	6,93	Program	
															1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Sosial	19,1	19,13	19,3	19,9	20,12	Program	
															1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	85	85	90	90	90	Program	
															1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pant <i>congo</i>	6,25	6,31	6,82	6,9	6,93	Program	
															1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Sosial	19,1	19,13	19,3	19,9	20,12	Program	

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi Jambi					RPJMD Kota Sungai Penuh					Keterangan						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,0	217,0	205,0	194,0	183,0	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	jumlah kepuertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah	76.586	77.086	77.586	1.02.02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	85	87	90	92	94	Sasaran Renstra SKPD	
		Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0			343	333	323	1.02.02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Pasyankes (Dinas Kesehatan dan PSUD)	65	70	75	80	85	Sasaran Renstra SKPD	
		Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11,0	10,0			59	56	53	1.02.02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra SKPD	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4			96%	96%	96%	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,23	66,58	66,9	67,19	67,45	Program	
		Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4			100%	100%	100%	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	76,25	85	86	87	88	Sasaran Renstra SKPD	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran)	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0			100%	100%	100%	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	18,84	18,11	17,49	16,96	16,51	Program	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0			45%	50%	55%	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penyaluran terhadap PUS dan WUS di lokus desa stunting dan pentingnya metode MKJP untuk mengatur jarak kahamilan	100	100	100	100	100	Program	
													2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase sosialisasi dan pembinaan terhadap kader pendamping desa tentang stunting	100	100	100	100	100	Program	
													2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Sosialisasi dan Pembinaan 1000 HPK terhadap kader pendamping desa kepada Keluarga yang berisiko stunting	100	100	100	100	100	Program	
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat)	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0			9	9	9	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penyaluran terhadap PUS dan WUS di lokus desa stunting dan pentingnya metode MKJP untuk mengatur jarak kahamilan	100	100	100	100	100	Program	
													2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase sosialisasi dan pembinaan terhadap kader pendamping desa tentang stunting	100	100	100	100	100	Program	
													2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Sosialisasi dan Pembinaan 1000 HPK terhadap kader pendamping desa kepada Keluarga yang berisiko stunting	100	100	100	100	100	Program	
		Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terakreditasi)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18			100%	100%	100%	1.02.02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100	100	100	100	100	Program	
		Insidensi tuberkulosis (per 100.000)	272,0	252,0	231,0	211,0	190,0			100%	100%	100%	1.02.02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100	100	100	100	100	Program	
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325,0	345,0	365,0	385,0	405,0			73%	81,80%	90,90%	1.02.02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100	100	100	100	100	Program	
		Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09			95%	95%	95%	1.02.02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100	100	100	100	100	Program	

Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi Jambi						RPJMD Kota Sungai Penuh						Keterangan			
			2020		2021		2022		2023		2024		Target		2020		2021		2022		2023		
			Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024						
PP	PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	PROGRAM PEMERUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak		54,54%	72,72%	81,81%	2.08.06	PROGRAM PEMERUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa/kelurahan ramah anak	NA	SB	65	68	72	Program	
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan	Laki-laki 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PENGRASUTAMAN AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,50%	91,50%	91,50%	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)	100	100	100	100	100	Program	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116475	91,27794284	91,27896233	91,33469578	91,38627023	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		100%	100%	100%	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen data gender dan anak	1	2	2	2	2	Sasaran Renstra SKPD	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481017	73,50050042	73,74051922	73,96592027	74,17747551	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender		0,81	0,82	0,83	2.08.02	PROGRAM PENGRASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang responsif gender	100	100	100	100	100	Program	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	PROGRAM PERLINDUNGAN KHAS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		67	67,62	69,87	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)	100	100	100	100	100	Program	
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPD yang mendapatkan layanan komprehensif		100,00%	100,00%	100,00%	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)	100	100	100	100	100	Program	
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda		0,033 % (76 kelompok)	0,041 % (96 kelompok)	0,052 % (121 kelompok)	Sasaran	11.6. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda Berprestasi	A (pandemi)	0,4	0,4	0,5	0,6	Sasaran	
								persentase peningkatan peran serta kepemudaan		0,13% (1181 orang)	0,15 % (1368 orang)	0,17 % (1570 orang)	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK Outcome)	45	50	50	55	60	Program		
								persentase kegiatan kepriauhan yang terfasilitasi		100%	100%	100%	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK OUTCOME)	4,85	5,1	5,1	5,3	5,49	Program		
PP	PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan)	27,9				40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Desa/Kelurahan		5%	7,50%	8,00%	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diherdayakan	85	85	90	90	90	Program	
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial		2,50%	2,75%	2,75%	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh layanan Jaminan Sosial	25	25	30	40	50	Program	
		Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilengkapi dengan sistem pengelolaan	630000	1600000	1850000	1350000	1100000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial		0,50%	0,70%	0,70%	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Sosial	19,1	19,13	19,3	19,9	20,12	Program	
		Bidang tanah yang diredisitribusi	750.000																				
		Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087																				
PP	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angkatan kerja berpendidikan tinggi	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat kompetensi		5,10%	5,20%	5,30%	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja (IKK Outcome)	108,62	112,57	116,76	121,2	125,9	Program	
		Jumlah PTN yang Masuk ke dalam World Class University	a. Top 200	0	0	0	0	1															
			b. Top 300	1	1	1	1	2															
			c. Top 500	2	2	2	2	3															
		Proporsi pekerja berkelelahan menengah dan tinggi (%)	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0																

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi Jambi						RPJMD Kota Sungai Penuh						Keterangan			
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Percentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		76%	79%	80%	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Percentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan		97,13	70	70	75	80	Program
PP	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUJUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN									8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	NA	70	70	75	80	Program					
PP	MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESAHJERAHAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya tergistrasi		100 buah	110 buah	115 buah	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	20	24	28	32	Program	
							PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Percentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi		13%	15%	18%	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah sejarah lokal	3	3	4	5	6	Program	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Percentase peningkatan jumlah museum ke museum		16%	18%	20%	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan jumlah koleksi permuseuman daerah	10	10	13	16	19	Program	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KERUDUYAAN	Jumlah seni budaya lombi yang ditatakan		27 karya	30 karya	32 karya	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang diilustrasikan	5	5	6	7	8	Program	
							PROGRAM PENGETAHUAN Taman Budaya Jambi	Jumlah sertifikasi		51.000	52.000	53.000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Percentase Keaktifan Kelompok Seni Budaya	50	55	65	65	70	Program	
PP	MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	Indeks Kerukunan Umat Beragama					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Percentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		76%	79%	80%	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Percentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	97,13	70	70	75	80	Program	
PP	PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Percentase rekomendasi/nask ah akademik/model yang diplikasikan peranakan daerah		60%	65%	70%	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Percentase implementasi rencana kelitaban	90,91	100	100	33	33	Program	
							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat indeks pembangunan literasi masyarakat		63,3	67,3	71,3	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Angka Kunjungan Perpustakaan pertahun	98,58	0,06	0,06	0,07	0,07	Program	
										21,5	22,5	23,5	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Percentase Penerapan Muatan Lokal	100	100	100	100	100	Program	
													2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK Outcome)	45	50	50	55	60	Program	
													2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK Outcome)	4,85	5,1	5,1	5,3	5,49	Program	
PN	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Percentase warga negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni		100%	100%	100%	Tujuan	4.1. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Percentase pemenuhan infrastruktur kota	N.A	68,18	71,28	74,31	77,5	Tujuan	
PP	INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan lauas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63							1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Percentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	90,92	0	100	100	100	Program	
		Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	Percentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni		100%	100%	100%	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Percentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	90,92	0	100	100	100	Program	

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi Jambi					RPJMD Kota Sungai Penuh					Keterangan										
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target									
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024					
		Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk nerhunahan	55,46	56,85	58,23	59,62	60								2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (IKK Outcome)	N.a	100	100	100	100	100	Program		
		Persentase rumah tangga yang masih menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses								2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase jumlah Kasus yang tertangani	N.a	N.a	100	100	100	100	100	Program	
		Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0								2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULLAYAT	Persentase Penyelesaian Tanah Ullayat	N.a	N.a	100	100	100	100	100	Program	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72,92% penanganan	73,70% penanganan	75,28% penanganan	77,64% penanganan	80% penanganan								2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Penyelesaian Tanah Kosong	N.a	100	100	100	100	100	Program		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91,8% (JP: 23,6%)	93,8% (JP: 25,4%)	95,9% (JP: 27,1%)	97,9% (JP: 28,9%)	100% (JP: 30,4%)								2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Bertambahnya Aset Pemerintah Daerah Berupa Tanah	N.a	N.a	100	100	100	100	100	Program	
		Persentase izin yang dikeluarkan	7,3 (JP: 68,2%)	8,4 (JP: 68,4%)	10 (JP: 68,7%)	12,2 (JP: 69,0%)	15 (JP: 69,5%)								2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Izin Yang Dikeluarkan	N.a	N.a	100	100	100	100	100	Program	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses layak (%)	3,70% pengurangan	5,51% pengurangan	9,13% pengurangan	14,57% pengurangan	20% pengurangan								4.1.2	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur permukiman	Persentase Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Permukiman	N.A	69,06	70,38	71,43	73,23	Sasaran			
		Luas kawasan permukiman kumuh (ha)												40	50	60	Sasaran									
		persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah												1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	90,92	0	100	100	100	100	100	Program		
		persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitis yang layak												78,45	81,44	85,27	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	90,92	0	100	100	100	100	Program
		persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman												31,03	32,46	34,54	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	90,92	0	100	100	100	100	Program
		Luas kawasan permukiman kumuh (ha)												185	172	160	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Persampahan	0	18,18	36,36	54,55	72,73	Program	
		Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yg terbangun (unit)												1	-	-	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan TPS-PERSARANA 3R Tingkat Desa	N.A	N.A	27,27	63,64	100	Program	
														2.11.11	PROGRAM PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	24	26	27	28	30	Program				
														2.11.11	PROGRAM PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN	Persentase peningkatan layanan	30	35	40	45	50	Program				
														2.11.11	PROGRAM PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN	Fasilitasi pembangunan TPS-3R Tingkat Desa	6	6	16	36	56	Program				
		Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yg terbangun (unit)												4.1.2	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur permukiman	Persentase Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Permukiman	N.A	69,06	70,38	71,43	73,23	Sasaran				
														1.03.03	PROGRAM PENGELOLAHAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di	58,33	59,64	61,82	64	68,98	Program				
														1.03.03	PROGRAM PENGELOLAHAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di	58,33	59,64	61,82	64	68,98	Program				
		Volume tumpungan air per kapita (m³/kapita)	52,50189621	55,18146289	57,05999842	58,10498273	58,49863205							1.03.02	PROGRAM PENGELOLAHAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penenangalan banjir	81,42	82,5	84,5	87,5	92	Program				

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024										RPJMD Provinsi Jambi										RPJMD Kota Sungai Penuh										Keterangan
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Keterangan		
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			
PP	INFRASTRUKTUR EKONOMI	Jumlah Daerah irigasi yang dimodernasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada		81,04	86,01	90,16	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Cakupan Pelayanan Irigasi Kondisi Baik	2.057,43	2.094,23	2.164,04	2.233,85	2.303,66	Program									
		Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang berirrigasi	45229,16667	115942,7083	116142,7083	116342,7083	116342,7083		persentase luas baku daerah irigasi yg terairi		81,04	86,01	90,16	Sasaran	4.1.1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan Pelayanan transportasi perkotaan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik fungsional	58	60	62	64	66	Sasaran									
		Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko banjir	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana		138,14	137,64	137,14	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian SPM Penanggulangan Bencana	N.A	100	100	100	100	Program									
		Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada		81,04	86,01	90,16	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penendalian banjir	81,42	82,5	84,5	87,5	92	Program									
		Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas (V/C Ratio)		0,55	0,55	0,55	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kualitas Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	72,09	75,5	84,41	85,5	87,74	Program									
		Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)						PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Perkeretaapian		60%	70%	80%	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	B	B	B	B	B	Program									
PP	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Kinerja tepat waktu (on time performance) nenerbaikan												1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemampuan Jalan Kota	70,69	72	74	76	78	Program									
		Panjang jaringan KA yang beroperasi												1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang dibangun	4	2,96	4,4	5,92	7,4	Program									
		Jumlah layanan angkutan umum masa perkotaan yang dibangun dan dikembangkan												2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	72,09	75,5	84,41	85,5	87,74	Program									
		Rasio elektifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN RIKAN	Persentase peningkatan rumah tangga		99,94%	99,95%	100%																		
PP	ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408		Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan		28,00%	29,00%	31%																		
		Penurunan	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07																								
		Percentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Percentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan		70%	75%	80%	Sasaran	2.14. Meningkatnya pemanfaatan dan Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,5	1,5	1,65	1,75	1,85	Sasaran									
		Percentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3							2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1	1	1,2	1,4	1,6	Program									
PP	TRANSFORMASI DIGITAL	Percentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G) Existing Q3 2019	97,5	98	98,5	99	100							2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1	1	1,2	1,4	1,6	Program									
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7																								

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi Jambi						RPJMD Kota Sungai Penuh						Keterangan				
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target								
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023			2020	2021	2022	2023	2024				
PN	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN																						
PP	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	61,19	61,29	61,39	Sasaran	6.1.1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara	91,8	61,09	61,19	61,29	61,39	Sasaran		
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50			2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTI Terpelihara	90	90	90	90	90	Program					
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50			6.1.1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara	84,42	84,52	84,62	Sasaran	6.1.1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	82,5	89,38	89,49	89,59	89,7	Sasaran
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50			2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTI Terpelihara	90	90	90	90	90	Program					
		Indeks Kualitas Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50			2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH	50	55	60	65	70	Program					
		Indeks Resiko Bencana	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	77,19	77,84	78,49											
		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			73,89	74,39	74,39	Sasaran	6.1.1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai, udara dan tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	88,83	89,16	89,48	89,81	90,14	Sasaran		
		Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana komada	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0			2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kenaikan luasan RTB	0	0	30	40	50	Program					
		Indeks Resiko Bencana	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10			1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian SPM Penanggulangan Bencana	N.A	100	100	100	100	Program					
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian SPM Penanggulangan Bencana	N.A	100	100	100	100	Program					
PP	PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	138,14	137,64	137,14	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian SPM Penanggulangan Bencana	N.A	100	100	100	100	Program		
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian SPM Penanggulangan Bencana	N.A	100	100	100	100	Program					
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian SPM Penanggulangan Bencana	N.A	100	100	100	100	Program					
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKK Outcome)	100	100	100	100	100	Program					
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH	50	55	60	65	70	Program					
PP	PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	70%	76%	77%	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH	50	55	60	65	70	Program		
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			0%	0%	20%	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kenaikan luasan RTB	0	0	30	40	50	Program		
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			0%	0%	20%	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kenaikan luasan RTB	0	0	30	40	50	Program		
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang tertangani sesuai dengan petunjuk teknis	15	15	18	21	24	Program					
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH	50	55	60	65	70	Program					
PP	PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	26%	27%	28%	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang tertangani sesuai dengan petunjuk teknis	15	15	18	21	24	Program		
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			26%	27%	28%	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH	50	55	60	65	70	Program		
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			26%	27%	28%	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTB Terpelihara	90	90	90	90	90	Program		
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTB Terpelihara	90	90	90	90	90	Program					
		Indeks Resiko Bencana	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15			2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang tertangani sesuai dengan petunjuk teknis	15	15	18	21	24	Program					

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi Jambi						RPJMD Kota Sungai Penuh						Keterangan				
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Target		Indikator Kinerja Program	Bidang Urusan Pemerintahan	Target		Target		Indikator Kinerja Program	Bidang Urusan Pemerintahan	Target		Target						
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021	2022	2023	2024			
PN	MENPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK																						
PP	KONSOLIDASI DEMOKRASI						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			77%	79%	81%	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang memahami pendidikan politik		92,35	75	75	80	80	Program
PP	OPTIMALISASI KEGIATAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67																
PP	PENEGRAKAN HUKUM NASIONAL	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73							Sasaran	7.1.2. Terciptanya Kota Sungai Penuh yang terdiri dan taat aturan	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan keteribatan umum	100	100	100	100	100	Sasaran	
													Sasaran	7.1.2. Terciptanya Kota Sungai Penuh yang terdiri dan taat aturan	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	80	100	100	100	100	Sasaran		
													1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Persentase Pelajaran Ketenteraman dan Keteribatan Umum Sesuai Dengan SPDM	N.A	100	100	100	100	Program		
													1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	N.A	100	100	100	100	Program		
													1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	80	100	100	100	100	Program		
													Tujuan	2.1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C	CC	CC	Tujuan		
PP	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Percentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	BB	BB	Sasaran	2.1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	B	BB	BB	Sasaran	
													XXX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD se Kota Sungai Penuh	100	100	100	100	100	Program		
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai DKPT		72%	74%	76%	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Target Pengawasan	100	100	100	100	100	Program	
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Percentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "C"		38%	43%	48%	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asisten	100	100	100	100	100	Program	
								PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN		250 Indeks	275 Indeks	300 Indeks	Sasaran	2.1.6. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Indeks Sistem Merit	N.A	0,51	0,53	0,56	0,61	Sasaran	
									Indeks Profesionalitas ASN		70 Indeks	75 Indeks	80 Indeks	Sasaran	2.1.6. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	tingat Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sasaran		
													5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN	N.a	100	100	100	100	Program		
													5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan	N.a	90	93	94	95	Program		
													5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterpenuhan formasi ASN	N.a	80	82	83	84	Program		
													5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N.a	81	83	84	85	Program		
													5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N.a	8	15	30	45	Program		
													5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N.a	100	100	100	100	Program		

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi Jambi						RPJMD Kota Sungai Penuh						Keterangan					
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			
PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Percentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase kelulusan peserta setifikat/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi Percentase penyelenggaraan pengembangan SDM araturar	72%	75%	78%	93%	95%	97%	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan	N.A	85	87	89	91	Program
		Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20								5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	N.A	20	20,1	20,2	20,3	Program	
		Global Terorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24								5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	N.A	4	5	5,25	5,5	Program	
		Proporsi orang yang merasa aman berialan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%								5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	N.A	40	45	50	55	Program	
		Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4								4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase produk hukum yang disusun	100	100	100	100	100	Program	
		Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan petugas satuanmas (orang)	17.150	18.200	19.600	Sasaran	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Angka konflik sosial	N.A	0	0	0	0	Sasaran	
		Global Terorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24								7.1.1.	Terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat yang berasasi	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteran dan ketertiban umum	33,33	100	100	100	100	Program	
		Proporsi orang yang merasa aman berialan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%								7.1.2.	Terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteran dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	Sasaran	
		Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4			100%	100%	100%	Sasaran	7.1.2.	Terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	80	100	100	100	100	Sasaran		
		Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20								1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketenteran dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	N.A	100	100	100	100	Program	
		Global Terorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24								1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	N.A	100	100	100	100	Program	
		Proporsi orang yang merasa aman berialan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%								1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80	100	100	100	100	Program	